

SEJARAH ETNIS SIMALUNGUN

Sejak Kerajaan Nagur
Sampai Terintegrasinyake Pangkuan Provinsi
Sumatera Utara 1950



Tim Penulis:

Dr. Budi Agustono

Dr. Suprayitno, M. Hum

Dra. Herestina Dewi, MPd

Pdt. Juandaha Raya P. Dasuha, MTh

Dr. Hisarma Saragih, M. Hum

Dr. Kaiman Turnip

Drs. Setia Dermawan Purba, Msi



KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN DAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) MEDAN
PAMATANGRAYA 2012



SEJARAH ETNIS SIMALUNGUN

Sejak Kerajaan Nagur Sampai Terintegrasinya ke
Pangkuan Provinsi Sumatera Utara 1950

Tim Penulis

Dr. Budi Agustono

Dr. Suprayitno, M. Hum

Dra. Herestina Dewi, MPd

Pdt. Juandaha Raya P. Dasuha, MTh

Dr. Hisarma Saragih, M. Hum

Dr. Kaiman Turnip

Drs. Setia Dermawan Purba, Msi

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara
Medan 2012

Dicetak :

CV Hutarih Jaya

(Isi di luar tanggungjawab pencetak)

Editor: Pdt. Juandaha Raya P. Dasuha, MTh

Cetakan 1: 2012

Cetakan 2: 2020

Pematangsiantar



BUPATI SIMALUNGUN

Kata Sambutan



Saya merasa senang dan gembira atas terbitnya buku Sejarah Etnik Simalungun yang diterbitkan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Inilah pertama kali buku yang secara komprehensif etnik Simalungun di Sumatera Utara.

Setelah membaca buku Sejarah Etnis Simalungun akan terlihat perjalanan sejarah dan kontribusi etnik Simalungun dalam pusaran sejarah di aras lokal dan nasional. Sejarah adalah ingatan kolektif etnik Simalungun yang dituturkan secara diakronik inilah yang menjadi kekuatan buku Sejarah Etnik Simalungun ini.

Buku ini kaya akan sumber sejarah arsip dan dokumen, karena itu bobot akademis buku ini tidak diragukan lagi. Namun, di atas semua ini, saya ingin substansi buku diubah dan jumlah halamannya disederhanakan lagi agar dapat

menjadi bahan bacaan sejarah di sekolah. Dengan kehadiran buku ini siswa sekolah akan mengerti sejarah etniknya sendiri sehingga dapat memperkuat identitasnya sebagai orang Simalungun.

Mudah-mudahan buku Sejarah etnik Simalungun ini dapat menjadi rujukan tentang orang-orang Simalungun. Selamat atas terbitnya buku ini.

Pamatang Raya, Desember 2012
Bupati Simalungun

Dr. J. R. Saragih, SH, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan Penelitian	
C. Metode Penelitian	
D. Sumber Data	
E. Sistematika Penulisan	
BAB II SIMALUNGUN MASA PRA KOLONIAL	
A. Asal usul dan Latar Belakang Historis	
B. Asal Suku Simalungun dalam Tradisi Lkal ...	
C. Perkembangan Kerajaan	
1. Nagur	
2. Raja Marompat (1400-1907)	
3. Raja Marpitu (1907-1946)	
D. Asal usul Kerajaan Simalungun	
1. Siantar	
2. Tanah Jawa	
3. Silou	
a. Dolog Silou	
4. Panei	
5. Raya	
a. Padang Tebingtinggi	
6. Purba	
7. Silimakuta	
E. Masyarakat Adat Simalungun di Kesultanan Melayu Sumatera Timur	
BAB III GAMBARAN UMUM ETNIK SIMALUNGUN	
A. Gambaran Umum Wilayah Dan Masyarakat	

Simalungun	
1. Gambaran Geografis dan Kependudukan ...	
B. Struktur Sosial	
1. Tolu Sahundulan Lima Saodoran	
2. Tondong dan Posisi uang Bolon di Simalungun	
3. Panggilan Kekerabatan (Partuturan)	
C. Sistem Pemerintahan Tradisional	
D. Stratifikasi Sosial	
1. Golongan bangsawan (Partuanon)	
2. Golongan Rakyat Merdeka (Paruma)	
3. Golongan Hamba (Jabolon)	
E. Karakteristik Masyarakat Simalungun	
F. Pengaruh Hindu Buddha Di Simalungun	
G. Hak-Hak Atas Tanah	
H. Bahasa Dan Aksara	
BAB IV MASA KOLONIAL BELANDA (1865-1942)..	
A. Kerajaan Lokal Dalam Kekuasaan Kolonial	
B. Perkebunan	
C. Mengalirnya Pendatang	
BAB V AGAMA-AGAMA DI SIMALUNGUN	
A. Agama Lokal Simalungun	
B. Agama Islam	
C. Agama Kristen Protestan	
1. Tanggapan Masyarakat Simalungun Atas	
2. Tanggapan Masyarakat Simalungun Bawah..	
3. Hambatan Orang Simalungun memeluk agama Kristen.....	
4. Konversi Orang Simalungun ke Agama Kristen	
a. Mendirikan Comite Na Ra Marpodah Simalungun	

b. Mendirikan Kongsi Laita	
c. HKBP-S menjadi GKPS	
d. Hoeria Christen Batak (HChB) cikal bakal HKI)	
D. Roma Katolik	
1. Masuk dan pertumbuhan Gereja Katolik di Simalungun	
BAB VI REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945-1950)....	
A. Pendudukan Jepang (1942-1945)	
B. Berdirinya Pemerintahan Republik Di Simalungun.....	
C. Turbulensi Politik dan Kekerasan	
1. Kerajaan Panei	
2. Kerajaan Tanoh Jawa	
3. Kerajaan Siantar	
4. Kerajaan Purba	
5. Kerajaan Silimakuta	
6. Kerajaan Dolog Silou	
7. Kerajaan Raya	
BAB VII MASA DEKOLONISASI (1945-1950)	
A. Siantar Sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera	
B. Simalungun Dalam Rengkuhan Negara Sumatera Timur (1947-1950)	
C. Akhir Revolusi: Simalungun Menjadi Bagian Provinsi Sumatera Utara	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Simalungun adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Penduduk asli Kabupaten Simalungun adalah etnik Simalungun. Meski sebagian besar menetap di Kabupaten Simalungun tetapi kelompok etnik ini juga menyebar ke berbagai wilayah di luar Provinsi Sumatera Utara. Sama seperti kelompok etnik lainnya, orang Simalungun mempunyai sejarahnya, yang menceritakan baik tentang asal-usulnya, batasan geografisnya, bahasa maupun budayanya sendiri. Nama "Simalungun" menurut sumber lisan turun temurun berasal dari bahasa Simalungun: "*sima-sima*" dan "*lungun*"; "*sima-sima*" artinya, 'peninggalan' dan '*lungun*' artinya "yang dirindukan". Namun berdasarkan arsip kolonial Belanda, nama Simalungun itu sendiri baru dipergunakan secara resmi pada awal abad ke-20 (1906) sebagai nama sebuah wilayah administratif pemerintahan.

Tidak banyak informasi yang diketahui tentang masa prakolonial Simalungun. Sejarah prakolonial Simalungun lebih banyak dijelaskan melalui cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menyulitkan untuk melacak kembali apa yang terjadi di masa prakolonial itu. Kelangkaan sumber tertulis ini membuat sejarah Simalungun ini belum banyak tersingkap. Pada masa prakolonial di Simalungun berdiri Kerajaan Nagur dan Batangio, kerajaan Raja Maroppat dan kerajaan Raja Marpitu. Kerajaan Nagur kemudian terpecah menjadi empat

kerajaan (Raja Maroppat) yakni: Tanoh Jawa, Siantar, Panei dan Dolog Silou. Orang Simalungun sangat percaya bahwa empat kerajaan ini muncul berdasarkan pembagian besar marga yang membentuk masyarakat Simalungun yakni: Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba yang sering disingkat SiSaDaPur.

Kerajaan Nagur dianggap sebuah kerajaan besar yang kekuasaannya jauh melampaui batasan geografis Kabupaten Simalungun sekarang ini. Orang Simalungun sendiri meyakini Nagur adalah kerajaan besar yang memiliki wilayah kekuasaan luas dengan pusat kekuasaannya berada di dekat Pardagangan Tomuan sekarang ini. Pada abad XIII sampai abad XV kerajaan ini menjadi vassal dari Kerajaan Singosari dan kemudian Majapahit. Pada abad XVI – XVII empat kerajaan di Simalungun ini mengaku tunduk kepada Kesultanan Aceh. Sultan Aceh mengakui kekuasaan mereka dengan memberikan “bawar” (sejenis pedang) dan bahkan nama untuk kerajaan-kerajaan itu, seperti tetangganya di Karo. Berdasarkan logika narasi historiografi ini, seharusnya Islamisasi di Simalungun berasal dari Aceh, tetapi sumber-sumber tertulis menyatakan lain. Islamisasi justru masuk dari tetangga dekatnya orang Melayu yang terlebih dahulu memeluk dan membentuk kesultanan Melayu Islam di pesisir Timur Sumatera. Siantar dan Tanoh Jawa menjadi bagian penting dari wujudnya kehadiran agama Islam di kalangan orang Simalungun.

Di masa kolonial Belanda, kerajaan Raja Marompat dipecah menjadi tujuh kerajaan (Raja Marpitu) yakni: Tanoh Jawa, Siantar, Panei, Dolog Silou, Raya dan Silimakuta. Pada masa inilah sumber tertulis tentang kerajaan Raja Marpitu ini

satu demi satu mulai bermunculan seturut dengan hadirnya kekuasaan pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Kedatangan kekuasaan Belanda membawa perubahan struktural di Simalungun. Kerajaan tradisional masuk dalam orbit kekuasaan kolonial. Perkebunan kelapa sawit, teh dan karet yang tersebar di daerah Simalungun Bawah memproduksi komersialisasi ekonomi. Sejalan dengan berdirinya perkebunan ini para migran mulai mengalir ke wilayah ini. Juga masuknya Kristen yang perkembangannya melampaui penyebaran Islam merupakan bagian dari perubahan struktural ini. Di tengah perubahan struktural ini muncul perlawanan dari elite Simalungun seperti: Tuan Rondahaim dari Raya dan Sang Nauluh Damanik dari Siantar terhadap kekuasaan kolonial yang mendisrupsi wibawa tradisional. Namun perlawanan mereka tidak mampu mengusir kehadiran kolonialisme Belanda di Simalungun.

Kekuasaan kolonial di Simalungun baru dapat digantikan oleh Jepang pada tahun 1942. Sirkuit kekuasaan mengalami perubahan dan kekuasaan mulai terbuka terhadap publik. Di masa ini orang Simalugun mengalami mobilitas sosial. Para pemuda dari strata bawah memasuki badan-badan resmi bentukan Jepang baik sipil maupun militer yang kemudian memainkan peranan penting dalam membentuk formasi politik dan sosial di Simalungun. Namun keberadaan kerajaan tradisional secara politik mengalami marginalisasi. Meskipun pemerintah militer Jepang masih mengakui eksistensi mereka, tetapi wibawa raja-raja direduksi hanya untuk memobilisasi rakyat dalam merekrut tenaga kerja dan mengumpulkan bahan makanan untuk keperluan militer Jepang. Sejalan dengan itu, sebagai

penduduk asli, orang Simalungun mengalami penciptaan "privilese" ekonomi sebagai akibat makin membesarnya pendatang yang mengalir ke wilayah ini sejalan dengan bergemuruhnya suasana revolusioner yang melanda wilayah Simalungun.

Ketika kekuasaan Jepang berganti dengan republik tahun 1945 orang Simalungun mempunyai akses memasuki jagad politik dengan menjadi aktor politik lokal. Dalam periode ini muncullah laskar, partai politik dengan beragam ideologi, terserapnya elite Simalungun dalam birokrasi pemerintahan menjadi wilayah baru yang diisi orang Simalungun pasca kemerdekaan. Pada masa ini Simalungun memainkan peranan penting tidak saja dalam sejarah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara, tetapi untuk seluruh Sumatera. Siantar ditetapkan menjadi ibukota pemerintahan Provinsi Sumatera ketika Medan sudah tidak kondusif lagi akibat hadirnya tentara Belanda dan Sekutu. Dari Simalungun diatur strategi dan pembagian logistik perang untuk prajuritnya yang berlagai di Front Medan Area mempertahankan eksistensi Republik. Dari sini pula berbagai kebijakan penting baik militer dan administratif menyangkut kelangsungan pemerintahan Provinsi Sumatera digodok dan diputuskan. Namun bersamaan dengan itu, turbulensi politik 1946 menghampiri wilayah ini, sehingga banyak kaum bangsawan menjadi korban keganasan turbulensi politik.

Dampak turbulensi politik yang paling tragis adalah orang Simalungun kehilangan tokoh-tokoh pentingnya (top leaders) yang sangat mempengaruhi perkembangan politik dan kemajuan peradaban di Simalungun. Formasi etnik dan

politik berubah cepat secepat gerakan revolusioner yang melanda hampir seluruh kawasan Simalungun. Agresi militer Belanda menjadi satu moment yang penting menyelamatkan sisa-sisa elite politik penting orang Simalungun yang tersisa untuk menerima gagasan pembentukan negara federal yang ditawarkan H. J. Van Mook. Mereka kemudian turut memainkan perang penting dalam menuntun status otonomi daerah Simalungun/Sumatera Timur dalam struktur negara Indonesia Serikat sebagaimana disepakati dalam perjanjian Linggarjati. Melalui perjalanan panjang, akhirnya Simalungun masuk dalam rengkuhan Negara Sumatera Timur (NST) pada tahun 1948.

Pada masa ini, kaum intelektualnya menduduki posisi penting dalam struktur negara itu. Raja Kaliamsyah Sinaga adalah Wakil Wali Negara. Djomat Purba yang aktif menggerakkan demonstrasi menuntut pembentukan Komisi DIST (Daerah Istimewa Sumatera Timur) kemudian menjadi Komandan Barisan Pengawal NST, Bisara Sinaga dan Philemon Sinaga diangkat sebagai Komandan Batalion Pengawal Anggota Parlemen RIS mewakili NST. NST kemudian dibubarkan sejalan dengan tuntutan sebagian besar masyarakat Sumatera Timur setelah ditandatanganinya Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Wilayah Simalungun menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Sampai sejauh ini, penulisan sejarah kelompok etnik Simalungun mulai dari Nagur sampai pasca kemerdekaan masih bersifat sporadis. Sejarah sebuah kelompok etnik ini masih berserakan. Penulisan sejarah orang Simalungun seperti dijelaskan di atas tidak lain untuk menggambarkan gerak sejarah orang Simalungun dari masa pra kolonial

sampai menyatunya kelompok etnik ini ke dalam pangkuan provinsi Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

1. Menyingkap sejarah orang Simalungun mulai dari berdirinya Nagur sampai terintegrasinya kelompok etnik ini ke pangkuan provinsi Sumatera Utara.
2. Merekonstruksi peran orang Simalungun dalam pusaran sejarah di Sumatera Utara.
3. Memperkaya khasanah historiografi di Simalungun

C. Metode Penulisan

Proses penulisan ini mengikuti petunjuk-petunjuk seperti dalam metode sejarah (Garraghan, 1957:33-37). Metode yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah gabungan antara metode dokumenter dengan wawancara. Dengan metode dokumenter dikumpulkan sumber sejarah, baik primer maupun sekunder misalnya laporan pemerintah Belanda, surat-surat resmi dan telegram dari pejabat pemerintahan saat itu, seperti kontrolir, surat kabar, majalah, dan buku-buku. Semua sumber / data tertulis ini dilacak di berbagai perpustakaan di Medan, Siantar dan ke Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta. Untuk melengkapi data ini, dilakukan wawancara terhadap keturunan ketujuh kerajaan Raja Marpitu dan pemuka masyarakat yang memahami perkembangan sejarah kelompok etniknya dari masa ke masa. Setelah pengumpulan data, penulisan sejarah dilakukan secara deskriptif analitis

dengan menerapkan prinsip hubungan sebab akibat dan kronologis.

D. Sumber Data

Meskipun ada sejumlah data lisan yang diperoleh melalui wawancara dan *folklore*, tetapi rujukan utama penulisan buku ini adalah dokumen tertulis, khususnya arsip-arsip kolonial yang ditemukan di Museum Simalungun, Perpustakaan Nasional, koleksi pribadi dan Arsip Nasional Jakarta. Jenis arsip-arsip itu terdapat dalam koleksi *Binnelandsch Bestuur (BB)* yang di dalamnya terdapat surat-surat keputusan (*besluit*). Arsip-arsip ini berisi informasi yang penting tentang berbagai pertimbangan baik sosial, politik dan ekonomi para pejabat *Departement van Binnelandsch Bestuur* (Departemen Urusan Pemerintahan/Departemen Dalam Negeri) atas saran Direktur BB kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari sinilah dapat direkonstruksi tentang reorganisasi pemerintahan di Simalungun. Dalam koleksi ini terdapat juga *Memorie van Overgave (MvO)*. *MvO* merupakan laporan serah terima dari seorang pejabat kolonial di daerah kepada para penggantinya. Laporan itu sangat penting karena dibuat oleh pejabat yang bertugas di daerah Simalungun mengenai semua peristiwa yang terjadi baik politik, ekonomi, agama, penduduk, pendidikan dan kesehatan.

Tentu saja koleksi arsip kolonial yang tersimpan dalam koleksi *Algemeen Secretarie* (arsip sekretariat negara Hindia Belanda) menjadi bagian penting dalam membangun narasi sejarah etnik Simalungun. Sebab dalam koleksi ini terdapat informasi yang sangat berharga tentang dasar

pertimbangan seorang Gubernur Jenderal membuat sebuah keputusan menyangkut seluruh daerah kekuasaan Belanda, termasuk Simalungun. Dalam koleksi arsip itu termasuk surat edaran (*circulaire*) dan kumpulan korespondensi antar pejabat kolonial yang biasanya ada dalam agenda (lampiran surat keputusan).

Jenis arsip lainnya adalah arsip yang sudah diterbitkan (*leksikografi*) yang berisi peraturan-peraturan dan notulen rapat seperti *Koloniaal Verslaag* (Laporan Kolonial) dari Menteri Kolonial dalam sidang Majelis Rendah Belanda. Di samping itu, buku ini juga ditulis berdasarkan data yang terdapat dalam artikel-artikel yang diterbitkan di *Tijdschrift van Bataviaasche Genootschap voor Indisch Taal-, Land en Volkokunde* misalnya dari P. A. L. E. van Dijk kontrolir Toba mengenai Simalungun (Daerah Tanjung Kasau, Tanah Jawa dan Siantar) tahun 1894; J. A. Kroesen 1897 mengenai laporan perjalanannya di Simalungun; C. J. Westenberg 1891 tentang Tanah-tanah Batak Merdeka; dan Moolenburgh tentang Panei, Tanah Jawa, Siantar dan Raya. Artikel-artikel ini berisi laporan tentang letak perkampungan, asal-usul penduduk, adat kebiasaan, pakaian, rumah, perabotan, senjata, budak, perdagangan, peternakan, tentang asal-usul kerajaan di Simalungun dan sistem pemerintahannya, serta batas-batas wilayah Simalungun, agama dan etnografi Simalungun.

Semua informasi tertulis dan lisan dari beragam sumber itulah kemudian dikritik untuk mendapatkan data yang kredibel sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah Etnik Simalungun secara holistik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

E. Sistematika Penulisan

Buku ini memaparkan sejarah etnik Simalungun sejak hadirnya Kerajaan Nagur sampai masuknya daerah Simalungun menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara. Untuk memudahkan pembahasan buku ini diorganisasi ke dalam 7 bab yang masing-masing bab memaparkan dan menjelaskan satu topik pembahasan. Bab pendahuluan menjelaskan dasar-dasar pemikiran, tujuan, metode dan tahapan-tahapan riset serta proses penulisan buku ini. Simalungun masa pra-kolonial memaparkan tentang sejarah awal Simalungun dimulai dari Kerajaan Nagur, Raja Maroppat (Tanoh Jawa, Siantar, Panei dan Dolog Silou) hingga terpecah menjadi Raja Marpitu (ditambah Purba, Raya dan Silimakuta). Berdasarkan sumber-sumber tradisi lisan, dapat dipaparkan asal-usul kerajaan ini berikut dengan formasi pembentuk kesatuan marga-marga di Simalungun. Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai keberadaan masyarakat etnik Simalungun yang sudah membentuk pemerintahan di Kerajaan Padang Tebingtinggi.

Etnografi dan demografi Simalungun menjelaskan gambaran umum tentang masyarakat Simalungun, batasan wilayah Simalungun dan penduduk Simalungun. Kemudian dilanjutkan dengan bab Simalungun masa kolonial yang memaparkan keberlanjutan sejarah kerajaan-kerajaan di Simalungun, respon mereka terhadap kehadiran kekuasaan kolonial sampai digabungkannya ketujuh kerajaan ini menjadi sebuah wilayah administratif dengan etnik tetangganya bernama *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden*. Hadirnya perusahaan perkebunan dan mengalirnya para imigran ke Simalungun berikut perubahan struktural dan sosial yang

menyertainya menjadi fokus bahasan penting dalam bab ini.

Masuknya agama-agama ke Simalungun diawali dengan uraian singkat tentang agama lokal orang Simalungun dan proses Islamisasi, Kristenisasi berikuti respon masyarakat Simalungun terhadap kehadiran agama-agama ini, termasuk bagaimana strategi mengkristenkan orang Simalungun, hambatan yang dihadapi. Tentu saja ada gambaran tentang proses pembentukan berbagai organisasi keagamaan sebagai bagian dari usaha mengubah orientasi keagamaan dan pendidikan tradisional orang Simalungun. Masa revolusi kemerdekaan yang bergejolak dan menimbulkan perubahan drastis terhadap etnik Simalungun dipaparkan dalam bab Simalungun. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Bab ini memaparkan bagaimana rakyat Simalungun di bawah pendudukan Jepang, pembentukan pemerintahan Republik, turbulensi politik yang berujung pada penghancuran kerajaan Raja Marpitu dan pembantaian terhadap tokoh-tokoh penting elite Simalungun Maret 1946.

Akhirnya buku ini ditutup dengan sebuah bab berjudul: Masa Dekolonisasi yang memaparkan bagaimana etnik Simalungun akhirnya mendukung dan memainkan perang penting dalam proses pembentukan Negara Sumatera Timur untuk melindungi etnik dan kebudayaan Simalungun dari cengkeraman kaum migran sampai akhirnya Simalungun menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, menandai babak dekolonisasi di Simalungun. Bab ini juga memaparkan bagaimana etnik Simalungun juga aktif dalam satuan-satuan gerilya untuk menghancurkan militer Belanda pada masa Agresi Militer ke-2 (1948-1949). Sebuah proses panjang keterlibatan etnik Simalungun dalam episode yang

sangat krusial dalam sejarah pembentukan pemerintahan NKRI sesungguhnya yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah bangsa Indonesia.

BAB II

SIMALUNGUN MASA PRA KOLONIAL

A. Asal Usul dan Latar Belakang Historis

Penelitian terkini makin menegaskan bahwa asal usul penduduk pedalaman Sumatra Utara yang berdiam di sekitar pantai Danau Toba bermula dari pesisir timur Sumatra. Bukti-bukti bukit kerang yang ditemukan di sepanjang pantai pesisir Timur seperti di Langkat makin meyakinkan para peneliti bahwa nenek moyang orang Batak saat ini sebelum mencapai bibir pantai Danau Toba sebelumnya mereka tinggal di pantai Timur Sumatera. Timbunan kulit kerang makanan manusia awal penghuni Sumatera Timur itu disebut *kjokkenmodinger* (sampah dapur). bersama dengan bukit kerang itu biasanya ditemukan juga peralatan berburu mereka yang terdiri dari kapak genggam lonjong.¹ Pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan tuntas hingga saat ini adalah darimanakah asal muasal mereka? Pertanyaan tersebut sama misteriusnya pada saat mengemukakan darimanakah asal muasal manusia Batak² dewasa ini? Hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut yakni melalui diaspora yang masuk melalui pantai Barat ataupun Pantai Timur Sumatera. Jika arahnya berasal dari pantai Barat, katakanlah dari pelabuhan *Singkuang* dan Barus, maka kondisinya langsung berhadapan dengan Samudra Indonesia yang terkesan ganas dan berombak tinggi. Walaupun demikian, masa keemasan Barus sebagai bandar perdagangan di Pantai Barat Sumatra Utara tidak dapat diragukan lagi³. Pada saat itu, Barus dikenal

sebagai bandar perniagaan Kamfer dan Kemenyan yang sangat dikenal di seluruh dunia. Pada tahun 1873 di Lobu Tua Barus Tapanuli Tengah sebuah prasasti Tamil telah ditemukan. Prasasti bertarikh 1010 Saka itu melaporkan adanya pemukiman pedagang Tamil dari India Selatan yang disebut Kelompok Yang Kelima Ratus dari Seribu Arah.⁴ Berdasarkan penemuan prasasti ini para ahli memperkirakan adanya interaksi antara penduduk asli dengan orang Tamil India. Tideman malahan menyebutkan marga Sembiring dan sebagian marga rumpun Borbor di Toba dan Dairi berketurunan dari orang Tamil tersebut yang kemungkinan kawin dengan wanita setempat. Sampai di masa modern ini tradisi membakar mayat dan menghanyutkan abu jenazah masih dipraktikkan marga Sembiring keturunan Tamil tersebut.⁵

Jalur diaspora lainnya adalah melalui Selat Malaka yang airnya dikenal tenang dan merupakan jalur yang sangat ramai dikunjungi sebagai jalur pelayaran internasional. Selat ini dikenal dengan Jalur Pelayaran Maritim Sutra yang menghubungkan China, Asia, Arab dan Afrika. Oleh karena itu, gelombang-gelombang migrasi yang melewati perairan itupun dapat dipastikan melewati selat Malaka dan mencari pemukiman-pemukiman yang layak untuk dihuni.

Atas dasar itu, beberapa pemukiman tua pun ditemukan di sepanjang pantai Timur Sumatra seperti di Palembang, Jambi, Riau, Medan dan bahkan hingga Pasai dan Lambri (Banda Aceh). Sedangkan dari arah pantai barat, pemukiman-pemukiman tua yang dijumpai hanyalah beberapa seperti Barus dan Singkuang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa arus migrasi (diaspora) manusia

pada awalnya masuk ke pulau Sumatera adalah melalui Selat Malaka.

Dari selat Malaka kemudian mencari tempat-tempat pemukiman di tepi pantai yang dikenal dengan 'Kota'⁶ ataupun pelabuhan. Dari tepi pantai itu, kemudian melalui sungai-sungai besar mencari sumberdaya alam hingga ke pedalaman sehingga terjadi perpindahan masyarakat dari tepi pantai ke pedalaman yang pada akhirnya membentuk mata rantai dagang antara orang pesisir dan orang pegunungan atau pedalaman (*inland*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asal muasal pemukim di pegunungan tersebut adalah dari pantai yang kemudian pindah ke pegunungan untuk mencari pemukiman yang kondusif sekaligus mencari sumber daya alam yang layak untuk diperdagangkan ataupun untuk dikonsumsi.

Arkeolog berkebangsaan Inggris, McKinnon⁷ telah melakukan penelitian dan ekskavasi di Kota Cina Medan Marelán sejak tahun 1972-1978 mengemukakan bahwa, pentingnya selat Malaka sebagai jalur migrasi dan niaga di pesisir timur Sumatra. Pernyataan ini didukung oleh ditemukannya jejak perdagangan seperti koin cina, porselen, keramik, tembikar, arca (Budha, Siwa dan Lakhsmi) di situs Kota Cina. Tinggalan yang sama juga banyak ditemukan di situs Kota Rentang Hamparan Perak serta Benteng Putri Hijau Delitua. Selat Malaka menghubungkan kota-kota di pesisir timur Sumatra (bagian utara) yang terhubung ke wilayah Asia seperti Burma, Siam dan Tiongkok, Timur Tengah dan Eropa. Selat Malaka terhubung dengan *riverince* seperti Sei Wampu, sei Bilah, dan sei Deli ke Karo *hinterland*. Dengan asumsi itu, di Simalungun terdapat jalur riverine seperti

Bah Bolon ke pedalaman ke Danau Toba. Sei Asahan ke pedalaman ke Danau Toba dan *riverine* Barumun ke Padang Lawas terus ke Barus melalui Batangtoru.

Kesyahbandaran Malaka populer hingga ke Asia Timur Jauh dan Eropa yang jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sejak saat itu, Malaka menjadi populer dan menjadi kota penting di Asia dalam eksploitasi niaga khususnya kamper dan kemenyan disamping komoditas lainnya. Uraian pentingnya selat ini banyak ditulis oleh Marco Polo, Tomme Pires, Augustin Beuliau, Ibnu Battutah, bahkan de Houtman bersaudara yang pernah tinggal di Aceh⁸. Belakangan, Marsden dan Anderson banyak melaporkan pentingnya selat ini⁹.

Teori yang klasik diungkapkan oleh Sarasin bersaudara terkenal dengan *Teori Gelombang*. Disebutkan bahwa sebelum era kristiani terjadi gelombang migrasi yang masuk ke Nusantara dari Indocina (Vietnam). Yang pertama membawa budaya neolitik yang dikenal dengan Proto Melayu yang bermukim di pesisir pantai dan kedua membawa budaya perunggu yang dikenal dengan Deutro Melayu. Pada waktu kedatangan gelombang yang kedua ini telah memaksa golongan Proto Melayu¹¹ masuk ke pedalaman dan tinggal menetap disana. Beranjak dari pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa gelombang pertama memasuki dan berdiam di pesisir pantai (selat Malaka) dan setelah kedatangan gelombang yang kedua telah mendorong pemukim pertama di pesisir ke daerah pegunungan¹². Hal inilah yang mendorong Barlett (1952) mengemukakan bahwa wilayah Batak (Simalungun) pada awalnya meliputi hingga pesisir yang berbatasan dengan selat Malaka¹³.

Menurut arkeolog Geldern¹⁴ dalam kesimpulannya dikemukakan bahwa tradisi neolitik masuk dari India ke Sumatra melalui Austronesia (Malayo-Polynesians) antara tahun 2000-1500 BC yang ditandai dengan kebudayaan *technique of sawing stones, cultivation of rice and millet, cattle raising, outrigger boat, megaliths, ancestral figure, headhunting*. Sedangkan budaya perunggu (bronze) merupakan budaya Dongson yang masuk ke Sumatra sekitar 300 BC dari *North-East Indochina* (Tongking, Annam) dan South China. Salah satu bentuk tinggalan Dongson ini adalah atap rumah berbentuk pelana dan bertanduk. Selanjutnya, Munoz (2009) mengemukakan bahwa sekitar 2500 BC, gelombang migrasi datang dari China Selatan, melalui Taiwan dan kepulauan Filipina menuju ke Indo-Melayu. Para migran tersebut berasal dari Mongoloid Selatan yang umumnya dikenal sebagai orang Austronesia¹⁵.

Gelombang Austronesia ini melakukan migrasi ke selatan Taiwan melalui Filipina dan migrasinya bercabang dua. Cabang pertama meneruskan perjalanan ke selatan dan bermukim di Sulawesi dan Kalimantan. Dari Kalimantan menyeberangi Laut Cina Selatan untuk bermukim di Vietnam, sebagian lagi melanjutkan perjalanan sampai Bali, Jawa dan Sumatra dan Malaysia peninsula. Cabang kedua bermigrasi ke timur di Maluku dan terpecah dua, yang pertama terus ke timur ke Papua Nugini sampai Fiji, Tonga, Samoa dan Polinesia. Sementara kelompok kedua menuju barat di kepulauan Sunda Kecil¹⁶. Sementara itu, Simanjuntak (2002)¹⁷ mengemukakan bahwa secara umum diketahui bahwa orang Batak tergolong bangsa Melayu Tua (Proto Melayu) yang dinyatakan berasal dari Indo Cina atau Hindia Belakang¹⁸. Perpindahan besar-besaran itu terjadi 2000 tahun sebelum

Masehi¹⁹. Mereka ini bermukim didaerah pantai, mengitari sungai, membentuk koloni dagang ataupun bandar sungai (*riverince*) sebelum terdesak masuk kepegunungan yang lebih terisolir oleh migrasi Deutro Melayu.

Apabila membandingkan letak geografisnya, maka lebih mungkin apabila manusia pertama di Tanah Batak itu sesungguhnya bermukim di pesisir pantai dan bukan langsung ke Pusuk Buhit dan menyebar ke daerah lain. Oleh karena itu, jalur menuju *hinterland* Bukit Barisan dari selat Malaka adalah *Bah Bolon* (Sungai besar), Sungai Asahan, Sungai Barumum²⁰, Sei Padang, Sei Wampu, Sei Bilah maupun Sei Deli sedang dari pantai barat (laut Hindia) adalah Barus melalui Sungai Batang Toru. Demikian pula bahwa, bila ditinjau dari segi bahasa dan aksara, Uli Kozok mengemukakan bahwa bahasa dan aksara Simalungun lebih dekat dengan bahasa dan aksara Mandailing, dan kedua bahasa ini lebih tua usianya daripada bahasa Batak Toba, Karo dan Pakpak²¹. Sebelum Kozok, tahun 1939, ahli bahasa yakni Voorhoeve telah menulis aksara-aksara Batak, dimana aksara dan bahasa Simalungun dikategorikan sebagai rumpun bahasa tengah²².

Selanjutnya, adanya pengaruh Hindu pada masyarakat Batak seperti *Biaro* di Padang Lawas, (archa Laksmi dan Siwa maupun kontruksi biaro di Kota Cina)²³ menurut Tideman²⁴ dibawa langsung dari asalnya, India. Penjelasan itu juga dibuktikan oleh Tideman seperti banyaknya kata-kata serapan dari bahasa Sansekerta (India Selatan) pada bahasa dan aksara Batak, mite penciptaan dunia yang terpengaruh Wedda, nama dewa Batak yang diambil dari dewa Hindu Brahma. Begitu pula marga terutama di Karo yang berasal

dari Hindia Muka di India Selatan. Tideman juga yakin bahwa pengaruh itu dibawa langsung dari Munda²⁵, di Nagpur²⁶ di Selatan Sungai Gangga India Selatan. Pengaruh Hindu masuk ke Sumatra pada awal abad ke-7 bersamaan dengan bangkitnya kerajaan Sriwijaya di muara Sungai Musi Palembang²⁷. Kiranya, temuan-temuan keramik, tembikar, manik-manik ataupun arca yang terpengaruh Hindu dan Budha di pantai timur Sumatra Utara ini dapat menguatkan pendapat tersebut.

Berangkat dari uraian ini, dapat dipastikan bahwa jalur utama migrasi manusia-manusia awal memasuki pesisir timur Sumatra (bagian utara) adalah melalui selat Malaka. Posisi geografis Simalungun yang berada di pesisir timur Sumatra itu, lebih memungkinkan dihuni lebih awal sebelum menyebar ke daerah pegunungan Bukit Barisan. Namun demikian, hipotesis ini masih perlu mendapat pembuktian secara ilmiah, terutama menyangkut asal muasal orang Simalungun itu sendiri. Akan tetapi, melihat jalur-jalur migrasi yang paling memungkinkan, kiranya asumsi yang menyatakan bahwa asal muasal orang Simalungun pastilah berasal dari pendatang yang barangkali dari India Selatan dapat dibenarkan mengingat adanya persamaan budaya yang dianut oleh orang Simalungun maupun oleh beberapa kelompok masyarakat yang terdapat di Sumatera Utara. Penting ditegaskan disini bahwa, wilayah yang dinamakan dengan Kabupaten Simalungun sekarang, bukan merupakan total luas wilayah Simalungun pada awalnya.

B. Asal Suku Simalungun Dalam Tradisi Lokal

Hampir semua bangsa di dunia ini memiliki mitos

ataupun folklore tentang asal usul mereka; orang Yunani menghubungkan nenek moyangnya dengan Dewa Zeus, orang Jepang dengan Dewi Amaterasu dan orang Batak Toba dengan mitos Siraja Batak yang menurut mitos diturunkan para dewata di Pusuk Buhit. Orang Minangkabau percaya bahwa mereka diturunkan di Bukit Saguntang dari Sang Sapurba yang konon adalah turunan dari Iskandar Zulkarnain. Orang Simalungun sendiri percaya mereka datang dari seberang, atau tepatnya dari suatu tempat nun jauh dari daratan pulau Sumatera yang dalam cerita rakyat disebutkan datang dari Banua Holing (tanah India).

Mitologi asal-usul penciptaan manusia tertulis dalam kitab kuno guru Simalungun yang disebut "*Pustaka Ahar Mulajadi*". Kitab kuno orang Simalungun ini menceritakan asal-usul manusia diciptakan oleh ilah bernama Tuan Sahinei-hinei dari segumpal tanah dan memberinya hosah hagoluan (nafas kehidupan). Di diturunkan ke bumi melalui kurirnya bernama Adil Moradil ke dunia tengah (bumi). Manusia pertama itu bernama *Tuan Parlobei* (manusia pertama) ditempatkan pertama kali di suatu negeri di tanah India bernama Nagore atau Nagur. Tuan Parlobei kawin dengan seorang gadis yang asalnya dari pohon aren (*bagod*) bernama *Panakboru Bolon* (perempuan utama). Anak-anak mereka bernama Sang Majadi, Satara Manggun dan Sang Mainim. Mereka dengan naik perahu dari hayu losi berlayar mencari negeri baru hingga tiba di tempat yang sepi di tepi pantai Timur Sumatera. Para kawula yang menyertai mereka tempat itu disebut Si Baloengoen. Di sini mereka menetap dan mendirikan kerajaan bernama Nagur. Inilah kerajaan Simalungun pertama. Para kawulanya yang

lain yang menyertai mereka muncul ambisi untuk saling menguasai, akhirnya pecah perang di antara mereka. Untuk mendamaikan maka masing-masing dibagi menjadi empat kelompok besar, dipimpin salah seorang panglima yang takluk kepada Nagur sebagai maharaja. Kelompok besar ini disebut Nagur dari kelompok marga Damanik, Parnabolon dan Banua Sobou dari kelompok marga Saragih, Banua Purba dari kelompok marga Purba dan Saniang Naga dari kelompok marga Sinaga. Keempat kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan Silou, Batangiou, dan Onggou Sipoldas. Purba dipimpin raja marga Purba, Batangiou kerajaan marga Sinaga, Onggou Sipoldas kerajaan marga Saragih dan Nagur dipimpin raja marga Damanik²⁸.

Nagur berangsur-angsur makin surut kuasanya dan seiring dengan itu berganti nama Timur Raya (Batak Timur) dan akhirnya Simalungun. Adapun asal-usul penamaan "Simalungun" menurut sumber lisan turun-temurun berasal dari bahasa Simalungun: "*sima-sima*" dan "*lungun*"; "*sima-sima*" artinya, 'peninggalan' dan "*lungun*" artinya "yang dirindukan' atau 'sepi'. Folklore orang Simalungun menceritakan bahwa, zaman dahulu pada masa Kerajaan Nagur, daerah ini pernah dilanda penyakit sampar (kolera) yang parah. Penyakit itu sendiri menurut orang Simalungun dahulu berawal dari kutukan Naibata (dewa orang Simalungun) sehingga banyak orang meninggal. Akibatnya orang Simalungun harus mengungsi keluar dari Nagur menyeberang ke seberang danau yang sekarang dikenal sebagai "Danau Toba" yang dalam bahasa Simalungun disebut dulunya Laut Tawar atau Bah Sibongbong. Menurut

kepercayaan lama, air danau itu berkhasiat selain penangkal "hantu sampar" (sebutan masyarakat untuk wabah itu) juga berfungsi sebagai penawar atau "tawar" dalam bahasa Simalungun. Orang Simalungun, sampai-sampai sumpah serapah pun dikaitkan dengan kekejaman wabah itu, "matei ma ho ibuat sampar hantu Badagei"! (matilah engkau dimakan hantu Bedagai). Mungkin mengingatkan orang Simalungun tempo dulu bagaimana kejamnya akibat wabah sampar di kampung Bedagai dahulu kala. Demikianlah, orang dari Kerajaan Nagur itu menyeberangi danau sampai ke seberang yang sekarang dikenal dengan Samosir²⁹. Nama itu disebut demikian karena orang Nagur "sahali misir" (sekali berangkat ke seberang). Setelah beberapa tahun, pengungsi ini merasakan daerah Nagur sudah aman dari wabah penyakit mematikan itu. Mereka kembali ke seberang ke daerah asalnya di Nagur dan melihat daerah itu sudah sepi, mereka merindukan daerah itu (malungun) dan sadar bahwa apa yang tertinggal hanya "sima-sima" (peninggalan) saja. Demikianlah nama daerah itu kemudian dikenal orang dengan nama "Simalungun" perpaduan kata "Sima-sima" dan "Lungun".³⁰

Dari penjelasan mitos di atas, kita dapat memahami penolakan asal-usul orang Simalungun terhadap klaim orang Batak Toba yang bersikukuh bahwa seluruh orang Batak adalah keturunan suku mereka yang datang dari Samosir (Pusuk Buhit) seperti diceritakan dalam *tarombo* (silsilah) orang Batak Toba³¹. Orang Simalungun sendiri meyakini bahwa nenek moyangnya datang dari "dipar" (seberang) lautan yaitu dari Tanah India (*Banua Holing*). Kedatangan nenek moyang orang Simalungun ini diceritakan datang dalam

dua gelombang. Gelombang pertama disebut Simalungun Naparlobei (Proto Simalungun). Mereka sampai ke Sumatera Timur (Simalungun sekarang) setelah melewati daerah Assam di India Timur, menyusuri Birma (Myanmar sekarang), terus ke Siam dan Malaka selanjutnya menyeberang ke Sumatera Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Batubara sekarang. Orang Simalungun tua ini bertempat di sekitar pesisir Timur (Serdang Bedagai dan Batubara sekarang), mereka mendirikan kerajaan yang pertama bernama Kerajaan Nagur (seperti nama daerah asalnya di India Kerajaan "Nagpur" atau "Nagore". Kerajaan Nagur ini menurut Martua Raja Siregar guru sejarah *Normaal School* di Pematangsiantar seperti diterbitkan puteranya Mangaraja Onggang Parlindungan dalam bukunya yang kontroversial *TuanKu Rao* sudah dicatat di Cina pada zaman Dinasti Sui sekitar abad VII (tahun 600 Masehi)³². Rajanya yang pertama bernama Datuk Parmanik-manik yang selanjutnya berubah menjadi Damanik ("Da" artinya "Sang" dan "Manik" artinya "berwibawa"). Inilah marga penguasa pertama di Simalungun. Kelak keturunannya mendirikan Kerajaan Siantar sekitar abad XIV yang menjadi Kota Pematangsiantar sekarang ini.

Akan tetapi, muncul prahara di Kerajaan Nagur, kerajaan orang Simalugun yang pertama itu. masing-masing panglima perang Kerajaan Nagur saling berebut pengaruh sehingga pecah perang saudara. Sadar akan bahaya yang mengancam, panglima-panglima Kerajaan Nagur berdamai, masing-masing kemudian bersatu menghadapi musuh yang datang, yaitu pasukan dari tanah India. Setelah perdamaian itu, maka dibentuklah empat kelompok marga di Simalungun, yaitu menurut nama panglima Nagur, yaitu:

Raja Banua Purba (Purba artinya "timur") menjadi Raja Silou (kemudian menjadi Kerajaan Dolog Silou, Panei dan Silimahuta) bermarga Purba. Raja Banua Sobou Parnabolon menjadi marga Saragih (Sa-Ragih artinya "Sang Pemilik Aturan") keturunannya kelak menjadi yang dipertuan di daerah Raya (Simalungun) Tebingtinggi (Serdang Bedagai) dan Tanjung Morawa (Deli Serdang) atau dikenal dengan marga Saragih Garingging dan Saragih Dasalak. Selanjutnya Raja Saniang Naga, yaitu nama dewa penguasa lautan yang menjadi marga Sinaga penguasa di Kerajaan Batangiu (kemudian beralih menjadi Kerajaan Si Tonggang dan terakhir Tanah Jawa) dan **Raja Nagur Damanik** sebagai raja di raja kelompok marga itu.

Demikianlah sehingga ada empat induk di Simalungun yang kemudian disingkat dengan *Si-Sa-Da-Pur*, singkatan dari Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba. Marga yang empat inilah marga Simalungun asli yang menjadi marga pemilik tanah di Simalungun sejak zaman dahulu. Masing-masing marga berdiri sendiri dan tidak diizinkan mengawini marga yang sama. Untuk mengikat persaudaraan dan kekeluargaan di antara empat marga ini, maka masing-masing kerajaan yang empat itu (Kerajaan Tanah Jawa/Sinaga; Kerajaan Siantar/Damanik, Kerajaan Panei/Purba Dasuha, Kerajaan Dolog Silou/Purba Tambak) memiliki tradisi budaya perkawinan antar kerajaan di mana permaisuri (*Puang Bolon*) haruslah dari puteri raja tetangganya yang berbeda marga, menurut adat yang sangat ketat ini, pewaris mahkota raja di seluruh Simalungun haruslah anak laki-laki tertua yang dilahirkan *Puang Bolon*, yaitu puteri raja tetangganya turun temurun tanpa terputus. Masing-masing *Puang Bolon* raja-

raja Simalungun turun temurun adalah berikut ini:

No.	Kerajaan	Marga Raja	Ibukota (Pamatang)	Asal Puang Bolon (Permaisuri)	
1.		Nagur	Damanik	Pamatang Nagur	Padang Rapuhan (Padang Lawas)
2.		Batangiou	Sinaga	Pamatang Batangiou	Nagur (Damanik)
3.		Silou	Purba Tambak Silou Buntu	Pamatang Silou Buntu	Nagur (Damanik)
4.		Dolog Silou	Purba Tambak Lombang	Pamatang Dolog Silou	Nagur (Damanik) kemudian beralih ke Saragih Garingging (Raya)
5.		Tanoh Jawa	Sinaga	Pamatang Tanoh Jawa	Siantar (Damanik), Tuan Girsang dari Raya (Saragih Garingging), Tuan Dolog Panribuan dan Jorlang Hataran dari Simarimbun (Panei)
6.		Panei	Purba Dasuha	Pamatang Panei	Siantar atau Marihat (Damanik)
7.		Siantar	Damanik	Pamatang Siantar	Silampuyang atau Sipoldas (Saragih Sidabuhit)
8.		Purba	Purba Pakpak	Pamatang Purba	Siantar (Damanik)
9.		Raya	Saragih Garingging	Pamatang Raya	Panei atau Bajalinggei atau Guru Raya (Purba Dasuha)
10.		Silimahuta	Purba Girsang	Pamatang Nagasaribu	Raya (Saragih Garingging) atau dari Tongging (Saragih Munthe)

Dengan demikian seluruh raja-raja Simalungun diikat oleh kekeluargaan yang sangat kuat melalui adat Puang Bolon (permaisuri raja) itu. Berikut ini adalah marga-marga utama suku Simalungun sesuai daerahnya masing-masing.

No	Marga Induk	Marga Turunan	Daerah
1.	Sinaga	Sidahapittu Sidahalogan Simaibun Sidasuhut Simanjorang Simandalahi Dadihoyong Hataran Dadihoyong Bodat	Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon Girsang Sipangan Bolon, Nagasaribu Sibaganding Dolog Panribuan, Tanoh Jawa Jorlang Hataran
2.	Saragih	Sumbayak Garingging Dasalak Dajawak Simanihuruk Simarmata Sitio Turnip Sidauruk/Sidabuhit Sitanggang	Raya, Raya Kahean, Silou Kahean, Raya, Raya Kahean, Padang Bedagai Padang Tebingtinggi Rakutbesi, Raya Silimakuta Haranggaol, Silumbak Tigaras Tigaras Silampuyang, Sipoldas Bandar, Tanoh Jawa
3.	Damanik*)	Nagur/Rappogos Usang Bariba Bayu Hajangan Simaringga Tomok Sola Sarasan	Nagur Raja, Raya Kahean, Raya, Padang Bedagai Raya Kahean Siantar, Bandar, Sidamanik, Sipolha Raya Kahean, Sidamanik Sidamanik, Raya Kahean, Raya Nagasaribu, Silimahuta Dolog Malela, Sipolha, Tambunraya, Manik Saribu, Sihilon, Hutamura, Raya Raya Kahean, Raya, Padang Bedagai Raya, Raya Kahean
4.	Purba	Tambak Pakpak Tua Silangit Sigumonrong Sidasuha Sidadolog Sidagambir Tondang Tambunsaribu Siboro Manorsa	Dolog Silou, Siloubuntu, Serdang Purba, Panombeian Panei Dolog Silou, Serdang Dolog Silou, Serdang Lokkung, Marubun Longkung, Cingkes Panei, Bajalinggei, Marihat, Raya Sinaman Raja i Huta Hinalang, Huta Tano Binagara Haranggaol Siboro Gaunggaung Purbasaribu, Haranggaol
5.	Marahap Simalungun	Sipayung, Lingga, Sitopu dan lain-lain	Silou Kahean, DologSilou, Silimakuta dan Purba

*) Damanik tidak mempunyai marga cabang. Sebutan di belakang marga ini menunjuk pada nama tempat asal leluhurnya terdahulu berkuasa.

Belakangan muncul banyak pendatang ke Simalungun dari suku-suku sekitar yang umumnya dari daerah Samosir dan Toba. Mereka ini datang dulunya sebagai pekerja upahan (Simalungun: *"parombou"*) atau karena dirampas atau dibeli sebagai budak (Simalungun: *jabolon*). Zaman dahulu sewaktu Simalungun masih berstatus kerajaan (setidaknya sebelum masuknya Belanda tahun 1865), kewarganegaraan di Simalungun sangat ketat, di mana hanya mereka yang masuk ke dalam empat marga itu yang diakui sebagai kaula merdeka yang dapat diberikan tanah oleh raja-raja Simalungun. Menyesuaikan dirinya, maka banyak orang dari Samosir dan Toba memasuki marga yang empat itu di Simalungun sebagai rakyat biasa dan mengaku dirinya orang atau suku Simalungun. Perlu diketahui zaman dahulu, masyarakat adat Simalungun itu terbagi atas kasta (pembagian kelas masyarakat karena struktur pemerintahannya yang feodal). Kelas utama (*upper class*) disebut *"partongah"* (yaitu kelompok masyarakat kelas bangsawan dari keturunan raja-raja Simalungun; kelas menengah (*middle class*) disebut *"paruma"* yaitu rakyat biasa dan terendah (*lowest class*) disebut *"jabolon"* (hamba). Kedudukan hamba ini sangat hina dan diperlakukan dengan kejam oleh pemiliknya yaitu kaum bangsawan tadi. Pembauran dengan suku Simalungun asli inilah yang selanjutnya dikenal dengan Deutro Simalungun (Simalungun Muda) yaitu mereka yang disebut *"marahab Simalungun"*. Maksudnya mereka dari suku lain yang mengaku dirinya orang Simalungun, berbahasa, berkepribadian, berbudaya, berkesenian dan beradat Simalungun.

C. Perkembangan Kerajaan

1. Kerajaan Nagur



Gambar 1: Catur Raja Nagur di Museum Simalungun

Di kalangan orang Simalungun³³ dan dalam beberapa literatur³⁴ yang ada, Nagur dianggap sebagai kerajaan tertua (*ancient kingdom*) yang pernah berdiri di wilayah Simalungun³⁵ dan merupakan cikal bakal kerajaan

berikutnya³⁶. Wilayahnya terhampar luas dan berbatas langsung dengan Aceh, Danau Toba serta Selat Malaka³⁷. Dengan demikian, bisa dibayangkan apabila wilayah yang disebut dengan Kabupaten Simalungun saat ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan wilayah pada masa keemasan kerajaan Nagur³⁸. Nagur meliputi juga Batangiou yang adalah daerah takluknya (vasal). Tideman menyebutkan bahwa Nagur meliputi daerah Panei sampai ke Nagurraja di Padang Bedagai, di samping itu masih terdapat Kerajaan Batangiou yang meliputi Tanah Jawa sampai ke Asahan. Kerajaan yang terakhir ini berbeda dengan Nagur dari dinasti Damanik, penguasa Batangiou adalah marga Sinaga. *Puangbolon* (permaisuri) Kerajaan Batangiou selalu dari Bandar (Damanik). Kemudian hari, Batangiou turun pangkat menjadi *partuanon* setelah raja Batangiou dikalahkan Muharaja pendiri Kerajaan Tanah Jawa³⁹. Komoditas utama kerajaan ini adalah karet dan lada, rotan, padi dan lain-lain⁴⁰. Menurut beberapa literatur yang ada, Kerajaan Nagur bangkit dan berdiri sejak abad ke-6 dan mengalami kemunduran pada abad ke-15⁴¹.

Hikayat raja-raja di Simalungun mengungkapkan sebelum kedatangan leluhur mereka zaman dahulu ke daerah Simalungun sudah lebih dulu hadir kerajaan besar bernama Kerajaan Nagur yang diperintah oleh raja marga Damanik. M.D.Purba mengutip laporan perjalanan Marco Polo (1271-1295)⁴² menceritakan bahwa pernah mengunjungi pesisir pantai Sumatra Utara di mana ada kerajaan yang bernama *Nagore* atau *Nakur*. Pada saat itu, Ia melihat bahwa Nagur sedang berperang. Sumber lain adalah Mendez Pinto⁴³ yang dalam laporannya dituliskan adanya kerajaan Batak⁴⁴ yang

bernama *Jakur (Nakur)* yang sedang berperang dengan Aceh. Raja Nagur sebagaimana yang dicatat oleh Pinto dalam laporannya itu adalah '*Timorraja*'. Selain itu, Tomme Pires penguasa Portugis di Malaka pada tahun 1512-1515 mengemukakan raja Batak pada saat itu adalah *Tomjam* yang memerintah di pegunungan Sumatra Utara⁴⁵. Merujuk pada pendapat Pinto terdahulu maka dapat dipastikan bahwa *Raja Tomjam* adalah penguasa setelah *Timoraja* di kerajaan Nagur.

Perlu dicatat di sini bahwa keberadaan Nagur di Aceh itu dengan di Simalungun masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Seorang pakar tentang Batak dari Hawaii University Dr. Uli Kozok misalnya berpendapat bahwa Nagur di Aceh dan di Simalungun itu dua buah kerajaan yang berbeda kemunculan dan budayanya. Nagur di Aceh sudah hadir lebih dulu sebelum hadirnya Kerajaan Nagur di Simalungun. Di sisi budaya Nagur di Aceh itu lebih dekat dengan budaya pedalaman Aceh, sementara di Simalungun lebih dekat dengan budaya Batak. Menurut Dr. Uli Kozok, Nagur di Simalungun itu hanyalah kerajaan kecil saja yang tidak pernah dicatat oleh sumber asing dari zaman mana pun. Dia mungkin pernah ada demikian kata Dr Kozok tetapi tidak pernah sampai meluas keluar dari daerah sekitar Paneitongah hingga Nagaraja sekarang ini di Kabuapten Simalungun.⁴⁶ Uli Kozok merujuk pada "sumber asli" dari catatan para musafir Cina serta catatan tahunan dinasti Ming (Ming Shi-Lu). Nagur dan Nakur itu sama. Kerajaan itu terletak di Aceh dekat Pidie dan tidak punya sangkut paut dengan Simalungun. Kozok mengenai Nagur ini mengatakan,

"Namun saya tetap menolak bila Nagur di Simalungun

mau dihubungkan dengan Nakur/Nagur yang disebut di dalam sejarah Cina. Cina pada masa itu menjadi peradaban yang paling maju di dunia. Mereka memiliki peta yang dapat diandalkan dan saya tidak bisa membayangkan mereka salah menempatkan sebuah negeri di petanya. Apalagi Nakur/Nagur jelas dikatakan terletak antara Aceh dan Samudra Pasai. Kesamaan nama memang menggiurkan, tetapi saya tetap yakin bahwa Nagur di Simalungun dan Nakur di dalam sejarah Cina tidak sama. Kembali pada pertanyaan semula apakah Nagur atau Sriwijaya lebih tua, jawabannya sederhana: Kita tidak tahu sejarahnya Nagur Simalungun karena tidak ada data sejarah. Sedangkan Nakur di Aceh baru muncul di zaman Majapahit maka jelas Sriwijaya lebih tua, namun hal itu tidak relevan untuk sejarah Simalungun. Untuk sumber asli silakan lihat 1. Ying-Yai Sheng-Lan: 'The Overall Survey of the Ocean's Shores' (1433) dan 2 Hsing-ch'a-sheng-lan: the overall survey of the star raft. Nagur/Nakur dianggap sebagai transliterasi dari bahasa Sansekerta Nagari (negeri). Mills menduga bahwa Nakur merupakan "an advanced establishment of the Batak" di sekitar Peudada (antara Lhokseumawe dan Sigli). Dalam hal itu Mills jelas keliru karena orang Nakur dikatakan (menurut sumber Cina) memiliki bahasa dan adat yang sama dengan orang di Samudra (berarti bahasa/adat Melayu atau Aceh). Sayangnya Mills tidak tahu banyak tentang Batak. Ternyata Mills menganggap Batak sebagai cabang Melayu sehingga dia tiba pada kesimpulan bahwa Nagur itu sama dengan Batak karena kebetulan daerah Nagur disebut berbukit-bukit. Interpretasi Mills jelas keliru. Pokoknya, setelah saya baca sumber-sumber asli, saya semakin yakin bahwa Nagur/

Nakur merupakan sebuah kerajaan kecil di sekitar Pidie. Di dalam kerajaan itu hanya ada satu pemukiman yang agak besar. Jumlah penduduknya yang semua bertatu sekitar 1000. Demikianlah menurut sumber Cina. Yang jelas: Nagur ini tidak ada hubungan apa pun dengan Nagur di Simalungun.”⁴⁷

Terlepas dari itu semua, pengamat sejarah Simalungun percaya bahwa Nagur di Simalungun itu pernah berkuasa di Sumatera Timur. Lebih dahulu hadir sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di Simalungun. Ibnu Battuta mengunjungi Pasai pada tahun 1345⁴⁸ meriwayatkan bahwa kerajaan *Nagur* diserang oleh raja Chola⁴⁹ dari India Selatan pada tahun 1023-1024 sehingga memasuki abad ke-14, kerajaan Nagur sudah banyak kehilangan daerah-daerah taklukkanya. Daerah-daerah taklukan tu kemungkinan bangkit menjadi daerah kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan Nagur seperti kerajaan Aru (*Daaru*). Sumber berikutnya adalah berasal dari laporan perjalanan Zheng He⁵⁰ dan Ma.

Huan⁵¹ dari Tiongkok yang mengunjungi Nakur (Nagur) pada kunjungan ke-4 tahun 1413-1415 dan kunjungan ke-7 tahun 1431-1433. Berdasarkan sumber itu, Groeneovelt menganalisis dan mengemukakan bahwa kerajaan Nagur yang dikunjungi oleh Zheng He dan Ma Huan tersebut adalah kerajaan Batak yang berpusat di pegunungan dan berbatas dengan Aru (*Daaru*) dengan selat Malaka.

Kemunduran kerajaan ini banyak disebutkan sebagai akibat dari penetrasi pasukan ekspedisi Pamalayu Kertanegara pada tahun 1293-1295 ke pesisir Timur Sumatra Utara⁵². Penyebab lainnya adalah akibat serangan

Raja Chola dari India Selatan pada tahun 1023-1024 yang mengakibatkan banyaknya daerah-daerah kekuasaan Nagur yang menghilang. Lain daripada itu, penyebab lainnya adalah sebagai dampak agresi Aceh yang tidak menginginkan adanya kerajaan merdeka di wilayah pesisir timur Sumatra⁵³. Diyakini, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang besar dan merdeka serta memiliki laskar yang terkenal dengan panah beracun.⁵⁴ Ketenaran pasukan ini, tampak pada kemampuan laskar Nagur menewaskan sultan Aceh dan menggagalkan serangan Aceh ke wilayah Nagur. Cerita rakyat Simalungun mengisahkan cerita ini dengan penamaan "Asih" untuk Aceh dan "*Jau Siloupak Ipon*" untuk pasukan penakluk dari Jawa. Sampai hari ini pun masih banyak nama kampung di Simalungun berhubungan dengan nama Asih, seperti Marjandi Asih (berjanji dengan Aceh) di daerah Tanah Jawa sekarang ini. Kisah Harangan Lungun di Simalungun mengisahkan pertempuran sengit antara pasukan Kerajaan Timur Raya dengan Kerajaan Samidora yang dimenangkan pasukan Timur Raya dengan bantuan burung raksasa Nanggordaha. Kerajaan Samidora menurut kisah di Simalungun identik dengan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh sekitar abad XIII.

Tideman dan Tichelman pernah melakukan penelitian dan eskavasi di bekas reruntuhan kerajaan ini di sekitar Bah Sawa di Tanah Jawa dan Silou Buntu di pedalaman Raya. Di kedua daerah ini keduanya menemukan banyak benda-benda kuno yang membuktikan bahwa kerajaan ini pernah ada di Simalungun. Salah satu dari benda peninggalan Kerajaan Nagur ini sebongkah batu yang pernah dipakai bermain catur oleh raja Nagur yang sekarang masih bisa

dilihat di Museum Simalungun Pematangsiantar.

Di daerah Silou Kahean tepatnya di Dolog Sirampogos di kampung Bongbongan ditemukan semacam batu bersusun berupa punden berundak yang dipercaya masyarakat lokal adalah makam puteri Raja Nagur yang tewas digigit babi peliharaan sang puteri raja. Peninggalan raja Nagur yang masih bisa disaksikan hingga kini adalah perkampungan sang raja bersama pengikut dan keturunannya di Nagaraja sebuah kampung kecil di tengah perkebunan karet di Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.⁵⁵

Memang secara historiografinya, asal usul kemunculan kerajaan ini belum diketahui secara pasti, belum ada penelitian yang secara khusus untuk memecahkan misteri keberadaan Kerajaan Nagur ini. Akan tetapi, melirik pada konsep-konsep sebutan yang digunakan seperti "*raja*" (*raj*), maka dapat dipastikan bahwa berdirinya kerajaan ini pastilah diawali oleh masuknya masyarakat dan kebudayaan Hindu/Budha ke pesisir timur Sumatra Utara. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh Hindu mula-mula tampak secara jelas pada kerajaan Srivijaya (*Kemenangan Yang Menjanjikan*) yang berdiri sejak abad ke-6.⁵⁶ Sesuai dengan jalur-jalur perdagangan yang umumnya melalui selat Malaka, dan jalur sungai (*riverince*) sebagai *entrance* kepedalaman, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan Nagur juga didirikan berdekatan dengan melihat kedua kondisi geografis ini.

Pada perkembangan selanjutnya, komunitas pedagang tersebut berkembang secara lebih lanjut sesuai dengan ukuran zamannya dan mendirikan sistem

pemerintahan yang dikenal dengan kerajaan Nagur. Kerajaan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat Simalungun masa kini, serta cikal bakal tradisi kerajaan yang diwarisi hingga dipertengahan abad ke-20. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa kerajaan Nagur berdiri setelah berdirinya kerajaan Srivijaya pada abad ke-6. Kemungkinan besar, masyarakat Srivijaya yang berada di antara Bukit Seguntang dan Sabokingking disepanjang alur sungai Musi-Palembang⁵⁷ itu menyebar ke daerah lain. Sebagian memilih jalur sungai Sei Panai, Barumon dan Batang Toru dan masuk ke Padang Lawas. Sebahagian lagi meneruskan perjalanan melalui pesisir selat Malaka dan masuk ke Simalungun melalui sungai Padang dan Sungai (*Bah*) Bolon⁵⁸.

Hal inilah yang menyebabkan bahwa dari segi bahasa yang digunakan, maka bahwa Simalungun dan Mandailing lebih dekat bila dibandingkan dengan bahasa Karo, Toba dan Pakpak.⁵⁹ Tujuan perjalanan tersebut adalah untuk mencari rempah-rempah atau komoditas alam yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Khususnya pada masyarakat Simalungun, nama Nagur banyak disebut sebagai penyebutan nama kampung seperti *Mariah Nagur*, *Nagur Raja*, *Nagur Usang*, *Nagur Huta*, *Nagur Bayu*, *Nagur Tongah*. Istilah ini diterjemahkan sebagai kesatuan administrasi kampung yang disebut dengan *nagori* yang dikepalai oleh pangulu (kepala desa) dalam sistem administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Simalungun sekarang ini.

2. Raja Marompat (1400-1907)

Kerajaan Nagur meskipun sudah mengalami

banyak invasi, ternyata masih mampu mempertahankan dirinya walaupun daerahnya semakin sempit dan terjepit di pedalaman di antara kerajaan-kerajaan Melayu dan Aceh. Nagur masih mampu mempertahankan dirinya dari invasi kaum Melayu yang menyerbu pantainya (Padang, Bedagai dan Batubara). Nagur berhasil mempertahankan kekuasaannya di bagian Selatan Simalungun. Tideman mencatat bahwa kerajaan Nagur selanjutnya pecah menjadi empat bagian: Silou Panei, Siantar dan Si Tonggang (Tanoh Jawa) yang meskipun merdeka tetapi masing-masing saling berkaitan erat.⁶⁰ Kekuasaan Aceh yang semakin meningkat sejak zaman Iskandar Muda (1606-1639) berkuasa yang merupakan zaman keemasan kesultanan Aceh memaksa raja-raja di bekas kekuasaan Nagur untuk mengakui kekuasaan Aceh.⁶¹

Raja-raja bekas bawahan raja Nagur mengakui sultan Aceh sebagai yang dipertuan dan kadang-kadang mengaku dirinya wazir atau wakil sultan Aceh untuk menghindarkan kesan penjajahan langsung. Menariknya, hampir di setiap kerajaan atau penguasa lokal di Sumatera Timur mendapatkan pengesahan pengangkatan mereka sebagai raja harus dilakukan oleh sultan Aceh atau wakilnya. *Partingian Bandar Hanopan* sebagai contoh menceritakan pengangkatan raja Silou oleh sultan Aceh melalui wakilnya Sultan Deli. Untuk itu raja-raja yang diangkat sultan Aceh mendapat tanda kebesaran sebagai bukti pengesahannya sebagai raja yang terdiri dari sebilah pedang Aceh, bawar, jorong dan lela (meriam).⁶² Keempat raja-raja bekas daerah kekuasaan raja Nagur itu mengikat persekutuan dengan Aceh yang menyebut konfederasi mereka itu sebagai raja

berempat, terjemahan dari *"Tuha Peuet"* yang sudah lebih dulu diterapkan sultan Aceh di Gayo dan Tanah Karo.⁶³ Daniel Perret mengenai sistem pemerintahan ini berpendapat:

*Pada satu saat, semua daerah kekuasaan di Deli bersekutu dalam sebuah institusi bernama "Datuk Empat Suku" atau "Datuk Berempat". Sistem yang serupa ditemui di pesisiran barat Aceh dalam bentuk Tuha Peuet, di suku Gayo dalam bentuk Pojo Si Opat, di suku Alas dalam bentuk Raja Si Empat, di sebelah utara Danau Toba dalam bentuk Raja Berempat, di Simalungun dalam bentuk Raja Maropat dan di selatan Danau Toba dalam bentuk Raja Na Opat. Sumber-sumber tidak sepakat dalam menyebutkan saat mulai berlakunya sistem tersebut di Pesisir Timur Laut.*⁶⁴

Laporan kolonial tahun 1904 mencatat bahwa nama kerajaan-kerajaan Simalungun sejatinya berasal dari peristiwa ketika para raja itu dikukuhkan sultan Aceh. Panei disebut demikian karena pada saat pengesahannya, raja duduk di atas tumpukan *"parpaneian"* (pustaka kulit kayu atau bambu bertulis nujuman bergambar putaran matahari dan bulan), Silou disebut karena raja pada saat itu duduk di atas *"Hiou"*, Siantar disebut karena raja duduk di atas *"pantar"* yaitu lantai rumah yang dibangun di atas tiang.

Masing-masing menerima tanda-tanda kebesaran seperti dimiliki raja Panei berupa pemberian dari sultan Aceh atas pengangkatannya, yaitu: *"Terapang"* sejenis keris, *"Semiga"* sebongkah emas berbentuk bulat dan sebuah gambar ikan Bulet.⁶⁵ Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Batara Sangti Simanjuntak dan W. B. Sidjabat yang menyebut raja berempat (*Raja Maroppat*) di Simalungun adalah bentukan dari Sisingamangaraja yang disebutnya

selaku "Maharaja Batak".⁶⁶ Sisingamangaraja bukanlah raja dalam pengertian negara (*state*), melainkan hanya dalam konsep religius; sebab seperti disebutkan oleh Lance Castles bahwa pada dasarnya suku Batak Toba tidak mengenal pemerintahan terpusat selayaknya negara, orang Batak Toba hidup dalam *stateless*.⁶⁷ Lebih jelasnya Vergouwen menulis:

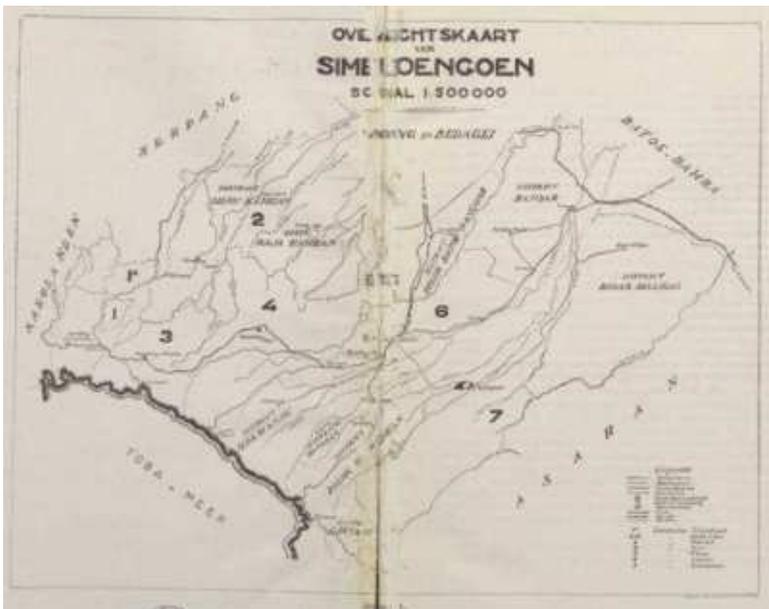
*"Mengenai kekuasaan terpusat kita dapat mencermati kehidupan di zaman pidari, masyarakat Batak Toba lebih suka berdiam di unit kecil yang menyenangkan; terdiri dari beberapa ratus orang, atau paling banyak seribu, dan yang kepentingannya hanya terbatas pada urusan sendiri. Mereka belum sampai pada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup suatu daerah luas di bawah satu pemeritahan yang mantap. Tidak ada orang yang memegang kekuasaan sentral".*⁶⁸

Sedangkan suku Simalungun sudah sejak lama mengembangkan struktur pemerintahan kerajaan terpusat yang disebut "*pamatang*" berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam unit-unit yang lebih kecil, di mana pola pemerintahannya adalah duplikasi dari struktur pemerintahan di atasnya.⁶⁹ Struktur pemerintahan raja berempat jelas bukan bentukan Sisingamangaraja, sebab kapasitas dan status kedudukannya tidak memungkinkan untuk itu. Ahli sejarah bangsa Belanda, Schadee di Sumatra Timur jelas sekali menyebutkan bahwa konsep raja berempat itu berasal dari sultan Aceh. Sistem itu diberlakukannya di daerah-daerah kekuasaannya dalam rangka mengokohkan hegemoni kekuasaannya di Sumatra Timur. Raja berempat memerintah sebagai *vertegenwoordigers* (bertindak atas nama) sultan Aceh dan pengakuan itu dikukuhkan dengan

pemberian tanda-tanda kebesaran seperti sudah kita sebut di atas.⁷⁰

3. Raja Marpitu (1907-1946)

Tahun 1865 mulailah kolonialisme Belanda memasuki tanah Simalungun, mula-mula di Tanjung Kasau yang pada waktu itu tunduk ke Siantar, lalu makin merembes jauh sampai ke pedalaman Simalungun dalam rangka pembukaan perkebunan di atas lahan raja-raja Simalungun. Dengan berbagai intrik dan politik pecah belah di antara sesama raja-raja dan masyarakat Simalungun; Belanda berhasil memisahkan beberapa daerah adat Simalungun dari kekuasaan Raja Marompat; daerah Padang Bedagai



Gambar 2: Peta Kerajaan Marpitu (Steenplastiek in Simeloengoen, 1937)

yang pada awalnya daerah takluk Kerajaan Silou menjadi diakui sah sebagai raja oleh Belanda. Demikian pula daerah Batak Timur Dusun di Serdang diakui masuk kesultanan Serdang. Batubara sekitarnya sampai ke Tanjung Balai yang dulu berada di bawah kekuasaan raja Siantar dan Tanah Jawa dipisahkannya dari Simalungun dan dimasukkannya ke Kesultanan Asahan.

Pada tahun 1907 sesudah perlawanan raja-raja Simalungun berhasil ditundukkan Belanda, seperti raja Siantar Sangnualuh Damanik, penguasa di Raya Rondahaim Saragih, Tuan Dolog Panribuan gelar Tuan Sibirong Sinaga dan raja Dolog Silou Tuan Tanjarmahei Purba Tambak maupun Tuan Jontama Purba Sidasuha raja Panei; maka Belanda mengakui Raya, Purba dan Silimakuta menjadi kerajaan penuh di samping kerajaan Raja Marompat yang sudah lebih dahulu hadir ratusan tahun sebelumnya. Belanda berhubung keterbatasan anggaran dan personel mereka yang akan ditugaskan memerintah daerah Simalungun yang sudah didudukinya itu memilih untuk mengangkat penguasa lokal Simalungun sebagai wakil mereka di daerah dalam lingkup wilayah Hindia Belanda dalam tatanan pemerintahan otonom dalam sistem pemerintahan swapraja yang disebut *Zelfbestuurende Landschappen van Simeloengoen*. Dengan demikian hadirilah tujuh kerajaan di Simalungun sesudah kehancuran Kerajaan Nagur sampai revolusi sosial (1946) yaitu empat raja marompat: *Panei, Siantar, Tanah Jawa* dan *Dolog Silou* ditambah tiga kerajaan baru yang diakui Belanda: *Purba, Raya* dan *Silimakuta*. Kerajaan-kerajaan tradisional Simalungun ini disatukan bersama Tanah Karo dalam *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden* yang

dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda nomor 22 tanggal 12 Desember 1906 dan dicatat dalam lembaran negara Hindia Belanda (*staatblad van Nederlandsch Indies*) nomor 531. Asisten residen pertama diangkat V. C. J. Westenberg berkedudukan di ibukota Saribu Dolog.⁷¹ Sejak tanggal 12 Desember 1906 resmilah ketujuh kerajaan-kerajaan Batak Timur itu digabungkan oleh Belanda dalam satu daerah administratif dengan memakai istilah *Simeloengoen* sebagai nama resmi daerah administrasinya.



Gambar 3 : Raja-raja Marpitu dari Simalungun
(Sumber: Perpustakaan Nasional Jakarta).

D. Asal Mula Kerajaan-kerajaan Simalungun

Legenda asal-usul kerajaan-kerajaan Simalungun ini ditulis oleh Tideman dalam bukunya *Simeloengoen* yang terbit di Negeri Belanda tahun 1922. Sejauh yang bisa ditambahkan dari berbagai sumber⁷², kisah berdirinya dan silsilahnya raja-raja Simalungun sejauh yang diketahui kami deskripsikan berikut ini.

1. Siantar



Gambar 4: Tuan Sawadim Damanik dan ketiga puterinya – Pemangku Raja Siantar (1924-1946) (Sumber: kitlv.nl)

Kerajaan Siantar adalah penerus Raja Nagur Damanik. Semula daerah Siantar dikuasai oleh marga Damanik dari Jumorlang yang disebut Tuan Jumorlang Damanik. Kekuasaan Tuan Jumorlang Damanik beralih kepada saudaranya Partigatiga Sipunjung Damanik dari Siantar Matio Sipolha dalam adu ayam. Menurut kisah di Siantar, Tuan Jumorlang tewas oleh tombaknya sendiri dalam adu tanding dengan Partiga-tiga Sipunjung Damanik setelah ayam aduannya dikalahkan ayam aduan Partiga-tiga Sipunjung bernama Manuk Sihulabu di Pulo Holang Siantar. Kematiannya ini dikenal di Siantar dengan istilah "*partodos ni raja Jumorlang, mati di ujung tombak sendiri*". Sesudah Raja Jumorlang tewas, jandanya menjadi isteri Partiga-

tiga Sipunjung. Anak Raja Jumorlang terdahulu bernama Ari Urung Damanik gelar Ompu Barita Damanik dijadikan Harajaan Bah Bolak (bendahara kerajaan) di Siantar dan dihormati dengan gelar *Ompung* bila turunannya laki-laki dan *Bou* bila turunannya perempuan oleh keturunan Partiga-tiga Sipunjung yang menjadi raja Siantar.⁷³

Meskipun raja di Siantar adalah marga Damanik, namun kampung-kampung di sekitarnya dikuasai oleh marga Saragih yang menjadi *tondong* raja Siantar. Setiap raja di Siantar harus menjemput permaisurinya dari Silampuyang atau Sipoldas marga Saragih.

Menurut J. Tideman, Kampung tertua di daerah ini adalah Pamatang, dan selanjutnya Naga Bosi, Dolog Malela dan Silampuyang, yang pada masa ini tidak termasuk Siantar, tetapi berdiri sendiri dibawah Tuan Silampuyang marga Saragih Sidabuhit. Penduduk yang menghuni daerah ini hingga kini berasal dari marga Saragih. Naga Bosi dan Dolog Malela kemudian dikuasai oleh marga Damanik Tomok dari Raja Natakkang Tambunraya sebagai partuanan di daerah itu.⁷⁴

Pada hari yang baik muncul Partiga-tiga Sipunjung Damanik, yang berasal dari Siantar Matio di daerah Si Tonggang. Dia berada di Silampuyang dan menikahi putri Tuan di sana. Sebagai bandar besar aduan ayam, dia berjudi dengan Raja Si Tonggang. Dengan kemarahannya dia mempertaruhkan sebagian urung (daerah) Silampuyang kepada Si Tonggang. Si Tonggang kalah dan wajib meninggalkan daaerahnya. Oleh karenanya, dia pergi ke Tanah Jawa, sementara Partiga-tiga Sipunjung menjadi raja di daerah itu yang menyebut daerahnya dengan nama

Siantar. Sejak masa ini ada kewajiban para raja Siantar untuk mengambil permaisuri dari keturunan Tuan Silampuyang.

Putra Partiga-tiga Sipunjung dan putri raja Silampuyang adalah Si Ali Urung yang menggantikan ayahnya setelah kematiannya. Tetapi dia lalu kembali ke Siantar Matio dan mendorong beberapa anggota keluarga, di antaranya cucu Bagot di Hitang, yang lebih berkuasa di Siantar Matio daripada dia (Hitang adalah nama jenis lemak tuak khusus, dengan mulut ketel pada penutupnya), untuk mengikutinya. Pemuda ini ingin mendudukkannya sebagai raja di Siantar untuk menggantikannya, sementara dia sendiri akan tinggal sebagai Bah Bolak, salah satu bangsawan tinggi di Pamatang. Mengapa dia melakukan itu, kisah ini tidak mengungkapkan. Tetapi atas alasan ini adat masih menuntut hingga kini bahwa raja Siantar tanpa peduli berapa usianya, memanggil keturunan Bah Bolag dengan gelaran *Ompung* dan kepada perempuan dengan gelar *Bou*. Bah Bolak sekarang adalah keturunan garis lurus dari Partiga-tiga Sipunjung.

Van Dijk memberikan kisah yang berlainan. Dia berkata bahwa serbuan pertama terjadi di bawah Babalak (tepatnya Bah Bolak), yang tidak bisa menaklukkan raja di daerah baru. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada kepala Siantar Matio, yang berhasil mendepak mereka. Dia akhirnya menjadi raja di wilayah ini dan Bolak tetap menduduki posisi yang tinggi. Dari keturunan raja Siantar muncul Tuhan Bandar dan Sidamanik.

Van Dijk mengisahkan – dan ini dipertegas, kemudian dilengkapi dengan beberapa keterangan yang tidak tepat pada Van Dijk – bahwa dua bersaudara dari seorang raja

Siantar tetap ingin mandiri dan adiknya tetap diakui sebagai raja Siantar. Yang satu berangkat ke Sidamanik dan yang lain lalu menuju Bandar. Tetapi ada perpecahan sebagai akibat kemalasan dan ketidakmampuan adiknya di wilayah ini. Saat itu kedua bersaudara – setelah para kepala Siantar meminta Tuan Bandar bersedia tampil sebagai raja Siantar (*Siantar si di tengah*; ketika para pejabat pemerintah pertama mengunjungi daerah ini seluruh Bandar dan Sidamanik telah lama menjadi bagian dari Siantar. Oleh karena itu mereka menjadi bagian tengah Siantar, yang dianggap sebagai daerah asli Siantar) yang ditolaknya – para kepala dan penduduk daerah ini memberitahu mereka bahwa mereka telah membuat kesepakatan: yang satu di Bandar, yang lain di Sidamanik. Yang termuda sebagai raja, yang pangkatnya paling tinggi tinggal di Siantar. Karenanya Tuan Bandar lah hingga kini masih menyandang gelar Tuan Siantar.⁷⁵

Silsilah raja-raja Siantar⁷⁶ sejauh yang diketahui adalah berikut ini:

1. Raja Namartuah gelar Partigatiga Sipunjung Damanik dari Siantar Matio (Sipolha)
2. Raja Namaringis
3. Raja Ramajim
4. Raja Pagar Ujung
5. Raja Na Longah
6. Raja Nai Rih
7. Raja Nai Horsik
8. Raja Na Pitung
9. Raja Namartuah II
10. Raja Saduraja
11. Raja Namartuah III
12. Raja Sadurupa

13. Raja Mapir Namatua
14. Raja Sang Nualuh
15. Raja Riah Kadim
16. Raja Sawadim (sampai revolusi sosial 1946).



Gambar 5: Rumah Bolon Siantar (Sumber: kitlv.nl)

2. Tanah Jawa

Bermula di Tanah Jawa sudah berdiri kerajaan marga Sinaga bernama Kerajaan Si Tonggang. Si Tonggang adalah nama kerajaan yang semula berasal dari Kerajaan Batangiu dari marga Sinaga. Arifin Alamsyah Sinaga turunan langsung Tuan Jintar Sinaga raja Tanah Jawa menjelaskan bahwa mula-mula nama tanah Jawa adalah "*Panatap Daoh*" kemudian *Tahtah Daoh*, kemudian *Tanoh Jawa* (*tanoh*=daerah, *jawa*=datar), sehingga bisa menatap jauh karena tanahnya datar. Adat istiadat dan sistem pemerintahan di Kerajaan Siantar dan Tanah Jawa realtif sama, bahkan puang bolon di Tanah Jawa diadatkan haruslah dari Kerajaan Siantar. Sejak



Gambar 6: Tuan Sang Majadi Sinaga Dadihoyong – Raja Tanah Jawa
(Sumber: kitlv.nl)

tahun 1919 atas usul kontrolir dan persetujuan pembesar-pembesar kerajaan, raja menyetujui perubahan nama kerajaan Tah Jauh menjadi Tah Jawa (Tanah Jawa).⁷⁸ Kerajaan Tanah Jawa berkedudukan di Pamatang Tanah Jawa terdiri dari tujuh parbapaan: yaitu: Tuan Dolog Panribuan, Tuan Djorlang Hataran, Tuan Marjandi Asih, Tuan Hatondohan, Tuan Batangio dan Raja Girsang Sipangan Bolon (dengan kampung-kampung otonom: huta Parapat, Sibaganding dan Panahatan yang sempat berada di bawah kekuasaan Tuan Dolog Panribuan). Di samping itu masih terdapat *harajaan* (dewan penasihat) yaitu: Orang Kaya, Tuan Mahasar, Nagodang dan Rumah Tongah.⁷⁹

Tideman berdasarkan penelitiannya menyebutkan bahwa nama Tanah Jawa menimbulkan dugaan bahwa di sini pada masa lalu menjadi tempat tinggal koloni orang Jawa Hindu. Mungkin saja bahwa imigrasi Minangkabau dari tempat ini telah terjadi, pada masa dominasi Jawa atas Sumatera Selatan dan Tengah (Abad XIV dan XV). Dalam memori residen Bengkulu yang mengundurkan diri L.C.Westenenk, disampaikan, dengan angka tahun 1365: "Koloni orang Melayu Hindu dan orang Jawa minimal membentang sampai arus hilir (arah 2 kilometer di timur laut terletak patung Budha di dalam hutan seperti Avalokiteswara Roco), dan ke arus hulu sampai Pulu Punjung". Penelitian Tideman ini boleh jadi benar bila kita hubungkan dengan folklore asal-usul Muharaja pendiri kerajaan Tanah Jawa yang disebutkan datang dari Jawa melalui Aceh dengan tujuan menambah pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan kepandaiannya di pulau Sumatra.⁸⁰ Sebelum Muharaja menjadi raja di Tanah Jawa, cerita

rakyat menyebutkan bahwa daerah ini dikuasai oleh Raja Si Tonggang Sinaga dari Kerajaan Batangiou yang masih seketurunan dengan marga Sinaga di Girsang Sipangan Bolon. Raja Si Tonggang Sinaga turunan Batangiou ini menyerahkan tahtanya kepada Muharaja Sinaga dalam adu sumpah. Peralihan kekuasaan dari Raja Si Tonggang Sinaga kepada Muharaja dikisahkan dalam legenda tupai (*buyut*) di pohon aren (*bagod*), di mana Si Muharaja menceritakan kepada raja bahwa ada tupai yang bisa berbicara, "*torgotok-gotok, ter getek-getek, raja gabe jabolon, jabolon gabe raja* (raja menjadi rakyat, rakyat menjadi raja)". Raja yang tidak percaya cerita si Muharaja datang bersama permaisuri dan pejabat kerajaannya. Ternyata apa yang dikisahkan si Muharaja benar terjadi, lalu karena sang raja sudah terlanjur berjanji menyerahkan kerajaannya kalau cerita itu benar, akhirnya si Muharaja dinobatkannya menjadi raja dengan nama Kerajaan Tanoh Jauh yang seterusnya berubah nama menjadi Kerajaan Tanoh Jawa.⁸¹

Turunan raja Tanah Jawa berkuasa mulai dari Girsang Sipanganbolon/Parapat di pesisir Danau Toba sampai ke Sibaganding, Panahatan, pedalaman Dolog Panribuan, Jorlang Hataran, Pamatang Tanoh Jawa sampai ke Bosar Maligas bahkan dulu sampai ke tepi Selat Malaka sebelum masuknya Belanda. Posisi marga Sinaga Dadihoyong marga raja Tanah Jawa sangat penting di sini. Gamot sebagai pembantu raja semuanya punya pertalian keluarga atau keturunan dengan raja. Setiap pendatang yang masuk ke Tanah Jawa harus menyesuaikan dirinya dengan marga raja Tanah Jawa dan mengikuti adat istiadat dan budaya yang berlaku di daerah ini.

Tideman menghubungkan legenda asal usul berdirinya Kerajaan Siantar, menghubungkan tokoh pendiri kedua kerajaan ini dengan nama yang mirip di luar Simalungun. Di Siantar nama raja pertama kerajaan Partiga-tiga Sipunjung diduga berkaitan dengan Pulu Punjung. Menurutnya dia menduga bahwa pernah ada sekelompok orang dari Jawa atau Pulu Punjung yang sampai ke daerah ini dan mendirikan koloni atau kerajaan di daerah ini. Tideman menulis, "Mungkin saja bahwa koloni dari warga ini berada di Tanah Jawa dan mungkin masuk lebih jauh atau pada saat yang sama (seperti di Padang Lawas) juga masih di daerah yang letaknya lebih jauh membentuk pemukiman koloni. Orang asing yang datang dari Minangkabau, yang telah membentuk kerajaan Tanah Jawa, disebut orang Jawa (Jawa atau Jau)".⁸² Tideman, Musa Sinaga dan nota tahun 1909, berbeda pendapat tentang asal-usul leluhur raja Tanah Jawa. Tideman merujuk ke Urat di Pulau Samosir sementara itu Musa Sinaga dan nota tahun 1909 menyebut dari Pulau Jawa yang pernah untuk sementara waktu menetap bersama keluarga Raja Urat di Samosir.

Berikut ini kami mencoba untuk mengutip kisah berdirinya kerajaan Tanah Jawa berikut ini:

a. Asal-usul Raja Tanah Jawa Menurut J. Tideman⁸³

Di Urat Samosir ada seorang bernama Nai Heong (Nadi Hoyong) yang memiliki tiga putra, yang termuda si Mula Raja, berada dalam perjalanan ke Simalungun dan membuka tanah di Tanah Jawa sekarang dikampung Limbung (kini berada Dolog Panribuan). Dia tinggal di sini dan menjadi leluhur Tuan dari Dolog Panribuan. Nadi Hoyong memiliki dua anak: yang satu bernama Si Muha Raja, tetapi satunya

lagi namanya tidak dikenal. Mereka pergi ke Simalungun untuk mencari adiknya. Mereka berhenti di danau Toba dan mendarat di Sipolha, kemudian mereka terus ke timur melalui darat. Mereka bertemu dengan seorang Minangkabau yang mengumpulkan getah pohon Jorlang untuk dijual. Dari sinilah muncul daerah yang disebut Jorlang Hataran. Saudara tertua tinggal di sini yang menjadi leluhur Tuan Jorlang Hataran. Oleh karena itu, keturunannya disebut sebagai marga "*Nadi Hoyong Hataran*". Saudara tua ini membagi berbagai tugas kepada Si Muha Raja. Dia harus mengumpulkan rotan untuk keperluan saudara tuanya, memotong rumput untuk kudanya dan untuk aktivitas lainnya. Dia tidak memerintah di wilayah ini, karena dia memutuskan untuk meninggalkan Jorlang Hataran dan pergi bersama pengumpul rotan Minangkabau dalam perjalanan ini. Di mana-mana dia berkelana, juga ke Jawa. Dari pulau ini Sri Muha Raja membawa serta tanah dan air, dengan tujuan setelah kembali ke Sumatera dia akan mengusir adiknya dari Jorlang Hataran. Di Tanjung Bale, Sri Muha Raja meninggalkan temannya dan pergi ke barat menuju daerah ini. Di tempat di mana raja Si Tonggang tinggal (sekarang Pematang Tanah Jawa) dia tetap singgah dan menyimpan lahan dan air Jawa di hutan.

Seperti kita lihat dalam legenda tentang Siantar, Raja Si Tonggang dari Pematang Siantar tiba, dia telah melawan raja Partiga-tiga Sipunjung. Orang memberitahukan bahwa dia jauh melebihi orang biasa, tampak jelas dari fisiknya (seluruh tulangnya dimakamkan dekat Pematang Tanah Jawa di hutan Parsimagodan). Pertama-tama Si Tonggang tinggal di Batangio, menikah dengan putri raja di sana dan menempati sebuah kampung, yang kemudian bernama

Pematang Tanah Jawa, di mana raja Batangio kemudian mengakuinya sebagai raja. Di Kampung ini muncul Si Muha Raja dengan tanah dan airnya dari Jawa.

Si Muha Raja dihadapkan raja Si Tonggang, yang bertanya kepadanya dari mana dia tiba. Dia menjawab bahwa dia adalah orang asing dan tersesat dalam hutan. Raja Si Tonggang saat itu mengajaknya untuk mencari *bagot* (tuak) di hutan.

Pada suatu hari si Muha Raja melihat tupai (buyut) yang memanjat pohon aren. Dia berhasil menangkapnya dengan menggunakan ketapel dari bambu (todik) yang dibuatnya. Ketika Si Muha Raja mendekat, hewan ini berbicara dengan suara manusia: "*Tor gotok, tor gotok*, ada bambu besar yang melengkung, yang ditarik ke atas dan ditekan ke bawah dan terikat". Si Muha Raja sangat kaget mendengarnya, bahwa tupai itu bisa berbicara. Karena hewan ini meminum semua tuaknya, menjelang sore dia kembali tanpa membawa minuman kepada raja yang akan dipersembahkan kepada raja. Raja Si Tonggang sangat marah dengan hal ini. Tetapi Si Muha Raja mengisahkan bahwa semua telah terjadi dan dia tidak bisa melaksanakannya. Raja Si Tonggang yang menduga bahwa dia berbohong, tetap marah dan tidak mempercayai apapun darinya. Untuk membuktikannya, Si Muha Raja meminta agar dikirim kepercayaan raja menuju ke pohon dan melihat apakah semua yang diceritakannya itu benar. Saat itu Si Tonggang bersumpah bahwa apabila benar ada tupai yang berbicara, Si Muha Raja akan diangkat menjadi raja Tanah Jawa, tetapi bila dia berbohong, dia akan dibunuh.

Raja Si Tonggang kemudian mengirim seorang

hulubalang kepercayaan yang menegaskan kata-kata Si Muha Raja, tetapi masih tetap belum percaya pada Si Tonggang. Setelah itu, dia mengirimkan permaisurinya (*puang bolon*), tetapi dengan hasil sama sampai raja Si Tonggang akhirnya pergi dan tidak lagi membantah kebenaran itu. Kini dia memikirkan suatu rencana untuk menyingkirkan si Muha Raja. Dia mengikatkan sebuah kain pada ranting, sehingga tampak seperti ular. Si Tonggang berkata bahwa apabila itu bukan ular maka Si Muha Raja akan terbunuh, tetapi apabila memang ular maka dia akan menjadi raja. Dia menyuruh menebang sebuah cabang, membuat kain itu jatuh tetapi berubah menjadi ular. Ini adalah *ulok sawah*, karena itu beberapa orang menduga bahwa Tanah Jawa berasal dari kata *sawa* dan yang pertama adalah *Tanah Sawa*. Karena malu Si Tonggang kembali.

Si Muha Raja mengingatkan pada janji Si Tonggang dengan berkata, "Tanah di mana saya berdiri adalah Tanah Jawa dan airnya adalah air Jawa". Si Tonggang terlalu kuat dan dia mengajaknya berkelahi, dia terbunuh. Si Muha Raja menjadi raja daerah itu yang disebut Tanah Jawa. Orang-orang menduga bahwa Tanah Jawa ini pada mulanya sangat kecil, tetapi kini tumbuh sampai sekitar satu meter persegi. Di Pematang Tanah Jawa masih ditunjukkan di mana tanah itu berada.

Desas desus bahwa Si Muha Raja menjadi raja Tanah Jawa beredar di Dolog Panribuan, di mana saudaranya menjadi raja di sana. Dia lalu berkata, "Kini saya di sini berkuasa sebagai raja atas kalian, bahwa kalian minta aku meminjamkan lopou (beranda depan) di rumahnya di Pematang Tanah Jawa untuk digunakan, dan di sana kalian

membuat *paratas* (kedudukan) di mana kalian bisa tinggal bersama pengikut kalian, ketika kalian tiba di pematang Tanah Jawa”.

Tuan Dolog Panribuan menyampaikan laporan itu kepada raja Hatahunan, leluhur Tuan Girsang dan Simpangan Bolon agar mereka membawa kerbau ke Tanah Jawa untuk dipotong di sana sebagai saksi bagi raja baru. Mereka semua pergi ke Pematang Tanah Jawa. Tuan Dolog Panribuan menangkup tangan Si Muha Raja dan berteriak: “Kalian melihat Raja kita!” Tuan Jorlang Hataran (baca: Jorlakkataran) mendudukkan adiknya (Si Muha Raja) di kursi dan mengangkatnya sebagai raja (kini masih ada adat di Tanah Jawa bahwa dalam pengukuhan penguasa, para kepala Girsang dan Simpangan Bolon harus membawa seekor kerbau). Tuan Dolog Panribuan harus membimbing raja menuju kursinya dan Tuan Jorlang Hataran menempatkan dia di atasnya. Adat masih menuliskan bahwa Tuan Dolog Panribuan memiliki *lopou* di rumah penguasa otonom dan harus ada kursi baginya. Tuan Jorlang Hataran hanya memiliki sebuah rumah yang terpisah di Pematang Tanah Jawa, seperti para kepala Girsang dan Sipangan Bolon. *Lopou* ini disebut *lopou ujung*, Rumah para kepala Girsang dan Sipangan Bolon disebut dengan *Bale Siporling*. Akan tetapi kini sudah tidak ada lagi.

Seluruh legenda ini dicatat pada *tarombo*, yang terdiri atas beberapa lembar. Hanya raja atau atas perintahnya seorang guru yang boleh membaca *tarombo* ini selanjutnya, setelah meminta nasehat *parpaneian* (*pustaha* atau ahli nujum) tentang hari yang cocok untuk itu. Tetapi tentang bagian yang membicarakan tupai, guru tidak membacanya.

Kroesen menyebutkan bahwa di sini tenda didirikan dan guru yang datang ke sana harus menyerahkan *tarombo* kepada raja, agar apabila dia menghendaknya, bisa dibaca. Kini orang bisa menulis syair. Tarombo tersimpan rapi di rumah penguasa dan dianggap sebagai pusaka.

b. Asal Mula Raja Tanah Jawa menurut P. Moolenburgh

Raja Tanah Jawa sekarang adalah Tuan Jintar. Tentang makna daerah ini (tanah Jawa) beredar legenda sbb. Seorang putra raja Jawa berangkat ke suatu daerah asing untuk mendirikan sebuah kerajaan di sana. Dia membawa serta segenggam tanah dari tanah asalnya bersama sebuah kendi (yang terbuat dari buah labu) berisi air dari sungai. Pertama-tama dia berangkat ke Minangkabau dan dari sana, didampingi dengan orang Melayu berangkat semakin ke utara. Akhirnya mereka tiba di Urat, sebuah kampung di pantai selatan semenanjung Samosir. Di sana dia meminta raja marga apa. Jawabannya berbunyi Sinaga Siurat. Kemudian juga marga saya berkaitan dan dengann demikian kami masih berkerabat, demikian kata orang Jawa itu. Saat itu dia menegaskan lebih jauh; setelah kembali mengelilingi danau dia tiba di Hataran (Hataran Jawa sekarang) di kerajaan Sitonggang dan dari sana berangkat ke ibukota raja, di mana pendampingnya orang Melayu, kembali dalam pengembaraannya (*betapa*). Setibanya di ibukota dia memerciki tanah yang dibawanya dan duduk di atasnya, memegang air kendi di tangannya. Ketika raja mendengar tentang orang asing yang datang, bersama pengiringnya pergi menemuinya dan bertanya kepadanya apa yang bisa

dia lakukan di daerahnya. Orang Jawa itu menjawab: tanah tempatku duduk adalah tanahku, air ini adalah airku. Raja yang tidak memahami berkata begitu saja: jadi pergilah kemana engkau suka, kemudian jadilah raja di tempatku. Penyelesaiannya adalah sederhana: orang Jawa itu menjadi raja dan tanah itu kemudian disebut Tanah Jawa.⁸⁴

c. Asal Mula Raja Tanah Jawa menurut Tuan Musa Sinaga⁸⁵

Hatta, maka adalah seorang bernama Tuan Hojong Hataran jang datangnja dari Pulau Djawa ke Tanah Atjeh dengan maksud hendak menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan serta untuk mengembangkan kepandaiannya pula di Pulau Sumatera.

Sesudah beberapa bulan tinggal di Tanah Atjeh, ia pun meneruskan perjalanannya arah ke Selatan. Sampaillah dia di daerah Toba (Tapanuli). Daerah Toba itu diperintahi oleh Radja Urat.

Tuan Hojong Hataran pandai membawakan dirinja terhadap seseorang maka ia pun dapat bersahabat karib dengan Radja Urat, terus sebagai orang bersaudara. Walaupun persahabatan Radja Urat dan Tuan Hojong Hataran sudah begitu akrab, tetapi tjita-tjita Tuan Hojong Hataran untuk meneruskan perjalanannya tak dapat dipengaruhi rapatnja persahabatan mereka itu. Ia tetap bertekad meneruskan perjalanannya.

Setelah beberapa bulan tinggal di Urat, ia pun minta diri untuk meneruskan perjalanannya ke Girsang Sipangan Bolon. Sebagai membuktikan keakraban persahabatan Radja Urat beserta pegawainja mengantarkan Tuan Hojong

Hataran ke Girsang Sipangan Bolon.

Di sana mereka disambut oleh Radja Girsang Sipangan Bolon. Diadakanlah pesta tamu tudjuh hari tudjuh malam. Dipesankan Radja Urat supaya Radja Girsang Sipangan Bolon menerimanja dengan sebaik-baiknja karena Tuan Hojong Hataran telah dianggapnja seperti saudaranja sendiri. Sesudah keramaian adat ini sudah selesai, maka Radja Urat pun kembali ke Toba. Maka tinggallah Tuan Hojong Hataran di Girsang Sipangan Bolon sebagai tamu di sana. Sebagaimana waktu di Urat, begitu pula halnja di Girsang Sipangan Bolon, Tuan Hojong Hataran perbuatan serta kata-katanja menarik hati ra'jat dan masjarakat sehingga ia mendjadi kesajangan dihormati orang di sana.

Setelah beberapa bulan tinggal di sana, maka niat semula untuk meneruskan perdjalanannja timbul kembali. Maksudnja itu dilahirkanja kepada Radja Girsang Sipangan Bolon. Oleh karena hadjat dari Tuan Hojong Hataran ini tak dapat dihalangi, maka dengan berat hati Radja Girsang Sipangan Bolon pun mengantarkan Tuan Hojong Hataran dengan beberapa orang pengiringnja sampai ke perbatasan Djorlang Hataran. Dari Sana Tuan Hojong Hataran berdjalan sendiri. Hutan rimba jang sunji itu dilaluinja dengan tidak gentarnja. Niatnja adalah untuk bertapa pada suatu tempat jang baik untuk memperdalam pengetahuannja.

Makad sampailah dia pada serumpun rotan jang lebat di antara sungai Bah Sigambur-gambur dengan sungai Bah Sombah Huta. Kedua sungai ini bertemu dekat di situ. Inilah jang bernama Tapian Boru Hojong. Di sana ia tinggal beberapa bulan dengan menahan makan dan minum gunan menuntut ilmu jang gaib-gaib. Iklim di sana dingin sedjuk,

sehingga dengan demikian Tuan Hojong Hataran merasa senang tinggal di sana untuk menuntut ilmu gaib dengan tjara bertapa di situ.

Pada suatu hari dalam musim kemarau, tidak turunturun hudjan, jang masa jang serupa ini amat baik buat pergi menangguk ikan (Sim. 'mandurung'), berangkatlah satu rombongan laki-laki dan perempuan, tua dan muda dari Kampung Bukit jang tidak berapa djauh dari situ, menudju ke sungai dekat pertapaan Tuan Hojong Hataran tadi.

Jang mendjadi ikutan rombongan (*pandurung*) penangguk ikan tadi ialah puteri Tuan Buhit jang bergelar "Bou Buhit Na Bolag". Puteri ini rupa dan pembawannya menunjukkan bahwa benar-benarlah ia seorang puteri jang berbangsa. Disegani dan disajangi teman-temanja. Orangnya amat sajang kepadanya. Dia anak tunggal, tidak mempunjai adik atau abang.

Di dalam mereka menangguk ikan itu, tidak ada dapat ikan jang ditjari, jang menurut biasanja di tempat itu banjak ikannya. Sehingga rombongan ini merasa ketjewa karena tidak dapat apa-apa dan sudah letih berdjalan, menangguk. Hari sudah mulai sore dan bermaksud mau kembali ke Buhit. Merekapun istirahat. Tempat istirahat ini sudah dekat benar dengan tempat pertapaan Tuan Hojong Hataran, jaitu Tapian Boru Hojong.

Seorang dari anggota rombongan itu pergi mentjari rotan untuk pengganti gagang tangguk (durung) jang rusak. Tiba-tiba laki-laki tadi terkedjut dan berdiri tak berdaja, karena dilihatnja Tuan Hojong Hataran ada di mukanja dengan kaeraan kurang tertib berpakaian (hanja bobat sadja)

J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 58-63.

dan berambut pandjang. Tuan Hojong Hataran dilihatnja tenang bertapa dan tak menghiraukan akan kedatangannya itu. Ia duduk bersila. Perawakan badannya tegap. Hal ini segera disampaikan oleh laki-laki tadi kepada Tuan Puteri Bou Buhit Na Bolag untuk mengudji kebenaran berita jang disampaikan oleh laki-laki itu, disuruhnja lagi pesuruh lain. Tuan Puteri mendapat laporan serupa, jaitu seorang laki-laki ada di rumpun rotan. Kemudian disuruh lagi utusan seorang lagi, agar laki-laki itu suka datang kepadanya untuk mentjeritakan halnja, mengapa ada di tempat itu. Usaha untuk menjuruh datang ia berhasil, karena laki-laki itu Tuan Hojong Hataran tak berani menampakkan dirinja dalam keadaan berpakaian demikian.

Hal ini dipahami oleh Tuan Puteri maka dengan ichlas diberikanjalah "suri-suri"-nja (kain tenunan Simalungun) untuk dipakai laki-laki itu. Dengan hormat dan sopan barulah Tuan Hojong Hataran berani mendekati puteri Bou Buhit na Bolag serta memberi tahu nama dan hadjat maksudnja di tempatnja. Dan dinjatakannya bila perbuatan serta pekerdjaannya menjalahi hukum adat di daerah itu, rela ia menerimanja.

Dengan mengikuti akan tutur kata dari Tuan Hojong Hataran ini, maka tuan puteri merasa terharu dan terpesona atas butir-butir kata dan gerak-gerik laki-laki itu. Hari bertambah sore. Maka oleh Tuan Puteri telah diambilnja suatu keputusan bahwa ia akan tinggal bersama Tuan Hojong Hataran di tempat itu. Dan semua rombonganja disuruhnja pulang, dan memberi kabar tentang tindakan keputusannya itu kepada orang tuanja Tuan Buhit.

Mendengar perkataan tuan puteri ini semua

rombongan ketakutan sebab tuan puteri tinggal dan mereka kembali. Tetapi sebab kata-kata dan perbuatan tuan puteri ini tidak dapat disanggah, harus dipatuhi, maka mereka pun kembali dengan hati tjemas, takut akan akibatnja.

Pesan tuan puteri itu: "Relalah ia bertjerai kepala dengan tubuh bila maksudnja itu dihalangi oleh orangtuanja, artinja tak dapat berpisah dengan Tuan Hoyong Hataran.

Sesudah rombongan tiba di Bukit dan telah diterima Tuan Buhit tentang anaknja tinggal bersama Tuan Hojong Hataran, ia pun djatuh pingsan.

Beberapa hari kemudian Tuan Buhit pun meninggal dunia. Maka berkabunglah rakjat di situ, lebih-lebih karena tuan puteri Buhit Na Bolag pun tak ada di situ lagi, maka perasaan suka tjita mereka sangat mendalam.

Sesudah tuan puteri Bou Buhit Na Bolag kawin dengan Tuan Hojong Hataran, maka djadilah tempat itu suatu kampung karena rakjat dari Buhit Na Bolag banjak jang pindah ke sana dan dari tempat-tempat lain.

Karena kebidjasanaan suami isteri memimpin penghuni kampung itu, maka djadilah Tuan Hojong Hataran kepala di tempat itu dengan didampingi puteri Bou Buhit Na Bolag. Djadilah kampung itu dalam keadaan aman, tenteram, jang diberi nama "Djorlang Hataran".

Sesudah kira-kira setahun umur negeri itu, maka keluarga itu pun dapat angerah seorang putera jang diberi nama "Naihomban". Tahun-tahun berikutja, lahir seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan jang diberi nama "Siduadua". Terakhir lahir lagi seorang laki-laki jang diberi nama: "Sihojong Madjawa Hataran". Djadi anak Tuan Hojong Hataran tiga orang laki-laki dan seorang perempuan.

Setelah anaknja jang sulung nama Naihomban dewasa, ia pun dikawinkan dengan puteri Tuan Simarimbun (Panei) dengan atjara adat besar-besaran selama tudjuh hari tudjuh malam.

Adapun akan anak jang kembar dua Siduadua kelakuannja amat menarik hati penduduk dan rupa jang manis, menarik hati setipa orang. Karena indah parah kedua anak kembar ini selalu mendjadi buah tutur kata orang banjak.

Kelakuan anak jang keempat Hojong Hataran Madjawa Hataran serupaja dengan tjita-tjita orang tuanja laki-laki, jaitu hendak merantau sadja, guna menuntut ilmu dan mentjebakan/mentjebarkan pengetahuan-pengetahuannja. Maksudja ini disampaikanja kepada ibu bapanja. Karena berat rasa hati Tuan Hojong Hataran melepas anaknja jang bungsu, paling ketjil untuk berdjalan sendiri begitu djauh dan tudjuan untuk menuntut ilmu ia pun memutuskan untuk turut mengawasi anaknja, sama-sama pergi. Tudjuan mereka ialah ke tempat matahari terbit. Dengan membawa perbekalan untuk beberapa bulan di djalan dengan menempuh hutan rimba, pada suatu hari tibalah mereka di daerah Radja Sitanggung jang djadi ibu negerinja Radja Maligas. Radja Sitanggung jang djadi kepala di daerah ini terkenal dengan kebidjaksanaannja memutuskan sesuatu persoalan dan tidak mau mangkir atas satu-satu keputusan jang sudah dikelurkan, walau apa pun akibatnja. Perintah tegas/tepat.

Di sinilah Tuan Hojong Hataran membuktikan keahliannja waktu berhadapan dengan Radja Si Tanggang.

Dari kisah di atas kita simpulkan bahwa dulunya di

Tanah Jawa itu berdiri Kerajaan Si Tonggang dari marga Sinaga yang berasal dari Kerajaan Batangiou yang masih seketurunan dengan marga Sinaga di Girsang Sipangan Bolon (Parapat Simalungun). Seiring dengan masuknya si Muharaja yang disebutkan datang dari Pulau Jawa, kerajaan beralih dari Raja Si Tonggang Sinaga kepada si Muharaja Sinaga Dadihoyong raja Tanah Jawa pertama.

Silsilah raja Tanah Jawa sejauh yang diketahui adalah:

1. Muharaja
2. Raja Naidalan Bah
3. Raja Nai Bale
4. Raja Namaringis
5. Raja Horatimbul
6. Raja Horpanaluan
7. Raja Jintar
8. Raja Sangmajadi (menggantikan abangnya Raja Jintar yang dibuang ke Medan)
9. Raja Kaliamsyah (sampai revolusi sosial)

3. Silou



Gambar 7 : Raja Dolog Silou Tuan Tanjarnahei Purba Tambak Beserta para pembesar kerajaannya, 1930 (Sumber: kitlv.nl)

Silou adalah kerajaan yang muncul setelah kekuasaan Nagur semakin surut dan berangsur-angsur kekuasaannya berpindah ke anakboru-nya. Raja Silou diketahui bermarga Purba dan berkedudukan di Silou Buntu (Kecamatan Raya sekarang ini). Kerajaan ini kemudian pecah menjadi dua yaitu Kerajaan Panei dan Dolog Silou disebabkan perebutan kekuasaan di antara putera raja Silou yang merasa berhak atas kedudukan sebagai raja Silou. Kisah berikut ini dikutip oleh Tideman dari naskah kronik Kerajaan Silou bernama Partingian Bandar Hanopan yang masih disimpan ahliwarisnya di kampung Bandar Hanopan Kecamatan Silou Kahean Simalungun.

Pada masa lalu di Tambak Bawang (kini bawahan Dolog Silou) hidup Jigo, putra kepala di sana sebagai petani. Pada suatu hari dia bersama sumpitnya menangkap seekor burung (semacam merpati) tetapi tidak mati. Hewan ini juga terbang ketika dia akan mengangkapnya. Akhirnya Jigo yang mengejar burung itu tiba di Siloubuttu pada malam hari, ibukota kerajaan Silou di dekat Jandi Mauli. Malam itu, Jigo tidur di hutan Siloubuttu dalam gubuk milik penebang kayu. Keesokan harinya, dia duduk di depan gubuk itu dan membuat panah sumpitnya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang berteriak: "*Dokdok ma! Urat ni padang silah on!*" "Cabutlah akar rumput, atau padang silah, di lahan ini dan engkau akan melihat Putri Ijo".

Setelah beberapa kali mendengar suara yang sama, Jigo mengambil tanaman rumput dari tanah itu dan dengan penuh keheranan melihat wajah putri yang cantik. Jigo bertanya dari mana ia datang dan siapa orang tuanya, yang dijawabnya, "Saya bukan manusia, jadi tidak perlu kamu minta nama orangtua saya. Panggil saja saya Putri Ijo. Katakan kepada orang lain bahwa aku adalah saudaramu, sehingga aku akan menjadikanmu raja besar di daerah ini".

Mendadak muncul pencari rotan, warga Raja Nagur di dekat gubug itu. Kedua pemuda itu kagum akan kecantikannya dan menduga bahwa dia bukan orang melainkan dewa (*naibata*). Dia mengisahkan ini di kampungnya dan kini banyak orang berdatangan ke hutan Siloubuttu untuk melihatnya. Berita itu meluas sampai hingga mencapai Deli dan Sultan dari kerajaan ini tertarik, bahkan mengirim beberapa hulubalang ke Siloubuttu untuk membuktikan hal ini. Mereka melihat Putri Ijo dan mengakui

bahwa mereka sangat kagum akan kecantikannya. Menjawab pertanyaan wanita itu isteri siapa, Jigo menjawab bahwa Putri Ijo adalah saudaranya dan dia belum menikah. Saat itu utusan ini mengulangnya: "Namanya terkenal di mana-mana. Oleh karenanya, kami menyampaikan permintaan Sultan Deli untuk menjadikan Putri Ijo permaisuri". Jigo menjawab dia merasa tidak keberatan bila mereka menyetujui. Saat itu Putri Ijo menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya, "Kami adalah orang miskin dan hidup terlantar di hutan; apakah cocok bila aku menjadi isteri Sultan? Apabila Sultan memandang layak maka aku akan menyertainya. Akan tetapi aku meminta agar Sultan menyediakan sejumlah orang untuk menemani Jigo agar dia tidak sendirian di sini; selain itu saya meminta jagung dan padi yang diperlukan Jigo agar dapat diolah dan dapat ditanam di lahannya. Juga saya meminta agar kebutuhan hidup pengawal Jigo diperhatikan, sampai mereka mendapatkan panen yang cukup untuk hidup. Dan akhirnya, saya masih meminta agar Sultan, ketika aku menjadi isterinya, akan menjawab kepada mereka yang bertanya siapa aku, bahwa aku adalah saudaranya".

Para hulubalang kembali dengan jawaban ini ke Deli dan Sultan berjanji akan menyetujui semua ini. Sultan kembali mengutus mereka melamar Putri Ijo dan membawanya ke Deli agar menjadi permaisurinya. Jigo mendapatkan 12 pengikut dan padi serta Jagung untuk menanami tanahnya. Putri Ijo mengikuti utusan itu dan kemudian menjadi isteri Sultan Deli. Sementara itu, tanaman di ladang Jigo tumbuh sangat subur. Banyak orang dari Nagur perlahan-lahan bergabung dengannya dan akhirnya dia menikahi seorang wanita dari daerah ini.

Tetapi Putri Ijo tidak tinggal di Deli, karena pada suatu hari Sultan Aceh mengunjungi daerah ini, melihat nyonya muda yang cantik dan segera bertanya siapa dia. Sultan Deli menjawab (sesuai janjinya) bahwa dia adalah saudaranya; kemudian raja Aceh bermaksud melamarnya. Tanpa sepengetahuan Sultan Deli Putri Ijo menerimanya asalkan sultan itu mau menjadikan saudaranya menjadi raja karena, "Aku hanya minta tidak mau dinaikkan dalam status itu; juga saudaraku harus mengikutinya".

Ketika Sultan Aceh akan membawa Putri Ijo untuk dijadikan isterinya, Sultan Deli berusaha merintanginya. Akibatnya terjadi konflik, yang menyebabkan Sultan Deli mengalami kekalahan (Kroesen menyampaikan, "Setelah sekitar tahun 1615 atau 1620 Raja Mahkota Alam Alauddin S. Johan, Sultan Aceh, yang berkunjung tertarik pada kecantikan Putri Hijau dari Deli, Deli diserang dan direbutnya, yang menurut beberapa saksi putri tewas dalam pertempuran, akan tetapi versi lain Putri Hijau jatuh ke tangannya. Selanjutnya, dia berkata bahwa dia berlayar di sepanjang Pantai Timur Sumatera, sampai mencapai muara sungai yang lebar dan sampai Telok Pie, di samping muara dan Tanjung Balei". Tanpa ragu-ragu bersama Putri Hijau sama seperti Putri Ijo yang diambil dari legenda tentang kerajaan Silou). Setibanya di Aceh, Putri Ijo mendesak dipenuhinya janji menjadikan Jigo sebagai raja dan memang pasangan itu pergi ke Siloubuttu untuk merayakan upacara ini.

Sangat terlambat pagi itu ketika Sultan Aceh tiba di Siloubuttu, sehingga sinar matahari membutakan mata (Silou dalam bahasa Karo dan Melayu) dan karena kampung

itu terletak di atas bukit, tanah ini disebut Siloubuttu oleh Sultan Aceh. Kampung Siloubuttu yang kini tidak lagi ada, terletak pada ketinggian 50-60 M di atas lingkungan itu. Ada jalan membentang ke timur sepanjang celah bukit sempit di mana (menurut kisah orang) dulu terdapat sebuah patung batu gajah. Patung itu (kata orang) seluruhnya dicat putih, yang dibuat orang di Bongguron (Nagori sekarang). Orang menyebut patung ini "Gajah Putih". Semua orang melihatnya dari jauh dan menganggap bahwa ini akan menjadi seekor gajah hidup. Dari Nagur, Toba, Cingkes (tanah Karo) dan wilayah lain mereka berduyun-duyun berangkat ke sana untuk melihat gajah.

Tukang cerita menambahkan bahwa sejak saat ini imigrasi orang Toba di satu pihak dan orang Karo di pihak lain dimulai dan bahasa penduduk yang terdiri atas kedua unsur ini menjadi bahasa campuran Karo dan Toba. Penduduk kini diperintah oleh raja Silou Buttu untuk menerima dan menyambut banyak orang yang datang untuk melihat Gajah Putih dengan ramah. Hal ini dilakukan selama beberapa tahun, tetapi lama-lama perintah ini terlalu memberatkan bagi penduduk, sehingga orang mengajukan keberatan yang mengakibatkan bahwa raja menutup patung gajah Putih dengan tanah, sehingga tidak lagi tampak. Tempat itu kini masih disebut Buntu Parhapuran yang dapat diterjemahkan menjadi "bukit kapur".

Siloubuttu menjadi tempat kunjungan. Dari Pamatang Raya orang harus menempuh jalan sempit sepanjang 9 KM menuju kampung Jandi Mauli yang dibangun di Bukit. Dari tempat ini terletak Siloubuttu yang terpisah hanya beberapa ratus meter. Kemudian orang menempuh jalan lewat tempat

penggembalaan hijau (sompalan) dengan bambu dan tanaman lain. Segera orang menaiki bukit itu. Jalan semakin sempit dan tanjakan semakin curam. Sementara lereng bukit meskipun ditumbuhi dengan pepohonan lebat dan belukar, berdiri tegak lurus dari bawah. Ini hanya mungkin dipanjati satu persatu. Mendadak orang terbentur pada sebuah tembok karang. Ini adalah batu Parhapuran yang terletak di *Buntu Parhapuran* yang disebutkan terdahulu. Selanjutnya, ditemukan makam raja Silou. Semuanya terletak pada pelebaran punggung bukit dan menimbulkan kesan redup dengan ditumbuhi berbagai jenis tanaman paku. Di tengahnya orang melihat sebuah monumen batu setinggi setengah meter, seorang kesatria naik kuda atau sejenis hewan lain. Ini menjadi pintu tempat penyimpanan tulang-tulang leluhur. Orang tidak merasa keberatan atas kunjungan saya ke sana (biasanya setelah berdoa dan memberikan sesaji) untuk membuka batu. Tulang-tulang putih saat itu tampak terlihat. Sebuah batu di mana tulang-tulang almarhum disimpan disebut *gundaba*. Rumah kecil atau bangunan kayu dan bambu disebut *jerat*. Dengan kata ini orang menunjukkan tempat di mana makam dapat dibuka.

Selanjutnya, orang mencapai dataran luas di atas bukit, di mana sebuah kampung besar berdiri. Di tengahnya ada rumah bolon (rumah raja); di sekitarnya ada rumah-rumah lain. Selain Buntu Parhapuran masih ada tiga jalan masuk lain yang sempit, curam dan sulit dimasuki seperti yang pertama. Di salah satu jalan ini (seperti di sisi utara) juga ditemui sebuah karang; Karang ini disebut Batu Gajah karena orang di sini menduga dapat menemukan patung gajah

(seperti di Batu Parhapuran). Tempat di mana Batu Gajah berada sulit dicapai, setidaknya bagi manusia, yang merasa pusing, karena jalan kecil membentang lewat deret bukit yang curam dengan dinding tegak lurus di kedua sisinya, lebih sedikit tumbuhan daripada *Buntu Parhapuran*. Jalan ini mencapai tempat kampung saat itu di Buntu Panjomuran, di tempat warga kampung dulu menjemur padi di bawah sinar matahari. Pada sisi lain, istilah *Buntu Pandodingan*, dari ketinggian tempat orang melantunkan lagu dan kembali ke tempat lain, *Buntu Partonunan* merupakan tempat para gadis muda menenun kainnya untuk dipasang di tiang layar.

Tempat ini di masa lalu merupakan benteng yang hampir tidak terkalahkan. Di sini tinggal raja Silou yang daerahnya membentang di sejumlah kampung dan pemukiman, di satu sisi sampai danau Toba dan di sisi lain sampai Padang Bedagai di timur laut dan Panei di timur. Melalui penurunan, kerajaan ini akhirnya terpecah menjadi beberapa bagian (Dolog Silou, Purba dan Silimakuta), sementara raja yang berkedudukan di Silou dulunya juga merupakan raja yang kuat.

Belakangan Kerajaan Silou ini pecah akibat pertikaian sesama putera raja Silou yang melahirkan Kerajaan Dologsilou dan Kerajaan Panei. Dologsilou berkedudukan di Pamatang Dologsilou dan Panei berkedudukan di Pamatang Panei.

a. Dolog Silou

Di salah satu kampung yang dibangun oleh raja Silou, Silou Nabolak, Tuan (kepala) telah mengambil seorang marga Purba dari Tulang Bawang di rumahnya dan karena sifat-sifatnya yang dianggap cocok dengan "jagoan", Silou

Nabolak diangkat menjadi panglima. Kini Tuan Silou Nabolak pada saat yang sama menikah dan memiliki keturunan. Anak Jagoraha ini tumbuh semakin kuat dan pandai daripada Tuan Silou Nabolak sendiri. Karenanya, isterinya menukarkan kedua anak itu. Jagoraha menyatakan setuju tetapi isterinya menduga bahwa hanya akan menguntungkan anaknya bila dianggap sebagai putra raja dan ayahnya dalam hal ini hanya mengikutinya saja. Akan tetapi ketika putra raja asli yang muncul bagi anak Jagoraha, berusia 7 atau 8 tahun, dia terbukti memiliki sifat berkuasa. Semua anak sebayanya mengikuti perintahnya tanpa membantah. Ketika Tuan Silou Nabolak melihat bahwa putra Jagoraha (yang menjadi putranya) adalah anak pertama, kebenciannya muncul akibat keberanian yang mengakibatkan kerenggangan antara dia dan Jagoraha.

Dengan kematian Jagoraha, putranya menggantikan dia. Tokoh ini menaklukkan banyak kampung kerajaan Nagur. Akhirnya, Tuan Silou Nabolak mendirikan kampung Silou Dunia, yang mengangkat Jagoraha menjadi kepala. Akan tetapi, dia lebih dihormati daripada Tuan Silou Nabolak sendiri. Jagoraha bekerjasama dengan seorang pande besi membuat sejumlah senjata, seperti: pisau, tombak dan pedang. Di antara tenaga ahli, yang mengherankan adalah besi untuk membuat senjata, semakin lama semakin besar, sehingga pande besi yang sibuk menggarapnya bermaksud menggantinya dengan yang lain. Tetapi Jagoraha pergi kepadanya dan membawanya pulang, meskipun belum selesai (pisau yang disebut Piso Niat termasuk pusaka Dolog Silou sampai sekarang).

Setelah itu Jagoraha menikah dengan putri Sibayak

dari Jambur Lige (kini adalah kampung dari desa Barus Jahe) daerah Karo dan setelah kembali ke daerahnya disebut Puang Bolon (permaisuri raja). Akan tetapi isterinya merasa keberatan untuk diangkat statusnya menjadi raja karena orang tuanya bukan dari keturunan raja. Oleh karenanya, Jagoraha mengirim utusan Si Pisangbuli kepada raja Aceh (di sini yang dimaksudkan sebagai utusan ketika Deli selama dominasi Aceh atas daerah itu, karenanya kami menyebutnya Tengku) untuk meminta mereka mengangkat dia menjadi raja. Mertuanya memberinya perintah mengadakan sebuah pesta besar di rumahnya untuk menyambut Tengku. Pada perjalanannya ke sana Tengku singgah ke Barus Jahe. Sibayak daerah ini membaritahukannya mengapa dia tidak menyampaikan kedatangannya, karena dia akan menemui orang lain, seperti yang diperintahkan oleh adat. Tengku menjawab bahwa dia diminta oleh Si Pisangbuli untuk mengangkat Sibayak di Jambur Lige menjadi raja. Sibayak dari Barus Jahe bertanya "Ketika adikku Sibayak dari Jambur Lige menjadi raja, di mana wilayahnya, di mana kampung dan bangsanya?". Ketika Tengku mengetahui situasi ini dan menyatakan bahwa orang-orang akan mengangkat dia menjadiraja, yang tidak berhak, dia sangat marah dan menolak mengangkat Sibayak dari posisi orang kecil menjadi raja, dan dia langsung kembali ke rumahnya. Jagoraha dengan sia-sia menanti di Jambur Lige dan akhirnya dengan malu kembali ke kampungnya. Dia menyampaikan berbagai hal dengan tujuan menemukan alasan mengapa pengangkatan menjadi raja tidak terjadi. Peristiwa ini didengar oleh Tengku; dia memanggil Jagoraha untuk menjawab, tetapi dia menghindarkan diri dari pertanyaan ini.

Segera terjadi perang antara Tengku dan Jagoraha. Tuan Silou Nabolak, agar bisa membantu musuh besar Jagoraha, menunjukkan sebuah kampung di mana orang-orang Aceh bisa tinggal yang disebut kampung Nagori Asih (Aceh). Kampung ini kini berada di bawah Parbapaan Nagori Dolog. Jagoraha tidak berani melawan Tengku Aceh, oleh karenanya dia pindah dari Silou Dunia ke Panei. Di sana dia menunjukkan jasa-jasanya dan tampil sebagai panglima pasukan di Panei; setelah itu dia berbuat hal yang sama di Siantar dan Tanah Jawa. Kemudian ketiga kerajaan itu memihak kepadanya apabila terjadi peperangan. Raja-raja itu menawarinya sejumlah besar pasukan, tetapi dia hanya meminta seseorang yang selanjutnya diminta untuk mengikutinya. Misalnya, dari Panei muncul Partanja Batu, seorang yang bisa memecah batu dengan kekuatan sama, dengan sebuah meriam akan mampu mematahkan rantai. Dari Siantar muncul Ompu Birong, orang kebal dan dari Tanah Jawa Guru Baresa, yang sangat cakap seperti guru atau datu (nujum).

Makam tiga warga ini oleh raja Dolog Silou masih dianggap sebagai makam suci (keramat). Dengan ketiga pengikutnya, Jagoraha kini pergi menemui Sultan Deli, yang menerima keluhan mengenai apa yang terjadi padanya. Sultan memberinya emas, senjata dan mesiu agar dia bisa menghadapi musuh lamanya Tuan Silou Nabolak. Untuk emas dia tukar dengan pakaian putih, merah, hitam, dan warna lain di pasar Tiga Sibuarbuar, dekat Dolog Singgalang. Ketika kembali, untuk mempersiapkan pertempuran, dia melihat beberapa batu di aliran gunung Sahang Nabolon, yang berkilauan dan tidak mungkin digosok oleh tangan

manusia. Dia mencoba mengambilnya tetapi gagal karena panas. Pada saat itu muncul seseorang dari Purba Tua (kini Dolog Silou), yang berbicara mengenai batu itu. Dia menyampaikan bahwa semua itu amat berguna bagi pemilikinya, karena kekuatan daya alaminya. Batu itu hanya bisa disimpan dalam kain putih dengan disertai minuman tertentu yang dibuat dalam mangkuk putih, terdiri atas air dan getah limau puter (sejenis jeruk). Selanjutnya Jagoraha bertanya kepadanya apa makna batu itu. Jawabnya adalah bahwa batu itu memberikan *Si Malang Ate* (keberanian) dan *sarang timah* (kekebalan terhadap senjata lawan) pada pemilikinya. Disebutkan kemudian bahwa semua itu harus disimpan dalam bambu. Jagoraha pergi untuk mencari bambu tetapi hanya menemukan satu di kursi bambu yang dirusak sehari sebelumnya oleh gajah. Kini batu itu diambil dari sungai dengan kain putih dan dimasukkan dalam bambu. Manusia dari Purba Tua itu memberikannya kepada Jagoraha, sementara mereka saling berbicara dengan penuh persahabatan (bambu dengan batu itu masih termasuk pusaka Dolog Silou dan apabila orang muncul dengan membawa batu itu, masih ada orang dari Purba Tua dengan kain putih yang menjadi perantaranya).

Dengan memiliki benda yang sangat berguna baginya ini, Jagoraha kini bersama tiga pengikutnya harus menghadang musuh. Mengingat jumlahnya masih sedikit, kal itu diterapkan. Mereka pergi ke bukit Dalan Pangelukan (jalan dengan tikungan), yang terletak dengan jarak yang sama dari Silou Nabolak. Di sini mereka berganti pakaian yang warnanya berbeda (yang dibeli di pasar Sibuar-buar) dan menjelang petang mereka bergerak di bawah umpatan

dan ledakan tembakan yang muncul dengan potongan kayu di pohon, melalui tikungan jalan itu, sehingga orang bisa melihat dari Silou Nabolak. Ketika melewati tikungan mereka berganti pakaian dengan warna lain dan kembali bergerak ke arah yang sama di tempat ini. Jadi orang-orang di Silou Nabolak menduga bahwa ada banyak musuh yang sedang bergerak. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti mereka. Mereka lari bersama Tuan Silou Nabolak dan Jagoraha dengan cara ini tanpa perlawanan atau pukulan mampu menduduki kampung Silou Nabolak. Para pelarian setelah singgah di berbagai tempat, akhirnya tiba di Mala Sori (nama *Mala Sori* mengandung arti kemenangan perang; *Sri* adalah bahasa Melayu).

Lama setelah itu raja daerah Raya dalam perjalanan perangnya menemui Jagoraha dan tiga pengawalnya, ketika mereka sedang duduk beristirahat di Saran Badimbo (tempat peristirahatan) dan bernyanyi. Warga Raya sebaliknya tidak menunjukkan luka. Namun, mereka tidak bertahan dan tetap duduk tenang, tidak memperhatikan senjata musuh. Raja daerah Raya sangat heran, kemudian menjalin persahabatan dengan Jagoraha dan mengundangnya. Kemudian orang ini menikah dengan *boru* (putri) Raja.

Di Raya, Jagoraha diangkat menjadi panglima tertinggi. Atas perintah raja, dia menyerang Sinaman dan Sipoldas (Panei), menaklukkan tempat-tempat ini, mereka yang merampok kerbau mengembalikannya kepada raja. Dia tidak membawa ternak ini ke Dolog Silouu, tetapi menyerahkannya kepada warga Raya. Dia akan membayar \$6 tiap hewan untuk perawatannya dan sepakat dengan raja bahwa ketika seseorang dari keturunannya akan menikahi

putri raja, mas kawinnya akan dihitung sebanyak kelipatan dollar menurut jumlah kerbau, yang dijadikan mas kawinnya (apabila kini masih ada seseorang dari keturunan Tuhan Dolog Silou menikah dengan anak Raja dan maskawinnya adalah 15 kerbau, maka dia hanya akan membayar 15 x 6 dolar). Jagoraha kembali bersama pasangannya.

Mereka melahirkan seorang putera Nai Horsik yang menggantikannya dan kemudian pindah ke Partuakan, di mana seorang putra dari Nai Horsik lahir, yang disebut Maralam. Di dekat rumahnya sebuah kampung yang terletak di bukit Sampang Buahni, yang dikenal tidak tertembuskan ketika musuh mendekat. Hanya sebuah jalan saja yang mengarah ke sana, sementara kampung yang memiliki luas sekitar 4 hektar itu dibatasi dengan karang yang tinggi. Di sana hampir setiap malam orang memukul gondrang (jenis musik yang disebut manggual), sehingga Tuan Maralam tidak bisa tidur. Karenanya dia memutuskan untuk menyerang Sampang Buahni. Dia meninggalkan rajutan rotan. Ini membantunya dalam mengatasi permasalahan tembok dusun itu. Tuan Maralam dan kelompoknya memanjat dan dengan cara ini secara cepat menakuti penduduk kampung yang diduga tidak jahat. Tuan Maralam menaklukkan kampung dan sejak saat itu disebut Tuan Bedar Maralam (bedar adalah sejenis domba). Tuan Bedar Maralam menaklukkan berbagai kampung Nagur dan menaklukkan Partibi Sibnomba, yang dipimpin oleh Si Ganjang Kateas (kaki panjang). PISAUNYA (suruk sekung) direbut dalam pertarungan itu dan disimpan di antara pusaka Dolog Silou (masih ada). Demikianlah gambaran kemunculan kerajaan Dolog Silou.

Raja Dologsilou terakhir Tuan Bandaralam menyusun

silsilah raja-raja Dolog Silou berikut ini:

1. Pangultop-ultop
2. Pangulu Tambak Bawang
3. Tuan Sindarlela
4. Tuan Timbangan Raja
5. Raja Rubun
6. Tuan Bedar Maralam
7. Tuan Rajomin
8. Tuan Moraijo
9. Tuan Taring
10. Tuan Lurni
11. Tuan Tanjarmahei
12. Tuan Ragaim
13. Tuan Bandaralam
14. Tuan Tandjargaim

4. Panei

Keturunan raja Panei menurut dongeng dari Suha Nabolak, sebuah kampung yang didirikan oleh raja Silou, muncul di sekitar Tiga Runggu (di jalan Pematang Raya – Saribu Dolog yang terletak KM 180). Tuhan Suha Nabolak memiliki dua orang anak: yang sulung adalah petani, yang muda setiap pagi pergi untuk mengambil tuak dan dibawa pulang, kemudian pergi berburu. Karena biasanya dia pulang terlambat, saudaranya makan dan minum tuak itu lebih dahulu, dan hanya meninggalkan sisa baginya. Hal ini membuat marah adiknya, yang akhirnya menyesalkan kakaknya yang menyebabkan dia akan memukulnya. Kakaknya lari meninggalkan rumah dan bersembunyi di hutan. Setelah beberapa saat dia memutuskan untuk

meninggalkan Suha Nabolak selamanya. Akan tetapi karena ayahnya memiliki kitab sihir (*parpaneian*), di mana orang bisa mengetahui kapan saat yang benar bagi tindakan tertentu, dia pergi ke sana lebih dahulu, membawa serta buku itu dan menempuh arah ke timur sampai tiba di kampung Dusun Raja Nagur. Kampung ini sekarang terletak di sekitar Pematang Panei.

Selain Tideman, kita mendapat informasi mengenai asal-usul berdirinya Kerajaan Panei dari naskah *Partingkian Bandar Hanopan* dan folklore berjudul "Tuan Suha Bolag". Menurut sumber ini, asal usul raja Panei berawal dari kisah pertikaian anak raja Silou di Silou Buntu yang berebut tahta kerajaan yang pangkal persoalannya bermula dari hal sisa-sisa minuman tradisional tuak yang dalam bahasa Simalungun disebut "*suha-suha*", artinya "sisa-sisa minuman tuak/aren". Dari sini bermula marga Purba Sidasuha maksudnya, "orang yang dijuluki sebagai peminum *suha-suha* (sisa-sisa tuak). Munculnya julukan ini pertama kali di Silau Buttu (suatu kampung di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun sekarang). Kisahnya berawal dari pertengkaran dari dua orang putera raja Silau yang bersaudara kandung. Menurut kisah, Raja Silau bermarga Purba Tambak mempunyai dua orang putera yang masing-masing berbeda tabiat dan bakatnya. Salah seorang di antaranya adalah petualang yang pekerjaannya sehari-hari "*mardagang*" (mengembara) dan berjudi. Seorang lagi lebih berminat sebagai petani yang rajin. Pekerjaannya sehari-hari hanya mengurus tanamannya dan pekerjaan sambilannya sehabis berkebun adalah "*maragad*" (menggambil tuak dari pohon enau).

Pada suatu hari anak yang sehari-hari menyadap

tuak ini marah karena saudaranya yang penjudi itu telah menghabiskan tuaknya sehabis pulang berjudi. Pecahlah perkelahian di antara mereka. Saudaranya yang penjudi mengejek si petani dengan ucapan, *"ai suha-suha ni bagod in do talup inumonmu, tandani ho silojaloja irumah bolon on!"* (Artinya: "Memang *"suha-suha bagod"* (sisa tuak) itu sangat cocok untuk minumanmu, pantas buatmu selaku orang suruhan di istana ini"). Mendengar ucapan yang merendahkan itu, dia pun bangkit amrahnya dan balik memukul. Karena terdesak si petani anak raja Silou itu menyelamatkan diri dari kampung ayahnya di Silou Buttu menuju ke daerah Tigarunggu (Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun sekarang). Tetapi dikejar saudaranya yang penjudi itu sampai ke Malasori, kampung kediaman adik perempuannya di Malasori. Bou ini kemudian menyembunyikan si petani itu di bawah *"palakka pangulgasan"* (tempat merendam benang tenunan), dan sang bou dengan tenang duduk di atasnya melanjutkan pekerjaannya bertenun.

Akhirnya tibalah si penjudi itu di Malasori dan menanyakan apakah Bou melihat si petani? Oleh Bou Tambak ditunjukkan arah yang lain, sehingga selamatlah si petani yang disembunyikannya di bawah palakka itu sementara Bou duduk di atasnya menenun. Si petani pun selamat dan sebelum pergi, disumpahkannya kepada adiknya (Bou Tambak) bahwa ia sampai keturunannya akan mengingat jasa adiknya itu dan akan menyayangi *"botou"* (saudara perempuan) dan *"boruni"* (anak perempuan/pihak yang memperisteri adik perempuannya). Demikianlah menurut kisah sehingga keturunan Purba Sidasuha sangat sayang kepada *"boru"* atau *"botou"*-nya.

Dengan sahabat-sahabat setianya yang menyertai pelariannya itu—*pustaha panei bolon* milik ayahnya Raja Silau juga turut dibawa lari—ia pun sampailah di daerah sekitar Tigarunggu dan membangun perkampungan di sana. Dinamailah kampung itu “Huta Suha Bolag” mengingat riwayat pelariannya itu, marganya pun ia robah, sehingga bukan lagi Purba Tambak, tetapi berubah menjadi Purba Sidasuha atau Purba Dasuha. Dengan pertolongan sahabat-sahabatnya, ia pun mengangkat dirinya menjadi yang dipertuan di tempat itu, karena daerah itu masih dalam wilayah kekuasaan ayahnya Raja Silau. Di kemudian hari, ayahnya Raja Silau berperang dengan saudaranya Raja Silau Bolag, karena terdesak Raja Silau melarikan diri ke tempat anaknya Tuan Suha Bolag meminta perlindungan, tetapi karena pasukan Raja Silau Bolag lebih kuat, pertahanan Raja Silau berhasil dihancurkan di Suha Bolag, dan Raja Silau pun tewas bersama panglima-panglimanya Pisang Buil, Sibayak Parbosi dan Raja Hanopa. Sehabis perang, si penjudi yang gagal membunuh si petani itu ditawan di Suha Bolag, tetapi dapat meloloskan dirinya dari tutupan, ia melarikan diri bersama pasukannya ke daerah Bangun Purba sekarang ini dan mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Rubun yang daerah kekuasaannya berbatas dengan Bah Karei (Sungai Ular)—Rih Sigom dan Sibaganding. Keturunannya kelak mendirikan Kerajaan Dolog Silou dengan memakai marga Purba Tambak Lombang.⁸⁸

Selepas perang saudara, Tuan Suha Bolag pergi ke Kerajaan Siantar dan kawin dengan tuan puteri raja Siantar (Bou Siattar) marga Damanik yang turun-temurun menjadi permaisuri di Kerajaan Panei. Dengan bantuan

mertuanya Raja Siantar marga Damanik, Tuan Suha Bolag diangkat menjadi raja di daerah bekas kekuasaan Raja Onggou Sipoldas marga Saragih. Kisahnya, Raja Onggou Sipoldas selaku salah satu dari Raja Maroppat (Siantar, Onggou Sipoldas, Tanoh Djawa dan Silau) tidak percaya dengan kesaktian pusaka Kerajaan Silau yakni *Pustaha Panei Bolon*⁸⁹ (kitab kuno dari kulit kayu yang tulisannya hanya dapat dibaca di tempat gelap di mana tulisan di kitab itu memancarkan sinar seperti seekor naga, sehingga dapat diramalkan nujuman mengenai hal-hal yang akan terjadi). Raja Onggou Sipoldas takabur dengan ucapannya sendiri, sehingga dalam pertaruhannya dengan Raja Siantar, ia kalah dan terpaksa memberikan kerajaannya kepada Tuan Suha Bolag, tetapi Tuan Suha Bolag tidak mau dinobatkan di tahta Raja Onggou Sipoldas, melainkan di atas Pustaha Panei Bolon, demikianlah menurut kisah, kerajaannya dinamakan Kerajaan Panei. Ibukotanya ditentukan di daerah Pamatang Panei (sekitar 8 kilometer dari Pematang Siantar).

Setelah menikahi puteri Raja Siantar boru Damanik yang dijadikannya permaisurinya turun temurun (*puang bolon*), diapungiatmemperluaswilayahnya. Diakenaklukkan dusun Sapala Toehan yang kini disebut Pamatang Panei. Konon kekuatan kekuatan gaib *parpaneian* dan ilmu yang diperolehnya dari ayahnya Raja Silou membuat dia kuat dan berhasil meluaskan daerahnya. Atas pertolongan pusaka kerajaan ayahnya Pustaha Panei Bolon dinamailah kerajaannya Panei dan ibukotanya Pamatang Panei. Tradisi di Panei, setiap raja yang akan dinobatkan harus dikukuhkan dengan ritual adat *manrajahon* duduk di atas *parpaneian* yang merupakan salah satu pusaka raja Panei.

Untuk mengatur pemerintahannya, para pembantu dan sahabatnya diangkatnya menjadi wakilnya di daerah yang dikuasainya itu. Tideman mencatat bahwa di ibukota Panei Pamatang Panei, diangkat tiga orang bangsawan:

1. Orang Kaya dari marga Purba Girsang, sampai sekarang masih ada dan diwakili oleh Tuan Dolog Batu Nanggar, salah seorang *parbapaan* yang dulu menjadi vazal Panei.
2. Jagoraha atau panglima pasukan, kini tidak lagi ada, tetapi jabatan ini diisi oleh seorang dari marga Purba Tambun Saribu yang diwakili oleh Tuan Simarimbun, *parbapaan* Panei.
3. Tuan Suhi dari marga Purba Sidadolog yang diangkat pada jabatan ini oleh Tuan Sinaman, yang juga salah seorang *parbapaan* Panei.

Raja pertama Panei menurunkan seorang putra yang pincang bernama Marsitajuri, "yang salah satu kakinya lebih panjang dari yang lain". Karena dia harus menaiki kuda, orang menyebutnya *Parhuda Sitajur*. Dia menaklukkan berbagai kampung, termasuk dusun Siantar, *urung-urung* Sidadolog, dan kerajaan Sapalatuhan (sekarang Panei hulu). Di sana dia membangun sejumlah kampung. Parhuda Sitajur selalu memperluas kekuasaannya dan orang takut karena "hantu Panei" yaitu roh yang jahat. Sekarang orang masih mengenal sumpah bahwa hantu ini adalah hantu yang paling jahat.⁹⁰

Daerah kekuasaannya pada awalnya hanya kecil saja berangsur-angsur makin meluas, berbatas di sebelah selatan mulai dari tepi pantai Tigaras sampai ke sebelah utara di pantai selat Malaka yaitu Indrapura sekarang ini; di

sebelah barat dengan daerah Suha Bolag (Kecamatan Purba sekarang) sampai ke perbatasan dengan daerah Silampuyang (Kerajaan Siantar). Raja Panei kedua dinamakan *Parhuda Sitajur* atau *Hantu Panei* yang terkenal sakti mandraguna (ia dapat berperang dengan berkuda tanpa dapat dilihat musuh). Pada zamannya daerah Kerajaan Panei sangat disegani di Sumatera Timur, dan pengaruhnya sampai ke Asahan (Buttu Panei). Keturunannya banyak yang merantau ke daerah sekitarnya, ada yang sampai ke Sialtong Serdang dan diangkat menjadi yang dipertuan. Daerah itu sebelum berdiri kesultanan Serdang adalah daerah kekuasaan Kerajaan Silau di Simalungun yang daerahnya mencakup Bangun Purba sampai ke Lubuk Pakam.

Di Purba, keturunan raja Panei yang mengontrol daerah Purba yaitu Tuan Simalobong Purba Dasuha dikalahkan oleh seorang pengembara dari Tungtung Batu (Pakpak Dairi) dalam adu sumpah (*marbija*). Tuan Simalobong bersama pengiringnya meninggalkan istana Pamatang Purba pergi ke Purba Saribu dan sebagian ke Haranggaol (Kecamatan Haranggaol Horisan sekarang). Si pengembara yang bernama Raendan "*marbulawan*" dengan Tuan Simalobong dan mengakui Tuan Simalobong sebagai Raja Nagodang Purba. Ia juga memakai marga yang sama dengan Tuan Simalobong tetapi dengan mengingat asalnya dari Pakpak maka marganya disebutnya Purba Pakpak.

Sementara raja Panei sendiri selama enam generasi masih tetap tinggal di Pamatang Panei, tetapi pada generasi ketujuh terjadi pertikaian di Pamatang Panei yang mengakibatkan perginya salah seorang putera raja Panei bersama pengiringnya dan Puang Bolon (permaisuri raja)

ke daerah kekuasaan Kerajaan Panei yaitu daerah Baja Linggei (Sipispis) sekarang kira-kira tahun 1550. Pada abad XIX daerah ini diklaim sultan Deli menjadi daerah takluknya dalam lingkup wilayah Kerajaan Padang Tebingtinggi. Dari Bajalinggei, salah seorang saudara (*sanina*) tuan Baja Linggei yang lain ditugaskan oleh Raja Panei pindah ke Raya dan menjabat sebagai Guru Raya bersamaan dengan dijemputnya tuan puteri Panei yang menjadi permaisuri (puang bolon) di Raya sekitar tahun 1600 (abad XVII).

Keturunan raja Panei yang lain yang adalah tuan Sinaman bermarga Purba Sidadolog dan adiknya Tuan Rajaihuta bermarga Purba Sidagambir. Dengan demikian keturunan langsung dari garis marga induk Purba Tambak adalah: Purba Tambak (Silau Buttu, Bawang, Tualang dan Lombang), Purba Sigumonrong (tuan Lokkung dan Marubun Lokkung di Kerajaan Dolog Silau), Purba Sidasuha (Raja Panei, Tuan Simalobong/Nagodang Purba, Tuan Baja Linggei/Guru Raya), Purba Sidadolog (tuan Sinaman) dan Purba Sidagambir (tuan Rajaihuta dan Dolog Huluan) di Kecamatan Raya sekarang. Pada masa pemerintahan Raja Panei Tuan Djintama (sekitar akhir abad XVIII) didudukkan pelarian dari Nagasaribu marga Purba Girsang menjadi partuanan di Dolog Batu Nanggar⁹¹. Tuan Dolog Batu Nanggar yang terakhir adalah Tuan Badja Purba Girsang yang kawin dengan Bou Dorla Damanik puteri Raja Riah Kadim Waldemar Damanik raja Siantar. Dolog Batu Nanggar pernah memberontak ke Panei hendak melepaskan dirinya dari Panei namun dapat ditumpas oleh raja Panei dengan bantuan Tuan Rondahaim dari Raya. Tuan Dolog Batu Nanggar melarikan diri ke mertuanya Raja Siantar di

Pematang Siantar dan tidak berani pulang ke kampungnya. Dia tinggal di Siantar selama dua tahun, dan baru kembali ke Dolog pada tahun 1894. Akibat peperangan ini, Tuan Dolog Kahayan dan Tuan Dolog Merawang tidak mengakui dirinya lagi bagian dari Panei, kedua partuanan ini kemudian menyerahkan daerahnya ke Kerajaan Padang pada tahun 1881.⁹²

Tuan Marjandi Mailan Damti Purba menyusun silsilah raja-raja Kerajaan Panei⁹³ adalah sebagai berikut:

1. Tuan Suha Bolag
2. Raja Marsitajuri gelar Parhuda Sitajur/Hantu Panei
3. Raja Panei III
4. Raja Panei IV
5. Raja Panei V
6. Raja Panei VI
7. Raja Panei VII -----> Tuan Bajalinggei (Padang)
----> Guru Raya di Pamatang Raya
8. Raja Panei VIII
9. Tuan Sarmalam
10. Tuan Sarhalapa
11. Tuan Jintama gelar Nai Horsik
12. Tuan Jontama gelar Ompung Na Matei i Medan
13. Tuan Jadiamat gelar Ompung Nai Simin
14. Tuan Bosar Sumalam
15. Raja Muda Tuan Marga Bulan
16. Tuan Djaulan

5. Raya



Gambar 9: Tuan Sumayan Saragih Garingging gelar Tuan Kapoltakan -Raja Raya. Raja Raya ini cerdas dan maju pemikirannya, dekat dengan Kerajaan Padang Tebingtinggi (Sumber: kitlv.nl)

Raja Raya Tuan Sumayan Saragih Garingging gelar Tuan Hapoltakan (1857-1932) membantah bahwa keturunannya berasal dari Samosir, tetapi dia berkata bahwa leluhurnya berasal dari Aji Sembah (tanah Karo) dan menjadi Raja Nisombah, raja yang disembah. Aji Sembah ini kemudian menjadi Ari Sinembah (Tanah Karo). Hal ini disebutkan oleh Tuan Hapoltakan untuk menyangkal cerita asal-usul Garingging yang dituliskan oleh J. Tideman dalam bukunya *Simeloengoen* berketurunan dari Ompu Sohajoloan Saragih dari Simanindo Samosir Utara.⁹⁴

Putera Tuan Hapoltakan adik dari raja Raya Tuan Gomok bernama Tuan Taralamsyah Saragih berdasarkan kisah turun temurun yang dikisahkan orang-orang tua marga Saragih Garinggin menceritakan bahwa asal-usul raja Raya bermarga Saragih Garingging adalah dari Ajinembah suatu kampung di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sekarang ini. Dari sini dia bersama kawan sepengiringnya berangkat dengan menaiki kerbau Sinanggalutu. Rute yang ditempuhnya adalah: Tingkos, Purbatua, Hinalang, Sidaladala (Tigarunggu sekarang ini), Raya Bayu, Raya Tongah dan seterusnya Raya Simbolon.⁹⁵

Wilayah Raya pada masa itu berada di bawah kekuasaan marga Sumbayak sebagai penguasa di daerah itu yang takluk kepada raja Nagur Damanik. Kedudukan Tuan Raya Sumbayak pada masa itu adalah di kampung Raya Tongah. Sipinangsori kemudian meminta lahan pertanian kepada Tuan Raya Tongah dengan dasar "*tutur saamang-sainangonkon*" (seayah seibu), yang memberikan sebidang tanah di Raya Simbolon. Di sini Sipinangsori memulai kehidupannya yang baru dengan bercocok tanam dengan

menanam jagung dan padi yang bibitnya dia peroleh dari tembolok burung tekukur (anduhur) yang disumpitnya.

Sipinangsori ternyata petani yang tekun mengusahai ladangnya dan hasil ladangnya melimpah sehingga menarik orang lokal datang meminta padi dan jagung kepadanya. Tepat pada saat itu masa paceklik di negeri itu. Rakyat sudah resah karena langkanya jagung dan padi sebagai makanan pokok mereka. Maka ketika mereka tahu bahwa Sipinangsori memiliki banyak persediaan padi dan jagung maka berbondong-bondonglah mereka datang ke gubuknya meminta beras dan jagung. Sipinangsori tidak meminta imbalan apa pun. Dia hanya memesankan, kalau ditanya oleh penguasa negeri itu, dari mana mereka mendapat padi dan jagung, cukup dengan perkataan, "hun bani Tuan Raya" (dari tuan Raya).

Maka sampailah berita itu kepada Raja Nagur yang menguasai daerah itu. Dia pun berangkat bersama wakilnya di daerah itu Tuan Raya Tongah Sumbayak untuk memastikan isu yang dia dengar dari rakyatnya mengenai adanya "tuan Raya" yang baru di negeri itu. Raja Nagur bersama Tuan Raya Tongah Sumbayak bertanya dari siapa Sipinangsori mendapatkan gelar Tuan Raya? Sipinangsori menjawab bahwa dia memperoleh itu dari Naibata (Tuhan). "Kalau begitu, engkau harus berani bersumpah (marbija)", titah Raja Nagur. Sipinangsori pun mengangkat sumpah di hadapan raja Nagur, Tuan Raya Tongah dan rakyat yang menyaksikannya. Berbekal air dalam labu dan tanah yang ia dapatkan dari kuku kerbaunya yang dibawanya dari Ajinembah, Sipinangsori bersumpah (marbija). Setelah ditunggu dia masih tetap sehat bugar, sesuai tradisi pada

masa itu, Raja Nagur dapat menerima gelarnya yang baru itu, maka dinobatkanlah dia menjadi Tuan Raya yang baru menggantikan Sumbayak yang tetap berkuasa di Raya Tengah sebagai partuunan sekaligus diangkatnya sebagai gamot ni harajaan (kabinet penasihat raja). Selain itu Sipinangsori juga mengakui Tuan Raya Tengah Sumbayak sebagai Raja ni Adat, sebagai tempat bertanya mengenai adat yang berlaku di daerah itu, sebab Sipinangsori tidak menguasai adat istiadat yang berlaku di daerah itu berhubung asal-usulnya yang berasal dari Ajinembah yang berbeda adatnya kebiasaanya.

Seterusnya Sipinangsori kawin dengan puteri raja Nagur Damanik dan melahirkan anaknya bernama Tuan Lajang Raya yang menggantikannya sebagai Tuan Raya. Sesudah anaknya dinobatkannya menjadi Tuan Raya, dia pun pamit kepada rakyatnya merantau ke sebelah timur (hapoltakan). Menjelang wilayah Panei yang dibatasi sungai Bah Bakkuo dia menyampaikan salam perpisahannya kepada rakyatnya dan tempat itu pun dinamai dengan Hutailing.

Menurut hikayat yang diyakini keluarga besar Saragih Garingging, Sipinangsori dalam petualangannya di daerah Mandailing bersama pengiring dan menunggang kerbau Sinanggalutu sampai ke Hutabatu dan kawin dengan puteri kepala kampung di situ. Di sini lahir anaknya bernama Dalimunthe. Kerbau Sinanggalutu yang dibawanya dari Raya mati di Padanglawas melawan kerbau pendek dari Minangkabau dalam adu kerbau. Sedih karena kematian kerbaunya ini, Sipinangsori mengembara dan wafat di daerah Sibolga (Tapanuli Tengah sekarang) yang kampung ini kemudian disebutkan orang sesuai namanya Pinangsori

sampai hari ini.

Keturunan Sipinangsori ini lah yang seterusnya berkuasa di daerah Raya sampai ke Raya Kahean. Masing-masing keturunannya itu diangkat sebagai wakil raja di daerah yang disebut partuanan. Demikianlah kita mengenal Tuan Manakraya, Tuan Silou Marihat, Tuan Rayahuluan, Tuan Raya Panribuan, Tuan Sombul, Tuan Sinondang, Tuan Marjandidolog, Tuan Rayahumala, Tuan Bulupange/Hutailing, Tuan Hutadolog, Tuan Silou Raya, Tuan Dologsaribu, Tuan Tambunmarisi, Tuan Urungraya, Tuan Siloting, Tuan Hutarih, Tuan Dologhasian, Tuan Rayadolog, Tuan Rayabosi, Tuan Simbou, Tuan Banuhraya, Tuan Raya Kahean, Tuan Buluhraya, Tuan Nagurusang, Tuan Sisawa, Tuan Sibayak, Tuan Paneiraya, Tuan Paransiluman, Tuan Damak, Tuan Amborokan, Tuan Sorbadolog, Tuan Siholmut, Tuan Paneiraya, Tuan Rayabosi dan lain-lain. Selain itu masih terdapat gelar tuan yang tidak menguasai satu wilayah/daerah tertentu tetapi diakui tingkat kebangsawanannya seperti: Tuan Raya Simbolon, Tuan Sikaha-kaha, Tuan Nabolon, Tuan Tambuboras dan Tuan Rumahbayu. Gelar yang terakhir ini diberikan raja Raya kepada saudaranya yang seharusnya naik tahta menggantikan posisi ayahnya menjadi raja namun menolak menjadi raja. Sebagai kompensasi, maka raja Raya yang menggantikan posisinya sebagai raja mendirikan rumah bolon yang baru untuknya, demikianlah dia dikenal dengan gelar Tuan Rumahbayu.⁹⁶

Seperti disinggung terdahulu, raja-raja di Kerajaan Raya menurut adat haruslah dilahirkan *puang bolon* (permaisuri raja) turun temurun. Sejak Sipinangsori sampai Tuan Raya Poso *puang bolon* Raya berasal dari puteri raja

Nagur Damanik. Tradisi ini berganti setelah Tuan Raya Nengel sampai generasi seterusnya di mana puang bolon Raya berasal dari puteri raja Panei, Tuan Bajalinggei atau Guru Raya dari marga Purba Dasuha. Di Raya, adat *puang bolon* ini suatu keharusan dan mutlak sifatnya, harus dipatuhi oleh siapa pun yang hendak menjadi raja. Pengangkatan sebagai raja Raya disahkan oleh Gamot Harajaan Raya yang didominasi turunan penguasa Raya sebelumnya marga Saragih Sumbayak.

Adapun silsilah raja-raja Raya ⁹⁷ seperti di bawah ini:

1. Tuan Sipinangsori (1395-1435)
2. Tuan Ladjang Raya (1430-1530)
3. Tuan Nabolon/Raya Simbolon (1465-1540)
4. Tuan Raya Gukguk (1500-1570)
5. Tuan Raya Unduk (1535-1595)
6. Tuan Raya Denggat (1560-1630)
7. Tuan Raya Minggol (1590-1660)
8. Tuan Raya Poso (1615-1690)
9. Tuan Raya Nengel (1640-1720) → Raja Padang Tebingtinggi
10. Raja Bolon (1675-1750)
11. Raja Martuah (1710-1783)
12. Raja Morahkalim (1755-1810)
13. Tuan Jimmahadim gelat Tuan Hutadolog (1790-1840)
14. Tuan Rondahaim gelar Tuan Raya Namabajan (1828-1891)
15. Tuan Sumayan gelar Tuan Hapoltakan (1857-1932)
16. Tuan Gomok gelar Tuan Bajaraya (1881-1940)

17. Tuan Jahali (1922-.....)
18. Tuan Aribet (1947 -
19. Tuan Artalim

6. Kerajaan Padang Tebingtinggi

Raja-raja Padang Tebingtinggi sesuai isi buku terombo yang masih dipegang keturunannya di Tebingtinggi berasal dari Raja Raya Simalungun. Ini disebutkan tanpa tedeng aling-aling Pemangku Adat Kerajaan Padang Tebingtinggi Tengku Nurdinsyah Al-Haj pada Diskusi Sejarah Kota Tebingtinggi pada tahun 2012 di Balai Kartini Tebingtinggi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi.⁹⁸ Putera Tuan Raya Nengel Saragih Garinging bernama Tuan Poltakraja Saragih Garinging membuka kampung di aliran Bah Bulian di hilir Kerajaan Raya bersama pengikutnya. Tuan Poltakraja Saragih Garinging ini kemudian dikenal dengan marga Saragih Garinging Dasalak yang setelah masuk Islam berganti nama Raja Umar Baginda Saleh Qamar dan mendirikan Kerajaan Padang berkedudukan di Bajenis (Bah Jornih) Kota Tebingtinggi sekarang ini.⁹⁹

Di dalam naskah tua *Zuriat Kerajaan Padang* dalam aksara Arab berbahasa Melayu disebutkan asal usul raja pertama Kerajaan Padang adalah dari Raja Simalungun, anak keturunan Raja Raya namanya Raja Gukguk Saragih Garinging. Dalam silsilah raja-raja Raya yang ditulis tahun 1937 Raja Gukguk adalah keturunan generasi keempat setelah Sipinangsori leluhur marga Saragih Garinging dari Ajinombah. Tarombo raja-raja Raya menyebut nama pendiri Kerajaan Padang Tuan Mortiha Saragih Garinging.

Sedangkan naskah lain menyebut namanya Tuan Poltakraja Saragih Garingging Dasalak atau Tuan Hapultahan.

Sebagai anak putera bangsawan, Poltakraja Saragih gelar Tuan Hapultahan memperluas daerah Raya sampai ke pesisir Selat Malaka bersama pengikut-pengikutnya. Di Bajenis dia mendirikan kerajaan yang dinamainya Kerajaan Padang yang wilayahnya berbatas dengan Raya Kahean sampai ke Bandar Kalipah di pesisir Selat Malaka. Pada tahun 1630 Tuan Poltakraja Saragih masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Raja Umar Baginda Saleh Qamar.

Pada tahun 1640 Raja Umar wafat meninggalkan empat putera dan satu puteri. Masing-masing bernama: Marah Muhammad Udin, Puang Zainab yang kawin dengan orang Barus, Marah Sudin, Marah Ali Maludin di Pabatu, Marah Adam di Bajenis. Selepas Raja Umar wafat, kedudukan raja Padang digantikan oleh putera keduanya bernama Marah Sudin.

Pada masa pemerintahan Raja Padang VII Marah Titim gelar Raja Tebing Pangeran (1806-1823) Kerajaan Padang mencapai puncak kejayaannya. Pelabuhan Bandar Khalifah ramai dikunjungi oleh para pedagang mancanegara. Untuk mengumpulkan barang-barang ekspor ke Pulau Pinang, Raja Tebing Pangeran mambangun pelabuhan di pertemuan Sungai Padang dan Sungai Bahilang yang tebingnya tinggi dan oleh raja dinamakan Tebing Tinggi. Inilah awal mula sehingga kampung itu disebut Tebing Tinggi.

Posisi Kerajaan Padang yang strategis rupanya mengundang Serdang, Deli, Aceh dan Siak untuk menguasainya. Dengan Deli muncul pertikaian hebat pada tahun 1853. Sultan Deli Usman Perkasa Alamsyah

mengirim pasukannya dibantu Belanda menguasai Padang. Panglima Daud orang Bugis yang mengepalai pasukan Deli dan dibantu Belanda menyerang Padang dan dengan licik berhasil membunuh Raja Padang Marah Titim dengan keris yang dicuri seorang penghianat dari balik tandu Raja Padang Marah Titim. Pertikaian sesama keluarga Marah Titim pecah sesudah raja Padang ini mangkat. Pihak keluarga menobatkan puteranya Raja Syahbokar menjadi Raja Padang VIII tetapi ditentang pihak keluarga dari garis silsilah Puang Zainab anak perempuan Tuan Umar Baginda Saleh Qamar. Dengan alasan bahwa Syahbokar masih belum dewasa, diangkatlah Marah Ja'far putera Marah Saleh Safar cucu Raja Marah Sudin raja Padang II yang tinggal di Mendaris. Pihak Puang Zainab tetap menolak dan bersikukuh menobatkan Marah Hakum dari pihaknya menjadi Raja Padang VIII. Sultan Deli tidak setuju dengan kehendak pihak Puang Zainab ini. Deli sendiri lebih suka kalau kerajaan Padang diteruskan oleh keturunan laki-laki Raja Umar. Meskipun ditentang Marah Hakum tetap dinobatkan menjadi penguasa Padang dengan gelar Raja Goraha Negeri Padang (1823-1870) berkedudukan di Huta Usang.

Raja Marah Hakum digantikan oleh puteranya Tengku Muhammad Nurdin gelar Tengku Maharaja Muda Wazir Negeri Padang (1870-1914) yang tunduk ke Deli. Raja Padang IX ini memelihara hubungan baik dengan leluhur pendiri Kerajaan Padang yaitu Kerajaan Raya di hulu. Tengku Maharaja Muda dalam rangka memelihara hubungan kekerabatannya menjemput permaisurinya dari puteri Raja Raya bernama Panakboru Muncu Saragih Garingging.

Pada masa pemerintahan Tengku Maharaja Muda,

penduduk pedalaman dari Raya dan Bandar di Simalungun banyak yang berniaga lada ke Kerajaan Padang. Hasil bumi di pedalaman dijual atau dibarter dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti senjata api, alat musik, pakaian, garam dan lain-lain yang datang dari luar negeri.

Untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus perdagangan di Tebingtinggi, Tengku Maharaja Muda banyak merekrut orang-orang Simalungun menjadi pembantunya bahkan pejabat istana. Di antaranya Kajim Damanik dari Bandar yang menyerahkan anaknya Datuk Kajum Damanik untuk mengabdikan pada Tengku Maharaja Padang. Datuk ini kemudian dijadikan panglima besar Kerajaan Padang yang berhasil membesarkan kerajaan. Selain Datuk Bandar Kajum masih ada nama-nama seperti: Bandar Hasan Saragih gelar Tuan Rambutan, Rangkaya Matlahan Saragih, Orang Kaya Saimbang Saragih, Orang Kaya Dasimah Saragih dan Orang Kaya Alinaviah Saragih yang keseluruhannya adalah pendatang dari Raya Simalungun.

Kebesaran dan kemajuan Negeri Padang meresahkan sultan Deli. Pada tahun 1885 dengan Firman Sahifah Sultan, raja Padang Tengku Muhammad Nurdin diturunkan dari tahtanya dan digantikan kerabatnya Raja Muda Tengku Sulaiman dari Deli (1885-1888). Atas perbuatan sultan Deli ini, maka Tengku Muhammad Nurdin mengadakan persoalannya kepada penguasa Raya Tuan Rondahaim Saragih yang pada masa itu sedang giat-giatnya melawan Belanda. Pasukan Rondahaim menyerang Bulian dan tempat-tempat lain di Padang. Mendengar gerakan perlawanan dari Raya ini, Raja Syahbokar Saragih bergabung dengan pasukan Rondahaim melawan Deli yang dibantu pasukan Belanda. Tetapi dalam

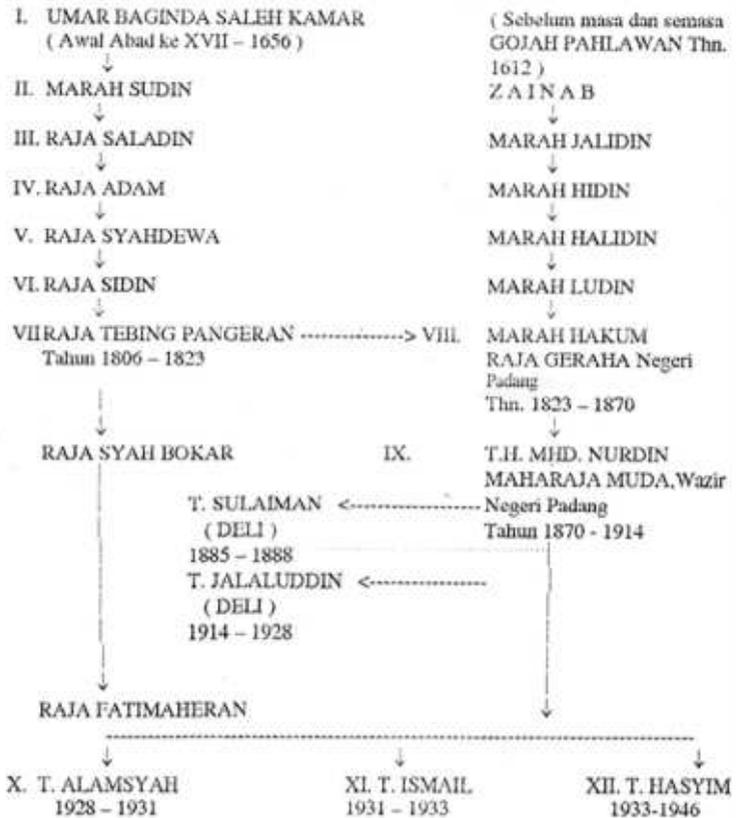
pertempuran di Bandar Bejambu pada tanggal 9 Oktober 1887 Raja Syahbokar mati ditembak pasukan Belanda dan dimakamkan di tempat itu.

Belanda cukup direpotkan dengan perlawanan ini sampai harus mengerahkan pasukannya dari Medan dipimpin Kapten Schenk. Kerugian yang dihadapi Belanda cukup besar dengan dibakarnya bangsal tembakau dan perusakan kebun-kebun tembakau milik maskapai Belanda. Setelah perlawanan itu Belanda memerintahkan sultan Deli memulihkan kedudukan penguasa Padang kepada Tengku Muhammad Nurdin. Didesak sekutunya Belanda yang sudah kewalahan itu, Sultan Deli memulihkan kembali jabatan raja Padang kepada Tengku Muhammad Nurdin pada tanggal 27 Rajab 1295 atau tahun 1888 tahun Masehi.

Sesudah raja Padang Tengku Muhammad Nurdin wafat tahun 1914, jabatan penguasa di Padang diserahkan sultan Deli kepada Tengku Jalaluddin dari Deli (1914-1928). Sejak itu Padang oleh Belanda dimasukkan ke dalam pemerintahan *Afdeeling* Deli en Serdang. Beberapa daerah di perbatasan Simalungun dengan Padang dimasukkannya ke *afdeeling* ini, termasuk Nagur Raja (Nagaraja) dan daerah-daerah lain. Sepanjang masih bisa dimanfaatkan oleh sultan-sultan Melayu yang berkuasa di daerah bekas kerajaan-kerajaan Simalungun yang dikuasainya, jabatan-jabatan penghulu atau kepala atas kampung-kampung Simalungun di Serdang, Deli, Batubara dan Asahan untuk beberapa waktu masih diserahkan kepada penghulu kampung sebelumnya yang adalah orang Simalungun. Adat kebiasaan dan pola pemerintahan pun masih dipertahankan sesuai adat Simalungun.

Adapun silsilah raja-raja Padang Tebingtinggi¹⁰⁰ adalah sebagai berikut:

II. SIL SILAH RAJA NEGERI PADANG (TEBING TINGGI)



Research yang dilakukan oleh :

PUTERA PRAJA
1 JANARI 1964

7. Purba

Mula-mula daerah ini adalah kekuasaan dari Kerajaan Panei marga Purba Dasuha. Wakil raja Panei di sini Tuan Simalobong Purba Dasuha istananya terletak di Pamatang Purba. Tuan Simalobong menjemput puteri Raja Siantar Damanik menjadi permaisurinya. Kekuasaan sebagai yang dipertuan di daerah ini selanjutnya beralih ke seorang pemburu yang dalam legenda disebutkan datang dari Pakpak di Tanah Dairi. Kita mengutip penjelasan Tideman¹⁰¹ berikut ini:

Raja pertama Purba berasal dari tanah Pakpak. Dia adalah seseorang dari marga Purba, yang hidup dari berburu. Dia pernah berada di daerah Sidikalang di Tuntung Batu untuk berburu dengan menggunakan sumpit untuk menembak burung, walaupun binatang itu tidak mati. Dia ingin menangkap hewan itu, tetapi juga dengan maksud agar bisa terbang kembali, jatuh kembali dan pergi dari Tuntung Batu. Pemburu mengikuti mangsanya, sampai dia tiba di Nagor Raja (mungkin Nagur Raya) sebuah kampung yang pada masa lalu termasuk Nagur dan kini di bawah Raya. Di sana dia tidak lagi melihat burung. Dia memasuki kampung dengan menyebutnya Parultopultop, yakni pemburu dengan sumpit (*ultop* adalah sumpit; ini dibuat dari jenis bambu yang menghasilkan alat ini, buluh ultop). Tuan Nagor Raya menerimanya dengan baik dan membiarkannya berburu burung. Karena Parultopultop bertindak baik, Tuan Nagor Raya secara tiba-tiba memberikan putrinya untuk dinikahi. Beberapa saat setelah perkawinan, ketika dia berburu kembali, dia mendadak melihat burung Tuntung Batu kembali sehingga dia mengikuti hewan itu. Burung

itu akhirnya terbang juga. Di sebuah tempat, Pematang Purba sekarang, dia kehilangan burung sasarannya itu. Oleh Karena itu, di sini, di hutan, dia membangun rumah dan dari situ dia mencoba menemukan hewan itu meski tidak muncul lagi.



Gambar 10: Tn Rahalim Purba Pakpak – Raja Purba XII (1904-1921)

(Sumber: kitlv.nl)

Setelah beberapa hari tinggal di sana, dia kembali ke Nagur Raya, tetapi muncul di kampung Simalobong. Di sini dia beberapa saat tinggal pada seorang petani yang menanam berbagai tanaman. Tuan Simalobong menikah dengan putri seorang harajaan dari Siantar. Pernah mertuanya datang mengunjungi Tuan Simalobong. Dia disertai dengan adiknya, yang amat cantik. Ketika pada suatu hari mereka berjalan-jalan di luar kampung dan menemui Parultopultop, yang jelas mendapat kesan mendalam; penampilannya

demikian gagah dan sangat rajin. Dia juga pandai bercocok tanam. Dia bertanya buah apa yang akan dihasilkannya sehingga dia juga suka memberi sesuatu. Mereka mencoba menemuinya di ladangnya. Mereka saling belajar mengenal sampai mereka saling percaya. Segera setelah itu mereka kembali ke Siantar dan Parultopultop kembali berburu dengan sumpitnya.

Wanita muda ini tetap teringat pada Parultopultop di Siantar dan meminta ayahnya agar pergi ke Simalobong tetapi tidak bisa segera dilakukan karena takut ancaman perompak. Ketika ada beberapa wanita dari Siantar yang pergi ke Sipolha untuk membeli mangkudu, mereka juga pergi dengan harapan akan melihat Parultopultop. Dengan maksud mengunjunginya, dia diikuti beberapa warga yang jauh lebih muda, dan akhirnya menemuinya ketika mereka membawa sayur dan buah-buahan di pasar Tiga Langgiung (Purba).

Ketika mereka saling bertemu, mereka bersama pergi ke ladang Parultopultop dan menikahkannya. Semakin lama mereka tetap tinggal di ladang, semakin banyak pemukiman muncul, karena warga dari marga Purba di tanah Pakpak, dari Siboro dan lain tinggal di sana. Akhirnya, Tuan Simalobong mendengar bahwa adik mertuanya menikah dengan Parultopultop. Tentang hal ini dia sangat marah dan akan kembali. Parultopultop tidak mau datang ke sini lagi. Ini menjadi alasan Tuan Simalobong mengusirnya dari tempat tinggalnya, tetapi Parultopultop menjawab bahwa dia tidak bisa diburu-buru pergi dari sana, karena lahan ini adalah miliknya. Tuan Simalohong berkata tentang ini, "Apabila Anda berani bersumpah, saya juga mengalah dan engkau

bisa tampil sebagai raja". Parultopultop meminta waktu sebulan untuk mengambil sumpah ini pergi ke Pakpak dan mendapatkan tanah dan air. Di suatu tempat di mana Tiga Runggu (tiga atau pasar di perbatasan Raya dan Purba), masih ada dan di mana banyak orang datang bersama-sama untuk berdagang, dia bertahan selama sebulan di depan sejumlah raja. Parultopultop melakukannya setelah dia membuat bumi di bawah bulan dan air dalam labu (sejenis buah) dan setelah itu duduk, bersumpah bahwa tanah dan air tempat dia duduk menjadi miliknya. Sejak itu, tempat tinggalnya disebut Purba karena Parultopultop adalah raja marga Purba.

Setelah Parultopultop selama beberapa saat tinggal di Purba sebagai raja, dua hulubalang bergabung dengannya yakni Si Battenangnang dan Parhole Nasa Anduri dari marga Saragih Simarmata (keduanya dari Samosir) yang memintanya untuk memasukkan sejumlah kampung di sekitarnya menjadi daerahnya. Pada hari itu, ketika orang berkumpul di Tiga Langgiung untuk berdagang, orang menyerang yang melibatkan Siboro, Purba Saribu, Sipinggan, Huta Raja, Bongguron (Nagori). Jadi muncul kerajaan Purba dan Parultopultop menjadi raja pertama.

Sekitar tahun 1850 muncul pertikaian keluarga di Purba antara Tuan Purbasaribu dan Tuan Hinalang dengan penguasa di Pamatang Purba perihal pajak (*guguan*) yang semestinya dibayarkan penguasa kedua daerah ini kepada Tuan Purba di Pamatang Purba. Dalam pertikaian ini, turunan Tuan Purbasaribu meminta suaka ke Panei. Raja Panei menerima mereka di kerajannya dan menempatkan para pengungsi ini di Panombeian kampung yang berdekatan

dengan kampung raja di Pamatang Panei. Keturunan merekalah yang kemudian diangkat raja Panei menjadi yang dipertuan di sini dengan gelar Tuan Panombeian.

Silsilah raja-raja Purba seperti disusun oleh J. D. Poerba dan D. Kenan Purba¹⁰² berikut ini:

1. Tuan Raendan gelar Pangultop-ultop (1515-1560)
2. Tuan Rajiman (1560-1590)
3. Tuan Naggar (1590-1631)
4. Tuan Batiran (1650-1679)
5. Tuan Bakkara (1650-1679)
6. Tuan Baringin (1679-1727)
7. Tuan Bona Batu (1727-1762)
8. Tuan Rajaulan (1795-1830)
9. Tuan Atian (1867-1904)
10. Tuan Hormabulan (1830-1867)
11. Tuan Randob (1867-1904)
12. Tuan Rahalim (1904-1921)
13. Tuan Karel Tanjung gelar Parjabayak (1921-1934)
14. Tuan Mogang (1934-1947)

8. Silimakuta

Silimakuta (tepatnya: Silimahuta) disebut demikian karena ada 5 kampung wilayahnya yaitu: Nagasaribu, *Nagamariah*, *Situri-turi*, *Rahut Bosi*, *Saribujandi*. Kerajaan ini berdiri sah sebagai kerajaan sejak Tuan Pamoraidup Girsang Tuhan Nagasaribu dan Pa Ngasami Girsang Tuhan Siturituri ini menandatangani Perjanjian Pelakat Pendek dengan Belanda tahun tanggal 4 September 1907. Sesudah

Tuan Pamoradup Girsang pensiun, jabatannya digantikan puteranya Tuan Padiraja Girsang pada tanggal 18 Maret 1933 yang disahkan pemerintah Hindia Belanda.¹⁰³



Raja Pamoraidup (Doma Raja) Girsang Raja Silimahuta Ke-1 yang dianugerahi Bintang Emas (Gouden Ster) oleh Ratu Hindia Belanda Ratu Wilhelmina Tahun 1939.

Anak Raja Pamoraidup Girsang ada tiga Orang, yaitu :
yang paling sulung Tn Sasir Girsang, Anak Ke-2 Tn Asin (Tuan Ujung Saribu),
yang paling bungsa Tn Padi Raja Girsang.
(Doc. Kel.St.Janamin Girsang/Ir.Ayasanta Girsang).

Gambar 11 : Raja Silimahuta ke-1 Tuan Pamoraidup Girsang

(Sumber: Koleksi St. Janamin Girsang)

Menurut sejarahnya, semula penguasa di daerah ini adalah Tuhan Nagamariah marga Sinaga yang datang dari Girsang Sipangan Bolon (Sidasuhut Girsang) terus ke Sihalalit Simanindo Samosir dan selanjutnya ke Sikodon-kodon kampung kecil dekat Silalahi (Dairi). Sinaga dari Girsang

Sejarah Etnis Simalungun

ini kemudian menjadi penguasa di daerah Nagamariah, Nagatimbul, Nagasaribu, Dolog Panribuan dan kampung-kampung di sekitarnya.¹⁰⁴ Penguasa Sinaga ini pada awalnya tunduk di bawah kekuasaan Raja Dolog Silou marga Purba Tambak yang menguasai daerah Nagasaribu sampai ke Tongging. Kondisi ini masih bertahan sampai zaman Tuan Rondahaim menyerang daerah Nagasaribu di akhir abad XIX.¹⁰⁵ Kedudukan penguasa Sinaga berada di Nagamariah di kaki Dolog Sipiso-piso. Peralihan kekuasaan selanjutnya terjadi dari marga Sinaga kepada seorang pemburu rusa dari Lehu (Pakpak Dairi) bernama Si Girsang. Permaisuri turun temurun di Silimakuta adalah dari Raya (Saragih Garingging) atau Tongging (Saragih Munthe).

Dalam buku *Simeloengoen* karya J. Tideman diceritakan bahwa Si Girsang awalnya adalah keturunan seorang pemburu yang berasal dari Tanah Pakpak yang mengejar seekor rusa (bukan burung) ke timur yang ditembaknya di Lehu (Sidikalang).¹⁰⁶ Rusa itu dikejar oleh anjingnya sampai ke Tanduk Banuwa (Sipiso-piso). Di sini mereka kehilangan jejak, namun Si Girsang menjumpai seekor kerbau putih (*horbo jagat*) sehingga dia menduga sedang berada di suatu perkampungan. Kemudian untuk bisa melihat daerah itu dan bisa menegaskan dugaan itu maka dia bersama anjingnya mendaki Tanduk Banuwa, tetapi karena sepanjang hari mereka tidak makan dan minum, mereka lapar dan haus sehingga Si Girsang duduk di bawah pohon, dan meminum beberapa tetes embun yang jatuh dari daun dan kembali bangkit. Anjing berjalan dengan lidah menjulur dan Si Girsang yang akan membantu hewan ini memetik dawan merah dan memberikan kepadanya untuk

dimakan, tetapi terbukti bahwa buah itu beracun.

Setelah dia memberikan cendawan putih maka hewan itu kembali kuat seperti sebelumnya. Si Girsang mulai mengetahui bahwa cendawan merah itu mengandung racun, sementara cendawan putih bisa digunakan sebagai obat penawar. Dari puncak gunung ia melihat sebuah kampung yang luas, tempat *marga* Sinaga bermukim. Kampung itu disebut Naga Mariah. Dia memasuki perkampungan itu dan salah satu penduduk bersedia menampung di rumahnya.

Pada saat itu kampung Naga Mariah terancam oleh serbuan musuh, yang datang dari Siantar dan bermalam di dekat Singgalang untuk memasak dan beristirahat. Sumber air di lereng gunung Singgalang, di mana orang mengambilnya untuk meminum air, kini disebut Paya Siantar. Tuan Naga Mariah melihat musuh berada dalam kesulitan, tetapi kini Si Girsang tiba dengan usul bahwa dia akan menghancurkan semua lawan. Tuan Naga Mariah berkata, "Jika kamu berhasil, maka saya akan memberimu *bou* (putri) sebagai isteri". Kemudian dia mohon untuk memberikan perintah kepada warga Naga Mariah guna mengumpulkan sebanyak mungkin duri, apakah duri bambu atau duri jeruk, rotan, pandan dan tanaman lain. Si Girsang memetik cendawan merah, merendamnya dalam air dan menaburkan duri di dalamnya. Duri beracun ditaburkannya di jalan, yang akan dilewati musuh dan air beracun dia masukkan dalam Paya Siantar. Musuh terjebak dalam duri serta meminum air, sebagai akibatnya mereka semua mati. Si Girsang pergi menemui Tuan Naga Mariah dan berkata: "Ada seribu lawan mati, yang tergeletak di gunung itu". Karena itu gunung ini disebut Singgalang dan tempat itu disebut SeribuDolog.

Si Girsang menikah dengan seorang *bou* Naga Mariah melalui upacara seperti raja, maka sementara itupun dia tinggal di *rumah bolon* (rumah besar) di sebelah kiri rumah Tuan Naga Mariah. Si Girsang menjadi dikenal di mana-mana sebagai *datu* dan ahli nujum (tabib), yang memahami seni dalam mencampur racun sehingga orang menyebutnya Datu Parulas. Orang sangat takut kepadanya. Setelah wafatnya Tuan Naga Mariah, Datu Parulas menggantikannya. Beberapa saat kemudian dia membangun kampung Naga Saribu di sekitar lokasi di mana seribu lawan mati, yang menjadi ibu kota Silimakuta. Nama ini dibenarkan karena pada masa ini ada lima kampung yang termasuk wilayah Naga Mariah yakni: Rakut Bosi, Dolog Panribuan, Saribu Jandi, Mardingding dan Naga Mariah.

Dari isteri pertamanya Datu Parulas mendapat empat putra yang tidak bisa disebut sebagai putra raja, karena ayahnya belum menjadi raja. Mereka menjadi leluhur Tuan Rakut Bosi, Dolog Panribuan, Saribujandi dan Mardingding. Setelah itu dia masih mendapat dua orang putra. Yang sulung membuka kampung Jandi Malasang dan kemudian pindah ke Bage, tempat dia membangun *tiga* (pasar) dan *bale*, yang mandiri. Si Bungsu mengikuti Datu Parulas setelah kematian ayahnya. Kemudian pada saat penegakan pemerintahan Belanda, Bage berada di bawah Silimakuta.

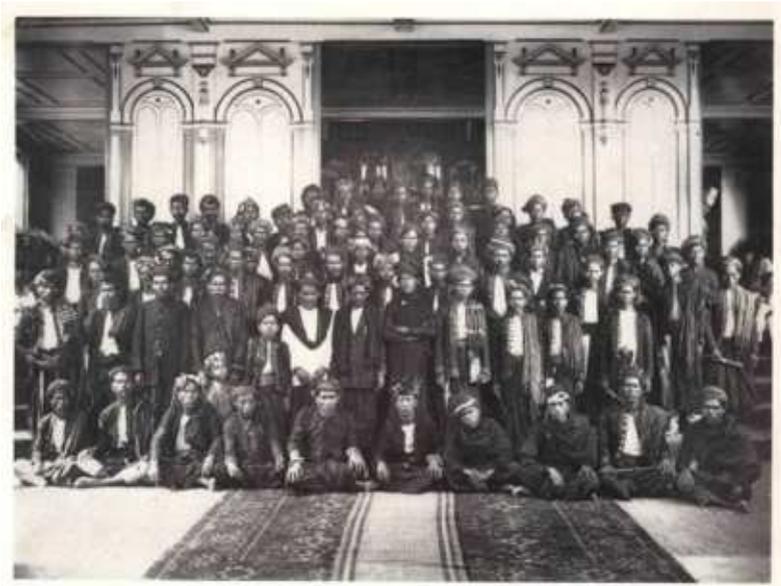
107

Silsilah raja-raja Silimakuta¹⁰⁸ adalah sebagai berikut:

1. Si Girsang alias Datu Parulas
2. Si Dingding
3. Si Dungdung
4. Parjolma Sampuluonom (Nai Jerat)

5. Raja Gani
6. Tuan Pamoraidup Tuan Nagasaribu dan Tuan Pangasami Tuan Situri-turi
7. Tuan Padiraja
8. Raja Nungkat

E. Masyarakat Adat Simalungun di Kesultanan Melayu Sumatera Timur



Gambar 12: Kepala-kepala Simalungun dan Karo di Istana Sultan Serdang di Perbaungan, 1930 Sumber: kitlv.nl

Selama abad ke-18 sampai abad ke-19 banyak daerah-daerah kerajaan-kerajaan Simalungun di hilir yang berbatasan dengan Selat Malaka dikuasai penguasa Melayu baik Serdang maupun Deli. Penguasaan daerah ini sejalan dengan Islamisasi/Melayuisasi masa itu. Seringnya terjadi

perang perluasan wilayah di antara raja-raja Simalungun dan penguasa Melayu turut merubah perbatasan masing-masing daerah kekuasaannya. Sebagian di antara kepala-kepala adat Simalungun yang bertikai dengan raja-raja Simalungun ada yang melepaskan dirinya dan mengaku bagian dari kesultanan Melayu Sumatera Timur. Berdirinya Kerajaan Deli, Kerajaan Serdang dan Kerajaan Asahan serta Langkat merobah batas-batas daerah Simalungun, Karo dan Toba.

Menurut sejarah, Sultan Deli pertama adalah seorang pendatang dari India bernama Muhammad Dalikhan yang diangkat Aceh menjadi panglima Aceh di bekas Kerajaan Haru. Ia kawin dengan Nangbaluan Surbakti adik Raja Sunggal sekitar tahun 1632. pada tahun 1669 Panglima Perunggit anak Dalikhan menyatakan diri merdeka dari Aceh dan menjalin hubungan dengan Belanda di Malaka. Dengan demikian Kerajaan Deli berdiri di sekitar abad XVII. Sedangkan Kerajaan Serdang adalah pecahan dari Deli karena perebutan tahta pada tahun 1723, Tuanku Umar putera tertua Tuanku Panglima Paderap dirajakan Orang Besar Deli yaitu Raja Urung Sunggal marga Surbakti dan Raja Urung Senembah serta seorang Raja Urung Batak Timur bermarga Saragih Dasalak yang berkuasa di Tanjung Morawa. Dengan demikian sultan Serdang pertama adalah pendatang juga ke Serdang yang mendirikan kerajaannya dengan bantuan orang Karo dan Simalungun pada abad XVIII . Sebelum berdirinya Kesultanan Serdang, telah berdiri kerajaan dari orang Simalungun bernama Kerajaan Padang dan Bedagai yang merupakan saudara kandung dari Kerajaan Raya. Pendiri Kerajaan Padang bernama Raja Umar Baginda Saleh (Poltakraja Saragih Garingging/Dasalak) masuk

Islam pada tahun 1630 dan bersama dengan temannya bernama Peresah dari Nagur Raja, mereka menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Nagur dan mendirikan Kerajaan Padang. Sedangkan daerah yang berbatasan dengan Tanah Karo yang dihuni orang Simalungun sejak zaman Kerajaan Nagur dijadikan satu distrik tersendiri bernama Distrik Dusun Batak Timur Dusun dengan seorang Wakil Sultan Serdang setelah daerah itu dimasukkan ke Serdang sejak abad XVIII.¹⁰⁹ Tanjung Morawa dan Kampong Baru juga adalah daerah yang dikuasai keturunan Raja Umar Baginda Saleh Saragih Dasalak. Puteranya Marah Jana Saragih mendirikan kampung Tanjung Morawa Senembah.¹¹⁰

Sementara Batak Timur Dusun dibiarkan memerintah menurut adat istiadat Simalungun. Pada zaman kesultanan Serdang daerah Batak Timur Dusun terdiri dari:

a. Urung Simapang:

- (1) Perbapaan (Sibayak) Negeri Simapang
- (2) Perbapaan Tarean
- (3) Damak Jambu (Sibayak)
- (4) Perbapaan Marjandi
- (5) Perbapaan Gunung Mariah
- (6) Perbapaan Gunung Panribuan
- (7) Perbapaan Bintang Mariah
- (8) Perbapaan Pamah
- (9) Perbapaan Silindak

b. Urung Kotarih

- (1) Perbapaan (sibayak) Kotarih
- (2) Perbapaan Siranggiting (sekarang Sarangginting)
- (3) Perbapaan Sialtong (marga Purba Dasuha)

(4) Perbapaan Banjaran Godang (Anakboru Balei)

c. Urung Sini Purba

(1) Perbapaan Bah Perak

(2) Perbapaan Batugingging

(3) Perbapaan Bangun Kinalang

d. Urung Si Enam Kuta

(1) Perbapaan (Sibayak) Bagerpang

(2) Perbapaan Ujung Bulan

Yang menjadi wakil sultan Serdang untuk daerah Distrik Batak Timur Dusun putera Simalungun yang sudah beragama Islam bernama Orang Kaya Tausa Purba Silangit yang berasal dari Silimahuta Simalungun¹¹¹ Sedangkan daerah Sipispis dan Dolog Merawan yang dahulunya bernama Bajalinggei dijajah Serdang dan Deli yang mendapat penolakan dari penguasa Panei Jontama Purba.

112

Dari sejarah ini jelas bahwa suku Simalungun dan Karo adalah penduduk asli di Padang Bedagai, Serdang, Batubara (Tanjungkasau) dan sebagian Asahan. Penduduk Melayu datang kemudian setelah jatuhnya Malaka pada abad XVI dan kerajaan-kerajaan Melayu berdiri setelah masuknya pengaruh Aceh dengan mengangkat Dalikhan menjadi panglima Aceh pada abad XVII.

Penetrasi budaya dan agama Islam yang sangat kencang di antara orang Simalungun yang tinggal di dekat pantai menimbulkan munculnya proses Melayunisasi yang cepat dan intens. Banyak orang Simalungun yang setelah memeluk Islam menanggalkan kesimalungunannya dan mengaku dirinya Melayu. Sehingga suku Simalungun mengalami penciutan populasi yang parah. Menurut sejarah, orang Melayu Batubara, Tanjung Balai, Serdang

terdiri dari orang-orang Simalungun yang sejak Kerajaan Nagur telah tinggal menetap di pesisir pantai Selat Malaka. Karena pengaruh Islam yang kuat dan budaya Melayu yang menyertai penyebaran Islam tersebut, orang Simalungun tersebut mengaku dirinya sebagai Melayu dan beradat Melayu. Sampai zaman Raja Sang Nauluh Damanik berkuasa di Kerajaan Siantar (1888-1904) jalinan kekeluargaan terus berlangsung di antara orang Simalungun di pedalaman dan orang Melayu bekas orang Simalungun tersebut, di antaranya melalui ikatan perkawinan. Puteri-puteri raja-raja Simalungun banyak yang kawin dengan para penguasa Melayu Sumatera Timur yang sekaligus mengukuhkan klaim penguasa Melayu itu atas daerah-daerah Simalungun yang masuk wilayahnya.



Catatan



¹Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 6.

²Nama Batak pertama sekali ditemukan pada tulisan Ferdinand Mendez Pinto pada abad ke-16 dalam bukunya *Peregrination* (perjalanan) yang disebut dengan nama Bata. Sebelumnya, nama yang berdekatan ditemukan pada tulisan Nicolo di' Conti pada abad ke 15 yang menyebut Batech. Kedua nama tersebut mengandung pengertian yang sama yakni manusia yang bermukim di gunung dan dinyatakan uncivilized.

³Hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Perret selama 10 tahun di Barus telah menghasilkan tiga mahakarya arkeologi tentang Barus. Demikian pula

buku yang ditulis oleh Jane Drakard tentang Dua Naskah Dari Barus.

⁴Lihat, Claude Guillot, Lobu Tua: Sejarah Awal Barus (terjemahan Daniel Perret) (Jakarta: Obor, 2002), hlm. 17-25. Dalam buku ini ditranskripsi isi prasasti tersebut dan tejemahannya dengan lengkap.

⁵Rusli Amran, Sumatra Barat hingga Plakat Panjang (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 49.

⁶Kota dalam istilah Melayu adalah bandar ataupun pelabuhan tempat bertemunya pedagang asing dan pedagang local. Jadi pengertian kota dalam hal ini bukan merujuk sebagai City dalam arti modern.

⁷Peneliti Independen. Mc Kinnon pernah melakukan penelitian arkeologis di Kota Cina, Benteng Putri Hijau Delitua, Kota Rentang dan Teluk Aru (pulau Kampai) bekerjasama dengan Unimed Medan. Arkeolog tersebut berkenan hadir di Unimed atas undangan Pussis-Unimed. Lebih lanjut tentang pentingnya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan, lihat Edward E. McKinnon, 1984. Kota Cina: Its Context and Meaning in the Trade of Southeast Asia in the Twelfth to Fourteenth Centuries. (Thesis for Doctor Philosophy): Cornell University.

⁸Laporan-laporan pengelana asing ini telah dikompilasi dan diterbitkan. Lihat, Anthony Reid. 1995. Witnesses to Sumatra: a Travellers Anthology. Singapore: Oxford University.

⁹Marsden diutus Raffles dari Bengkulu tahun 1770 dan Anderson diutus Philips dari Penang tahun 1823. Laporan mereka dianggap sebagai buku ilmiah pertama yang mengurai tentang manusia, kebudayaan, flora, fauna, dan kekayaan alam Sumatra. Lihat, William Marsden. 1969. History of Sumatra. Kuala Lumpur: Oxford University; John Anderson. 1971. Mission to the East Coast of Sumatra in 1823. Kuala Lumpur: Oxford University

¹⁰Batak adalah salah satu kelompok suku pada gelombang Proto Melayu. Ichwan Azhari dan Daniel Perret berpendapat bahwa nama Batak tidak muncul dari orang Batak sendiri, tetapi disematkan orang luar untuk mengidentifikasi penduduk pedalaman yang belum beragama Islam. Akhir-akhir ini istilah Proto Malay dan Deutero Malay semakin banyak diragukan para pakar. Studi HUGO (Human Genome Project) yang beranggotakan 40 research group tahun 2009 menyebutkan bahwa justru nenek moyang ras mongoloid yang berasal dari nenek moyang kita di Indonesia, jadi ras mongoloid bukan nenek

moyang kita, justru mereka yang berasal dari kita. Lihat Niji No Saki, Menyoal Asal-usul Identitas Bangsa Melayu, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/03/02>, diakses 31/12/12;12:49.

¹¹Sebelum uraian terhadap teori ini dapat dilihat pada tulisan Arlin Dietric Jansen. 2003. *Gonrang Simalungun: Struktur dan Fungsinya Bagi Masyarakat Simalungun*. Medan: Bina Media.

¹²Apabila teori Sarasin bersaudara ini diperluas, maka gelombang Proto Melayu yang sampai di Simalungun dapat disebut dengan Proto Simalungun yang tinggal di pesisir pantai timur Selat Malaka Sumatra bagian utara, sedang gelombang Deutro Melayu di Simalungun adalah Deutro Simalungun yang pada waktu migrasinya mendesak Proto Simalungun ke pedalaman. Migrasi kedua inilah yang mengakibatkan Simalungun sekarang bermukim di kaki Bukit Barisan yang splendid isolation, sedangkan gelombang kedua itu adalah orang Melayu sekarang yang banyak menghuni pesisir pantai timur Sumatra bagian utara.

¹³Lihat H.H. Barlett. 1952. *Batak and Malay Chant on Rice Cultivation, with Introductory Notes on Bilingualism and Acculturation in Indonesia*. *Proceeding of the American Philosophical Society*, XCVI, Pages 118-125.

¹⁴Periksa tulisan Robert H. Geldern dengan judul 'The Archaeology and Art of Sumatra, dalam *Sumatra: Its History and People* (Edwin M. Loeb, ed). 1935. Singapore: Oxford University.

¹⁵Openheimer mengemukakan bahwa moyang orang Austronesia telah bermukim di Asia Tenggara yang dibuktikan oleh situs-situs yang tenggelam setelah naiknya level permukaan air laut antara 10.000 dan 7000 tahun lampau. Lihat, S. Openheimer. 1999. *Eden in the East*. Trafalagar Square Publishing.

¹⁶Lihat Paul Michel Munoz. 2009. *Kerajaan-kerajaan awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta: Mitra Abadi.

¹⁷Lihat, BA. Simanjuntak. 2002. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Djendela.

¹⁸Lihat F.B. Pedersen. 1975. *Darah Batak dan Jiwa Protestan*. (terj) Jakarta: BPK Gunung Mulia.

¹⁹Lihat Clerk E. Cunningham. 1958. *The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*. Yale University.

²⁰Pemukiman tua yang terdapat disekitar sungai Barumon yakni candi-

candi Budha telah menguatkan dugaan bahwa kasawan tersebut dihuni pada awal abad 12. Lihat tulisan Scnitzer tentang *Forgotten Kingdom* yang mengisahkan tentang artefak Candi di Padang Lawas.

²¹Lihat Uli Kozok. 1999. *Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak*. Jakarta: KPG.

²²Lihat tulisan MD. Purba tentang Museum Simalungun.

²³McKinnon, 1984 pada catatan kaki sebelumnya.

²⁴Lihat Tideman, 1936. *Hindu Involved in Noordelijk Batakland*. Batak Instituut., No. 23. Amsterdam.

²⁵Ada dugaan bahwa suku Mandailing berasal dari Munda (India Selatan). Lihat catatan kaki Simanjuntak (2002) pada rujukan bacaan diatas.

²⁶Nagpur adalah ibukota distrik Nagpur, negara bagian Maharashtra Utara India. Lihat Hassan Shadily (pemred), 1983. *Ensiklopedia Indonesia*. Volume 4. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. Kemungkinan nama tersebut diadopsi menjadi nama kerajaan Nagur di Simalungun pada waktu migrasi pengaruh Hindu ke Sumatra. (periksa catatan kaki Simanjuntak, 2002 pada rujukan bacaan diatas).

²⁷Lihat dan periksa O.W. Wolters. 1970. *The Fall of Srivijaya in Malay History*.

²⁸Lihat Jan Jahaman Damanik, "Salib dan Sirih", disertasi Doktor Teologi (Jakarta: STT Jakarta, 2009), hlm. 69-74. Marga di Simalungun lebih pada identitas kelompok bukan kesatuan genealogis. Ini yang berbeda dengan Batak Toba yang mengaku semua kelompok marganya berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Siraja Batak. Di Simalungun setiap pendatang boleh memilih kelompok marga yang diinginkan asal memenuhi ketentuan adat Simalungun. Kondisi ini digambarkan dengan pantun sebagai berikut, "Sinraya sini purba, sindolog, sini panei, naija pe lang mubah, asal marholong ate" (dari mana pun asalnya boleh diterima menjadi keluarga besar Simalunugun asal mempunyai kesadaran dan kepedulian sebagai orang Simalungun yang dinamakan "ahap Simalungun").

²⁹Cerita rakyat Simalungun mengisahkan bahwa konon dahulu pernah pulau terpencil itu dijadikan oleh Raja Nagur Damanik sebagai tempat pembuangan para pelanggar-pelanggar adat dan hokum, terutama mereka

yang melanggar ketentuan tidak boleh kawin semarga (mardawan begu). Para pesakitan ini dijadikan budak dan dibuang ke pulau tersebut yang jauh dari Nagur. Selain itu para penderita kusta dan penyakit menular lainnya menurut kisah dibuang ke daerah ini, hingga orang-orang yang datang dari pulau itu dianggap rendah oleh masyarakat Nagur. Pulau itu sekarang disebut Samosir.

³⁰M. D. Purba, *Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun* (t.p.: Medan, 1986), hlm. 18-23.

³¹Karya-karya di antara penulis Toba dan peneliti asing sesudah tahun 1922 hampir seluruhnya mengutip pandangan tradisional Batak Toba ini. Liddle menyebut upaya ini sebagian dari upaya orang Batak Toba untuk mengukuhkan superioritas etnis mereka atas suku-suku Batak lainnya di Sumatera Utara, lihat Liddle, *Ethnicity*, hlm. 59. Teolog Batak Toba Jan S Aritonang memaknainya dengan istilah *primitive ethnocentric superiority*, sikap khas orang Batak Toba pra zending yang semakin dikokohkan oleh kesadaran baru orang Kristen Batak sebagai umat pilihan Tuhan seperti umat Israel dalam Alkitab, lihat Jan S Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 404.

³²M. O. Parlindungan, *Pongki Nangolngolan gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak, 1816-1833* (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 454.

³³Maksudnya penulis orang Simalungun seperti MD. Purba (1980), TBA Tambak (1980), Mansen Purba (1983), D Kenan Purba (1995), Djahutar Damanik (1984), Juandaha Raya P. Dasuha dan Martin Lukito Sinaga (2003), dan folktales yang berkembang luas pada masyarakat Simalungun.

³⁴Periksa Mangaradja Onggang Parlindungan, 2007. *Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak*. Edisi cetak Ulang. Yogyakarta: LKIs, atau Groenoveltd. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya*. Jakarta: Bharata.

³⁵Penting diingat bahwa, wilayah Simalungun pada awalnya bukanlah wilayah yang dikenal dengan sebutan Kabupaten Simalungun sekarang. Menurut MD. Purba (1980) dinyatakan bahwa wilayah Simalungun pada awalnya berbatasan dengan Kerajaan Haru (Utara), Selat Malaka (Timur), Batanghio (Selatan) dan Aceh serta Danau Toba (Barat). Lihat, MD. Purba (1980). *Bungai Rampai*

Simalungun. Lihat pula, Juandaha Raya P. Dasuha dan Martin Lukito Sinaga (2003), *Tole den Timorlandend das Evangelgium*. Pematang Siantar: Kolportase GKPS.

³⁶Hancurnya kerajaan Nagur telah mengilhami munculnya tradisi kerajaan di Simalungun sebagai bentuk dari pemerintahan sendiri (swapraja). Kerajaan dimaksud adalah Radja Marompat dan Radja na Pitu.

³⁷Lihat catatan kaki diatas.

³⁸Periksa buku pada catatan kaki nomor 34 diatas.

³⁹J. Tideman, op. cit., hlm. 51-55; lihat juga hlm. 60-61.

⁴⁰Periksa tulisan Batara Sangtie, (1977) atau WP. Groeneveltd (1960) atau Suma Oriental Tomme Pires (1967)

⁴¹Periksa lampiran buku M.O.Parlindungan, (2007) Tuanku Rao, juga Groeneveltd serta penulis Simalungun yang telah disebut pada catatan kaki sebelumnya.

⁴²Pinto menulis, *Timorraja, king of the Batas*. Selanjutnya lihat *The Travels of Marco Polo*, translated by Ronald Latham, penguin books, Harmondsword, 1958, pp.224-8. atau *Cannibals and Kings: Northern Sumatra in the era 1290s* dalam Anthony Reid. 1995. *Witnesses to Sumatra: A Travelers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

⁴³Lihat tulisan Pinto dalam: *The Travels of Mendes Pinto*. 1989. Edited and translated by Rebecca D. Cats. Chichago: University of Chicago Press. Pp.20-9. atau *Aceh's Crusader against the Batak, 1539*, dalam Anthony Reid. 1995. *Witnesses to Sumatra: A Travelers Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

⁴⁴Ketidakjelasan sumber inilah yang menyebabkan munculnya klaim bahwa Nakur, Jakur atau Nagore itu adalah kerajaan Karo sebagaimana yang dituliskan oleh Brahmoputro, 1983. *Karo Dari Zaman ke Zaman*. Medan: Merga Silima. Namun demikian, bila menilik laporan pengelana seperti Ma Huan, Zheng He, Pires dan Pinto maupun analisis Groeneveltd terhadap sumber Tiongkok itu, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Bataks, Batas, atau Batta itu bukan Karo. Bukan juga Barus karena sudah dikemukakan bahwa posisi geografisnya adalah hinterland (dataran tinggi), sedang Barus terletak pada kaki Bukit Barisan. Atas dasar itu, pendapat yang mengemukakan bahwa Nakur atau Jakur atau Nagore

itu terletak di Aceh (Peudada) dapat ditepis.

⁴⁵The Kingdom of Batas is bordered on the one side by the kingdom of Pase (Pasai) and the other by the Kingdom of Aru (Daaru). The king of this country is called 'Raja Tomjam'. Selanjutnya, dalam catatan kaki yang dituliskan oleh Armando Cortesao disebut The Batas, Battas or Bataks were the inhabitants of the hinterland of northern Sumatra. Lihat, The Summa Oriental of Tomme Pires. An account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1513. Armanda Cortesao (editor), 1967, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited.

⁴⁶Demikian diskusi penulis dengan beliau di sebuah jejaring sosial.

⁴⁷Penulis berterimakasih untuk pandangan Prof. Uli Kozok mengenai Kerajaan Nagur ini. Keberadaannya memang masih membutuhkan banyak penelitian dari para ahli sejarah.

⁴⁸Lihat Ibn Battuta: 1929. Travels in Asia and Africa 1325-1354. translated by HAR.Gibb, George Routledge and Sons. London, pp.273-6. Atau penjelasan ringkas tentang perjalanan Battuta dalam Anthony Reid. 1995. Witness to Sumatra: A Travelers Anthology. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

⁴⁹Di daerah Nagaraja, Sipispis, Raya, Silou Kahean dan Raya Kahean masih terdapat marga Damanik Chola, nama "Chola" ini mirip dengan nama Kerajaan Cholaramandel dari India Selatan. Mereka mengakui leluhur mereka berasal dari sini. Di Simalungun marga memang banyak merujuk pada tempat asal-usulnya. Kemungkinan orang India dari Chola ini pernah menetap di Simalungun dan kawin dengan penduduk lokal. keturunannya disebut Damanik Chola. Wawancara dengan Jamerdin Damanik (60) di Hutadolog, Desember 2012.

⁵⁰Kong Yuanzhi. 2007. Muslim Tionghoa Cheng Ho. Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara. Jakarta: Pustaka Obor.

⁵¹Ma Huan, 1970, Ying Yai Sheng Lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores 1433. Feng Ch;eng-Chun (editors). Cambridge: Hakluyt Society.

⁵²Dalam buku yang ditulis oleh Juandaha Raya P. Dasuha, disebutkan bahwa "Kerajaan Nagur pada tahun 1293-1295 di Invasi oleh kerajaan Singosari atas perintah Kertanegara dibawah panglima perangnya Indrawarman dari

Damasraya Djambi. lihat, Tole den Timorlanded das Evangelium, (2003)
Pematang Siantar: Kolportase GKPS

⁵³Sebagaimana diketahui bahwa, sejak terbentuknya kesultanan Pasai pada 658 H (1260 M) oleh Malikul Al Saleh, Aceh memiliki keinginan untuk melenyapkan seluruh kerajaan yang ada di Sumatra dan menjadikannya sebagai daerah vasal untuk menguasai jalur perdagangan. Sehingga, Aceh senantiasa melancarkan serangan ke pesisir timur Sumatra Utara hingga ke Bintan. Periksa, HM. Zainuddin, 1961. Tarich Atjeh dan Nusantara. Djilid-I. Medan: Pustaka Iskandar Muda atau T. Lukman Sinar. 2006. Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatra Timur. Medan.

⁵⁴Nagur memiliki pasukan panah beracun yang mampu menaklukkan serta menggagalkan serangan Aceh. Teknologi ini masih dipraktekkan orang Simalungun dalam perlawanannya melawan Belanda dan dalam perburuan tradisional. Panah beracun itu diperbuat dari semacam getah dan ramuan tradisional. Sampai tahun 1980-an, keahlian orang Simalungun meramu racun tradisional menjadi momok di tengah masyarakat, orang Simalungun dipandang sebagai parsantou, pamutas (istilah tradisional menyebut tukang racun) oleh etnik non Simalungun, khususnya orang Batak Toba/pendatang yang rupanya sering jadi sasaran racun tradisional ini. Sekarang sudah sukar menemukan orang Simalungun yang ahli dalam meramu racun tradisional ini.

⁵⁵Memang di sekitar kampung Nagaraja ini (sebenarnya Nagur Raja) masih terdapat perkampungan lain yang bersinggungan dengan nama "Nagur". Misalnya, Nagur Panei, Mariah Nagur, Nagur Usang dan Nagur Bayu. Bahkan di Kecamatan Tanjung Beringin Serdang Berdagai terdapat nama kampung bernama Nagur. Selain itu di daerah TigaDolog masih terdapat nama kampung bernama Nagur yang letaknya jauh di pedalaman dan sulit ditempuh. Berdekatan dengan kampung Nagur ini terdapat tempat keramat bernama Batu Gajah sisa candi peninggalan agama Hindu yang sudah pernah diteliti tim arkeologi dari Medan yang menurut perkiraan didirikan sejak abad ke-5 Masehi.

⁵⁶Periksa Paul Michel Munoz, 2009. Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI). Yogyakarta: Mitra Abadi.

⁵⁷Lihat dan periksa buku pada catatan kaki nomor 21 diatas.

⁵⁸Lihat buku yang ditulis oleh Dietric Jansen, 2003. *Gonrang Simalungun: Arti dan Fungsinya pada Masyarakat Simalungun*. Medan: Bina Media

⁵⁹Periksa Uli Kozok. 1992. *Warisan Leluhur. Bahasa dan Aksara Batak*, Jakarta: Gramedia dan 2007, *Surat Batak: Sejarah dan Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja*. Jakarta: KPG. Demikian pula pendapat Voorhoeve sebagaimana yang dicatat oleh Batara Sangtie yakni: huruf penutup suku kata k,d,g dan uy tidak terdapat di antara suku-suku kata bahasa daerah Batak lainnya. Hanya terdapat pada suku-suku kata bahasa daerah Simalungun. Ini lebih mendekatkan diri kepada bahasa Sansekerta yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. *Periksa Sejarah Batak*, 1977. Balige: Karl Sianipar Company.

⁶⁰J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 34-35.

⁶¹Mohammad Said, *op. cit.*, hlm. 143.

⁶²*Ibid.*, hlm. 153. Di Museum Simalungun Pematangsiantar terdapat meriam-meriam kuno buatan Portugis yang diperkirakan sudah berumur ratusan tahun, bahkan ada di antaranya konon sudah ada sejak abad XV. Apakah meriam-meriam ini berasal dari tanda pengesahan raja berempat oleh sultan Aceh?

⁶³Lihat Tengku H. M. Lah Husny, *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950* (Medan: BP Husny, 1975), hlm. 47.

⁶⁴Daniel Perret, *Sumatera Timur Laut dalam Ruang Aceh sehingga Akhir Perang Aceh*, *Jurnal Terjemahan Alam dan Tamaddun Melayu*, 2011, hlm. 82.

⁶⁵"*Mededeelingen Betreffende Het Landschap Panei en Het Rajahgebied*" dalam: *Bijdragen Indische, Taal-, Land en Volkekunde* (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1904), hlm. 559.

⁶⁶W. B. Sidjabat, *Ahu Sisingamangaraja* (Jakarta: Sinar Harapan, 2007), hlm. 70-71.

⁶⁷Lebih jauh dapat dibaca karya L. Castles, "Statelessness and Stateforming Tendencies among The Batak Before Colonial Rule", dalam: Anthony Reid and Lance Castles (eds.), *Pre-Colonial State Systems in South East*, *Monograph of The Malaysia Branch of The Royal Asiatic Society*, No. 6, Kuala

Lumpur, 1975, hlm. 75.

⁶⁸J. C. Vergouwen, op. cit., hlm. 130.

⁶⁹Lihat R. William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study* (New Haven dan London: Yale University Press, 1970), hlm. 20.

⁷⁰W. H. Schadee, *De Uitbreiding van Ons Gezag in De Bataklanden* (Leiden: S. C. van Doersburgh, 1920), hlm. 18. Di Tanah Karo raja berempat terdiri dari: Lingga, Barus Djahe, Suka dan Sarinembah.

⁷¹J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 214.

⁷²Diolah dari berbagai sumber berupa dokumen dan hasil wawancara dengan nara sumber yang berkaitan dengan topik ini.

⁷³Jahutar Damanik, *Sang Naoealoe dalam Arena Perjuangan Bangsa Indonesia* (t.p.: Medan, 1981), hlm. 26.

⁷⁴Wawancara dengan Kadim Morgan Damanik di Pematangsiantar.

⁷⁵J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 56-58.

⁷⁶Silsilah Raja-raja Siantar ditulis Tuan Syahalam Damanik, 15 Desember 1997.

⁷⁷Seminar draft Sejarah Simalungun di kantor Disparsenibud Pamatangraya, 8 Desember 2012.

⁷⁸Sumatera Utara dalam *Lintasan Sejarah* (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1994), hlm. 53.

⁷⁹J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 101-102.

⁸⁰Tuan Musa Sinaga, *Asal-usul Tuan Hojong Hataran* (Berkedudukan di Pamatang Djorlang Hataran), manuskrip tahun 1967.

⁸¹Sesuai penjelasan dari Arifin Alamsyah Sinaga dan Gindo Hilton Sinaga, Pematangsiantar, 20 Desember 2012.

⁸²J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 58-59.

⁸³J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 58-63.

⁸⁴Anonim, "Nota van Toelicting Betreffende de Simeloengoensche: Lancschappen Si Antar, Pane, Tanah Djawa en Rajah" *Tijdschrift Indlandsche Taal-, Land en Volkekunde deel LI*, Batavia:Albrecht en Co, S'Hage Nijhoff, 1909, hlm. 555.

⁸⁵Buku harian Lettu Pens. Tuan Musa Sinaga (Pematangsiantar, 1963),

hlm. 68-81.

⁸⁶Stamboom Kerajaan Tanah Jawa tanggal 4 Maret 1963

⁸⁷TBA Purba Tambak, Sejarah Keturunan Silou, Pematangsiantar, 1967.

⁸⁸Lihat uraian Pustaha Bandar Hanopan sebagaimana ditulis kembali oleh Raja Dolog Silau terakhir (1942-1948) Tuan Bandar Alam Purba Tambak, Sejarah Keturunan Silau (Pematang Siantar: Percetakan HKBP, 1967), halaman 10.

⁸⁹Pustaha ini adalah peninggalan dari Raja Silau ayahanda Tuan Suha Bolag yang dibawanya pada pelariannya dari Silau Buttu karena hendak dibunuh abangnya sendiri. Menurut M. D. Purba, pustaha ini telah hangus terbakar bersama rumah Guru Raya Tuan Borahim Purba Dasuha di Pamatang Raya pada aksi agresi Belanda kedua tahun 1947.

⁹⁰J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 64.

⁹¹Anonim, Mededelingen Betreffende He Landschap Panei en Het Rajahgebied, 1904, hlm. 561.

⁹²Anonim, Mededelingen, hlm. 562.

⁹³M. D. Purba, Pustaha Panei Bolon, Pematangsiantar, 7 Oktober 1970, hlm. 11-12.

⁹⁴J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 68.

⁹⁵Taralamsyah Saragih, Saragih Garingging (Medan, 1981), hlm. 3-6.

⁹⁶Julianus Saragih dan Pan Djapoltik (Ihutan Bolon Garingging), "Buha Sahap hata ni Demban Sayur" (Medan, 1981).

⁹⁷Stamboom Keradjaan Raja diperboeat di hadapan seripadoeka Radja Gomok Radja Negeri Raja (koleksi pribadi). Pamatangraja, 8 Maart, 1937.

⁹⁸Saat itu penulis buku ini diundang resmi sebagai narasumber oleh Walikota Tebingtinggi dan langsung berbincang dengan Tengku Nurdinsyah Al-Haj di acara tersebut.

⁹⁹Ibnu Hibban Saragih, "Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Padang dan Tebingtinggi" dalam: Juandaha R Purba (ed.), Orang Simalungun Pendiri Tebingtinggi (Tebingtinggi: DPC PMS Tebingtinggi, 2011), hlm. 40.

¹⁰⁰Lihat Juandaha Raya P. Dasuha (editor), Orang Simalungun Pendiri Tebingtinggi: Mengungkap Tabir Sejarah Awal Berdirinya Kerajaan Padang dan Tebingtinggi (Tebingtinggi: DPC PMS Tebingtinggi, 2011), hlm. 24.

¹⁰¹J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 78-81.

¹⁰²D. Kenan Purba dan J. D. Poerba, "Sejarah dan Perkembangan Marga Purba Pakpak" dalam Buku Kenangan Rondang Bintang Purba Pakpak se-Jobotabek, Jakarta, 1994, hlm. 29.

¹⁰³Benjamin Damanik, "Harajaan Silima Huta", dalam: Sinalsal No. 25/ April 1933/Tahun II, hlm. 9-11.

¹⁰⁴Gindo Hilton Sinaga, Sistem Pemerintahan Sosial dan Politik Pada Zaman Raja Marpitu di Simalungun, makalah Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun di USI Pematangsiantar, 22 Oktober 2010, hlm. 8-9.

¹⁰⁵J. Wismar Saragih, "Baritani Tuan Rondahaim" (Pamatangraya, 1931) dalam Mansen Purba, Kepahlawanan Tuan Rondahaim: Sebuah Kisah Menentang Penjajahan di Simalungun (Bina Budaya Simalungun: Medan, 1993), hlm. 272.

¹⁰⁶Ada sumber dari pihak marga Girsang menyebutkan leluhur mereka bernama si Girsang adalah keturunan marga Sihombing Lumbantoruan dari Nagasaribu Siborong-borong Humbang Hasundutan yang melarikan diri ke Lehu dari sana ke Nagasaribu Silimakuta.

¹⁰⁷J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 81-83.

¹⁰⁸TBA Purba Tambak, Sejarah Simalungun (t.p.: Pematangsiantar, 1984), hlm. 119; B. J. Girsang (Nagasaribu).

¹⁰⁹Tengku Lucman Sinar, Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatera Timur, 2008, hlm. 49, 53-55.

¹¹⁰Ibid, hlm. 95.

¹¹¹Tengku Luckman Sinar, op. cit., hlm. 89-90.

¹¹²M. D. Purba, Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun, Medan, 1977, hlm. 54.

BAB III

DEMOGRAFI UMUM ETNIS SIMALUNGUN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat Simalungun

1. Gambaran Geografis dan Kependudukan



Gambar 11: Suasana huta di Simalungun tempo dulu, 1930
Sumber: kitlv.nl

Daerah yang disebut Simalungun sekarang ini adalah kumpulan dari tujuh daerah swapraja (*landschap*) yang dibentuk Belanda pasca ditetapkannya ketujuh daerah swapraja Simalungun masuk ke dalam lingkungan pemerintahan Hindia Belanda. Penetapan itu dilakukan

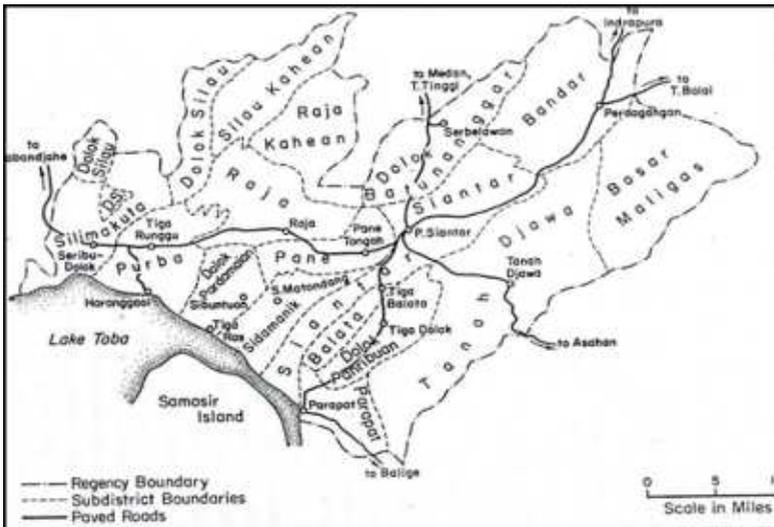
oleh pemerintah Hindia Belanda dengan beslit nomor 531 tanggal 12 Desember 1906. Orang Karo dan Pakpak sampai hari ini menyebut daerah ini Simelungun, artinya daerah yang sepi (lungun). Van Dijk kontrolir Toba yang pernah menjelajahi daerah Simalungun tahun 1890 menyebut bahwa Tanjung Kasau, Tanah Jawa dan Siantar adalah daerah yang dikenal penduduk Toba dengan nama Simalungun. *Lungun* di Toba berarti penduduknya jarang atau tanah yang ingin dilihat orang.¹ Situasi daerah Simalungun yang *lungun* itu memang dirasakan benar oleh petugas zending dari Jerman dan Toba yang memasuki daerah ini di tahun awal abad XX. Agak mengherankan dengan penduduk yang sedikit, suku Simalungun bisa mendirikan koloni di daerah-daerah yang berdekatan dengan kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur. Atau boleh jadi sebaliknya sesuai dugaan asal-usul orang Simalungun yang menyebar dari pantai ke pedalaman Sumatera, hunian orang Simalungun awalnya bermula dari pesisir Timur dan perlahan-lahan mendirikan kerajaan-kerajaannya di pedalaman.

Secara geografis daerah yang didiami orang Simalungun memanjang mulai dari bibir pantai Laut Tawar atau Danau Toba hingga mencapai pesisir Timur Sumatera. Adapun daerah-daerah pesisir yang sebelumnya dihuni orang Simalungun berangsur-angsur sesuai perjalanan sejarah Sumatera Timur bergabung atau digabungkan dengan kesultanan-kesultanan Melayu. Sampai masuknya Belanda pada tahun 1865, daerah yang masih tersisa di dekat pantai Timur adalah Tanjung Kasau. Daerah yang paling dekat dengan pantai ini dulunya bagian dari distrik Bandar yang merupakan wilayah Kerajaan Siantar. Pargurouan atau

Pagurawan dalam tradisi raja-raja Siantar merupakan tempat peristirahatan para keluarga raja pada saat-saat tertentu. Van Dijk menjelaskan bahwa Tanjung Kasau akhirnya dipisahkan Belanda dari Siantar dengan alasan bahwa daerah ini dianggap daerah Melayu yang penduduknya biasa berbicara bahasa Melayu dan Simalungun serta sudah memeluk agama Islam.² Tanjung Kasau adalah sekian contoh daerah Simalungun yang dikeluarkan dari wilayah raja-raja Simalungun dengan alasan politis-ekonomis Belanda. Pada saat Belanda menetapkan Simalungun sebagai bagian dari *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden*, batas-batas daerah Simalungun adalah seperti yang ada sekarang ini. Berbatas dengan Batu Bara, Tanah Datar dan Limalaras dan Kesultanan Asahan dengan batas alam Sungai Silou Tua.³ Di sepanjang pantai Danau Toba berbatas dengan Ajibata yang memisahkannya dari Tapanuli. Sedangkan dengan Karo berbatas di punggung gunung Sipiso-piso yang memisahkannya dengan Tanah Karo. Ke sebelah timur dan selatan, daerah Simalungun berbatas dengan *onderafdeeling* Padang dan Bedagai.⁴

Penetapan batas-batas Simalungun dengan Tapanuli ditetapkan dalam *Staatsblad* nomor 604 tahun 1908 sekaligus menetapkan batas daerah Aceh dengan Tanah Karo. Untuk ketujuh daerah kerajaan-kerajaan Simalungun batas-batasnya ditetapkan dengan beslit gubernur jenderal tanggal 27 September 1913 nomor 24 *bijblad* nomor 7922. Sesuai pengukuran yang dilakukan, daerah yang masuk ke dalam *onderafdeeling* Simeloengoen mencakup luas wilayah 441.380 hektar. Masing-masing luas ketujuh daerah swapraja Simalungun⁵ adalah berikut ini:

1. Siantar (93510 hektar).
2. Tanah Jawa (158.140 hektar).
3. Panei (47.400 hektar).
4. Raya (58.900 hektar).
5. Dolog Silou (35.160 hektar).
6. Purba (23.270 hektar).
7. Silimakuta (25.000 hektar).



Gambar 12: Peta Daerah Onderafdeeling Simalungun menjelang masuknya Jepang (Sumber : RW Liddle, 1970)

Secara umum daerah Panei, Raya, Dolog Silou, Purba, sebagian Tanah Jawa, Siantar dan Silimakuta sebagian besar berada di dataran tinggi yang berhawa cukup sejuk. Sedangkan Siantar, Tanah Jawa dan sebagian daerah Panei berada di dataran rendah berhawa panas. Daerah-daerah berhawa panas ini disebut orang Simalungun *jahei-jahei* atau daerah hilir. Sedangkan penduduk pedalaman di pegunungan disebut *parurang rih* atau penduduk yang

dikelilingi alang-alang.

Hutan di Simalungun pada masa sebelum masuknya perkebunan meliputi hampir seluruh daerah Simalungun. Selain hutan lebat yang ditumbuhi pohon-pohon besar, dataran alang-alang pun sangat luas. Di hutan perawan ini hidup banyak hewan-hewan buas, seperti gajah, harimau (*begu*), badak (*barak*) dan beruang (*gipul*). Harimau sangat ditakuti oleh masyarakat lokal, dia digelari *ompung* oleh masyarakat Simalungun. Untuk menghindarkan diri dari kebuasan binatang-binatang ini, orang Simalungun mendirikan rumahnya bertiang tinggi dan berkelompok di suatu perkampungan (*huta*) yang dikelilingi pagar alami seperti bambu berduri atau pertahanan buatan yang disusun dari batu-batu besar dengan parit pertahanan di sekitar kampung. Kadang-kadang kampung didirikan di daerah yang dikelilingi pertahanan alam seperti jurang atau perbukitan yang hanya memiliki dua pintu masuk dan keluar yang disebut *horbangan*. *Horbangan* ini siang malam dijaga oleh penduduk kampung dengan bergiliran yang disebut *parari*. Setiap orang yang masuk kampung harus minta izin dari penguasa setempat melalui *parari* yang bertanya tentang asal usul dan maksud tujuan orang asing memasuki kampung mereka.

Kesuburan tanah Simalungun sudah diakui orang Eropa sejak dulu. Kesuburan tanah itu ditunjang dengan pegunungan yang mengalirkan sungai-sungai yang semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sayangnya menurut penelitian kebanyakan kesuburan tanah di Simalungun hanya berada di permukaannya saja yang dilapisi humus yang cukup tipis namun kaya organik yang mendukung kegiatan pertanian.

Humus ini bisa terkikis terbawa arus hujan bila tidak dijaga betul kondisi tanahnya yang di bawahnya terdapat batu vulkanik dan kwarsa.⁶ Sungai-sungai di Simalungun umumnya tidak bisa dilayari karena terletak di daerah yang bertebing curam di kiri kanannya. Pengecualian adalah sungai-sungai besar di hilir sungai Bah Bolon dan Bah Pamujian di daerah Bandar yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai Bah Hapal dari Kampung Perdagangan di Bandar Hilir pada perjalanan van Dijk tahun 1893 masih bisa dilayari dengan kapal sampai ke muara sungai Bah Hapal di tepi pantai Selat Malaka. Van Dijk melaporkan dengan posisi sungai-sungai di Simalungun yang berhulu di pegunungan dan berakhir di Selat Malaka sangat potensial mendukung pembukaan persawahan di Simalungun dengan cara membuat kanal di antara sungai-sungai itu. Kesuburan tanah Simalungun didukung sungai-sungai tersebut diperkirakan akan meningkatkan hasil panen padi sawah.⁷ Sungai terpanjang Bah Bolon memiliki panjang 2000 kilometer. Di antara sungai-sungai itu kadang-kadang terdapat genangan air yang cukup luas mirip danau kecil. Danau kecil itu di Simalungun dinamakan *longo* di Bandar atau di Tanah Jawa dan Raya disebut *bawang*. Danau kecil itu pada masa Belanda dijadikan sumber air untuk saluran irigasi modern mengairi ribuan hektar sawah. Bawang atau longo itu dalam keyakinan penduduk bermuatan spiritual-magis. Bawang Silo Raya pada saat airnya tiba-tiba mengering oleh masyarakat lokal dianggap pertanda buruk atau *simandatang*, tepat pada saat itu ibunda Tuan Rondahaim meninggal dunia⁸.

Selain sungai, di Simalungun terdapat gunung dan pegunungan. Pegunungan di Simalungun pada umumnya

puncaknya berada di sekitar punggung tepi Danau Toba dan melandai terus hingga mencapai dataran rendah di pesisir pantai Timur Sumatera. Tidak terdapat gunung berapi di Simalungun. Gunung di Simalungun umumnya berada di sepanjang pantai Danau Toba dan di pertengahan daerah Simalungun dengan pantai Timur Sumatera. Kita sebutkan di sini Gunung Dolog Simarjarunjung di sebelah utara Tigaras. Dolog Batu Mardinding (1608 meter), Dolog Marpalatuk (1770 meter), Dolog Sisae-sae (1764 meter), Dolog Batu Loting (1810 meter), Dolog Sipollung, Dolog Siabal-abal dan Dolog Parparean. Ketiga gunung yang terakhir ini adalah batas alam Simalungun dengan Asahan dan Tapanuli. Dari celah-celah gunung ini mengalir sungai Bah Tongguron dan Bah Boluk yang keduanya menyatu di Sungai Bah Bolon yang bermuara ke Sungai Tanjung di Batubara. Selain sungai yang dipakai orang Simalungun mengadakan perjalanan ke pantai timur Sumatera, mereka juga memanfaatkan jalan setapak dan jalan raya yang dibuka penguasa daerah dalam melancarkan urusan bisnis mereka. Produk hutan di Simalungun seperti damar, rotan dan lain-lain dipasarkan di pantai timur Sumatera yang ramai dikunjungi oleh para saudagar. Hutan-hutan lebat terhampar luas sejak dari pantai Timur Sumatera hingga ke pegunungan di pedalaman tanah Simalungun; hutan semakin jarang di daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai Danau Toba. Hutan lebat terhampar di sekitar pegunungan terutama di sekitar gunung Simbolon di daerah Raya yang memisahkannya dengan daerah Padang Tebingtinggi.

Sebagian besar daerah-daerah Simalungun berada di pedalaman Sumatera Timur, dataran rendah berada di

daerah yang berbatasan dengan kesultanan-kesultanan Melayu. Secara geografis daerah Simalungun bisa kita bedakan dengan daerah pegunungan yang terdiri dari dataran tinggi di dekat pesisir Danau Toba dengan kisaran tinggi dari permukaan laut antara 1200-1400 meter. Daerah pegunungan ini sebagian besar berada di sebelah barat. Di sebelah timur secara umum terdiri dari dataran rendah yang luas yang rata-rata ketinggiannya 100 meter dari permukaan laut. Iklimnya di daerah ini rata-rata suhu di antara 23-24,6 derajat celsius seperti di Pematangsiantar; sementara di SaribuDolog yang ketinggiannya 1400 meter cukup dingin dengan suhu antara 18,3-19,6 derajat celsius. Dataran tinggi di daerah Purba sampai ke Silimakuta terkenal dengan daerah pertanian sayur-sayuran yang potensial. Dataran rendah di daerah Siantar, Tanah Jawa dan Panei hilir sejak masuknya Belanda menjadi daerah penanaman modal asing dengan usaha perkebunan besar. Adapun daerah Raya kurang baik dijadikan daerah pertanian dan perkebunan dengan kondisi alamnya yang berbukit-bukit dan dipenuhi ngarai dan lembah dengan pengecualian Raya Kahean yang pada zaman Belanda dimanfaatkan untuk pembukaan perkebunan.⁹

Penduduk yang mendiami daerah Simalungun umumnya sebelum masuknya para pendatang adalah etnis Simalungun atau Batak Timur. Perkiraan kasar antara tahun 1850-1900 orang Simalungun yang mendiami daerah Simalungun berkisar 70.000 jiwa.¹⁰ Angka ini terlalu kecil sebetulnya bila dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Onderafdeeling Simeloengoen yang penduduknya orang Simalungun sejak dulu sebagai penduduk asli. J. Wismar

Saragih pernah menghitung secara kasar berdasarkan hasil sensus (volkstelling) tahun 1930 jumlah suku Simalungun di Sumatera Timur. Angkanya jauh melebihi perkiraan Tideman. Dia menghitung ada 103.387 orang suku Simalungun di Sumatera Timur: Onderafdeeling Simeloengoen sebanyak 87.696 orang, Onderafdeeling Serdang sebanyak 10.016 orang dan Onderafdeeling Padang dan Bedagai sebanyak 5.675 orang.¹¹ Angka ini masih boleh bertambah lagi dengan penduduk Tanjung Kasau, Batubara dan daerah yang di seberang Bah Siloutua yang memisahkan Simalungun dengan Asahan ditambah daerah Sipituhuta di Tanah Karo yang penduduk aslinya adalah suku Simalungun. Angka yang akurat memang belum ada yang bisa menjelaskan berapa sebetulnya suku Simalungun di daerah Sumatera Timur, tetapi perkiraan kita paling tidak pada masa sebelum tahun 1930 ada lebih kurang 250.000 orang suku Simalungun di Sumatera Timur dengan konsentrasi terbesar di daerah *Onderafdeeling* Simeloengoen. Suku Simalungun yang berdiam di luar *Onderafdeeling* Simeloengoen itu agaknya sudah dihitung bukan orang Simalungun lagi dan lebih dianggap Melayu oleh petugas sensus pada masa itu (dan mungkin juga sampai hari ini).

Statistik penduduk Simalungun pada tahun 1962 oleh Oudemans¹² berdasarkan etnis di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Simalungun Atas						
No	Daerah	Jumlah Penduduk	Simalungun (%)	Batak Toba (%)	Jawa (%)	Suku lainnya (%)
1	Silimakuta	10.246	90	2	0,5	7,5

2	Purba	13.076	95	2	0,0	3
3	Dolog Silou	6.737	95	1	1	3
4	Silou Kahean	9.906	85	2	10	3
5	Raya Kahean	6.760	90	3	2	5
6	Dolog Pardameian	11.054	80	15	2,5	2,5
7	Raya	19.250	95	2	2	1
Simalungun Bawah						
8	Siantar	63.263	10	40	40	10
9	Sidamanik	28.543	30	20	30	20
10	Panei	38.210	30	30	30	10
11	Jorlang Hataran	12.710	20	50	20	10
12	Tanoh Jawa	95.576	20	30	30	20
13	Bosar Maligas	48.801	20	30	30	20
14	Dolog Panribuan	15.105	10	60	10	20
15	Girsang Sipangan Bolon	5.976	10	70	2,5	17,5
16	Dolog Batunanggar	44.145	30	20	40	10
17	Bandar	97.477	30	20	40	10
Total		526.835				

Dari statistik Oudemans di atas tampak bahwa dominan suku Simalungun setelah masuknya Belanda berada di Simalungun Atas disusul etnis Batak Toba dan Jawa. Sedangkan di daerah Simalungun Bawah yang merupakan daerah perkebunan sejak zaman Belanda didominasi oleh etnis Batak Toba dan Jawa. Kedua etnis terakhir ini memang sengaja didatangkan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1907 dalam rangka tujuan politis ekonomis dan

agama di Simalungun. Kaum Batak Toba Kristen sengaja didatangkan Belanda selain untuk membuka sawah buat persediaan logistik beras buruh perkebunan di Simalungun juga dalam rangka mempercepat konversi penduduk asli Simalungun yang beragama suku ke agama Kristen Protestan. Suku Jawa didatangkan Belanda selaku buruh kontrak (*contract coeli*) di perkebunan-perkebunan yang sudah dibuka Belanda di Simalungun. Sampai tahun 1960 agama orang Simalungun sebagai penduduk asli daerah Simalungun di Simalungun Atas dominan Kristen dan Katolik dan di Simalungun Bawah dominan beragama Islam. Meskipun berbeda agama dan keyakinan, kerukunan umat beragama di antara suku Simalungun cukup baik dan toleran. Ini bisa dimaklumi, karena di setiap keluarga-keluarga Simalungun kedua agama itu ada di antara mereka. Bahkan di dalam satu kerabat dekat, kedua agama itu rata-rata dipeluk oleh mereka, sehingga pertentangan dengan dasar perbedaan agama atau keyakinan hampir tidak pernah ditemukan di antara orang Simalungun sampai saat ini.

Orang Simalungun di antara mereka sesuku biasanya berbahasa Simalungun dan dengan orang yang lain suku, orang Simalungun cenderung menyesuaikan dirinya dengan bahasa lawan bicaranya yang beda suku itu. Anggapan sebagian orang menyebutkan itu adalah sisi kelemahan orang Simalungun yang kurang bisa menjaga bahasa daerahnya sendiri. Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa itu dilakukan orang Simalungun untuk mengatasi gangguan berkomunikasi dengan orang lain yang tidak menguasai bahasa Simalungun dengan baik. Ketimbang menunggu lawan bicaranya mengungkapkan perasaannya dalam

bahasa daerah yang tidak dikuasainya, orang Simalungun mengambil alih bahasa lawan bicaranya untuk melancarkan komunikasi dengan memakai bahasa lawan bicaranya. Agaknya inilah yang menjadi penyebab mengapa umumnya orang Simalungun mampu menguasai bahasa asing relatif lebih cepat. Di daerah perbatasan Simalungun dengan Karo, umumnya orang Simalungun mampu berbicara dalam bahasa Karo, sebaliknya orang Karo tidak mampu menguasai bahasa Simalungun. Di daerah yang berbatasan dengan bahasa Batak Toba, orang Simalungun mampu berbahasa Toba, demikian juga di dengan daerah yang berbatasan dengan Melayu, orang Simalungun mampu berbahasa itu. Kemampuan berbahasa Melayu sebelum tahun 1890-an sudah merata di seluruh Simalungun. Van Dijk dalam kunjungannya ke Tanjung Kasau, Tanah Jawa dan Siantar menyaksikan sendiri kemampuan orang Simalungun berbahasa Melayu dengan tetangganya di pesisir pantai Timur Sumatera. rata-rata orang Simalungun lancar berbahasa Melayu bahkan bukan hanya di lingkungan kerajaan saja, tetapi jauh sampai ke pedalaman Simalungun. Kemampuan berbahasa Melayu ini di kalangan orang Simalungun sangat menguntungkan pemerintah kolonial dalam mengkomunikasikan tujuan-tujuan politisnya di Simalungun. Hal yang seperti ini kata Van Dijk tidak ditemukan di Toba. Di Simalungun rata-rata kepala-kepala adat menguasai dan fasih berbahasa Melayu, di Toba kemampuan berbahasa Melayu ini sangat kurang bahkan menurut van Dijk yang menjabat kontrolir Toba dalam kunjungannya ke Simalungun di tahun 1893, kepala-kepala adat di Toba hampir tidak ada yang mengetahui dan menggunakan bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu

pada masa kolonial adalah bahasa resmi administrasi pemerintahan di Hindia Belanda di samping bahasa Belanda yang adalah bahasa resmi utama.¹³

Suku Simalungun di tahun 1890-an lebih suka tinggal di ladang menjaga perladangannya dari serangan hama yang merusak tanaman mereka. Gajah yang bergerombol berpotensi merusak tanaman padi gogo petani suku Simalungun. Demikian pula monyet, beruk dan yang sebangsa dengan itu. Raja Panei pada tahun 1904 menghadapi ganasnya hama gajah yang merusak tanaman rakyatnya di Pamatang Panei pernah menulis surat kepada Nommensen di Pearaja Tapanuli memohon Nommensen dapat mengirimkan senjata api jenis "*bedil setan*" untuk membunuh gajah yang sering merusak tanaman rakyatnya itu.¹⁴ Selain itu serangan babi hutan yang disebut *ailli* oleh orang Simalungun merupakan hama yang ganas yang daya rusaknya mirip dengan gajah. Dengan situasi ini orang Simalungun lebih banyak menghabiskan hidupnya di luar perkampungan (*huta*). Kondisi ini menyulitkan pejabat pemerintah kerajaan dan kolonial Belanda menyampaikan instruksi atau pemberitahuan tentang hal-hal yang menyangkut hak dan kewajibannya. Kadang-kadang para penguasa tradisional harus mendatangi perladangan warga untuk menyampaikan pengumuman dari raja atau pemerintah kolonial. Sistem berladang berpindah-pindah dengan menebas dan membakar hutan menyulitkan pemerintah untuk mengumpulkan mereka. Meskipun rata-rata penduduk mempunyai rumah di perkampungan, tetapi hampir setiap hari rumah itu ditinggal pergi pemiliknya ke ladang atau keperluan lain. Kalaupun rumah itu ditinggali

paling-paling yang tinggal di rumah itu hanyalah orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi bekerja dan anak-anak. Kondisi rumah rakyat secara umum lebih buruk dari rumah para penguasa tradisional. Rumah-rumah tradisional Simalungun umumnya berada di atas tiang yang mencapai dua meter tingginya dari permukaan tanah, bahkan kadang-kadang bisa mencapai empat meter. Rumah para penguasa tradisional lebih baik mutu dan arsitekturnya dari rumah rakyat biasa yang kadang-kadang lebih buruk dari kandang hewan beratapkanalang, berdinding tepas dengan tiang bambu sederhana. Rumah para penguasa tradisional yang disebut raja atau tuan disebut rumah bolon yang melukiskan keindahan dan mutu arsitektur tradisional Simalungun. Rumah raja atau partuanon biasanya di belakang atau di depan terdapat bangunan khusus yang bersatu dengan rumah induk yang disebut lopou yakni, tempat raja atau tuan menerima tamu dan ruangan belakang untuk dapur.¹⁵ Rumah selain tempat berteduh, melambangkan status dan kekayaan penghuninya. Raja Tanah Jawa dan raja Siantar mendirikan rumahnya di ibukota kerajaan yang disebut pamatang, di sekeliling rumah raja terdapat puluhan rumah rakyat dan pembantu-pembantu raja. Tiang dan kayu rumah biasanya dibuat dari jenis kayu juar, atapnya ijuk atau alang-alang, dindingnya dari anyaman bambu atau papan kayu tebal dan lantainya dari kayu nibung (*pangkuh*) atau papan kayu. Rumah raja biasanya lebih bagus dan rapi daripada rumah rakyat. Bentuk rumah ini banyak meniru rumah Melayu. Dengan pengecualiaan di daerah tepi Danau Toba lebih bersifat Toba arsitekturnya, terutama di Girsang, Sipolha sampai ke Tigaras. Van Dijk mencatat rumah tradisional

yang cukup bagus di Simalungun adalah rumah Tuan Anggi Siantar dan Tuan Purba, sedangkan rumah raja Siantar dan Tanah Jawa terkesan buruk karena rusak.

Proses membangun rumah di Simalungun cukup rumit dan melelahkan. Sejak merencanakan hingga membangun rumah itu sampai peresmianya harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara adat dan kepercayaan tradisional. Sayur Andreas Lingga Sitopu petugas Museum Simalungun di Pematangsiantar menerangkan rumitnya proses itu dalam karyanya *Mengenal Rumah Tradisional Simalungun*. Tidak sembarang kayu di hutan boleh digunakan untuk membangun rumah. Ada 14 kategori kayu yang tidak baik membangun rumah yaitu, *libungon, rob-rob, baraat, sande, tunggar, sining bayoh, runag purih, mabungkar, usop, ranggasan, mardorob, hapit, sogsog* dan *rohop*.¹⁶ Kategori kayu di atas tidak boleh dipakai membangun rumah karena dianggap membawa sial atau celaka kepada pemilik rumah kelak. Bentuk rumah di Simalungun tidak seragam, ada jenis-jenis rumah di Simalungun yaitu, *pinar horbou, pinar munsuh, pinar hurung manik, pinar bangkiring* dan *rabung lima*. Raja-raja dan orang-orang yang mampu di Simalungun umumnya membangun rumah dengan arsitektur *pinar horbou* dengan kepala kerbau bertengger di puncak rumahnya menyerupai kerbau yang berdiri gagah dan menyinarkan wibawa.¹⁷ Jumlah anak tangga menggambarkan status pemilik rumah. Untuk rumah raja dan partuanon biasanya bilangannya ganjil yaitu 3, 5, 7, 9 dan 11 dan untuk rumah rakyat jumlah tangganya harus genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Rumah para raja selain dilengkapi *lopou* biasanya di depan *lopou* terdapat *surambih* yaitu ruangan

khusus para pengawal pada malam hari, penyimpanan barang-barang dan tempat istirahat. Dahulu dalam proses pemancangan tiang rumah bolon dipersembahkan korban manusia yang kepalanya ditanam di tiang utama depan sebelah kanan rumah, gunanya untuk persembahan kepada dewata penjaga bumi bawah yang disebut *boraspati tanoh*. Korban itu biasanya anak-anak yang tidak jelas orangtuanya atau budak rampasan dari daerah lain.

Para gadis atau pemuda biasanya tidak tidur di rumah orangtuanya. Gadis-gadis tidur di rumah seorang janda di kampung itu yang kadang-kadang si janda berfungsi sebagai siholang (mak comblang) para gadis yang menjodohkan mereka dengan para pemuda atau laki-laki yang dikenalnya. Para pemuda atau laki-laki yang sudah menduda tidur di balei yaitu bangunan khusus di tengah-tengah kampung. Biasanya di balei ini terjadi proses belajar untuk menjadi pria dewasa dari laki-laki yang paling dituakan di balei itu. Hal yang dipelajari termasuk hal-hal yang bersifat magis dan spritual misalnya belajar memikat gadis dengan mantera yang disebut *dorma* atau *parkasih*. Diajarkan juga bagaimana menjadi pria perkasa bila sudah menikah kelak dengan gadis pujaannya termasuk ajaran-ajaran atau latihan-latihan fisik dan rohani yang dibutuhkan seorang laki-laki. Para duda biasanya meniup sordam yang iramanya mendayu-dayu menyayat hati bagi perempuan yang mendengarnya yagn kadang-kadang jatuh cinta dengan peniup sordam ini. Sedangkan para pemuda yang belum pernah menikah biasanya mencari jodohnya dengan mendatangi para gadis di *losung* (yaitu tempat menumbuk padi) di tengah kampung. Dengan permainan musik atau

kelahiannya bercerita, seorang pemuda berusaha memikat gadis yang diinginkannya untuk dijadikan isterinya.

Memang penulis-penulis asing sulit memahami arti uang yang dikeluarkan seorang laki-laki Simalungun dalam proses perkawinannya dengan seorang perempuan. Van Dijk dan Tideman menyebut proses itu jual beli barang, padahal sesungguhnya arti dari pemberian sejumlah uang atau barang berharga itu sungguh dalam artinya dalam budaya suku Simalungun. Pemberian barang atau uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah dalam rangka meringankan beban pihak pengantin perempuan dalam acara pesta perkawinan anaknya dan sebagai bentuk penghormatan pihak laki-laki kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Itulah sebabnya uang mahar itu disebut *partadingan* bukan *boli* atau *sinamot* yang biasa dipakai oleh suku Batak Toba. Jumlah *partadingan* itu biasanya lebih besar pada gadis dari kalangan kaum bangsawan dibandingkan rakyat biasa, karena calon suami gadis kaum bangsawan ini biasanya dari kelompok masyarakat bangsawan juga atau orang yang berkemampuan secara materi. Tetapi dibandingkan dengan adat di daerah yang berbatasan dengan Toba, jumlah mas kawin di sana lebih tinggi harganya. Sebagai contoh di Raya, biasanya maskawin seorang perempuan biasa jumlah *partadingan* adalah 12-48 dolar, sedangkan untuk perempuan bangsawan lebih tinggi yaitu 48-120 dolar atau 48-240 dolar. Jumlah ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan maskawin di daerah sekitar Danau Toba yang mencapai 1500 dolar seperti di Girsang, Sipolha dan Sipangan Bolon.¹²

Meskipun masyarakat Simalungun menganut paham

perkawinan poligami, adat melarang perkawinan di antara marga induk yang sama (*mardawan begu*). Pelanggaran adat ini diganjar cukup keras dengan diusir dari kampung sebab dianggap membawa sial dan memalukan keluarga dan orang sekampung. Jadi setiap orang harus mengambil isteri dari marga yang berlainan dengan marganya sendiri. Seorang laki-laki bermarga Purba dilarang mengambil isteri dari marga yang serupa dengan itu, sebaliknya dia harus mengambil perempuan yang berbeda marga dengannya untuk dijadikan isterinya, seperti marga Saragih, Damanik Sinaga atau Sipayung. Adat ini keras di Simalungun, walau kerabat dekat sekalipun yang harus dihormati menurut adat, si pelanggar ketentuan ini dihukum keras oleh adat tanpa pilih bulu. Raja Panei Tuan Bosar Sumalam sekitar tahun 1940-an, pernah mengusir pelaku kawin semarga ini meskipun si pelanggar adalah *tondong*-nya sendiri yang wajib dihormati secara adat. Si pelanggar yang bermarga Saragih kawin dengan perempuan marga Saragih. Raja Panei marah dan menghukumnya dengan mengusirnya keluar kampung dan membuangnya di suatu desa yang jauh dari istana, yaitu di daerah Dolog Batunanggar yang masih dalam wilayah takluk raja Panei.¹⁹ Para raja Simalungun lebih spesifik lagi, mereka diharuskan untuk menjemput permaisuri yang disebut *puang bolon* dari perempuan bangsawan yang adalah masih seketurunan dengan ibu atau nenek buyutnya turun temurun yang melahirkan raja dinasti mereka. Jadi raja Siantar marga Damanik harus menjemput isteri dari puteri tuan Silampuyang atau Sipoldas marga Saragih; raja Panei marga Purba Dasuha harus menjemput permaisurinya dari puteri raja Siantar marga Damanik, tuan Raya marga Saragih

harus menjemput permaisurinya dari puteri raja Panei atau tuan Bajalinggei marga Purba Dasuha. Seorang isteri utama raja tidak bisa disebut *puang bolon* bila permaisuri raja yang akan digantikannya masih hidup. Dia cukup disebut *puang poso* menunggu pengangkatannya sebagai *puang bolon* sesudah *puang bolon* meninggal dunia.²⁰ Pengangkatan seorang puang poso menjadi puang bolon harus melalui rapat dewan kerajaan (harajaan) dan dirayakan dengan upacara adat yang khidmat dan sakral. Sama dengan raja yang dinobatkan di depan jenazah raja yang digantikannya; seorang *puang poso* dinobatkan menjadi *puang bolon* juga di depan jenazah *puang bolon* yang digantikannya. Sesudah proses adat pelantikan selesai, barulah jenazah raja atau *puang bolon* itu boleh dimakamkan di pekuburan para raja yang disebut *jerat ni partongah*. Upacara memakamkan raja atau *puang bolon* ini disebut horja *manurun*. Sebelum ini dilangsungkan, raja atau *puang bolon* yang mangkat itu masih dianggap berkuasa, dia digelar raja atau *puang na modom*, artinya raja atau permaisuri yang sedang tidur. Setiap hari jenazahnya diberi makan dengan bubur khusus dan jenazahnya dirawat dengan ramuan khusus di dalam peti mati yang disimpan di rumah bolon. Meskipun disimpan di peti mati sampai bertahun-tahun, jenazah tidak mengeluarkan bau busuk, mayat perlahan-lahan mengeras hingga menyerupai mumi. Ini berkat ramuan khusus yang dibuat merawat jenazah tersebut.

B. Struktur Sosial :

1. Tolu Sahundulan Lima Saodoran

Merujuk pada teori antropolog Merville J. Herskovis, struktur sosial adalah pranata-pranata yang menentukan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan dengan demikian menyalurkan hubungan pribadi mereka.²¹ Struktur sosial secara operasional pada hakikatnya bersendikan sistem sosial marga yang patrilineal. Seperti kita ketahui suku Simalungun seperti suku rumpun Batak lainnya menganut sistem sosial marga yang patrilineal, walaupun dahulu orang Batak pernah mempraktekkan kehidupan atas dasar matrilineal (berdasarkan garis ibu) seperti dikemukakan Tideman.²² Dalam sistem ini orang Simalungun menganut sistem organisasi sosial berdasarkan garis keturunan vertikal dari leluhur yang sama (lineality). Secara *lineality* masyarakat Simalungun terdiri dari empat marga utama yang sifatnya *patrilineality exogamus* yaitu marga Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba dengan sub-sub marga dengan pengecualian marga Damanik yang tidak mempunyai sub marga selain asal-usul keturunan kampung leluhur mereka terdahulu. Sedangkan secara *affinity* masyarakat Simalungun diatur dalam suatu struktur sosial yang disebut *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* (tiga sama duduk, lima sejalan).

Orang Batak Toba dan Mandailing-Angkola mempunyai *Dalihan Natolu*, orang Karo *Rakutsitelu*, *Tutur Siwaluh Perkaden-kaden Sepuluhdua*, maka orang Simalungun mempunyai *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*, sistem kekerabatan yang berbeda dengan suku lainnya.

Tolu Sahundulan berarti: *Suhut* (sanina), *tondong* dan *boru*. Ketiganya merupakan satu kesatuan. *Suhut* yaitu semua yang satu marga dengan ego, *tondong* yaitu, semua yang merupakan anggota keluarga dari isteri ego dan isteri yang marsanina dan *boru* yaitu semua yang merupakan anggota keluarga dari saudara perempuan (*botou*)ego. Secara umum di Simalungun, *Tolu Sahundulan* ini wajib hadir dan berperan dalam upacara adat Simalungun. Secara singkat dapat disebutkan: *sanina pangalopan riah*, *tondong pangalopan podah*, *sanina pangalopan gogoh*, *sikkuta pangalopan uhur*. Jadi berbeda dengan Toba, *somba marhula-hula*, *elek marboru*, *manat mardongan tubu*.

Lima Saodoran berarti lima unsur kekerabatan tetapi masih dalam satu barisan kekeluargaan dengan ego. Kelimanya adalah unsur *Tolu Sahundulan* ditambah *Anakboru Mintori* dan *Tondong ni Tondong*. Di samping itu dalam setiap upacara adat Simalungun harus ada Anakboru Jabu, fungsionaris dalam kekerabatan Simalungun yang merupakan posisi penting dan vital dalam kekerabatan orang Simalungun, dia adalah "*bona ni andar atau basikah ni rumah*" (tangga menuju rumah) orang Simalungun. Siapapun yang berurusan dengan masalah adat, harus terlebih dahulu berurusan dengan *Anak Boru Jabu*. Fungsionaris ini tidak boleh dihunjuk dari sembarangan orang. Dia haruslah masih merupakan keturunan langsung dari "*boru ni hasuhuton*", seperti: *Anakni Amboru ni Suhut* (anak laki-laki dari saudara perempuan ayah atau kakek turun temurun). Jadi tidak semua orang bisa diangkat menjadi *Anak Boru Jabu*, sebab pengangkatannya harus melalui adat yang disebut "*pabangkitkon Anak Boru Jabu*" disaksikan oleh sanina yang

lain. Di Simalungun tradisi *Anak Boru Jabu* muncul sesuai konteks kerajaan Simalungun tempo dulu. Setiap raja di Simalungun (Siantar, Tanoh Jawa, Panei, Raya, Purba, Dolog Silou dan Silimahuta) masing-masing memiliki perangkat kerajaan yang disebut Dewan Kerajaan (*Harajaan*). Anggota-anggotanya salah satunya adalah *Anak Boru Lopou*. Kalau di Raya, Anak Boru Jabu bermarga Purba Sigumonrong, sebab mereka secara turun temurun mengambil isteri dari keturunan raja Raya bermarga Saragih Garingging. Anakboru Mintori kalau isteri ego merupakan "*panogolan*" dari *hasuhuton*. Misalnya, saya kawin dengan boru Damanik dan isteri saya merupakan *panogolan* dari marga Saragih Garingging, maka saya memanggil tulang kepada tulang dari isteri saya, sekaligus saya adalah *anak boru mintori* dari tulang isteri saya bermarga Saragih Garingging.

Sedangkan tondong ni tondong adalah mereka yang merupakan tondong dari tondong ego. Misalnya Raja Raya tondongnya bermarga Purba Pakpak dan Purba Pakpak tondongnya marga Damanik, maka Damanik adalah tondongni tondong dari raja Raya. Tondongni tondong ini harus hadir dalam upacara-upacara berskala besar seperti upacara kematian orangtua (sayur matua), mamongkot rumah, *patampej sihilap* (melantik raja) dan perkawinan.

Dengan demikian di Simalungun struktur sosial Simalungun ini terdiri dari dua kelompok. Masing-masing *Tolu Sahundulan* dan *Lima Saodoran*. *Tolu Sahundulan* yaitu tiga unsur kerabat untuk bermusyawarah merumuskan secara adat membantu *suhut* (yang punya hajatan/urusan adat keluarga). Ketiga unsur kerabat ini terdiri atas: *tondong* (*bride giver*), *sanina* dan *anakboru* (*wife taking group*).

Ketiganya mutlak harus hadir dalam setiap acara adat Simalungun yang tidak membutuhkan undangan yang banyak (*horja-horja adat na etek*). Tetapi dalam hal acara adat yang sifatnya besar dengan mengundang banyak orang dan acara adat yang penuh secara adat Simalungun (*adat na gok*). Maka kelompok *Lima Saodoran* yaitu kelima unsur harus hadir, sehingga di setiap adat seperti ini harus diundang lagi dua unsur kekerabatan Simalungun yaitu, *tondong ni tondong* dan *anakboru mintori (boru ni boru)*. *Tolu Sahundulan Lima Saodoran* dengan demikian adalah: *tondong, sanina, anakboru, tondong ni tondong dan anakboru mintori (boru ni boru)*.²³

2. Tondong dan Posisi Puang Bolon di Simalungun

Konsep kekerabatan suku Simalungun berkaitan bukan hanya dalam kelompok keluarga batih (keluarga inti) tetapi meluas dalam struktur pemerintahan di Simalungun. Seperti sudah disinggung terdahulu, setiap raja di Simalungun disyaratkan haruslah dilahirkan *puang bolon* dan permaisurinya dari kelompok marga *puang bolon* yang ditentukan adat kerajaan turun temurun. J. Tideman mantan asisten residen Simalungun dan Tanah Karo yang bertugas pada saat organisasi kerajaan masih eksis memerintah sebagai pemerintahan swapraja di Simalungun mengatakan: "Di Simalungun hanya putra raja dari *puang bolon (hoofdvrouw)* yang bisa menjadi raja. Puang bolon adalah putri (*bou*) seorang raja tertentu, dilahirkan setelah pengangkatan ayahnya menjadi raja. Jadi raja Siantar mengambil *puang bolon* dari Silampuyang, raja Tanah Jawa

dari Bandar, raja Raya dari Panei atau Bajalinggei. Adat jelas diberlakukan bagi para toehan dan partoehanon.”

Adat *puang bolon* ini mengikat *raja marompat* di Simalungun.²⁵ Kelompok *puang bolon* menjadi *tondong* pada raja yang mengawininya dan *tondong* adalah kelompok kerabat yang sangat dihormati di Simalungun. D. Kenan Purba malahan menyebut *tondong* dalam pengertian spiritual “*tuhan na dong*” (tuhan yang tampak) sebab kelompok ini diyakini bisa menurunkan berkat (*pasu-pasu*) kepada *anakboru*.²⁶ Pengertian ini tampak jelas dalam setiap acara adat *mangalo-alo tondong*, dalam prosesi penyambutan ini, pihak *tondong* berdiri beriringan bersama rombongannya dan disambut oleh pihak *hasuhuton* (tuan rumah) dari pihak keluarga *boru*-nya dengan *manortor sombah* (tari sembah). Pihak *anak boru* dengan iringan *gonrang* (musik tradisional) bersembah menundukkan kepala sembari mempersembahkan *apuram marbatu* (sirih dalam piring putih dengan sejumlah uang, tembakau dan gambir bulat) dengan posisi tangan menyembah sampai menyentuh tanah menyambut kedatangan pihak *tondong* ke acara pesta mereka. *Tondong* datang dengan menjujung *tombuan* yaitu makanan tradisional yang disebut *tinombu* dan diserahkan kepada yang *hasuhuton* (tuan rumah) sebagai simbol kehadiran dan bantuan mereka kepada pihak *hasuhuton*. Pihak *tondong* sekaligus juga menyampaikan *tumpak pangurupi* (bantuan) mereka kepada *hasuhuton* dengan sejumlah uang atau barang.

Poligami di antara raja-raja dan kaum bangsawan Simalungun adalah hal yang lazim. Perkawinan poligami ini boleh terjadi karena banyak hal. Tidak jarang raja beristeri

sampai puluhan bahkan ratusan perempuan. J. Wismar Saragih dalam *Barita ni Tuan Rondahaim* menyebutkan isteri (*nasipuang*) penguasa Raya Tuan Rondahaim Saragih Garingging (wafat 1891) ada 80 (delapan puluh) orang. Isteri sebanyak itu diperisteri Tuan Rondahaim dengan cara dijemput secara adat (terutama perempuan dari kalangan bangsawan (*boru ni na margoran*) atau semacam imbalan atas kesepakatan yang dibuat pihak lawan atau sekutu yang hendak menjalin pakta pertahanan bersama dengan pasukan Tuan Rondahaim. Sebab dengan menyerahkan seorang perempuan kepada Tuan Rondahaim, si pemberi perempuan itu otomatis berada di posisi *tondong* pada pihak Tuan Rondahaim, sekaligus pula pengakuan bahwa pihak pemberi perempuan harus dihormati dan dilindungi oleh Rondahaim.²⁷ Isteri raja dari kalangan bangsawan biasanya lebih tinggi statusnya dan diberikan beberapa orang budak membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Tetapi tidak jarang seorang perempuan yang menjadi isteri seorang raja ditelantarkan sang raja dan dibiarkan menghidupi dirinya sendiri di gubuk reot di tengah perladangan yang jauh dari istana raja meski tidak kehilangan statusnya sebagai *nasipuang* (isteri raja). Ibu Rondahaim Saragih penguasa Raya yang ditakuti Belanda bernama Puang Ramonta boru Suha puteri Guru Raya isteri Tuan Hutadolog Tuan Jimmahadim (1790-1840) adalah contoh nyata dari kondisi ini. Sehingga untuk mensahkan kedudukannya sebagai Tuan Raya, Rondahaim harus menaikkan status ibunya itu lebih dulu menjadi *puang bolon* Raya.²⁸

Masing-masing isteri raja ini memperoleh nafkah dari raja, diwajibkan kembali ke istana pada malam hari. Tetapi

tidak semua isteri-isteri raja ini diam di *rumah bolon* (istana) namun tersebar di beberapa *huta* (kampung) di sekitar *pamatang* (kedudukan raja). Tuan Rahalim Purba penguasa di Purba yang memiliki 24 orang isteri hanya 12 isteri-isterinya yang tinggal di istana. Sisanya tinggal di kampung-kampung sekitar Pamatang Purba seperti di kampung-kampung Marubun, Bandar Saribu, Gunung Purba, Panombeian, Nagori dan lain-lain. Di Purba ke-12 isteri-isteri raja yang diam di *rumah bolon* adalah:

1. *Puang pardahan* (isteri raja pemasak makanan tamu)
2. *Puang pardahan* (isteri raja pemasak nasi raja) atau puang poso.
3. *Puang parorot* (isteri raja penjaga anak).
4. *Puang paniggiran* (isteri raja pimpinan upacara kesurupan).
5. *Puang pamongkot* (isteri raja pimpinan upacara memasuki rumah baru)
6. *Puang siampar apei* (isteri raja pengatur ruangan di istana dan memasang tikar).
7. *Puang siombah bajud* (isteri raja pimpinan pembawa peralatan makan sirih)
8. *Puang bona*.
9. *Puang bolon* (permaisuri).
10. *Puang panangkit* (isteri pimpinan upacara ritual).
11. *Puang Mata* (isteri raja tugas umum di rumah bolon).
12. *Puang jumabolag* (isteri pimpinan perladangan).

Poligami di kalangan raja-raja Simalungun bukan hanya meneruskan garis marga (keturunan) sekaligus juga untuk menopang fungsi pekerjaan sehari-hari di istana dalam segala aspek kehidupan kerajaan. Poligami dilakukan untuk melancarkan urusan pekerjaan di istana raja yang memang setiap hari dan momen-momen tertentu membutuhkan petugas khusus yang dekat dengan raja sebagai kepala adat sekaligus kepala pemerintahan. Sesuai adat bilik masing-masing isteri raja ini diatur sesuai tugasnya masing-masing di istana. *Puang pardahan* dan *puang poso* berada di *lopou* (ruangan depan istana) ditandai dengan *tataring* (tempat memasak) yang disekat tikar pada malam hari. Hanya raja yang mempunyai kamar khusus berdinding papan tebal dengan pintu masuk yang sempit tanpa jendela. Posisinya terletak di depan sebelah kanan ruangan *lopou*. Di kirinya terletak *tataring puang poso* dan *puang pardahan* tadi. Bila raja ingin berhubungan seks dengan salah satu isterinya baik selir ataupun *puang bolon*, seorang kurir menyampaikan bajud (tempat sirih tradisional). Pesan ini sudah dipahami oleh masing-masing isteri raja dengan melakukan persiapan khusus seperti bersuci di tapian dengan *maranggir* (membersihkan diri memakai jeruk purut) dan mempercantik dirinya. Lalu sesudah itu masuk ke kamar raja. Kurir ini haruslah seorang laki-laki yang sudah dikebiri (*ikasihkon*), sehingga tidak ada kemungkinan kurir tersebut berselingkuh dengan mereka.

Kadang-kadang seorang perempuan bangsawan diserahkan sebagai imbalan untuk memperoleh bantuan militer bagi salah satu pihak yang menginginkan tahta kerajaan dari pihak yang menginginkan hal yang sama

seperti terjadi dalam perselisihan perebutan tahta Tuan Sidamanik pada tahun 1887 di mana salah satu pihak yang bertikai menyerahkan seorang *bou* Sidamanik kepada Tuan Rondahaim sebagai imbalan atas bantuan militer yang diinginkannya.³⁰

Oleh karena kedudukan raja ditentukan oleh *puang bolon*, tak jarang sering pecah perang perebutan tahta di antara putera-putera raja memperebutkan isteri mendiang raja seperti pernah terjadi di Sidamanik antara Tuan Manik Raya dengan Tuan Ganda hingga melibatkan Tuan Rondahaim dari Raya untuk mendukung salah satu pihak yang bertikai dengan kekuatan militer.³¹ Apalagi dengan adanya adat *mambeten*, yaitu adat mengawini isteri mendiang raja yang bukan ibu kandung sah dilakukan di Simalungun dalam rangka pengukuhan klaim atas tahta kerajaan, menjadi sumber sengketa di antara putera-putera raja yang berambisi merebut tahta. Adat *mambeten* ini dilakukan Tuan Rondahaim untuk mengukuhkan klaimnya dengan menjemput ibu tirinya (isteri ayahnya Tuan Jimmahadim) dari Bajalinggei dan dijadikan permaisurinya (*puang bolon*).

3. Panggilan Kekerabatan (Partuturan)

a. Tutur Manorus (langsung)

1. *Ompung*, yaitu orang tua dari pihak ayah atau ibu. Di Simalungun tidak lazim disebut nama cucu pertamanya sebagai nama gelar, seperti biasa di Toba. Tetapi akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan di sebagian orang Simalungun yang berdekatan dengan Tapanuli, seperti *Ompung Doli* (untuk laki-laki), *Ompung Boru* (untuk

perempuan). Kebiasaan di Simalungun yang tidak ada di Toba, sebutan untuk *ompung* dari pihak ayah dan ibu dibedakan. Hanya *ompung* (perempuan) dari orangtua ayah kita yang dapat dipanggil dengan *tua/tutua* (Silimakuta "inangtua"). Sedangkan untuk *ompung* dari pihak ibu orang tua isteri kita keduanya dipanggil "*ompung*" saja.

2. *Amang/bapa/apa*, yaitu sebutan untuk orangtua kita laki-laki. Di Simalungun panggilan ini sesuai dengan sejarah keluarganya masing-masing (khususnya keturunan raja). Biasanya keturunan raja-raja Simalungun (terutama Panei dan Nagur, bermarga Purba Dasuha dan Damanik Nagur), anak-anaknya memanggil "*amang*" kepada ayahnya, dan di antara keturunan bangsawan Sidamanik, Siantar dan Sipolha memanggil "*Apa*" untuk ayahnya. Sebagian lagi memanggil "*Bapak/Bapa*" seperti biasa berlaku umum. *Amanggodang*=abang bapak kita; *amangtongah*=adik bapak kita; *amanggian (kian)*=adik terbungsu dari bapak kita. Di sebagian tempat disebut: *bapatua*, *bapatongah* dan *bapaanggi*. Tingkatan serupa berlaku untuk seluruh tingkatan tutur di Simalungun. Misalnya, *inanggodang (inangtua)*, *inangtongah*, *inanganggi*, *tulanggodang*, *tulangtongah*, *tulanggian*, dst.
3. *Inang* sebutan untuk ibu kita.
4. *Inanggodang*, yaitu sebutan untuk isteri dari

abang bapak kita, inangtongah isteri dari adik bapak kita dan inangangi, isteri dari adik bapak kita paling bungsu. Jika ego perempuan, sebutan itu ditujukan kepada kakak dari ibu kita tertua, selanjutnya *inangtongah* untuk adik ibu kita yang di tengah. Orang Simalungun tidak mengenal panggilan "*tante*".

5. *Inangangi (inanggihian)* selain untuk menyebut isteri dari adik bapak kita paling bungsu, jika ego perempuan, maka sebutan itu ditujukan kepada saudara perempuan dari ibu kita yang paling bungsu.
6. *Abang*, sebutan untuk saudara laki-laki semarga yang lebih tua dari kita.
7. *Anggi*, sebutan untuk saudara laki-laki semarga yang lebih muda dari kita.
8. *Botou*, sebutan untuk saudara perempuan semarga/tidak semarga dari kita.
9. *Kakak, kaka* sebutan untuk saudara perempuan yang lebih tua dari kita atau bisa juga kepada isteri dari abang suami kita.
10. *Kaha*, sebutan untuk isteri dari abang (saudara laki-laki semarga) dengan kita.
11. *Amboru*, sebutan untuk saudara perempuan semarga dari pihak ayah kita. Kalau kita perempuan, maka saudara dari mertua kita perempuan (termasuk mertua perempuan) dipanggil dengan sebutan *amboru*.
12. *Nasianggi*, sebutan untuk isteri dari adik kita. Berbeda dengan nasikaha yang dianggap kakak

ego, marnasianggi di Simalungun interaksinya terbatas dengan nasikahnya.

13. *Mangkela*, sebutan untuk suami dari *amboru* kita, mertua dari botou banua kita (anak perempuan dari *amboru* kita). Kalau kita perempuan, maka semua suami dari *amboru* dari pihak suami kita atau saudara laki-laki (*saninani*) mertua kita laki-laki dipanggil dengan mangkela.
14. *Tulang*, yaitu saudara laki-laki dari mertua kita, atau mertua kita laki-laki atau saudara laki-laki dari ibu kita.
15. *Anturang*, yaitu isteri dari tulang kita, isteri dari saudara laki-laki tulang kita seketurunan atau ibu dari besan kita.
16. *Parumaen*, yaitu isteri dari anak kita, isteri dari anak saudara kita laki-laki. *Amboru/makkela* kita juga memanggil *parumaen* kepada isteri kita. Kepada boru ni botou isteri kita juga kita memanggil *parumaen*. Di beberapa daerah di Simalungun, terutama di Sipolha dan Raya, tidak diperkenankan menurut adat mertua laki-laki berbicara langsung dengan *parumaen* kandung (isteri dari anak sang mertua itu). Keduanya juga tidak boleh berada dalam ruangan yang sama bila tidak ada orang lain di tempat itu. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang dulu mungkin boleh mengakibatkan hal-hal yang tidak baik.
17. *Besan*, yaitu isteri dari tulang anak-anak kita, istri dari botou isteri kita. Kalau perempuan, dia akan memanggil besan kepada suami dari

botou (saudara perempuan) suami kita. Isteri dari mertua perempuan anak kita (laki-laki dan perempuan) atau sebaliknya juga dipanggil besan. Untuk yang sangat dekat dipanggil dengan "*nasibesan*". Menurut adat Simalungun, "*marnasibesan*" tidak boleh sembarang berbicara apalagi bersentuhan atau berada dalam satu tempat berdua-duaan. Sikap seperti ini juga ditunjukkan kepada "*nasiparumaen*".

18. *Hela*, yaitu menantu kita laki-laki atau menantu saudara kita laki-laki dan pariban (yang mengambil isteri dari pihak isteri kita/ sapambuatan).
19. *Gawei/eda*, yaitu, yaitu sebutan seorang perempuan kepada isteri dari botou kita atau botou banua isteri kita atau isteri botou banua kita.
20. *Lawei, lae*, yaitu sebutan kepada suami dari saudara kita perempuan (botou diri), suami dari botou banua kita atau suami dari boru dari amboru kita. Di Simalungun *nasilawei (marlawei)* hubungannya disebut "*marumbei*" (tidak boleh mandi bersama). Itulah sebabnya kebiasaan di Simalungun, kalau seorang lawei haruslah terlebih dahulu menunggu *lawei*-nya selesai mandi, baru ia menyusul. Biasanya, seseorang harus meneriakkan, "*boah*" dan dijawab *nasilawei* yang sedang mandi, "*umbei*", kalau sudah begitu, yang datang menunggu di atas, dan setelah yang mandi mengucapkan "*laos*",

maka yang datang tadi kembali ke *tapian* (sungai atau pancuran tempat mandi) untuk mandi, karena *lawainya* sudah selesai mandi.

21. *Botou banua*, yaitu anak perempuan dari *amboru* kita. Kalau perempuan, dia *marbotou banua* kepada anak laki-laki dari tulangnya. Meski beda marga perkawinan di antara mereka terlarang menurut adat Simalungun.
22. *Pahompu*, yaitu anak (laki-laki dan perempuan) dari anak (laki-laki dan perempuan) kita, atau cucu dari saudara kita laki-laki dan perempuan, cucu dari botou banua atau cucu anak pariban kita.
23. *Nono*=anak dari cucu kita laki-laki. Ada juga menyebut cucu dari anak perempuan kita.
24. *Nini*=anak dari cucu kita perempuan.
25. *Panogolan*=anak (laki-laki dan perempuan) dari adik atau kakak ego (perempuan).

b. Tutur Holmouan (kelompok)

1. *Sanina*, di Simalungun adalah mereka mengaku satu keturunan nenek moyang, contohnya, antara marga Purba Dasuha dengan Purba Tambak, Sidadolog dan Sidagambir. Keempatnya *marsanina*, karena mereka berasal dari keturunan nenek moyang yang sama (segaris seketurunan) dari Raja Silou Purba Tambak. Antara Saragih Sumbayak dengan Saragih Garingging, Dajawak, Dasalak dan Damuttei, sebab mereka seketurunan dari nenek moyang Raja Banua Sobou Saragih yang

menurunkan Tuan Raya Tongah, Raja Raya, Raja Padang Tebingtinggi dan Tuan Sampang Buah. Jadi secara genealogis marga Purba keturunan Raja Silou tidak *marsanina* dengan marga Purba yang lain, apalagi yang mengaku dirinya berketurunan dengan Toga Purba atau Toga Simamora di Toba. Demikian halnya dengan keturunan Raja Banua Sobou tidak *marsanina* dengan keturunan marga Saragi yang lain yang mengaku dari keturunan orang Toba dari kelompok marga Parsadaan Raja Naiambaton (Parna). Meskipun demikian, antara kelompok marga ini bisa dianggap *marsanina* karena hubungan historis atau perjanjian, misalnya antara marga Purba Dasuha dengan marga Purba Pakpak di Pamatang Purba (perjanjian antara Tuhan Simalobong Purba Dasuha, tuhan Pamatang Purba dengan Raendan nenek moyang marga Purba Pakpak); antara Saragih Garingging dengan Saragih Sidauruk yang diangkat raja Raya menjadi Tuan Gunung dan Tuan Bornoh. Marga Damanik keturunan Raja Nagur tidak *marsanina* dengan marga dari Toba (tempat lain) dari kelompok Tatea Bulan atau Silauraja. Demikian dengan Sinaga yang menyangkal datang dari Toba.

2. Sanina *sapanganonkon*, yaitu sanina menurut garis keturunan ibu atau ibu dari bapak kita. Kalau sanina terjadi disebabkan satu garis keturunan genealogis (sahasusunan), maka

sanina sapanganonkon terjadi "*halani sisada pamupus, sapanganonkon i rumah ni tondong*" (karena satu yang *me-mupus*, makan bersama di rumah *tondong*). *Sanina sapanganonkon* ini di Toba disebut "*pariban*". Dalam pesta adat Simalungun (perkawinan), *sanina sapanganonkon* ini boleh difungsikan sebagai "*Anakboru sanina*". Meski berbeda marga bila isteri atau ibu masing-masing dari marga atau leluhur yang sama, mereka ini disebut *marsanina sapanganonkon*.

3. *Tondong*, yaitu mereka yang termasuk keluarga pihak isteri kita, ayah atau ompung atau *ompung ni ompung*.
4. *Tondong Mataniari*=pihak isteri dari *ompung ni ompung* kita.
5. *Tondong Bona*=pihak isteri dari ompung kita.
6. *Tondong Pamupus*=pihak isteri dari ayah kita.
7. *Tondong Jabu*=pihak isteri kita.
8. *Tondong marihutkon*=pihak isteri dari *sanina* kita atau *sanina ompung*.
9. *Tondongni tondong*=pihak isteri dari boru ni boru kita.
10. *Anakboru Mintori*=anak perempuan dari anakboru jabu kita; anak perempuan dari amboru/makkela kita; anak perempuan dari saudara kita perempuan.

Di Silimakuta ada sedikit perbedaan, tingkatannya adalah sebagai berikut:

1. *Saninani ompungni ompung, ompung ni*

ompung, ompung sapariban, sanina ompungni bapa, ompungni bapa, sanina inang., sanina ompung, ompung, sanina pariban, sanina bapa, bapa.

2. *Tondong ipardomui, tondong pamupus, tondong simada daroh, tondong bona, tondong bona-bona, tondong asal, tondong ni tondong, puang/puang ni tondong, puang/puang ni tondong, puangta.*
3. *Jabu, anak, Happu, nono, rittei (nini).*
4. *Anakborutua, anakboru jabu, anakboru iakkip, rumahangga, anakboru mintori, anakboruni mintori, anakboruni mintorini mintori.*

C. Sistem Pemerintahan Tradisional

Lance Castles menyimpulkan salah satu perbedaan nyata antara Simalungun dengan Toba adalah bahwa di Simalungun sudah sejak lama dikenal adanya pemerintahan yang diatur dari pusat pemerintahan yang diakui oleh vasalnya. Sementara itu di Toba tidak mengenal pola seperti itu; masyarakat Batak Toba adalah masyarakat *statelessness* (tidak mengenal negara). Mereka tidak pernah dipimpin atau takluk kepada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka secara langsung seperti di Simalungun oleh tingkatan elit kepada rakyatnya dengan pembagian kelas masyarakat yang tegas.³³ Mengenai situasi di Toba, ahli hukum adat Batak Toba, J. C. Vergouwen menulis, *"... masyarakat Batak Toba lebih suka berdiam di unit kecil yang menyenangkan; terdiri dari beberapa ratus orang, atau paling banyak seribu, dan yang kepentingannya hanya*

*terbatas pada urusan sendiri. Mereka belum sampai pada tingkat seni pemerintahan yang mampu mencakup suatu daerah luas di bawah satu pemerintahan yang mantap. Tidak ada orang yang memegang kekuasaan sentral. Tidak ada penyelenggaran peradilan bersama yang menangani perselisihan, atau pelanggaran kecil yang cakupannya melebihi suatu wilayah yang kecil; juga tidak ada pengadilan untuk naik banding guna melawan keputusan yang diambil di wilayah kecil tersebut. Perselisihan yang timbul di antara persekutuan-persekutuan masyarakat diselesaikan dengan jalan damai atau angkat senjata".*³⁴

Menurut J. Tideman di seluruh daerah Batak, hanya di Simalungunditemukan adanya tradisinegara.³⁵ Di Simalungun penguasa yang disebut raja mengendalikan pemerintahan sampai ke desa-desa terbawah dalam piramida kekuasaan tradisional Simalungun yang diakui dan dipatuhi perangkat penguasa di bawahnya serta kawula kerajaanya. Meski tidak bisa sepeenuhnya dikategorikan negara dalam pengertian modern saat ini, tetapi dalam konteks masyarakat tradisional, tradisi kerajaan di Simalungun menunjukkan adanya pola pemerintahan yang teroganisir dan berjenjang yang bisa disebutkan negara dalam pengertian pengaturan kekuasaan terpusat oleh raja dan perangkatnya. Hal ini dipertegas oleh Lance Castles, *Dalam pengertian politis, Simalungun tradisional terdiri atas beberapa kerajaan-kerajan kecil, setiap kerajaan itu terdiri atas sejumlah desa-desa dan unit-unit kekuasaan yang lebih besar yang mengakui kekuasaan seorang penguasa utama (raja) dan berkewajiban membayar pajak kepada raja. Pola kekuasaan pada dasarnya lebih berpola piramidal ketimbang hirarkhis, dan tiap-tiap bagian*

*daerah bawahannya (subordinat) merupakan duplikat (tiruan) suatu pola kecil dari sistem pemerintahan yang lebih besar di mana daerah bawahan itu adalah bagian dari kekuasaan di atasnya itu.*³⁶

Di Simalungun posisi raja diakui sebagai kekuasaan tertinggi di Simalungun. Kekuasaannya kadang-kadang bisa bersifat kejam dan sewenang-wenang sebagaimana dinyatakan dalam istilah Simalungun, "raja do adat, adat do raja". Raja di Simalungun berhak atas sejumlah kewajiban dari kawulanya menopang kehidupan di *pamatang* sebagai pusat pemerintahan dan kediaman raja beserta keluarganya. Konsep ini tidak ada di Toba. Di Toba gelar raja memang ada, tetapi terbatas dalam pengertian penghormatan kepada lawan bicara; pengertian raja di Toba berarti bukan budak (*ndang hatoban*). S.M. Siahaan dalam makalahnya mengenai peranan dan kedudukan raja di Toba menjelaskan, "... sebagai akibat dari sistem perkampungan yang tertutup, maka setiap kampung tidak tergantung kepada seorang raja yang administratif dan feodal. Maka setiap anggota kampung mempunyai hak mengutarakan pendapatnya, yang memungkinkan adanya sifat demokratis. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena jumlah penghun sesuatu kampung relatif sedikit, dan karena sifat saling bermusuhan dengan kampung-kampung sekelilingnya."³⁷

Keunikan sistem pemerintahan di Simalungun ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli Batak, mengapa di Simalungun muncul penyimpangan pola sosial dengan daerah Batak lainnya yang condong demokratis? Payung Bangun berpendapat bahwa pola kerajaan itu muncul di Simalungun dari hasil persentuhannya dengan budaya Hindu India yang diduga pernah hadir di Simalungun.

Batara Sangti Simanjuntak menghubungkannya dengan penetrasi Hindu Jawa ke Simalungun sekitar abad XIII.³⁸ Pengaruh Hindu di Simalungun tidak bisa kita abaikan dengan hadirnya sejumlah kosa kata, adat kebiasaan dan istilah-istilah ritual maupun budaya dan kepercayaan yang banyak bersentuhan dengan budaya Hindu. Tideman dalam bukunya *Hindoe Invloed* sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengaruh Hindu itu di Tanah Batak Utara. Studi-studi terkini pun membuktikan bahwa Batak pernah mendapat pengaruh Hindu entah langsung dari India atau melalui Sumatera Bagian Selatan dari raja-raja Jawa di abad XIII-XIV. Bahkan jauh sebelumnya dengan hadirnya komunitas pedagang Tamil di Barus di abad XI dan pemukiman kaum Hindu di Padang Lawas dan Pane di pedalaman Asahan. Bungaran Antonius Simanjuntak sependapat dengan para ahli terdahulu tetapi dengan menyebutkan bahwa pengaruh Hindu itu terkuat ada di Karo. Orang Batak mengambil istilah-istilah Hindu untuk jabatan, dewa, gelar, aksara, kalender, ramalan-ramalan dan lain-lain.³⁹

Sesuai konsep Hindu bahwa raja adalah inkarnasi dewa, orang Simalungun memaknai raja sosok spiritual di mana kekuasaan dewa dan manusia menyatu dalam dirinya. Raja disebut "naibata na taridah" (ilah yang kelihatan); mereka dipanggil dengan panggilan hormat "tuhan, tuhannami". Bekas air mandi raja dianggap berkhasiat sebagai obat, karena dianggap mempunyai kuasa gaib, hingga orang pun berlomba untuk mendapatkannya. Makan dari wadah bekas makanan raja dianggap bertuah yang disebut ayapan ni partongah. Raja sangat dihormati kawula. Ucapannya adalah hukum. Menentang raja sama dengan menentang hukum

dan negara. Di antara hukum tradisional "*Tardogei Tapak Na Ompat*" yang pelanggarnya dijatuhi hukuman mati, tiga di antaranya adalah berkaitan dengan pelanggaran atas kehormatan istana raja: *marhatahon nasi puang* (berbicara dengan permaisuri/isteri raja), *manangko hun rumah bolon* (mencuri di istana), *martahi-tahi* (berkhianat kepada kerajaan) dan *maraji-aji* (mencederai dengan ilmu hitam atau meracun).⁴⁰ Berbicara dengan raja dan keluarganya ada tatakrama dan tatabicara khusus yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Nama para raja dan tuan tidak bisa disebut sebab dianggap melanggar adat. Hukuman bagi mereka yang lancang menyebut nama raja sangat berat. Menghindarkan supaya nama raja jangan disebutkan sementara nama itu ada hubungan dengan benda atau tanaman tertentu, maka rakyat harus kreatif menciptakan nama baru untuk menyebut barang atau tanaman tersebut. Sang Nauluh nama raja Siantar bersinggungan dengan *pisang* dan *galuh* dalam bahasa Simalungun, maka di Siantar dicari kata yang berbeda dengan itu yakni *punsi*. Di Raya nama tuan Raya Tuan Rondahaim bersinggungan dengan nama *haronda* (sejenis tanaman untuk bumbu masak) maka diganti dengan *simulei-uiei*. Juga di Purba nama Tuan Raondok yang bersinggungan dengan pondok diganti dengan *jempet* yang artinya dangkal. Bila berpapasan dengan raja, rakyat harus membungkukkan kepalanya sampai ke tanah. Yang tegak berdiri dianggap menentang raja dan dihukum. Pengambil tuak raja (parhitang) tidak bisa memakai tangan kiri atau membawa tuak dalam hitang di sebelah kiri; bahkan orang lain yang berpapasan dengan parhitang harus menjaga posisi berjalannya jangan sampai

hitang tempat tuak itu berada di sebelah kirinya. J. Wismar Saragih menggambarkan suasana di rumah bolon Raya,

“Bila berpapasan dengan parhitang terlarang berjalan di sebelah kanan parhitang, sebab hitang tempat tuak yang ditutupi bulung taruk (pucuk daun pohon aren) untuk raja ditenteng di sebelah kanan parhitang, supaya jangan kena bayangan badan kita hitang tersebut. Lain lagi dengan budak yang melayani raja makan dan menuang tuak kepada raja. Yang melayani raja makan harus tetap mengipas raja dengan bulung tinapak (daun pisang yang dipotong bulat) pada pahar (tempat raja makan) supaya jangan dihinggapi lalat. Kalau si tahu bagod (penuang minuman tuak raja) harus menjaga supaya sarib (tempat minuman raja terbuat dari tempurung kelapa) tetap ditopang oleh ketiga jarinya (ibujari, jari telunjuk dan jari telunjuk) selama raja makan. Semua petugas ini melakukan tugasnya dengan posisi bersujud. Setelah raja selesai makan, pelayan inilah yang membagi bekas makanan raja (ayapan) kepada mereka yang dianggap patut mendapatnya, dia yang mengetahui bagian yang sulung atau yang bungsu, kadang-kadang raja memberikannya langsung. Jika tuak tidak enak, parhitang pun dapat saja dihukum gantung.”⁴¹

Sistem feodalisme di Simalungun ini memang menempatkan rakyat kebanyakan dalam posisi terendah dalam struktur pemerintahan tradisional. Rakyat menjadi objek pemerasan para penguasa, kadang-kadang rakyat harus menyerahkan barang bahkan anak gadisnya kepada para raja dan keluarganya ini meski dengan hati berat dan paksaan. Rakyat bukan hanya menyerahkan upeti dan kewajiban lainnya, tetapi juga persembahan langsung

kepada raja dengan menyediakan dirinya pada waktu dan kondisi tertentu untuk keperluan raja.⁴¹ Beberapa penghasilan raja berasal dari *pancong alas* (sepersepuluh dari hasil hutan), cukai dan pajak ekspor, *hasil tiga* (pajak pasar atas semua barang dagangan yang dijual di pasar), *wang meja* (sepersepuluh dari barang sengketa, parhukuman (denda yang dijatuhkan di pengadilan), *pajak judi* (sepersepuluh hasil kemenangan judi) dan sewa setengah dolar atas pemakaian tikar dan meja judi.⁴³ Hewan buruan dan ternak sendiri yang disembelih harus diserahkan sangkae (daging paha) kepada raja atau tuan di mana hewan itu diperoleh atau disembelih. Rakyat diwajibkan bekerja pada waktu tertentu mengerjakan ladang milik raja (*juma bolig*) tanpa digaji, membuat jalan, membangun istana raja, menjaga kampung (*parari*) dan berperang membela kerajaannya melawan musuh atau memperluas wilayah kerajaan.

Di bawah raja sebagai penguasa terdapat partuanan (dahulu *'partuhanan'*) yang masih punya hubungan kerabat dengan raja. Partuanan membawahi beberapa pangulu. Mediator para penguasa elit Simalungun ini disebut ulubalang. Ulubalang menyampaikan pesan-pesan pemerintah kerajaan kepada rakyat, apakah itu hanya sekedar pengumuman biasa atau perintah untuk melayani raja atau kepentingan kerajaan.

Pendamping raja dan tuan di daerah adalah *harajaan*. Di Simalungun harajan ini sifatnya sebatas penasihat raja, didengar atau tidak tergantung pada raja; pengangkatan menjadi raja harus dengan rapat dan persetujuan *harajaan* setelah calon raja yang diajukan memenuhi syarat-syarat adat. Istilah *gamot ni harajaan* rupanya diadopsi Belanda untuk

pola pemerintahan di Simalungun dari Karo (*gamet*) sama dengan istilah *parbapaan* dan *tungkat* (kepala distrik) yang diadopsi Belanda dari istilah Karo dan Melayu. Di samping itu tiap-tiap struktur pemerintahan terdapat harajaan sampai ke tingkat terendah. Sebutan untuk harajaan ini awalnya adalah Si Ompat Suku tetapi belakangan semakin terlupakan seiring dengan masuknya pola pemerintahan modern oleh Belanda sejak 1907. Setiap harajaan memiliki pembantu tersendiri yang disebut *pauidana*. Raja juga disebut partongah sebab selain kepala adat dia juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan di samping hakim yang memutus perkara pengadilan sesudah pengadilan tingkat huta dipimpin *pangulu* dan tingkat *partuanan* di pimpin *tuan huta*. Perkara di tingkat *huta* boleh dibawa banding ke tingkat di atasnya sampai ke tingkat raja di *pamatang*. Sistem peradilan seperti ini hanya ditemukan di Simalungun, tidak ada di Toba atau daerah Batak lainnya.⁴⁴ Keputusan akhir berada di tangan raja sebagai hakim pemutus perkara.

J. Tideman⁴⁵ dengan lengkap menjelaskan susunan pemerintahan tradisional kerajaan-kerajaan Simalungun berikut ini:

Kerajaan Siantar

A. Raja (partongah) Waldemar Tuhan Nagahuta marga Damanik Bariba.

B. Harajaan di pamatang:

1. Bah Bolag (sui Bah Bosar); pauidana Tuhan Ambarita (*).
2. Tuhan Anggi (sui Huluan); adik bungsu raja; pauidana Jagoraha (panglima perang) (*).

3. Rumah Tongah (suhi Kahean); paiduana Tuhan Tumorang.
4. Nagodang (suhi Huta Ipis); paiduana Tuhan Nabolon (*).

C. Parbapaan

1. Tuhan Sipolha.
2. Tuhan Dolog Malela.
3. Tuhan Lingga.
4. Tuhan Jorlang Hataran.
5. Tuhan Silou Bayu.
6. Tuan Bangun.
7. Tuan Silampuyang.

Kerajaan Tanoh Jawa

A. Raja (partongah) Sangma Raja Maligas marga Sinaga Nadi Hoyong Hataran.

B. Harajaan di Pamatang di bawah pengawasan Tuhan Huta sebagai wakil raja dalam urusan pemerintahan.

1. Orang Kaya (suhi Orang Kaya) bendahara kerajaan; paiduana adalah Tuhan Nabolon (*) dan Partanda. Tuhan Nabolon menggantikan Orang Kaya pada waktu dia memanggil seorang parbapaan (Si Opat Suku) menghadap raja dan menugaskannya atas perintah raja. Dia juga membawa tombak "Panraja". Partanda menjadi utusan, pembawa berita penting atau bintangara raja. membawa tombak "Panraja". Partanda menjadi utusan, pembawa berita penting atau bintangara raja.

2. Tuhan Mahasar (suhi Mahasar) mengawasi rakyat yang berkerja di ladang raja atau pekerjaan wajib lainnya oleh rakyat kerajaan; paiduana Bona Taon (*) yang mengatur waktu untuk penanaman dan pemanenan.
3. Nagodang (suhi Nagodang) mengatur pengangkatan para kepala kampung bersama Tuhan Nabolon. Selain itu, Nagodang bertugas selaku guru huta (tabib dan pemimpin ritual), pandihar (pemimpin para jawara), bona gonrang (pemimpin rombongan kesenian) dan partuha (pemimpin dalam acara adat istiadat).
4. Rumah Tongah (suhi Tongah), orang kepercayaan raja tempat raja mengetahui segala hal yang sifatnya rahasia yang harus diketahui raja.

C. Parbapaan

1. Tuhan Dolog Paribuan.
2. Tuhan Jorlang Hataran.
3. Tuhan Marjandi Asih.
4. Tuhan Hatundukan.
5. Tuhan Batangio
6. Raja Girsang (tiga orang, istilah raja di sini bermakna Toba, jadi bukan raja).
7. Raja Sipangan Bolon (juga tiga orang, seperti di Girsang). Huta Parapat, Sibagading dan Panahatan dulunya otonom dan merupakan wilayah Tuan Dolog Paribuan.

Kerajaan Panei

A. Raja (Partongah) Sumalam Tuhan Bosar marga Purba Dasuha.

B. Harajaan di Pamatang :

1. Orang Kaya
2. Bah Hapesong, dulu Jagoraha (panglima)*.
3. Toehan Suhi.
4. Anak Boru Huta (marga Sinaga Silalahi, kerabat raja).

C. Parbapaan :

1. Toehan Dolog Batunanggar.
2. T. Simarimbun.
3. T. Sipoldas.
4. T. Sinaman.
5. T. Dolog Saribu, pada masa lalu oleh raja Raya diangkat sebagai kepala daerah yang didudukinya di Pane.
6. T. Gunung Mariah.

Kerajaan Raya

A. Raja (Partongah) Sumayan Toehan Kapoltakan (yang berarti "yang terbit") marga Saragih Garingging.

B. Harajaan di Pamatang :

Pamatang hanya dibagi dalam tiga suhi yakni: Raya Simbolon, Raya Pongki dan Raya Damakkah. Pada suhi pertama terdapat tiga pejabat yakni Tuan Nabolon, Rumah Bayu dan Tuan Raya Simbolon (ketiga tuan ini tidak memiliki wilayah kekuasaan tetapi memiliki jabatan di istana raja).

1. Parhuluan dan Anak Boru Raya (suhi Raya

Pongki).

2. Rumah Tongah dan Pardalan Tapian (Tapian berarti tempat mandi).

C. Parbapaan (Si Ompat Suku) :

1. Tuan Raya Tongah, ini masih merupakan Bona ni Adat, yakni raja masih harus menemui dia untuk penyelesaian adat. Raja menyebutnya "abang" atau "kakak" tanpa peduli usianya, mengingat dalam lagenda tentang Raya, Raya Tongah disebut sebagai posisi lebih tua (anak-anak raja Raya menyebut Tuan Raya Tongah "*bapa tua*" atau disingkat "*Tua*" dan saudara tua ayah; saudara muda ayah adalah "*bapa anggi*" dari anak-anak dan saudara tengah disebut "*bapa tongah*").
2. T. Raya Bayu.
3. T. Raya Usang.
4. T. Buluh Raya.
5. T. Jandi Mauli dengan Tuan Malasori (sekarang tunduk kepada Padang Bedagai), keturunan dari generasi raja-raja Silou lama.

Kerajaan Purba

A. Penjabat raja Karel Tanjung marga Purba Pakpak.

B. Harajaan di Pamatang:

1. Nagodang.
2. Rumah Tongah.
3. Anak Boru.

Ketiganya tampil sebagai pelaksana perintah Raja.

Pada masa lalu masih ada :

- Ruman Buntu (Suhi Ulu).
- Tuan Suhi (Suhi Borno = arus hilir).
- Guru Huta (datu atau penyihir).
- Bona ni Ari.
- Bona ni Gonrang.
- Jagoraha (panglima pasukan).
- Partahi Dolog (membantu raja dalam hubungan dengan raja-raja di sebelah utara dan timur).

Partahi Bongguron (membantu raja dalam hubungan dengan seberang danau Toba).

C. Parbapaan :

1. Tuhan Hinalang
2. Tuhan Sipinggan
3. Tuhan Huta Raja.
4. Tuhan Saribujandi.
5. Tuhan Siboro.

Kerajaan Dolog Silou

A. Raja Ragaim Tuan Si Tunggung marga Purba Tambak Lombang.

B. Harajaan di Pamatang :

1. Tuhan Nabolon.
2. Gamot Dolog.
3. Anak Boru Dolog.

Dulu masih dikenal :

- Bintara Dolog.
- Tuhan Kaha Kaha.
- Anak Boru Lopou.
- Guru Dolog.

- Patumbak.

C. Parbapaan :

1. Tuhan Bandar Hanopan.
2. Tuhan Sinasih.
3. Tuhan Nagori Dolog.
4. Tuhan Sibangkudu.
5. Tuhan Marubun Longkung.
6. Tuhan Dolog Mariring.
7. Tuhan *Urung* Silou.

Kerajaan Silimakuta

A. Raja Pamoraidup Toehan Nagasaribu marga Purba Girsang.

B. Harajaan di Pamatang :

1. Nagodang.
2. Tuhan Lobe.
3. Anak Boru Huta.

Ketiganya ditugasi melaksanakan perintah raja.

Selain itu pada masa lalu dijumpai :

- Rumah Sianjung (untuk urusan agama).
- Rumah Jojong (untuk urusan agama).
- Rumah parik (pengawas kampung).
- Guru Sahuta (penyakit, tabib).
- Rumah Gorga (pengatur pesta).
- Tumbuk Borno (pengatur perladangan).
- Pahara (pesuruh).

C. Parbapaan :

1. Toehan Siturituri, pada masa lalu raja kedua Silimakuta, sejak 1921 setelah kematian Pangasami menjadi Parbapaan saja.

2. Tuhan Rakut Bosi.
3. Tuhan Saribu Jandi.
4. Tuhan Dolog Paribuan.
5. Tuhan Mardingding.
6. Tuhan Paribuan.

Catatan : tanda () sudah dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda.*

D. Stratifikasi Sosial

Sebagaimana di dalam masyarakat yang berpola feodal (kerajaan), masyarakatnya dibagi atas kelas-kelas tertentu. Pembagian kelas sosial seperti ini tidak dikenal di Toba. Selain di Simalungun, pembagian kelas ternyata ditemukan di tengah masyarakat Tapanuli Selatan dan Karo. Kelas sosial di Simalungun terstratifikasi atas tiga kelompok sosial, yaitu bangsawan (partuanon), orang merdeka (paruma) dan budak (jabolon).

1. Golongan Bangsawan (Partuanon)

Golongan teratas dalam stratifikasi sosial Simalungun adalah kelompok partuanon (bangsawan). Seseorang digolongkan pada kelompok ini berdasarkan asal-usul keturunannya dari seorang raja atau tuan yang disebut *partongah* atau *partuanon*. Kelompok inilah yang menjadi penguasa di Simalungun baik sebelum kolonial zamana kolonial sampai kemerdekaan Indonesia. Seorang raja memiliki banyak isteri dan dari isteri-isterinya ini dia memperoleh anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya itu disebut *tuan* dan perempuan disebut *panakboru*. Kadang-kadang

anak-anak laki-lakinya yang bergelar *tuan* ini diberikan hak memerintah atas suatu wilayah tertentu, maka nama tempat itu melekat kepadanya sehingga dia diberi gelar tuan sesuai nama wilayah kekuasaannya. Tuan Sumayan putera Tuan Rondahaim Saragih diberi gelar Tuan Hapoltakan sebab dia diberi kuasa di kampung Hapoltakan dekat Sondiraya. Juga Tuan Gomok diberi gelar tuan Bajaraya, sebab dia berkuasa di kampung Bajaraya. Pemangku raja Raya terakhir Tuan Jan Kaduk digelari Tuan Raya Kahean sebab dia diangkat oleh raja Raya ayahnya menjadi kepala distrik di Raya Kahean sesudah masuknya Belanda.

Rakyat menghormati dan kadang-kadang disertai rasa takut kepada para penguasa lokal ini. Kisah-kisah sedih diutarakan rakyat Simalungun mengenai kekejaman para feodal ini. Kemungkinan kebencian yang dipendam sejak lama telah memicu sentimen anti kerajaan yang puncaknya pecah dengan pembantaian kaum feodal Simalungun pada peristiwa revolusi sosial tahun 1946.

Seperti sudah dijelaskan di depan, raja di Simalungun selain pemangku adat tetapi dia juga adalah pimpinan pemerintahan. Tugas ini dilaksanakan oleh raja bersama pejabat-pejabat kerajaannya dibantu pihak *anakboru* yakni kelompok marga lain yang menjemput isteri dari kelompok *partuanon* ini. Selain itu raja juga sering mengadakan ritual-ritual tertentu dipimpin *guru huta* atau *guru nagori*. Oleh karena itu posisi raja di Simalungun sangatlah penting. Bahkan boleh dikatakan di dalam diri raja itulah sesungguhnya apa yang disebut kebudayaan Simalungun itu sendiri, sebab rumah bolon (istana) raja adalah pusat kebudayaan, adat dan agama Simalungun kuno. Dengan hilangnya rumah

bolon maka Simalungun juga kehilangan budaya aslinya dan condong mengikuti budaya lain yang belum tentu sejalan dengan budaya asli Simalungun itu sendiri pada awalnya.

Kaum *partongah* yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang dilahirkan *puang bolon*. Tidak sembarang orang boleh menjadi raja di Simalungun. Meski sama-sama anak raja tetapi bila tidak dilahirkan *puang bolon* dia tidak berhak menduduki tahta ayahnya menjadi raja di Simalungun. J. Tideman mencontohkan Tuan Riah Kadim Waldemar Damanik putera raja Siantar XIV Tuan Sang Nauluh Damanik (1871-1913). Meskipun dia anak raja Siantar, tetapi karena ibunya hanya *puang bona* bukan *puang bolon*, tidak pernah bisa diangkat menjadi raja menggantikan Sang Nauluh selama *puang bolon* (permaisuri Sang Nauluh) masih hidup. Statusnya hanya pemangku sampai putera mahkota yang berhak dinobatkan menjadi raja Siantar. Rakyat menamainya tuan bukan raja, *tuhannami* bukan *janami*. Masing-masing kerajaan di Simalungun mempunyai dewan kerajaan yang disebut harajaan. Inilah dewan yang bertugas memilih dan melantik raja sesuai adat. Untuk masing-masing kerajaan punya tradisi masing-masing. Di Tanah Jawa yang melantik raja adalah Tuan Girsang Sipangan Bolon yang membawa kerbau persembahan untuk pelantikan raja yang disebut *horbou rudangan* ke Pamatang Tanah Jawa. Di Siantar *horbou rudangan* dibawa Tuan Sipolha sebagai anak tertua leluhur raja Siantar.

Sebagai penguasa raja disebut "*naibata na taridah*" (ilah yang kelihatan), sebutan ini lebih cocok merujuk pada posisinya sebagai pemegang kekuasaan dan kehormatan diri tanpa mengayomi dan melayani rakyat sebagaimana

mestinya seorang pemimpin di alam demokrasi. Posisi raja seperti itu jelas membuat dirinya sebagai objek yang dilayani oleh seluruh rakyatnya. Raja memiliki banyak keuntungan politik, ekonomi dan sosial dalam posisinya yang mapan itu. Sementara rakyat banyak yang miskin dan tidak memperoleh perhatian yang semestinya dari raja sebagai penguasa.

Kontras dengan kondisi kelompok rakyat yang kebanyakan miskin, raja dengan posisinya yang istimewa ini menjadi kelompok elit yang kaya. Selain memiliki warisan harta benda dan keistimewaannya, dia juga memiliki sejumlah budak yang siang malam melayani kebutuhannya. Untuk kediaman raja disebut rumah bolon, tetapi sebutan itu tidak berlaku untuk rumah di luar kelompok raja. Rakyat meski mampu membangun rumah besar tidak boleh menyebut rumahnya *rumah bolon* tetapi *rumah banggal*.

2. Golongan Rakyat Merdeka (Paruma)

Kelas menengah dalam stratifikasi sosial orang Simalungun adalah kelompok rakyat kebanyakan yang disebut paruma. Kata paruma berasal dari kata *par* dan *uma*, *par* berarti orang dan *uma* berarti juma atau ladang, jadi paruma berarti orang yang bekerja di ladang atau petani. Kategori paruma berkaitan dengan hubungan genalogis dan status dalam struktur kerajaan Simalungun. Seseorang yang hubungan marga atau leluhur sudah jauh dengan raja dianggap paruma. Jadi tidak otomatis kesamaan marga menaikkan status seseorang menjadi kelompok partuanon. Menurut Angelo Kristop Purba, status sebagai paruma ada kalanya berubah ketika raja mengangkat statusnya menjadi partuanon atau wakilnya di daerah, bahkan orang

yang bermarga beda dengan raja bisa dinaikkan statusnya menjadi kelas atas di Simalungun. Di daerah Kerajaan Panei marga Saragih Sidauruk, Saragih Sitio, Saragih Turnip dan Purba Girsang diangkat raja menjadi wakilnya di daerah kekuasaannya. Mereka ini bergelar tuan. Di kampung Saragihras, wakil raja di sana berasal dari marga Saragih Turnip yang leluhurnya sejak abad XIX datang dari Lumban Turnip di Samosir juga marga Saragih Sitio diangkat sebagai wakilnya di Tigaras, Salbe dan kampung-kampung kecil di sekitar pantai Danau Toba wilayah Panei. Di Sipoldas wakil raja bermarga Saragih Sidauruk. Kadang-kadang raja memberikan jabatan penguasa wilayah di daerah takluknya atas dasar perkawinan atau balas jasa dan loyalitas maupun keberhasilan seseorang atau kelompok marga pendatang atas misi yang diembankan pemerintah kepada mereka, sehingga raja berkenan memberikan mereka wilayah untuk dikuasai dan menjadikan mereka wakilnya di daerah tersebut. Kadang-kadang pelarian dari kerajaan lain yang minta suaka diberikan wilayah untuk diperintah, seperti turunan Tuan Dolog Batunanggar marga Purba Girsang yang diangkat raja Panei menjadi wakilnya di daerah tersebut.

Umumnya status *paruma* yang melekat pada rakyat raja-raja Simalungun membawa mereka pada situasi sulit, sebab mereka harus melayani raja dan keluarganya. Tidak jarang *paruma* ini habis dijarah atau diperas keluarga raja. Istilah *paruma dongok-dongok* menunjuk pada seorang kaya dari rakyat kebanyakan yang harus pintar-pintar menyembunyikan hartanya dari pemerasan partuanon. Bila seorang rakyat kaya berbelanja ke pasar (tiga) dia harus pandai-pandai mengatur tampilannya supaya jangan

terkesan sebagai orang kaya. Bila kelihatan sebagai orang kaya, maka dia tidak jarang menjadi objek pemerasan. Hasil buruan juga harus diserahkan kepada raja, meski raja tidak berkeringat sedikitpun untuk itu. Dia cukup menyuruh ajudannya meminta hasil daging buruan itu, dan biasanya rakyat tidak berani menolak permintaan raja. Tidak hanya itu, anak gadis atau perempuan bersuami pun dirampas atau diminta oleh raja untuk dijadikan selirnya. Meski ada kehormatan tersendiri dirasakan orangtua atau pihak si perempuan, tetapi kadang-kadang penolakan muncul dari si perempuan atau gadis yang diserahkan itu, yang membawa dia kepada usaha bunuh diri atau gila, seperti kasus anak gadis Tuan Sidamanik Na Hu Langit yang diserahkan kepada Rondahaim penguasa Raya sebagai imbalasan atas bantuannya pada salah satu pihak yang bertikai di Sidamanik.

Rakyat seswaktu harus siap-siap memenuhi panggilan raja untuk mobilisasi militer melawan kerajaan lain. Untuk itu raja menyediakan para pelatih untuk melatih rakyat dalam pertempuran melawan musuh. Ilmu beladiri tradisional yang disebut dihar menjadi pelajaran penting yang diajarkan kepada setiap orang di dalam kerajaannya. Pada waktu tertentu diadakan galanggang, yaitu adu pencak silat di suatu kampung di mana para jawara saling adu kemampuan melawan pesilat lain. Industri senjata api dibina oleh pihak kerajaan, seperti membuat senjata rakitan (*bodil tunggu dulu*) dan perlengkapan *mesiu* (ubat). Senjata api pada masa sebelum Belanda masuk sudah banyak dipakai di Simalungun, seperti juga daerah lain. Senjata api itu dibeli dari pedagang senjata yang datang dari pulau Pinang atau saudagar asing dari Eropa dan tempat lain. Senjata api

itu diberi nama beragam, mulai dari *bodil pamuras*, *bodil sitenggard* dan lain-lain. Meriam pun diimpor dari luar negeri. Contoh meriam dan bodil itu masih bisa kita lihat di Museum Simalungun Pematangsiantar.

3. Golongan Hamba (Jabolon)

Di Simalungun sejak dulu perbudakan adalah hal biasa dan dianggap kewajaran saja. Budak-budak ini berasal dari latar belakang sosial. Istilah *jabolon* merujuk pada milik raja atau penguasa. Ja dalam bahasa Simalungun singkatan dari raja, dan *bolon* berarti besar. Jabolon berarti milik raja atau orang besar. Hanya orang-orang kaya atau kelompok partuanon yang biasanya memiliki budak. Rakyat biasa hampir tidak ada yang memiliki budak, kecuali budak yang diberikan raja atau partuanon untuk membantu seseorang dari kalangan paruma yang mengabdikan kepada raja. Ayah J. Wismar Saragih bernama Jalam Saragih seorang abdi raja yang profesinya sebagai *tuhang sarung bodil* (ahli perakitan bedil tradisional) diberikan penguasa Raja beberapa orang hamba untuk membantunya dalam pekerjaannya sehari-hari. Budak-budak milik raja biasanya tinggal di rumah khusus dan memperoleh nafkah sekedarnya dari raja atau *partuanon*. Secara umum bisa disimpulkan kehidupan sehari-hari budak di Simalungun sungguh menyedihkan. Mereka dianggap harta milik raja atau *partuanon* dan kadang-kadang disamakan dengan ternak. Yang membedakan mereka dengan ternak hanya budak bisa bicara dan mengerti perkataan manusia, sedang ternak tidak. Demikianlah pandangan masyarakat Simalungun tradisional *tempo doeloe* terhadap golongan masyarakat terbawah

ini. Budak-budak ini sepenuhnya hidupnya tergantung atas kemurahan hati tuannya, jaminan hukum atas mereka tidak ada. Mereka bisa dibunuh dan diperlakukan seenaknya dan sering hidup menderita dengan dipasung dalam gubuk reot dengan kotorannya tersebar di sekitar pasungannya. Budak-budak dianggap milik raja dan raja ini memberikan budak kepada para bawahannya di daerah-daerah kekuasaannya. Penderitaan para budak atas kekejaman para tuannya dijelaskan J. Tideman tentang perlakuan buruk raja Siantar terhadap salah seorang budaknya yang menyuruh budaknya memanjat pohon aren dan membakar pohon itu sehingga budak itu mati terbakar atau menjatuhkan dirinya dengan resiko kecelakaan yang parah. Di lain waktu, raja Siantar juga pernah menyuruh seorang budak memanjat pohon *landoyung* sementara raja menebang pohon itu hingga sang budak harus menyelamatkan dirinya hingga terjatuh dan tubuhnya remuk dijatuhi pohon tumbang. Perlakuan lebih kejam dilakukan oleh tuan Raya Rondahaim Saragih, seorang budak yang dituduh berselingkuh dengan isteri sang penguasa (*tardogei tapak na ompat*) diperintahkan duduk di atas sebuah balok kayu dan 20 orang budak lain diperintahkan sang penguasa memukuli sang budak dengan senapan, setelah itu kepalanya dipenggal.

Budak yang berumur 10-12 tahun lebih sulit lagi. Budak yang bertugas memata-matai isteri raja atas perintah raja kadang-kadang memperoleh perlakuan kejam. Budak yang disebut jabolon pangirik-irik atau paihut-ihut ini sering menjadi sasaran amarah cemburu sang raja atas hasutan orang dekatnya. Budak ini dipaksa dengan siksaan di atas kursi penyiksaan untuk memberikan kesaksian palsu

terhadap seorang warga yang dicurigai sang raja telah berselingkuh dengannya. Anak-anak yang masih polos ini sering tidak mampu menceritakan kesaksian yang tidak benar ini, karena takut pula terkena sumpah tradisional yang disebut *bija*! Jadi betul-betul sangat menderita dan dalam posisi sulit tanpa ada pihak mana pun yang bisa melepaskan mereka dari kondisi itu.

Hukuman bagi para budak ini bermacam-macam seperti telah disinggung terdahulu. Ada yang tangannya diikat dan digantung dengan sebuah tali hingga luka-luka, hukuman ini disebut *isiringi*. Ada yang dibaringkan selama beberapa jam lalu dipukuli dengan rotan. Di Pamatang Raya budak yang *isiringi* ini digantung di pohon yang disebut *hayu pangantungan Si Pohok*. Hukuman yang lain disebut *ilansinai* yaitu mata, lubang hidung serta mulutnya dilumuri dengan air bercampur cabai yang membuat pedih perasaan terbakar. Kemudian *ilatongi*, yaitu dipukul dengan sejenis tanaman (*latong*) yang membuat badan gatal-gatal luar biasa seperti terbakar, bagian tubuh yang terluka dibasahi hingga membuat gatal semakin parah. Budak yang lain ada yang dihukum dengan dipasung di sebatang balok yang besar yang berat (*ibayangkon*).

Hukuman yang lain adalah *ihudahurushon*, yaitu menempatkan selangkangan seorang terhukum di atas pelana kuda yang dipertajam dengan kedua kaki digantungi batu yang berat yang menambah rasa sakit. Hukuman ringan dengan efek jera karena malu adalah *isangkut*, di mana si tangan si terhukum diikat pada tiang rumah dan dipertontonkan kepada umum.⁴⁷

P. A. L. E. Van Dijk kontrolir Toba dalam laporannya

mengenai Simalungun tahun 1893 yang ditulisnya di Labuhan Ruku mengatakan bahwa perbudakan di Simalungun dan secara umum di Tanah Batak adalah hal yang biasa. Latar belakang menjadi budak pun beragam; di antaranya karena kalah berjudi. Perjudian di Simalungun sudah menjadi bagian budaya; di antara raja-raja terkenal praktek judi tradisional yang disebut judi porang. Selain judi porang, adu ayam juga berkembang luas di masyarakat. Unsur judi ditemukan dalam praktek catur tradisional Simalungun. Catur orang Simalungun agak beda dengan catur sekarang ini, caturnya terdiri dari bongkahan batu kali yang besar yang dipahat menyerupai buah catur. Untuk menggesernya dipakai tenaga budak, taruhannya juga budak. Biasanya tempat bermain catur terletak di tanah yang posisinya melengkung di antara dua tebing dengan tanah rata di tengahnya.

Selain berjudi, seseorang bisa menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang, ditangkap dari suatu kampung atau negeri lain, penduduknya dirampas dan dijadikan budak sebagai rampasan perang. Ada juga yang diculik dari tempat lain dan dijual di pasar. Menurut van Dijk pada tahun 1893 kebanyakan budak di Simalungun berasal dari pulau Samosir yang berpenduduk padat dan miskin.⁴⁸ Kesan buruk ini membuat orang Simalungun memandang rendah orang Samosir. Dahulu masyarakat Simalungun melarang putera-puterinya menikah dengan penduduk dari Samosir, karena dianggap merendahkan dirinya. Perkawinan antara orang Simalungun dengan penduduk Samosir memang kadang-kadang muncul, tetapi terbatas di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas di antara mereka, seperti perkawinan antara puteri raja Panei dengan

kepala kampung (djaihtan) Simanindo marga Sidauruk yang bergelar Panetoba Sidauruk.⁴⁹

Penguasa Raya Rondahaim sering memerangi kerajaan lain di Simalungun dan merampas harta dan penduduknya dijadikan budak yang dijual ke Penang. Pasar budak Tongging di tepi Danau Toba adalah yang teramai, di mana budak dari Samosir dijual di sana untuk dijual kembali oleh pedagang budak ke Tanah Karo. Perbudakan memang umum di seluruh Sumatera Timur dan Tapanuli.

Budak-budak di Simalungun digolongkan menurut asal-usulnya yaitu:

1. *Jabolon taban* adalah budak yang berasal dari tawanan perang. Pasaran harga budak ini termasuk keluarganya dapat dibeli dengan harga \$ 32.
2. *Jabolon tangga* adalah budak yang kedua orangtuanya adalah budak. Tebusan untuk mereka ini dipatok \$ 32.
3. *Jabolon marutang* adalah orang merdeka yang karena tidak padat melunasi hutangnya atau denda dihukum menjadi budak. Bedanya dengan jabolon tangga dan jabolon taban. Mereka ini bisa kembali menjadi rakyat bebas bila hutangnya dapat dilunasi.
4. *Jabolon ayoban* adalah anak-anak yang orangtuanya sudah meninggal dunia dan tidak ada yang peduli dengan kehidupan mereka, mereka dapat dibebaskan dengan membayar \$ 12.
5. *Satongah jabolon* atau setengah budak,

maksudnya salah seorang orangtuanya adalah keturunan budak. Status *satongah jabolon* bisa ditebus seharga \$ 24 atau salah satu pasangan dengan status budak ditebus pasangan yang bukan budak, dengan demikian anak budak ini pun menjadi orang bebas (*paruma*).

6. *Jabolon dapot i parlintunan* adalah kawula kerajaan yang melarikan diri namun dapat ditangkap kembali.
7. *Anak babi* adalah anak-anak yang lahir dari orangtua tanpa ikatan perkawinan yang sah.
8. Anak-anak pasangan budak.⁵⁰

Kecuali *satongah jabolon* yang boleh berdiam di rumah sendiri, semua budak harus tinggal bersmaa tuannya dan patuh kepada tuannya. Bila melawan, budak ini dihukum dengan kejam oleh tuannya.

E. Karakteristik Masyarakat Simalungun

Dibandingkan dengan suku Batak Toba yang keras dan condong agresif, karakter orang Simalungun cenderung bersikap mengalah dan lebih tertutup (konservatif). Arlin Dietrich Jansen mengatakan bahwa dibanding suku Batak Toba dan Karo, karakter orang Simalungun lebih berwatak halus dan sensitif. Sifat halus orang Simalungun itu dikaitkan oleh Walter Lemmp maupun Dietrich Jansen dengan pengaruh budaya Hindu yang pernah berpenetrasi dengan orang Simalungun, terutama kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa atau masyarakat Hindu yang pernah menghuni kompleks candi Padang Lawas melalui Asahan. Adanya Kerajaan Tanah

Jawa di Simalungun menjadi bukti akulturasi budaya Hindu Jawa pernah hadir di Simalungun, dan akulturasi itu telah membentuk konfigurasi watak orang Simalungun yang lebih halus, hormat, tidak pernah keras atau meletus meskipun sakit hati.⁵¹

Pandangan Kramer lain lagi, menurutnya orang Simalungun adalah kaum kafir yang lembut dan tabiatnya kurang antusias daripada orang Toba, sehingga orang Simalungun tidak mampu berhadapan dengan pendatang dan terdesak ke hutan/pedalaman menjauhkan diri dari kehidupan modern. Daripada berhadapan dengan dunia modern dan pendatang yang lebih maju dan agresif seperti orang Batak Toba, orang Simalungun sebagai penduduk asli memilih hidup damai di tengah hutan dan meneruskan tradisi pertaniannya yang sangat tradisional itu.

Meskipun ada kesan bahwa orang Simalungun dianggap malas dan lamban oleh sebagian orang, J. Tideman memberikan gambaran yang lebih positif tentang watak orang Simalungun. Dia memahami sifat orang Simalungun itu dari sudut kehidupan tradisional mereka. Menurut J. Tideman, sikap orang Simalungun itu lahir dari kondisi masyarakat yang feodal terutama praktik perbudakan yang menekan rakyat kebanyakan oleh para tuan-tuan mereka. Wabah kolera yang sering melanda Simalungun dan membunuh banyak orang, lalu peperangan yang sering terjadi di antara sesama raja-raja Simalungun. Perjudian dan madat menyumbang pada sikap dan karakter orang Simalungun. Tradisi bermadat dengan mengisap candu cukup meluas di Simalungun. Ini melemahkan fisik dan psikis orang Simalungun. Suami isteri bersama-sama mengisap

candu dan ini jelas merugikan pada generasi mereka seterusnya. Menurut van Dijk rata-rata kaum bangsawan Simalungun, khususnya kepala-kepala adat adalah pengisap candu yang tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar membeli candu dari saudagar asing. Kaum bangsawan Simalungun menghabiskan waktunya hanya dengan mengisap candu bersama isteri dan selir-selir mereka. Kebiasaan buruk mengisap candu ini ternyata merembet ke struktur sosial terbawah, rakyat kebanyakan pun mengisap candu. Alat penghisap candu dibuat dari pipa kayu panjang yang ujungnya berhias cincin perak. Di antara kaum bangsawan Simalungun yang paling parah mengisap candu adalah Raja Maligas yang berusia 30 tahun, raja Siantar yang berusia 20 tahun, Tuan Dolog Paribuan, Tuan Buntu Turunan dan Tuan Sipolha. Mereka ini bisa tidak keluar rumah seharian sibuk mengisap candu. Meskipun demikian tidak semua *partuanon* atau kaum bangsawan ini pengisap candu, seperti Tuan Bandar dan Tuan Negeri Bandar yang bukan pengisap candu.⁵³

Solidaritas dan persatuan di antara orang Simalungun lebih rendah dari orang Toba dan Karo, jangankan bersatu, di antara raja-raja Simalungun sering terlibat perang memperebutkan wilayah, padahal di antara mereka masih terjalin hubungan kekerabatan atas dasar tradisi *puang bolon*. Penguasa wilayah kerajaan sering melakukan pemberontakan dan dipadamkan dengan kekuatan senjata melibatkan sekutu-sekutunya. Tuan Sipolha salah satunya yang paling sering tidak mempedulikan perintah raja Siantar dan pernah menyatakan kemerdekaannya dari Siantar bahkan tidak mengakui kekuasaan raja Siantar

atas wilayahnya yang diklaimnya merdeka.⁵⁴ Juga Dolog Batunanggar memberontak ke Panei yang dapat ditumpas dengan bantuan pasukan Rondahaim. Di Tanah Jawa muncul perang saudara, perebutan tahta antara Tuan Naposo dengan Raja Maligas. Sidamanik salah satu daerah vasal Siantar pada tahun 1893 daerahnya nyaris habis dicaplok Tuan Rondahaim dari Raya. Van Dijk melaporkan bahwa daerah-daerah Sidamanik yang dirampas Tuan Rondahaim meliputi: Pematang Sidamanik, Bangunsaribu, Sirubu-rubu, Raga Manik, Manik Raga, Pagar Tanga, Raja Riahan, Manik Tanga, Maniksaribu, Manik Habean, Manik Siantar, Manik Dolok, Sindar Manik, Manik Hataran, Huta Bayu, Simanjalai, Manik Silo dan Tambun.⁵⁵

Selain watak di atas, sebelum masuknya Belanda, kebiasaan memakan daging manusia (kanibal) pernah hidup di tengah-tengah kehidupan sehari-hari orang Simalungun. Kebiasaan memakan daging manusia ini sempat menjadi momok bagi orang asing yang ingin masuk ke Simalungun.⁵⁶ orang-orang yang dimakan ini biasanya laki-laki yang dijatuhi hukuman mati oleh raja, orang asing yang masuk ke suatu *urung* tanpa persetujuan kepala *urung* atau tahanan perang.⁵⁷ Anak-anak dan perempuan tidak pernah dimakan. Kalaupun seorang perempuan dihukum oleh pengadilan, dia hanya dihukum dengan dipukuli memakai rotan.⁵⁸ Praktek kanibalisme di Simalungun tidak berkaitan dengan pemuas rasa lapar tetapi lebih menekankan aspek magis, di mana roh orang yang dimakan itu diharapkan tidak mengganggu orang yang memakannya atau *mana* (kuasa gaib) yang ada pada tubuh korban berpindah ke orang yang memakannya. Orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya

ditembak dengan senjata api seperti di Panei, di Tanah Jawa diikat dengan sikap tegak lurus lalu dipancung sementara di Raya diikat pada tonggak kayu atau di sebuah pohon nangka di Raya Bayu. Tangannya direntangkan, kakinya diikat dan wajahnya ditutup dengan ijuk.⁵⁹ J. Wismar Saragih menulis bahwa Rondahaim pernah memakan daging manusia seorang panglima pasukan Tuan Bandar Silouraya yang dibunuhnya bersama pasukannya usai pertempuran melawan musuh di Hatoguhan. Badannya dimakan untuk melampiaskan kejengkelannya atas perang tersebut. Kepala dan tangannya diantarkan ke Raya Simbolon sebagai bukti kemenangan.⁶⁰

F. Pengaruh Hindu India di Simalungun

Pengaruh Hindu-India yang masuk ke Indonesia menurut Bosch mula-mula diterima golongan atas dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang melihat budaya Hindu-India itu lebih tinggi tarafnya daripada budaya pribumi Indonesia. Bosch menyebut prosesnya sebagai "*penetration pacifique*" (pemasukan dengan jalan damai).⁶¹ Gelar raja-raja Nusantara yang berakhir dengan *warman* adalah khas India.⁶² Salah seorang raja Silou di Simalungun dalam silsilah dikenal Indrawarman.⁶³ Batara Sangti Simanjutak penulis buku *Sejarah Batak* tidak menyangkal adanya pengaruh Hindu dalam unsur kebudayaan, struktur sosial dan kerohanian suku Simalungun. Harry Parkin lebih jauh menghubungkannya dengan asal-usul orang Batak yang dikatakannya dari India mengingat banyaknya kosa kata, kultur dan religi serta kebiasaan yang mirip di antara orang Batak dan India. Kerajaan Tanah Jawa menurut Parkin

adalah salah satu bukti hubungan tersebut.⁶⁴ Tideman bahkan menunjuk Chotta Nagpoer (*kota, kuta, huta*) tempat asal leluhur orang Batak. Bahkan kata Tideman, leluhur marga Sembiring dan rumpun Borbor berasal dari orang India Tamil di Barus.⁶⁵ Pengaruh Hindu India yang paling nyata di Tanah Batak menurut Tideman adalah sistem keyakinan mereka, aksara, kosa kata yang banyak mengadopsi kosa kata Sansekerta, mitologi Batak tentang penciptaan dunia yang diadopsi dari mitos Wedda, nama-nama dewa yang diambil dari Hindu Dharma.⁶⁶ Tideman mendaftarkan nama-nama hari Batak Toba, Batak Karo dan penulis tambahkan Simalungun di bawah ini:

Belanda	Sansekerta	Batak Toba	Batak Karo	Simalungun
<i>Zoondag</i>	<i>Aditya</i>	<i>Artia (ariria)</i>	<i>Aditia</i>	<i>Aditia</i>
<i>Maandag</i>	<i>Soma</i>	<i>Soema</i>	<i>Soema</i>	<i>Soema</i>
<i>Dinsdag</i>	<i>Anggara</i>	<i>Anggara</i>	<i>Anggara</i>	<i>Anggara</i>
<i>Woensdag</i>	<i>Boedha</i>	<i>Moeda</i>	<i>Boedaha</i>	<i>Moedaha</i>
<i>Dondersdag</i>	<i>Bhrspati</i>	<i>Boraspati</i>	<i>Beraspati</i>	<i>Boraspati</i>
<i>Vrijdag</i>	<i>Sjoekra</i>	<i>Singkora</i>	<i>Stjoekera</i>	<i>Sihora</i>
<i>Zaterdag</i>	<i>Sjanaistjara</i>	<i>Samisara</i>	<i>Samisara</i>	<i>Samisara</i>

Pengaruh budaya Hindu di Simalungun apakah itu langsung dari India atau melalui kerajaan-kerajaan Hindu dari Jawa dibuktikan melalui serangkaian eskapasi di beberapa tempat situs sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan Simalungun yang dilaksanakan oleh G. L. Tichelman dan P. Voorhoeve. Di Sidamanik ditemukan patung pangulubalang Sanggapati, di Huta Marihat Dolog Parubuan ditemukan patung pangulubalang Sibiangsa. Sanggapati dalam bahasa Sansekerta berkaitan dengan kematian, sedang kata

biangsa berhubungan dengan *vjamsa* yang dalam bahasa Sansekerta berarti "yang berbahu lebar" dan kata *ghora* yang berarti kemilau atau cahaya. Menurut arkeolog Rita Margareth S dan Ery Soerdewo, kontak budaya Hindu India masuk ke Simalungun secara perlahan-lahan dan akumulatif, sehingga di Simalungun tidak muncul agama Hindu yang permanen dan teroganisir baik seperti di Bali.⁶⁸

Bekas jejak budaya Hindu dari India itu terdapat pada sebutan raja pada stratifikasi sosial suku Simalungun yang diambil alih dari sistem *raj* di India. Struktur raja sebagai kelompok teratas di Simalungun dibuktikan lagi dengan pembagian kelas atas *paruma* dan budak dalam piramida stratifikasi masyarakat Simalungun. Pengaruh Hindu di Simalungun ini diakui Loeb seorang antropolog. Dia mengatakan formasi kenegaraan orang Simalungun (Timur) dan Karo membuktikan adanya pengaruh Hindu di kedua suku ini, terutama di antara orang Simalungun yang diperintah raja-raja dan kerabatnya dengan hanya satu saja daerah pusat pemerintahan mereka yang menyatukan beberapa unit wilayah taklukan yang lebih kecil.⁶⁹

Berbeda dengan Tideman dan Harry Parkin yang mengkaitkan India sebagai daerah asal pengaruh Hindu ke Simalungun (Tanah Batak), Jansen menghubungkan pengaruh Hindu itu melalui Tanah Jawa sebagai jalur akses pengaruh asing yang datang dari Padang Lawas, Minangkabau atau Jawa.⁷⁰ Peninggalan nisan (anisan) makam di Simalungun dan bangunan suci tertutup yang berfungsi sebagai tempat pemujaan di Simalungun membuktikan keberadaan usur pengaruh Hindu Jawa. Unsur pengaruh Hindu Jawa di Simalungun ditegaskan Arlin Dietrich Jansen

hadir dalam konsep pemerintahan raja dan istana yang jauh lebih berkembang di Simalungun dibandingkan wilayah Batak lainnya. Unsur budaya Hindu itu dirasakan langsung orang India yang baru tiba di Simalungun, dia merasa tidak asing di sini, orang India itu merasa di rumah sendiri, di negerinya tanah India.⁷¹ Seni tari, musik tradisional (gonrang dan sarunei) serta ritual kepercayaan kuno dan pemakaian kain *porsa* (kain putih) sebagai tutup kepala laki-laki Simalungun dalam acara adat kematian di Simalungun sangat khas Hindu. Filosofi *Habonaron do Bona* (kebenaran adalah pangkal segala sesuatu) jelas sekali bermuatan ajaran kebenaran dalam konsep Hindu yang menjiwai seluruh kehidupan orang Simalungun.

G. Hak-hak atas tanah

Hak-hak atas tanah di Simalungun berdasarkan sejarah terbentuknya *huta* yang selanjutnya berkembang menjadi urung yang dibentuk oleh marga tertentu. Huta dibuka oleh marga tertentu atau marga terdahulu penguasa sebelumnya digantikan oleh marga yang datang kemudian. Marga penguasa inilah pemilik tanah, jadi di Simalungun pada awalnya tanah dimiliki secara komunal oleh marga penguasa atas *huta* tersebut. *Huta* selanjutnya berkembang apakah melalui perluasan secara damai atau perang yang disebut urung, yaitu gabungan beberapa *huta* dalam kekuasaan seorang raja dari marga penguasa *urung* tersebut. *Urung* di Simalungun memiliki batas-batas alam, baik berupa gunung, sungai, bukit, hutan atau lembah alang-alang yang dipilih. Setiap *urung* di Simalungun diperintah oleh kepala urung yang disebut raja. *Urung* yang semakin luas dibagi

atas beberapa wilayah kecil di bawah kekuasaan keturunan kepala *urung*, muncul pembagian lahan atas *urung* tersebut oleh turunan kepala *urung*. Dari sini makin bertumpulah kekuasaan atas tanah itu di tangan kepala *urung*, hak-haknya atas tanah di *urung* tersebut semakin besar, sehingga raja dianggap sebagai penguasa dan pemilik semua tanah liar yang belum dibuka. Dari sinilah berkembang pendapat bahwa apa pun yang terdapat di tanah itu menjadi hak milik raja. Namun hak milik atas tanah tetap diserahkan kepada warga daerah itu, mereka hanya melaporkannya kepada raja, rakyat penggarap tanah memiliki hak turun temurun atas tanah itu. Orang asing bisa memperoleh sebidang tanah dengan syarat menjadi kawula raja dan membayar cukai tertentu (*bunga tanah*) dalam bentuk penyerahan sebagian hasil panen atau memberikan kewajiban untuk raja. Penjualan atas tanah buat orang asing dilarang oleh adat.⁷²

Batas masing-masing *urung* disepakati oleh penguasa *urung*, misalnya batas *urung* Tanah Jawa dan Siantar oleh masing-masing raja *urung*. Bila muncul sengketa biasanya diselesaikan oleh raja *urung* yang bersengketa tadi. Tanah termasuk milik *urung*. Pada setiap *urung* terdapat leluhur bersama yang menguasai sebidang tanah luas sejak dahulu; leluhur *urung* ini disebut *ompung urung* atau raja adalah pemilik tanah. Kepala *urung* berhak memberikan tanah itu kepada kerabatnya untuk digarap bersama para pengikutnya serta membangun huta di daerahnya dengan syarat pengakuan wewenang leluhur atas hak-haknya atas tanah. Kerabatnya memiliki kewajiban untuk menguasainya atas nama leluhur dan menerima keuntungan atas tanah itu. Apabila muncul sengketa perbatasan atas tanah garapan yang diberikan kepala *urung*, maka penggarap harus

tunduk kepada kepala *urung* yang menjatuhkan putusan atas sengketa itu. Atas dasar ini van Dijk menegaskan bahwa semua tanah yang tidak digarap adalah milik kepala *urung* atau raja *urung* yang menguasai bukan hanya tanah tetapi juga semua penghuni *urung* itu. Itulah sebabnya semua hasil hutan harus diserahkan sebagian kepada raja *urung*, termasuk gading gajah hasil buruan para pemburu di wilayahnya.⁷³

Kekuasaan kepala *urung* atas wilayahnya kadang-kadang disanggah oleh vasalnya, seperti Tuan Sipolha atas kekuasaan raja Siantar atas daerahnya. Juga di Tanah Jawa antara Dolok Paribuan Si Rimbang pada tahun 1891/1892 terhadap raja Tanah Jawa di Pematang Tanah Jawa. Bila muncul pembangkangan wakil raja di daerah vasalnya, maka raja berhak menurunkannya dari posisinya dan menggantikannya dengan orang yang dianggap patuh kepadanya.

Van Dijk menegaskan bahwa tanah di Simalungun kecuali *galunggung* dikuasai oleh raja *urung* sebagai penguasa *urung*. Hak penguasaan tanah itu didelegasikan kepada wakil-wakilnya para *partuanon* di daerah-daerah dengan catatan bahwa mereka harus memperhatikan kepentingan umum warga, para *partuaonon* diberikan hak menguasai tanah demi kepentingan warga.⁷⁴ Bila rakyat menginginkan tanah maka dia harus menemui kepala *urung* atau *partuanon* di mana lokasi tanah yang dikehendaknya itu. Dia juga harus mengutarakan alasannya meminta tanah itu kepada penguasa di tempat itu, alasannya haruslah tepat, karena tidak mudah mencabut hak yang sudah diberikan raja kepadanya. Dia juga diwajibkan tinggal dan mengikuti adat

kebiasan di tempat itu. Tanah yang sudah pernah digarap dengan status *tanoh galunggung* tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Hutan-hutan dan tanah yang belum pernah diusahai berada di bawah kekuasaan raja *urung* dan penguasa di bawahnya. Apabila tanah yang pernah dibuka dibiarkan menjadi hutan kembali maka hak penggarap terdahulu menjadi hilang dan kembali kepada penguasa. Namun, selama tanah itu masih menghasilkan sesuatu dari pohon yang ditanam sebelumnya hak penggarap masih tetap sebab tanah itu dianggap masih berstatus *galunggung*.⁷⁵

Meskipun raja bertindak selaku kepala *urung*, dia wajib berunding lebih dahulu dengan para *partuanon*, para kepala daerah dan bawahannya yang tanpa persetujuan mereka tidak bisa melakukan pemberian. Selanjutnya kepala huta juga terlibat dalam persoalan ini, karena dia dianggap menguasai tuntutan pihak ketiga atas tanah yang diberikan. Ketika *partuanan* ingin menyerahkan lahan di daerahnya membangun huta baru, maka terutama dia harus meminta izin raja dengan menyebutkan nama orang yang mereka tunjuk sebagai kepala *huta* baru. Pihak yang diberi hak menguasai oleh raja diwajibkan mengabdikan kepada raja dengan membayar pajak dan kerja wajib. Dia memberikan pajak tanah yang disebut bunga tanoh kepada kepala huta (*pangulu*). Mengingat tanah selalu milik *urung*, pelepasannya hanya bersifat sementara, sebab raja atau *partuanon* boleh menyerahkan tanah itu kepada orang lain yang meminta tanah apabila penggarap itu meninggal dunia, meninggalkan tanah, tidak membayar *bunga tanoh*, dan pengalih fungsian tanah itu untuk tujuan lain yang diajukan sebelumnya, tanah itu kembali kepada *urung*.⁷⁶

Dari penjelasan van Dijk ini hak milik atas tanah di Simalungun terletak pada *urung* bukan raja *urung* atau kepala daerah. Pihak yang terakhir ini hanya sebatas pengelola atau pengawas saja atas tanah *urung* yang dikuasainya. Tanah-tanah kosong berupa hutan berada di bawah pengawasan kepala *urung* (raja) dan *partuanon*, tetapi tanah yang sudah pernah diusahai dan masih menghasilkan tetap dikuasai penggarap selama penggarap itu tidak meninggalkan tanah tersebut. Penggolongan tanah di Simalungun menurut van Dijk adalah:

1. *Tombak* atau hutan belukar tanpa bekas pembukaan atau pemukiman.
2. *Harangan*, tanah yang terletak di sekitar pemukiman dan yang meskipun berada di dalam kondisi liar masih bisa dijumpai bekas penggarapan tanah sebelumnya;
3. *Sampalan* yaitu terutama digunakan di daerah tempat membuka padang dan lahan alang-alang sehingga tidak lagi digunakan apapun kecuali sebagai tempat penggembalaan;
4. *Galunggung*, tanah yang telah dibuka namun ditinggalkan yang belum termasuk liar kembali dan pembukanya masih bisa bertanggungjawab menuntutnya. Sebagai tanda-tanda bekas pembukaan, di tanah ini dijumpai pohon seperti durian, pohon-pohon yang masih bisa diambil manfaat darinya dan pohon kelapa.⁷⁷
5. *Tanoh rih*, yaitu tanah yang ditumbuhi alang-alang, statusnya sama dengan tombak.⁷⁸

Sawah dianggap tanah milik individu dan bisa diwariskan kepada ahliwarisnya dan bisa diperjual belikan, digadaikan atau disewakan. Tetapi transaksi harus tetap diketahui dan diadakan di hadapan kepala adat. Jika seseorang meninggalkan kampung maka tanahnya disebut *gayang-gayang na tading* dan hak penguasaan tanah itu kembali kepada kepala adat. Kepala adat bisa mengolah tanah itu atau menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain untuk digarap, akan tetapi raja tidak bisa mengalihkan haknya kepada orang lain. Untuk itu si penggarap yang meninggalkan kampungnya harus membayar *tanggal pararian*, *tanggal anggap* atau *tantang horin* (khusus di Kerajaan Dolog Silou, Purba dan Silimakuta). Kewajiban pembayaran ini penuh bila keluar dari *urung* tersebut, namun bila masih berada dalam *urung* yang sama, pembayarannya dikenakan setengah dari jumlah yang ditentukan kepala *urung*. Selama dia berada di luar tanah itu, maka rumah dan pekarangan menjadi *gayang-gayang na tading* dan mereka bisa tetap menggarap tanahnya. Ketentuan tanggal pararian ini berbeda di setiap *urung* di Simalungun. kewajiban ini dibayarkan kepada raja dan *partuanon* sampai kepada kepala kampung sebagai birokrasi pemeritahan paling bawah di *urung* tersebut. J. Tideman menjelaskan di daerah Kerajaan Dolog Silou pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang langsung dikuasai raja, raja menerima 1/3, sisanya dibagi dengan Tuan Bandar Hanopan, Tuan Dolog Saribu dan Tuan Dolog Mariring.
2. Di Bandar Hanopan, raja menerima 1/3 dan Tuan Bandar Hanopan 1/3 sementara sisasanya

- dibagi di antara kepala adat kampung.
3. Di Dolog Mariring, raja menerima $\frac{1}{2}$, Tuan Dolog Mariring $\frac{1}{3}$ dan Tuan Longkung $\frac{1}{6}$. Di daerah Tuan Sinasih, dia menerima $\frac{1}{3}$, raja menerima $\frac{1}{3}$, sementara $\frac{1}{3}$ sisanya harus dibayarkan kepada Tuan Bandar Hanopan dan para kepala dusun.
 4. Di Nagori Dolog, $\frac{1}{3}$ diserahkan kepada raja, $\frac{1}{3}$ kepada Tuan Nagori Dolog, dan $\frac{1}{3}$ kepada para kepala kampung akan tetapi Tuan Nagori Dolog harus memberikan $\frac{1}{5}$ bagiannya kepada Tuan Bandar Hanopan, Tuan Dolog Saribu Tuan Dolog Mariring dan Tuan Sinasih.⁷⁹

Djariaman Damanik menjelaskan bahwa di Simalungun tanah tidak bisa digadaikan atau dijual sebeleum Belanda masuk, sebab tanah dikelola rakyat tetapi berada dalam kontrol penguasa.⁸⁰ Hanya sawah yang merupakan hak milik penggarap yang bisa diperjual belikan. Selain itu tidak bisa. Tanah *galungung* atau *gayang-gayang na tading* tetap bisa dimiliki penggarap sebelumnya yang pindah ke tempat lain asal dia memenuhi kewajibannya terhadap desa asalnya meskipun dia sudah menjadi warga desa lain. Untuk tanah milik kampung, kebun dan tanaman yang ada di atasnya dimiliki oleh kampung itu, raja hanya dapat memiliki tanah tersebut bila kampung itu sengaja ditinggalkan.⁸¹

H. Bahasa dan Aksara

Simalungun mempunyai bahasa daerah sendiri. Orang Toba pada tahun 1893 tidak mengerti bahasa Simalungun, meski banyak kata yang mirip bunyinya tetapi

tidak jarang maknanya berbeda, bahkan kadang-kadang saling bertentangan dan diartikan lain oleh masing-masing penutur kedua bahasa itu. Menurut van Dijk kontrolir Toba itu, bila orang Toba masih bisa memahami pembicaraan dalam bahasa Angkola yang banyak mirip dan searti sama dengan bahasa Batak Toba tidak demikian halnya dengan bahasa Simalungun. kepala-kepala adat di Toba yang dikenal van Dijk tidak ada yang mengerti bahasa Simalungun sama sekali.⁸²

Orang Simalungun menamai bahasanya dengan sahap Simalungun. masing-masing daerah di Simalungun mempunyai dialek tersendiri. Meski masih bisa saling mengerti, tetapi kadang-kadang ada perkataan yang sama tetapi artinya berlainan.

Semula misionaris yang datang ke Simalungun menganggap remeh persoalan bahasa Simalungun. Mereka mengira bahasa Simalungun hanyalah dialek saja dari bahasa Batak Toba, alasannya sesuai mitos di Toba bahwa leluhur orang Simalungun berasal dari Samosir, hingga sesungguhnya orang Simalungun hanyalah perluasan saja dari masyarakat Toba di Tapanuli. Namun pendapat keliru ini dikoreksi Voorhoeve, dia menyebutkan bahwa bahasa Simalungun adalah berbeda dengan bahasa Toba dan berbeda juga dengan bahasa Karo. Bahasa Simalungun benar adalah bagian rumpun bahasa-bahasa Batak, tetapi dia berada di tengah-tengah, di antara rumpun utara (bahasa Karo, Dairi/Pakpak dan Alas) serta rumpun Selatan (bahasa Toba, Angkola dan Mandailing). Bahasa Simalungun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bahasa Toba. Bahasa Simalungun lebih halus dan memiliki bahasa

tingkatan yang berbeda sesuai stratifikasi dan struktur sosialnya. Bahasa Simalungun juga mempunyai bunyi khas atau huruf penutup seperti, *g*, *b*, dan *d* di akhir kata serta mempunyai vokal rangkap *ei*, *ou*, *ui* dan *ah*. *Sopou* di Simalungun diucapkan *sopo* di Toba, *magou* di Simalungun diucapkan *magu* di Toba. Menurut Henry Guntur Tarigan, bahasa Simalungun memiliki 4 dialek, yaitu:

1. Dialek Silimakuta
2. Dialek Raya
3. Dialek Topi Pasir
4. Dialek jahe-jahe

Bahasa Simalungun di perbatasan Tanah Karo dipengaruhi bahasa Karo, di perbatasan dengan Tapanuli dipengaruhi bahasa Batak Toba, di perbatasan dengan Melayu dipengaruhi bahasa Melayu. Dengan posisinya ini, orang Simalungun mudah menguasai bahasa-bahasa tersebut. Di Saribudolok dan Dologsilou yang berbatasan dengan Karo, rata-rata orang Simalungun di sana menguasai bahasa Karo.

Selain bahasa orang Simalungun sudah hidup dalam budaya tulis. Media tulis mereka terbuat dari tanduk kerbau, kulit kayu atau bambu. Tulisan orang Simalungun disebut surat batak yang terdiri dari indungni surat sebanyak 19 buah, sehingga disebut *Surat Batak Sapuluhsiah* dan diakritik yang disebut budakni surat yaitu sejumlah vokal untuk melengkapi *indungni surat*.⁸⁴

Uli Kozok seorang paleografi dan ahli tulisan Batak menyebutkan bahwa surat Batak termasuk pada keluarga tulisan India terutama aksara Pallawa dari India Selatan. Menurut Uli Kozok, semua aksara asli Indonesia berinduk dari aksara Palawa India. Aksara Batak sendiri menurut Kozok

tidak lahir di Toba melainkan di Padang Lawas Tapanuli Selatan (Angkola Mandailing), dari sana menyebar ke arah utara membentuk aksara purba Toba-Simalungun (di antara Parapat dan Balige), dari Simalungun ke Toba, dari sini ke Pakpak dan terakhir ke Karo. Kozok membuktikan aksara Simalungun (lebih tepat Toba-Simalungun) lebih tua dari aksara Toba Barat, Pakpak dan Karo.⁸⁵

Aksara Simalungun dipakai dulu dalam menulis cerita-cerita rakyat, nujuman, suman-suman, pulas (pernyataan perang) dan lain-lain. Alat tulisnya pisau runcing yang tajam (*raut*) dan hasil tulisan di bambu atau kulit kayu (*pustaha laklak*) dilumuri dengan semacam getah (*saloh*) hingga hitam dan awet. Pada saat masuknya Belanda surat-surat yang berhubungan dengan kepala-kepala adat di Simalungun ditulis dengan aksara Surat Sapuluhsiah. Hal ini berlangsung sampai tahun 1915. Surat pengangkatan pangulu (*kepala desa*) ditulis dengan aksara Simalungun seperti ditunjukkan dengan besluit pengangkatan Haji Ulakma Sinaga menjadi pangulu Desa Bahal Gajah Sidamanik. Raja-raja Simalungun karena belum mengerti aksara Latin membubuhkan persetujuannya atas surat-surat pengangkatan dan pengakuan takluk kepada Belanda dengan menulis namanya dalam aksara Simalungun, seperti kita lihat dalam besluit pengakuan raja Siantar Sangnualuh tahun 1888 dan pelakat pendek komisi Kerajaan Siantar atas nama Tuan Torialam Damanik tuan Marihat dan Tuan Riahata Damanik tuan Sidamanik pada tahun 1907.



Catatan



¹P. A. L. E. van Dijk, "Laporan Mengenai Simalungun: Daerah Tanjung Kasau, Tanah Jawa dan Siantar" dalam TBG, 1894, hlm. 1.

²Ibid., hlm. 4.

³Anonim, "Nota van Toelichting ... (1909), hlm. 527.

⁴Van Dijk, op. cit., hlm. 1.

⁵J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 2.

⁶J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 10.

⁷Van Dijk, "Laporan Mengenai Si Balungun (1894)...", hlm. 3.

⁸Ibid., hlm. 6.

⁹Wolfgang Clauss, *Economic and Social Change among The Simalungun Batak of North Sumatra*, vol 15 (Saarbrücken-Fort Laudardale: Verlag Breitenbach Publishers, 1982), hlm. 31.

¹⁰J. Tideman, op. cit., hlm. 84.

¹¹J. Wismar Saragih, "Dong do Sadiha boeei ni halak Simaloengoen?", dalam *Sinalsal* No. 90/September 1938/Tahun VIII (Edisi khusus Jubileum Comite Na Ra Marpodah), hlm. 29.

¹²Dikutip Clauss, op. cit., hlm. 36.

¹³Van Dijk, op.cit., hlm. 8.

¹⁴Surat raja Panei tahun 1904 dalam *Arsip Nommensen Koleksi VEM Jerman*, dilampirkan Uli Kozok, *Surat Batak* (Jakarta: KPG Gramedia, 2009), hlm. 178.

¹⁵Van Dijk, op. cit., hlm. 9.

¹⁶Lebih jelas baca *Sayur Andreas Lingga Sitopu, Mengenal Rumah Tradisional Simalungun* (Pematangsiantar: Museum Simalungun, 1987), hlm. 7-8.

¹⁷Ibid., hlm. 14.

¹⁸Anonim, "Nota Penjelasan Tentang Daerah Siantar, Tanah Jawa dan Raya di Simalungun", TBG, (terjemahan) hlm. 90.

- ¹⁹Wawancara dengan Kamen Purba putera raja Panei di Pematangsiantar, Desember 2012.
- ²⁰Anonim, "Nota (1909)..", hlm. 90.
- ²¹Merville J. Herskovis, "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat" dalam T. O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya* (terj.) (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 82.
- ²²J. Tideman, op. cit., hlm. 98.
- ²³M. D. Purba, "Perspektif Sejarah Kebudayaan Simalungun", makalah Harunguan Bolon PMS III, 28-29 Agustus 1987 di Pematangsiantar, hlm. 7.
- ²⁴J. Tideman, op.cit., hlm. 108.
- ²⁵Ibid.
- ²⁶D. Kenan Purba, *Adat Istiadat Simalungun: Pelaksanaan dan Perkembangannya* (Pematangsiantar: Bina Budaya Simalungun, 1997), hlm. 25.
- ²⁷J. Wismar Saragih, *Barita ni Tuan Rondahaim* (Pamatangraya, 1935) dalam *Mansen Purba, Rondahaim: Sebuah Kisah Kepahlawanan Menentang Penjajahan di Simalungun* (Medan: Bina Budaya Simalungun, 1993), hlm. 50.
- ²⁸Mansen Purba, op. cit., hlm. 64.
- ²⁹Suruhen Purba, S. Andreas Lingga dan Marsiria, *Buku Petunjuk (Guide Book) Museum Rumah Bolon Pamatang Purba Kabupaten Simalungun* (Medan: Museum Sumatera Utara, 1991), hlm. 8-9.
- ³⁰T. Amin Damanik dan Jaramen Damanik, *Sidamanik: Turi-turianni Oppung Na I Horsik* (Pematangsiantar: Persatuan Oppung Na I Horsik, 1976), hlm. 58.
- ³¹J. Wismar Saragih, *Barita ni Tuan Rondahaim dalam Mansen Purba*, op. cit., hlm. 41.
- ³²J. Wismar Saragih, *Barita ni Tuan Rondahaim dalam Mansen Purba*, op. cit., hlm. 134.
- ³³L. Castles, "Statelessness and Stateforming Tendencies Among The Batak Before Colonial Rule" in Anthony Reid and Lance Castles (eds.), in *Precolonial State System in Southeast Asia, Monograph of The Malaysia Branch of The Royal Asiatic Society* no. 6, Kuala Lumpur, 1975, hlm. 75.
- ³⁴J. C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (terj.)

(Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 130.

³⁵J. Tideman, op. cit., hlm. 92.

³⁶Lance Castles, *Ethnicity*, hlm. 20.

S. M. Siahaan, "Peranan dan Kedudukan Raja dalam Struktur Suku dan Masyarakat Batak " dalam: *Vocatio Dei*, Edisi VIII (April-Juni 1984, Pematangsiantar: STT HKBP), hlm. 26.

³⁸Batara Sangti Simanjuntak, *Sejarah Batak* (Balige: Karl Sianipar Company, 1977), hlm. 164.

³⁹Bungaran Antonius Simanjutak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Yogyakarta: Obor, 2006), hlm. 33.

⁴⁰Lihat Mansen Purba, *Kepahlawanan*, hlm. 315.

⁴¹J. Wismar Saragih, "Barita ni Tuan Rondahaim" dalam Mansen Purba, op. cit., hlm. 261-262.

⁴²J. Tideman, op. cit., hlm. 92.

⁴³Anonim, "Nota Penjelasan Mengenai Siantar ... (1909)" (terjemahan), hlm. 108.

⁴⁴Bnd. J. C. Vergouwen, op. cit., hlm. 130.

⁴⁵J. Tideman, op. cit., hlm. 101-106.

⁴⁶J. C. Vergouwen, op. cit., hlm. 135.

⁴⁷J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 112-113.

⁴⁸P. A. L. E. van Dijk, "Laporan Mengenai Si Balungun..." dalam TBG (terj.), hlm.52.

⁴⁹Wawancara dengan Kamen Purba (77) tahun, putera raja Panei terakhir di Pematangsiantar, Desember 2012.

⁵⁰Anonim, "Medededelingen Betreffende het Landschap Pane en het Rajahgebied" dalam TBG (Martinus Nijhoff S'Gravenhage, 1904), hlm. 573; J. Tideman, *Simeoloengoen*, hlm. 110-111.

⁵¹Arlin Dietrich Jansen, *Gonrang Simalungun: Struktur dan Fungsinya dalam Masyarakat Simalungun* (terj.) (Medan: Bina Media, 2003), hlm. 17-19; lihat juga Walter Lemmp, *Benih yang Tumbuh* jilid 12: *Gereja-gereja di Sumatera Utara* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1976), hlm. 56.

⁵²Hendrik Kramer, *From Missionfield to Independent Church: Report on a Decisive Decade in The Growth of Indigeneous Churches in Indonesia* (Broekentrum: The Hague, 1958), hlm. 56.

⁵³P. A. L. E. van Dijk, op. cit., hlm. 10.

⁵⁴Ibid., hlm. 32 dan 36.

⁵⁵Ibid., hlm. 31.

⁵⁶J. Tideman, *Simeloengoen*, hlm. 39.

⁵⁷P. A. L. E. van Dijk, op. cit., hlm. 11.

⁵⁸J. Tideman, op. cit., hlm. 145.

⁵⁹Ibid., hlm. 142.

⁶⁰J. Wismar Saragih, "Barita ni Tuan Rondahaim" dalam *Mansen Purba*, op. cit., hlm. 114.

⁶¹F. D. K. Bosch, *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia* (terj.) (Jakarta: Bharatara, 1974), hlm. 15.

⁶²Peter Bellwood, *Prasejarah Kepulauan Nusantara* (terj.) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 203.

⁶³Jahutar Damanik, *Jalannya Hukum Adat Simalungun* (Medan, 1974), hlm. 36.

⁶⁴Harry Parkin, *Batak Fruit and Hindu Thought* (Madras: The Christian Literature Society, 1978), hlm. 77.

⁶⁵J. Tideman, *Hindoe Invloed in Noordelijk Batakland* (Amsterdam: NV Drukkerij "De Valk", 1936), hlm. 5-6.

⁶⁶Bnd. Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 29-35.

⁶⁷J. Tideman, *Hindoe...*, hlm. 12; R. Purba, "Aksara dan Bahasa Simalungun" dalam *Intisari Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia Pertama* (Pematangsiantar: Museum Simalungun, 1964), hlm. 161.

⁶⁸Rita Margareth S dan Ery Soedewo, "Jejak Kontak Kebudayaan Simalungun dengan Kebudayaan India", makalah *Sarasehan Budaya Simalungun di USI* (Pematangsiantar, 27 Pebruari 2003), hlm. 2.

⁶⁹Edwin M. Loeb, *Sumatra: Its History and People* (Singapore, New

York: Oxford University Press, 1990), hlm. 38.

⁷⁰Arlin Dietrich Jansen, op. cit., hlm. 18.

⁷¹Ibid., hlm. 19. Hal ini juga disebutkan Harry Parkin seorang misionaris India yang pernah mengajar di STT HKBP Nommensen tahun 1980-an.

⁷²Anonim, "Nota Penjelasan Mengenai Daerah Siantar, Pane, Tanah Jawa dan Raya di Simalungun" dalam TBG, 1909, hlm. 110.

⁷³P. A. L. E. van Dijk, op. cit., hlm. 56 dan 58.

⁷⁴Ibid., hlm. 58.

⁷⁵P. A. L. E. van Dijk, op. cit, hlm. 57

⁷⁶Ibid., hlm. 60.

⁷⁷Ibid., hlm. 55.

⁷⁸J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 132.

⁷⁹J. Tideman, Simeloengoen, hlm. 132-133.

⁸⁰Djariaman Damanik, "Hukum Tanah di Daerah Simalungun (Zaman Raja-raja di Daerah Simalungun) dalam Jef Rudiantho Saragih (ed.), Bunga Rampai Pemikiran Mr Djariaman Damanik: Berpikir dalam Multidisiplin Belajar dari Sejarah (Medan, 2006), hlm. 123.

⁸¹P. A. L. E. van Dijk, op. cit., hlm. 34.

⁸²Ibid., hlm. 15.

⁸³Henry Guntur Tarigan, "Bahasa dan Kepribadian Simalungun" makalah disajikan pada Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun, Jumat-Sabtu, 28-29 Agustus 1987 di Pematangsiantar, hlm. 1

⁸⁴M. D. Purba, "Perspektif Sejarah Kebudayaan Simalungun", makalah disajikan pada Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun, Jumat-Sabtu, 28-29 Agustus 1987 di Pematangsiantar, hlm. 11.

⁸⁵Uli Kozok, Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak (Jakarta: KPG, 1999), hlm. 73-78.

BAB IV

MASA KOLONIAL BELANDA (1865-1942)

Pada awal abad ke-20 daerah Simalungun mulai memasuki episode sejarah baru. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kolonialisme Belanda dan zending memasuki wilayah ini untuk menyebarkan misinya. Kolonialisme Belanda bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonominya, seperti pengamanan daerah-daerah perkebunan di kawasan Sumatera Timur, sehingga dilakukanlah usaha pasifikasi terhadap daerah-daerah "Batak" yang sebelumnya dianggap merdeka. Pada sisi lain dengan pesatnya perluasan perkebunan di Sumatera Timur, dan meluas ke daerah Simalungun, menyebabkan semakin banyaknya jumlah orang yang bermigrasi ke daerah ini terdiri dari: bangsa Eropa, Tiongkok (China), Keling (India Tamil), Batak Toba, Batak Mandailing dan lain-lain. Orang Eropa, China, Keling lebih berorientasi motif ekonomi perkebunan, dan hidup di areal perkebunan sehingga kurang bergaul dengan penduduk setempat. Sementara itu orang Batak Toba yang sudah beragama Kristen dengan motivasi membuka persawahan, yang mendapat dukungan dari pemerintah kolonial guna menopang pangan penduduk Sumatera Timur, dan para zendeling RMG dengan alasan sebagai sahabat untuk menyebarkan agama Kristen Protestan terhadap masyarakat Simalungun. Kondisi demikian, mempengaruhi masyarakat Simalungun dalam proses transformasi agama Kristen yang mulai diperkenalkan oleh zending. Bagian ini akan membahas mengenai ekspansi kolonial dan

pengaruhnya bagi masyarakat Simalungun seperti hadirnya perkebunan, para pendatang dan jatuhnya kerajaan lokal dalam kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

A. Kerajaan Lokal dalam Kekuasaan Kolonial

Sejak tahun 1823 daerah Simalungun mulai mendapat perhatian bangsa Barat yaitu John Anderson dari Inggris.¹ Perhatian semakin intensif terhadap daerah ini oleh kolonial Belanda adalah semenjak tahun 1865 seiring perluasan kekuasaannya ke luar pulau Jawa dalam hal ini ke kawasan Sumatera Timur, dengan motif ekonomi untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan perluasan perkebunan ke daerah ini.² Sekalipun kolonial Belanda telah menguasai Nusantara, namun perhatian mereka terhadap daerah Batak baru dimulai pada paruh kedua abad ke-19, hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu: (1) Kolonial belum punya kepentingan politis untuk menguasai daerah ini; (2) daerah Batak ini berlokasi di pedalaman yang terpencil, sehingga sulit mengaksesnya; dan (3) adanya anggapan terhadap sifat kanibalisme penduduk setempat sehingga mengecutkan hati dan menunda penyelidikan terhadap daerah Batak.³

Memasuki tahun 1888 pemerintah mulai campur tangan terhadap daerah ini dengan alasan penertiban terhadap wilayah Batak merdeka untuk dimasukkan menjadi bagian pemerintahan kolonial. Proses perlawanan dilakukan oleh raja-raja Simalungun terhadap Belanda, terutama dari Kerajaan Raya yang dipimpin Tuan Rondahaim Saragih Garingging (1828-1891), demikian juga dari Kerajaan Siantar yang dipimpin Sang Nauluh Damanik (1871-1913). Namun kurangnya kesatuan di antara kerajaan-kerajaan

tersebut memudahkan kolonial Belanda untuk menguasai dengan jalan membantu salah satu dari pihak-pihak kerajaan yang bersengketa. Kerajaan-kerajaan Simalungun mulai ditaklukkan tahun 1888 dengan memaksa raja Sang Nauluh Damanik dari Kerajaan Siantar tunduk kepada Hindia Belanda, selanjutnya tahun 1889 Raja Djintar Sinaga penguasa Kerajaan Tanoh Jawa. Tahun 1890 Raja Djontama Purba Dasuha dari Kerajaan Panei menyatakan tunduk, berikutnya tahun 1892 giliran Raja Tanjarmahai Purba Tambak dari Kerajaan Dolog Silou. Tuan Hapoltakan dari kerajaan Raya, Tuan Rahalim Purba Pakpak dari Kerajaan Purba dan Tuan Pamoraidup Purba Girsang dari Kerajaan Silimakuta. Setelah raja-raja ini menyatakan tunduk di hadapan pemerintah kolonial yang diwakili C. J. Westenberg Asistern Residen Urusan Batak, maka sebagai bukti pengakuan mereka dilanjutkan dengan penandatanganan *Korte Verklaring*⁴ atau Plakat Pendek. Isinya menyangkut tiga pasal, yaitu: (1) pengakuan takluk kerajaannya sebagai bagian dari Hindia Belanda; (2) Tidak akan mengadakan hubungan politik dengan negeri asing; (3) Sepenuhnya melaksanakan semua perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui pamongpraja Belanda.⁵ Setelah penandatanganan Pelakat Pendek⁶ ini kolonial Belanda mulai menerapkan bentuk pemerintahan baru, dengan memberikan pengakuan otonomi terhadap raja-raja Simalungun, walaupun dalam prakteknya selalu di bawah pengawasan kontrolir, sehingga dipandang lebih tertib dari sebelumnya. Simalungun dijadikan sebuah *onderafdeeling* dari *Afdeeling Simeloengoen en Karolanden*⁷ residensi Oostkust van Sumatera. Afdeeling ini pusatnya semula 1906



Gambar 13: Kantor Asisten Residen Afdeeling Simaloengeon en Karolanden di Pematangsiantar, 1930) (Sumber: kittv.nl)

di Saribudolak, namun sejak 1912 dengan pertimbangan strategis ekonomis dipindahkan ke Pematangsiantar. Raja-raja Simalungun diharuskan menangani tertib administrasi kerajaannya, menetapkan batas-batas wilayah tiap kerajaan dengan lebih tegas. Dengan demikian setiap kerajaan dibagi atas beberapa distrik dan perkampungan. Adapun ketujuh kerajaan (*landschap*) tersebut terdiri dari 16 distrik⁸ meliputi:

- (1) Siantar, dibagi atas tiga distrik yaitu: 1. Siantar, 2, Bandar, 3. Sidamanik
- (2) Tanoh Jawa dibagi atas lima distrik yaitu: 1. Tanoh Jawa, 2. Bosar Maligas, 3. Jorlang Hataran, 4. Dolog Panribuan, 5. Gisang Sipangan Bolon.
- (3) Panei, terdiri atas 2 distrik yaitu: 1. Panei, 2. Dolog Batunanggar.
- (4) Raya, terdiri atas 2 distrik yaitu: 1. Raya, 2 Raya Kahean

- (5) Dolog Silou, terdiri atas 2 distrik yaitu: 1. Dolog Silou, 2. Silou Kahean.
- (6) Purba, hanya satu distrik yaitu Purba.
- (7) Silimakuta, hanya satu distrik yaitu Silimakuta.



(**Gambar 14:** Foto Raja-raja Marpitu, saat pemberian bintang kehormatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Tn Sawadin Damanik Pemangku Raja Siantar 1930: 1. Raja Tanah Jawa Tn Sangmajadi Sinaga, 2. Raja Raya Tn Gomok Saragih, 3. Raja Siantar Tn Sawadim Damanik, 4. Raja Panei Tn. Bosar Sumalam Purba Dasuha, 5. Raja Dolog Siou Tn Ragaim Purba Tambak, 6. Raja Purba Tn Mogang Purba Pakpak, 7. Raja Silimakuta Tn. Padiraja Purba Girsang)

Walaupun raja-raja Simalungun telah berada di bawah tertib administrasi politik kolonial Belanda, tidaklah segera menghapus sistem kemasyarakatan yang monarkhis-feodalistis, bahkan kolonial Belanda memanfaatkan sistem tersebut dengan cara mengukuhkannya demi kepentingan ekonomi dan politik mereka di Simalungun.⁹ Kepada raja-raja Simalungun pihak kolonial memberi kuasa untuk memimpin persidangan wilayah kerajaanya bersama-sama dengan *Partuanon*. Persidangan itu disebut kerapatan oeroeng yang bertugas memutus perkara-perkara yang

berkaitan dengan tindak pidana dan perdata di tengah-tengah penduduk. Keputusan yang diambil dalam kerapatan itu harus mengikuti petunjuk hukum yang digariskan pemerintah kolonial.¹⁰ Sementara itu peradilan di tingkat *onderafdeeling* Simalungun yakni kerapatan nabolon, pemerintah kolonial menunjuk salah seorang di antara raja-raja Simalungun untuk menjadi ketua persidangan, yaitu atas hunjukan *asisten residen afdeeling Simeloengoen en Karolanden*. Perkara-perkara yang dapat disidangkan dalam kerapatan nabolon ini ialah perkara yang berbiaya f. 150 dan perkara-perkara yang berbiaya f. 60, menurut hukum adat Simalungun serta perkara-perkara yang berhubungan dengan pegawai-pegawai kerajaan. Dalam prakteknya, walaupun ketua persidangan dihunjuk dari seorang raja Simalungun akan tetapi tetap di bawah kendali pemerintah kolonial. Hal ini ditandai dengan ditugaskannya seorang ambtenaar mengawasi jalannya persidangan.¹¹ Namun dalam rangka memperkuat wibawa raja sebagai ketua persidangan, maka segala perkara yang diputuskan dalam kerapatan nabolon tidak dibenarkan naik banding lagi.

Strategi pemerintah kolonial Belanda selanjutnya untuk memperkokoh kedudukan raja nampak dalam hal pembebasan *kerja rodi* (kerja paksa). Raja-raja Simalungun berserta keluarga dekat, pegawai kerajaan, pegawai agama, guru sekolah, guru penolog serta para murid sekolah dibebaskan dari kewajiban itu.¹² Selain itu raja juga memperoleh *upah raja*, setiap penduduk pindah dari satu kampung ke kampung lain wajib membayar *biaya hadat pindah* sebesar f. 3 dengan perincian f.1 untuk raja, f. 0,50 untuk *gamot*¹³ kampung dan f. 1,50 untuk penghulu kampung.¹⁴



Gambar 15: Raja-raja Simalungun di Kerapatan Nabolon, 1913. Kiri ke kanan: Tn Sidamanik Tn Raiahata Damanik, Raja Panei Tn Jadiamat Purba Dasuha, Raja Tanoh Jawa Tn Jintar Sinaga Dadihoyong, Raja Raya Tn Sumayan Saragih Garingging, Pemangku Raja Siantar Tn Sawadim Damanik Bariba, Jaksa Kerapatan Manase Sitompul) (sumber: kitlv.nl)

Dengan demikian dapat dilihat bahwa upaya pemerintahan kolonial Belanda dalam memperkokoh posisi raja tradisional di Simalungun merupakan politik kebudayaan Belanda demi mempertahankan supremasi ekonomi dan politiknya di tanah Simalungun. Sekalipun raja berhak mengambil keputusan di wilayah kerajaannya akan tetapi keputusan itu senantiasa berada di bawah pengawasan dan kekuasaan pihak kolonial. Dapat dikatakan masa ini pemerintahan di Simalungun ditandai dengan semakin intensifnya kekuasaan kolonial dan pada sisi lain semakin terbatasnya kekuasaan raja-raja pribumi.¹⁵

Memang masuknya kekuasaan kolonial ke Simalungun telah membawa perubahan, misalnya mendukung tata

administrasi pemerintahan kolonial dibangun sarana-sarana penunjuang seperti kantor-kantor kerajaan dan personilnya. Sejumlah kantor yang dibangun meliputi kantor pengadilan, kantor polisi, rumah sakit, rumah sekolah, kantor urusan garam dan candu. Sejak 1917 di setiap kerajaan diangkat seorang personil yang bertugas mengepalai urusan administrasi kerajaan yang disebut *pangulu balei*.¹⁶

Sementara itu pihak kolonial Belanda juga menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut kebersihan, penertiban dalam pemeliharaan ternak, perambahan hutan, irigasi, penggajian pegawai kerajaan, penertiban harga sandang pangan dan papan. Raja-raja Simalungun secara perlahan-lahan membuka mata untuk menyesuaikan diri dengan pola kehidupan tersebut, serta hasrat untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem organisasi pemerintahan. Untuk mencapai hasrat demikian tidak boleh tidak harus didukung persyaratan-persyaratan tertentu di antaranya kemampuan membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, yang keseluruhannya itu tidak tersedia dalam lembaga pendidikan tradisional masyarakat Simalungun.¹⁷ Keadaan demikian mendorong kalangan raja-raja mulai mengejar dan menikmati pendidikan Barat yang disediakan zending, maupun kolonial nantinya.

Pada sisi lain dengan masuknya penetrasi kolonial tersebut, bagi kehidupan rakyat semakin terperosok kepada jaring politik kebudayaan kolonial. Kolonial menanamkan sikap kepada rakyat untuk patuh dan mengabdikan kepada raja dan punggawanya sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah.¹⁸ Perlawanan rakyat terhadap raja-raja Simalungun hampir tidak pernah muncul sepanjang

periode kolonial, meskipun rakyat tidak puas dengan kondisi demikian, namun sifat masyarakat agraris yang melekat dan keterikatannya terhadap adat tradisinya yang kuat membuat mereka enggan melakukan protes apalagi sampai melawan rajanya¹⁹. Perbedaan sosial antara golongan bangsawan dengan rakyat semakin menunjukkan rasa superioritasnya.²⁰ Perhatian mereka lebih banyak ditujukan kepada tugas-tugas kerajaan yang berorientasi kepentingan ekonomi dan politik kolonial, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah kebangsaan Indonesia. Masalah-masalah sosial politik yang berkenaan sebagai akibat dari kolonialisme Belanda tidak dapat mengalihkan perhatian masyarakat Simalungun ke arah situasi Indonesia.

B. Perkebunan

Daerah Simalungun yang merupakan bagian dari kawasan Sumatera Timur turut menjadi sasaran perluasan areal perkebunan asing yang dimulai sejak sekitar tahun 1865²¹. Daerah Simalungun Bawah yang meliputi Kerajaan Siantar, Tanah Jawa dan Panei merupakan daerah subur dan cocok untuk perkebunan. Sementara daerah Simalungun Atas, iklimnya kurang cocok bagi perkebunan sehingga tanaman yang dikembangkan di daerah ini adalah sayur-sayuran seperti kentang, dan kol.²² Tahun 1928 pemerintah kolonial mengangkat seorang asisten konsultan pertanian di daerah ini bernama Abdul Rifai.²

Sejak adanya *Korte Verklaring*, telah merintis jalan bagi perluasan perkebunan asing ke tanah-tanah pegunungan Simalungun. Antara tahun 1910-1920, modal Jerman dan Inggris telah mengembangkan *onderneming-onderneming*

teh di sekitar Pematangsiantar. Kepentingan-kepentingan Inggris diwakili oleh *Rubber Plantation Investmen Trust*, telah berhasil memperoleh konsesi yang luas dari Kerajaan Siantar dan Tanah Jawa. Langkah ini diikuti oleh pengusaha perkebunan Belanda *Handels Vereeniging Amsterdam (HVA)* untuk memulai pengembangan perkebunan teh sesudah tahun 1918.²⁴

Bagi raja-raja Simalungun pembukaan perkebunan itu telah mendatangkan keuntungan yang luar biasa dari pihak pengusaha perkebunan meskipun tidak sehebat penghasilan sultan-sultan Melayu di daerah Deli dan Serdang. Raja Siantar Tuan Sawadim Damanik dan Raja Tanah Jawa Tuan Sangmajadi Sinaga adalah raja terkaya di antara raja-raja Simalungun tahun 1938. Kedua raja ini memperoleh gaji sebesar f. 6.720 setahun, uang jalan f. 1800 setahun ditambah lagi penghasilan upeti dari rakyatnya.²⁵



Gambar 16: Pabrik Teh di Nagahuta Simalungun, 1930
(Sumber: kitlv.nl)

Pada sisi lain penduduk Simalungun sebagai kawula kerajaan tidak dapat menikmati keuntungan terhadap perkebunan ini, malahan mereka diberatkan kewajiban pajak. Adanya tanah yang dikonsesikan oleh raja untuk perkebunan membuat rakyat setempat kehilangan tanah dan mata pencahariannya. Untuk menutupi kekecewaan penduduk, pihak perkebunan menawarkan tanah pengganti di sekitar pinggiran perkebunan untuk ditanami dengan tanaman jenis pangan seperti padi, jagung, ubi dan lain-lain. Tawaran demikian kurang mendapat tanggapan dari penduduk Simalungun, mereka khawatir bila pada satu saat akan dipekerjakan sebagai buruh perkebunan. Pekerjaan sebagai buruh perkebunan dianggap sebagai pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan. Masyarakat Simalungun lebih menyukai bekerja sebagai petani di ladangnya, sebab dirasa lebih ringan dan bebas. Penduduk Simalungun juga harus memikul beban *saro* berupa wajib kerja tradisional mengerjakan tanah dan ladang sang raja atau pekerjaan lain yang diperintangkannya selama sepuluh hari per tahun. Selain itu ada pula kerja rodi, yaitu berupa wajib kerja untuk gubernemen dalam pembukaan jalan.²⁶ Pihak keluarga raja hal demikian dibebaskan. Pihak penduduk Simalungun yang tidak berkenaan, hanya sedikit keberanian untuk melawan, sebab mereka tidak mendapat dukungan dari pemimpinnya. Hanya perlawanan Tuan Rimbang Sinaga dari Dolog Panribuan (Tanoh Jawa) tahun 1891/1892 yang mencoba mengadakan perlawanan dengan menghimpun rakyat Simalungun menentang penguasa perkebunan yang dianggap tidak adil dan menguasai tanah mereka. Perlawanan diwujudkan dalam bentuk pembakaran gudang-

gudang kebun, merusak tanaman perkebunan, yang akhirnya dapat diamankan pemerintah kolonial dengan menurunkan aparat kepolisian²⁷. Seiring dengan semakin meluasnya pembukaan perkebunan-perkebunan di daerah Simalungun, membawa masalah baru yaitu sulitnya tenaga kerja kasar dalam merintis hutan-hutan belantara untuk dijadikan perkebunan. Orang Simalungun kurang tertarik sebagai tenaga kerja demikian bagi kolonial, sebab mereka mempunyai ladang yang luas, di samping jumlahnya juga sedikit. Untuk mengatasi ini pihak perkebunan mendatangkan tenaga kerja dari luar Simalungun, yaitu dari Jawa, Cina, Keling, Batak Toba. Kelompok suku bangsa pendatang ini seperti orang Jawa, Cina, Keling membentuk komunitas masing-masing dalam areal perkebunan. Hal ini dapat dimengerti karena kedatangan mereka ini memang atas kontrak pihak perkebunan²⁸, sementara migran Batak Toba hidup dan bekerja di luar areal perkebunan, yaitu membuka perswahan. Pertambahan tenaga kerja demikian membawa konsekwensi semakin bertambahnya penduduk yang bermigrasi ke daerah ini. Migran Batak Toba, merupakan pendatang yang menyolok dalam jumlah dan mereka ini adalah orang-orang Batak Kristen sebagai hasil konversi massal akibat perjumpaanya dengan para zendeling yang sudah bekerja di daerah Tapanuli sejak tahun 1861.

C. Mengalirnya Pendatang

Pada awal abad ke-20 masyarakat Simalungun mulai berhadapan dengan pendatang baru yaitu pendatang atau migran Eropa, Cina, Keling, Jawa, Batak Toba, Mandailing dan lain-lain. Orang Eropa, Cina, Keling dan Jawa hidup

membentuk komunitas masing-masing di areal perkebunan, sementara migran Toba hidup membentuk komunitasnya di luar areal perkebunan, namun masih berada di sekitarnya sehingga berkomunikasi langsung dengan penduduk dan raja-raja Simalungun. Migran Toba dikenal mempunyai keterampilan dalam bidang usaha sistem pertanian sawah²⁹.

Sistem pertanian sawah merupakan keterampilan yang telah dimiliki migran Batak Toba, sementara orang Simalungun kurang trampil dengan pola itu, dan lebih dominan dengan sistem perladangan. Untuk memperoleh hasil panen padi maksimal tidak akan terpenuhi jika hanya mengandalkan sistem perladangan,³⁰ sehingga kolonial mendorong perluasan pembukaan sawah-sawah baru, ini memberi daya tarik migran Batak Toba masuk ke daerah Simalungun Bawah dan meninggalkan daerah kelahiran serta tanah pertaniannya yang bergunung-gunung dan semakin sempit akibat pertumbuhan penduduknya yang meningkat. Kolonial Belanda di samping memberikan tanah secukupnya, juga memberi jaminan keselamatan mereka.³¹ Migran Batak Toba membentuk pemukiman di lembah-lembah sungai dan di sepanjang jalan raya dari Tapanuli-Pematangsiantar, di mana sistem irigasi dapat dibangun secara luas.³²

Sebagian besar migran Batak Toba berasal dari pantai Selatan Danau Toba dekat Balige sekarang, dan lembah Silindung, tempat kota Tarutung sekarang berada. Kebanyakan di antara mereka beragama Kristen karena para *zendeling* RMG dari Jerman telah bekerja di Tapanuli sejak tahun 1861 dan sangat berhasil di daerah Toba Silindung.³³ Para *zendeling* menggalakkan migrasi ke Sumatera Timur

dengan harapan agar para migran tersebut membantu orang-orang di daerah itu beralih ke agama Kristen.³⁴

Gelombang pendatang Batak Toba Kristen dari Tapanuli Utara ke daerah Simalungun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari daya tarik yang dibuat oleh pihak kolonial Belanda yang khawatir akan kekurangan pangan. Pemerintah kolonial menyodorkan beberapa jabatan kepala bagi yang berhasil membawa beberapa keluarga pindah ke daerah Simalungun.³⁵ Jabatan kepala tersebut diatur sedemikian rupa dalam beberapa tingkatan berdasarkan banyaknya keluarga yang mereka berhasil membawa 5 kepala keluarga (untuk selanjutnya disebut KK), pangulu dengan membawa 7 KK, dan raja ihutan dengan membawa 50 KK.³⁶ Pemerintah kolonial berharap bahwa jabatan-jabatan ini akan menarik perhatian sebagian migran Batak Toba, terutama orang-orang yang tidak mendapat jabatan atau gagal dalam pemilihan kepala di kampung masing-masing. Sejalan dengan hasrat yang begitu besar untuk meraih jabatan kepala, beberapa orang mulai melakukan pendekatan di kampung masing-masing dan membawa mereka jika sudah ada yang bersedia pindah.³⁷

Sejak pembukaan irigasi hasil produksi pertanian mengalami kenaikan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Bagi orang Batak Toba yang bermigrasi, di daerah baru itu, mereka selalu mendirikan gereja bersama, di samping membawa adat istiadatnya. Di kawasan Siantar, misalnya sekolah zending darurat yang dibangun tahun 1907, maka pada tahun 1910 telah diperbaiki dan atapnya, diganti menjadi seng. Rumah

penduduk semakin lebih baik, bangunan gereja diperbesar dan diperbaiki menjadi beratap seng, lantai dan dinding terbuat dari papan.³⁸ Melihat perkembangan ini maka penduduk sekitarnya terutama di daerah yang belum mempunyai gereja, datang dan ingin menjadi anggota jemaat gereja Siantar. Menurut laporan Tideman³⁹, jumlah migran Batak Toba yang masuk ke daerah ini adalah seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Migran Batak Toba di Simalungun

Tahun	Jumlah Migran
1913	6.500 jiwa
1915	8.500 jiwa
1917	11. 250 jiwa
1919	12. 840 jiwa
1920	20. 460 jiwa
1930	30. 433 jiwa
1935	41.000 jiwa
1942	50.000 jiwa

Pertambahan jumlah pendatang Batak Toba ke Simalungun pada akhirnya membuat pemerintah kolonial kewalahan, apalagi jika dikaitkan dengan status mereka. Pun raja-raja Simalungun berkeberatan dengan status istimewa mereka di Simalungun. Akibatnya pada tahun 1921 pemerintah kolonial menghapuskan jabatan-jabatan *kapala rodi* dan *pangulu*⁴² untuk kaum migran Batak Toba ini. Sejak tahun 1926 muncul percekocan antara petani-petani Batak Toba dengan raja-raja Simalungun karena pembebanan pajak irigasi yang cukup tinggi, yang sebelumnya tidak dikenal di Tapanuli. Hal ini sesuai dengan tuntutan raja-raja

Simalungun agar kaum pendatang tunduk dan memenuhi kewajiban kepada raja, karena mereka adalah rakyat dari raja tersebut. Di lain pihak, petani-petani Batak Toba tidak menerima sepenuhnya hal tersebut karena mereka merasa keberatan di bawah perintah raja-raja Simalungun yang masih beragama suku dan Islam serta merasa lebih cerdas dari raja-raja itu.⁴³ perbedaan pandangan, demikian menyebabkan timbulnya bibit konflik yang berkepanjangan. Raja-raja Simalungun menganggap hal tersebut sebagai tidak menghormatinya dan bahkan dianggap menentang mereka.

Masalah pembebasan pajak irigasi yang tinggi terus berlanjut bahkan diikuti pula dengan pemecatan beberapa orang Batak Toba pegawai pemerintah. Pemecatan ini diprakarsai oleh kontrolir J. C. C. Ter Haar dari Pematangsiantar atas permohonan raja-raja Simalungun tanpa mendapat teguran dari pihak atasan. Hal ini telah dipandang oleh orang Batak Toba sebagai persekongkolan antara raja-raja Simalungun dengan pemerintah kolonial. Mereka protes dan sebagai puncaknya pada tahun 1933 ditandai dengan pindahnya 400 KK atau lebih kurang 2.000 orang Batak Toba dari daerah Panei ke Padang Bedagai, daerah Deli Serdang.⁴⁴

Imigran Batak Toba di Simalungun Bawah pada masa kolonial bukanlah semuanya berusaha dalam persawahan padi⁴⁵, sebagian di antara mereka bekerja sebagai tenaga administrasi di perkebunan, rumah sakit, guru, maupun di kantor-kantor pemerintah kolonial. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengecap pendidikan Barat hasil pekerjaan para zending yang sangat giat dalam mendirikan sekolah-

sekolah desa. Perkembangan jumlah tenaga kerja terdidik hasil sekolah-sekolah zending yang sangat giat dalam mendirikan sekolah-sekolah desa. Perkembangan jumlah tenaga kerja terdidik hasil sekolah-sekolah yang dibuka zending sangat terasa bagi pemerintah kolonial Belanda dan para pengusaha perkebunan yang memerlukan tenaga untuk mengisi bermacam-macam pekerjaan administrasi. Lowongan kerja yang terbatas untuk kedudukan yang memerlukan pendidikan yang tersedia di Tapanuli, membuat kebanyakan orang Batak Toba cenderung pergi ke Simalungun Bawah.⁴⁶



Gambar 17 : Patung Badan Raja Ihutan (Hoofd der Tobanezen) di Simalungun
Guru Andreas Simangunsong (1874-1921) di makamnya di Kampung Kristen
Pematangsiantar. (Koleksi Pribadi)

Penduduk Tapanuli Selatan terutama yang berasal dari daerah yang sangat banyak penduduk Islam-nya, seperti Angkola, Mandailing dan Sipirok di sepanjang pantai Barat Sumatera, juga banyak yang bermigrasi ke Simalungun Bawah. Pola migrasi orang Batak dari Tapanuli Selatan berbeda dengan pola migrasi tetanggannya Batak Toba yang mendiami Tapanuli Utara. Orang Batak Toba terutama adalah para petani yang mencari tanah yang dapat dijadikan sawah, sedangkan mereka yang dari Selatan sangat tertarik bagi prospek perdagangan dan sebagian besar menetap di kota pasar dan kota administratif. Hanya sejumlah kecil petani dari Tapanuli Selatan, dan tidak kesulitan memperoleh tanah seperti halnya dengan Batak Toba yang ikut bermigrasi.⁴⁷

Di samping unsur pedagang, ada juga kelompok orang Batak Muslim yang menjadi pegawai administratif pemerintah, perkebunan, dan kerajaan tradisional Simalungun. Pada paroh terakhir abad ke-19, orang-orang Tapanuli Selatan yang pergi naik haji sangat terpengaruh oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah, yang menekankan pendidikan modern. Lagi pula zending RMG dari Jerman, yang lebih dahulu bekerja di Tapanuli Selatan sebelum masuk ke Tapanuli Utara, juga sudah mendirikan sekolah, dan sebagian muridnya beragama Islam. Dengan demikian, banyak migran dari Tapanuli Selatan itu sekurangnya telah memperoleh unsur-unsur pendidikan yang bergaya Barat. Sebagaimana migran Batak Toba yang dominan beragama Kristen, migran Batak Tapanuli Selatan yang dominan beragama Islam juga tertarik pada kemungkinan untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera Timur. Banyak guru agama datang ke Simalungun Bawah.

Di daerah itu mereka mendirikan sekolah serta beberapa lembaga pendidikan dan sosial dengan bantuan para pedagang dan kaum muslim terpelajar lainnya. Yang paling penting, di antara organisasi-organisasi ini adalah cabang Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1927, dan Al Jamiyatul Wasliyah yang didirikan pada tahun 1930 dan sampai dewasa ini merupakan organisasi Islam terbesar di Simalungun.⁴⁹

Masyarakat Simalungun sebagai penduduk asli di daerah Simalungun Bawah, sangat dirugikan dengan pertumbuhan perkebunan-perkebunan dan dibukanya persawahan-persawahan baru. Luas lahan tanah semakin sempit, sementara pola mata pencaharian masih tetap bercocok tanam di ladang, dan karena kurang mampu berasimilasi dengan kebudayaan kelompok pendatang, banyak di antara mereka yang kemudian pindah ke daerah-daerah dataran tinggi, yaitu daerah Simalungun Atas. Pada tahun 1930, mereka menjadi kelompok minoritas, dari 285.301 penduduk, jumlah orang Simalungun hanya 76.759 jiwa.⁵⁰ Sebagian besar tinggal di desa-desa pusat kerajaan mereka dan di sekitarnya yang semakin menyusut. Sebagian di antara mereka yang pindah itu, termasuk kaum bangsawan tradisional memeluk Islam melalui guru-guru agama dan para pedagang orang Batak Tapanuli Selatan dan orang Melayu yang datang dari pesisir Sumatera Timur.⁵¹

Sepanjang data yang diperoleh pada masa prakolonial tidak ditemukan kerusuhan yang berlatar belakang kesukuan (etnis) di Sumatera Timur. Pada waktu itu penduduk masih jarang dan komunikasi masih terbatas, loyalitas hanya terutama berpusat pada satuan huta (desa),

kelompok kekerabatan setempat, atau kerajaan-kerajaan tradisional. Namun, sejak abad ke-20 ketika orang-orang dari berbagai latar belakang mengadakan kontak langsung, maka mulai muncul persaingan terutama di kota-kota, perasaan kesukuan yang eksklusif yaitu pembentukan struktur hubungan sosial dalam arti *halak hita* (kita) dan bukan kita pun mulai tumbuh.

Kelompok-kelompok pendatang ini masing-masing mempunyai tradisi budaya, bentuk-bentuk organisasi sosial, dan bahasa mereka sendiri-sendiri sebagai dasar perbedaan suku. Migran Jawa, berkat bahasanya, sistem kekerabatan bilateralnya dan kebudayaan Hindu-Buddhanya, tentu saja, lebih menonjol. Sementara orang Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal dan aneka tradisi serta kebiasaan (adat) yang hampir serupa. Kontak yang sangat jarang terjadi selama beratus-ratus tahun telah menghasilkan dialek, adat, dan perbedaan-perbedaan lain, yang dalam kondisi daerah Simalungun Bawah awal abad ke-20, memungkinkan masing-masing kelompok mengembangkan ciri khasnya sendiri yang saling berbeda.

Secara umum agama memperbesar keekklusifan suku. Migran Batak Toba terpisah dari kelompok-kelompok lain karena beragama Kristen. Sementara itu migran Batak Tapanuli Selatan dominan beragama Islam,⁵² namun tidak ditemukan perpecahan antara keduanya. Meskipun migran Batak Tapanuli Selatan dan migran Jawa sama-sama beragama Islam, di antara mereka ada perbedaan besar dalam ketaatan dan amalan. Sebagian besar migran Jawa di daerah Simalungun Bawah berkepercayaan Abangan, yakni varian Islam yang lebih sinkretis, animistis dan terpengaruh

agama Hindu. Migran Tapanuli Selatan tergolong santri yang taat Islam di Indonesia.⁵³ Pada umumnya kelompok yang terakhir inilah yang ikut aktif dalam kegiatan keagamaan, sistem pendidikan Islam, dan organisasi sosial muslim.

Perbedaan tempat tinggal, sebagai akibat dari perbedaan pekerjaan dan agama, juga mendorong perkembangan identitas suku yang berbeda. Kuli kontrak Jawa ditempatkan di perkebunan-perkebunan, migran Batak Tapanuli Selatan yang dominan pedagang tinggal di kota, dan masyarakat Simalungun yang dominan petani cenderung tetap tinggal di desa-desa pra kolonial mereka. Dalam daerah perkampungan migran Batak Toba, terdapat banyak sekali babi,⁵⁴ dan karena itu perkampungan tersebut dihindari oleh kelompok muslim.⁵⁵

Di daerah Simalungun Bawah yang demikian, tidak ditemukan adanya elite sosial penghubung yang mampu dan diterima oleh semua suku di kawasan ini. Setiap kelompok etnis migran tersebut masing-masing mengembangkan elitnya sendiri-sendiri.

Daerah Simalungun Atas adalah daerah yang terisolasi dan kurang mendapat pengaruh dari luar. Di kawasan ini tidak ditemukan perkebunan besar, sehingga tanah pertanian lebih luas tersedia bagi penduduk dibanding dengan daerah Simalungun Bawah. Penghuni daerah ini sebagian besar adalah etnis Simalungun, yang sampai pada awal abad ke-20 masih memeluk agama suku dan belum mendapat pengaruh agama Islam. Kondisi demikian merupakan dasar pertimbangan para *zendeling* RMG untuk memilih daerah ini sebagai basis untuk menyebarkan agama Kristen di kalangan masyarakat Simalungun. Sebelum

masuk ke daerah ini, *zending* telah sukses di Tapanuli Utara, ditandai dengan adanya konversi massal di kalangan orang Batak Toba.⁵⁶

Catatan

¹Bangsa Barat yang pertama kali memasuki daerah pedalaman Sumatera Timur meliputi daerah Asahan, Batubara yang pada masa itu dihuni orang Simalungun adalah John Anderson (Inggris) tahun 1823 untuk mengamati kemungkinan potensi daerah ini bagi pembukaan perkebunan. Dari catatan perjalanan inilah diperoleh informasi awal tentang daerah dan penduduk di kawasan ini. Lihat John Anderson, *Mission to The East Coast of Sumatra in 1823* (London New York, Oxford University Press, 1971), hlm. 119-152.

²Orang Belanda pertama yang mengunjungi daerah Simalungun tahun 1865 adalah Controleur A. C. Van de Boer yang mengunjungi daerah Asahan, Batubara dan Tanah Jawa, kemudian L. de Scheemaker mengunjungi daerah hulu Batubara. Lihat J. Tideman, *Simeloengoen: Het Land Der Timoer-Bataks In Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling Tot Een Deel van Het Cultuurgebied van De Oostkust van Sumatra* (Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Becherer, 1922), hlm. 40.

³Ibid.

⁴Mengenai waktu dan tempat penandatanganan pernyataan ini ditentukan pemerintah kolonial dan biasanya dilakukan di pusat kerajaan. Misalnya untuk Raya dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1902 bertempat di Pematang Raya. Untuk Panei dilaksanakan pada tanggal 24 September 1903 bertempat di Pematang Panei. Untuk Dolog Silou dilaksanakan tanggal 27 April 1904 bertempat di Pematang Dolog. Untuk daerah Purba dilaksanakan 4 Mei 1904 di Pematang Purba, ANRI, SoK Besluit no. 34, 7 September 1904, bijlagen 10.

⁵ANRI, SoK Bisluit No. 24, 6 Januari 1904, Bijlagen 1.

⁶Pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terhadap Verklaring kerajaan-kerajaan di Simalungun adalah: tanggal 4 September 1907 untuk Panei, Raya dan Silimakuta, 5 September 1907 untuk Purba, 6 September 1907 untuk Tanoh Jawa, 10 September 1907 untuk Dolog Silou dan 16 Oktober 1907 untuk Siantar. Lihat, J. Tideman, op.cit., hlm. 48-49.

⁷Sebelum 1906 daerah Simalungun (Tanoh Jawa dan Siantar) berada di bawah pengawasan Onderafdeeling Batu Bara, dan sejak 12 Desember 1906 dibentuk Afdeeling baru meliputi Simalungun dan Tanah Karo sebagai daerah-daerah B atak yang baru ditaklukkan. Lihat ANRI, SoK Besluit No. 22, 12 Desember 1906. Juga dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1906, No. 531.

⁸ANRI, SoK Besluit 15 Nopember 1912 No 4, Bijlagen 2 No. 5104/4, hlm. 14-15 dalam lihat juga Radjamin Poerba, Pembangunan dan Perobahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun (Pematangsiantar: Pemda Simalungun, 1972), hlm. 12.

⁹R. William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study* (New Haven London, Yale University Press, 1970), hlm. 22-24.

¹⁰De Inlandsche Zelfbesturen in Simeloengoen, 1908-1931, hlm. 84-85.

¹¹Ibid.

¹²Ibid, hlm. 69-70.

¹³Gamot adalah pegawai pemerintah yang bertugas sebagai pembantu pemerintahan desa, lihat J. E. Saragih, *Kamus Simalungun-Indonesia* (Pematangsiantar: Kolportase GKPS, 1989), hl. 70.

¹⁴De Inlandsche Zelfbesturen in Simeloengoen 1932, hlm. 50.

¹⁵R. William Liddle, op. cit., hlm 25-26.

¹⁶De Inlandsche Zelfbesturen in Simeloengoen 1932, hlm. 85.

¹⁷Simalungun pra zending telah mengenal pendidikan non formal yaitu model pendidikan yang diajarkan oleh Datu atau Guru Bolon sebagai guru, dengan materi pelajaran meliputi pengetahuan praktis seperti mandihar (bela diri silat), menulis di atas potongan bambu atau kulit kayu (laklak), pengetahuan kesehatan, ilmu-ilmu kebatinan, dan lain-lain. Pendidikan ini menekankan nilai-nilai religius, moral, budaya maupun politik dan ekonomi. Lihat Djahutar Damanik, *Hukum Adat Simalungun* (Pematangsiantar: PD Aslan, 1974), hlm. 25. Juga Jan

S Aritonang, Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 41.

¹⁸ANRI

¹⁹Anthony Reid, *The Blood of the Peolpe, Revolution and The End of Tradisional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University, 1979), hlm. 54.

²⁰ANRI, MvO F. J. Neiboer, op. cit., hlm. 25.

²¹Pembukaan perkebunan di daerah Sumatera Timur dimulai sejak tahun 1863 oleh Jacob Nienhuys. Lihat Jan Breman, *Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20* (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 16.

²²ANRI SoK Serie Ie No. Reel film 21, MvO H. E. K. Ezerman, 1926, hlm. 27.

²³Asisten konsultan pertanian ini berkedudukan di Saribudolok. ANRI SoK Serie Ie No. Reel film 21, MvO H. Beeuwkes, 1929, hlm. 29.

²⁴Lihat Karl J. Pelzer, *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 77.

²⁵ANRI, SoK Serie Ie No reel film 21 *Memorie van Overgave van de Aftredenden Asistant Resident van Simeloengoen en Karolanden Sumatra's Oostkust*, G. W. Meindersma, 1938, hlm. 24/ Lihat juga Anthony Reid, loc. cit.

²⁶Menurut laporan C. J. Westenberg pembukaan jalan raya untuk menghubungkan daerah-daerah Simalungun dengan Sumatera Timur, seperti jalan raya Kabanjahe-Saribudolok-Pamatang Purba telah dimulai tahun 1907, dengan menggunakan tenaga penduduk setempat (rodi) yang dikordinir oleh raja-raja setempat. Aturannya baha setiap desa yang dilalui jalan desa itu harus menyediakan 40 tenaga kerja selama 10 hari dalam satu bulan. Lihat ANRI, SoK Serie IIIe No. Reel Film 2 *Memorie van Overgave van de Aftredenden Resident van Simeloengoen en Karolanden, Sumatra's Oostkust* C. J. Westenberg, 1908, hlm. 34.

²⁷Tengku Luckman Sinar, "Sang Nawaluh, Raja Siantar dalam Arsip Kolonial Belanda", makalah pada Seminar Hari Jadi Kota Pematangsiantar 1 Nopember 1988, hlm. 3.

²⁸W. B. Sidjabat, *Ahu Sisingamangaraja* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 130-132.

²⁹Seluk beluk persawahan (wet-rice culture) cukup dikuasai orang Batak Toba. Keterampilan untuk mencetak sawah di pebukitan, pembuatan tali air dengan sistem yang memanfaatkan tenaga arus air (gravity feed system) semuanya di bawah kordinasi seorang Raja Bondar yang merupakan arsitek, manager dan pemrakarsa pembuatan sistem pengairan itu. Modal ketrampilan inilah yang mereka terapkan di daerah Simalungun Bawah. Lihat Jan S. Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 64-65.

³⁰Terlalu sedikit orang Simalungun untuk menghasilkan padi bagi kebutuhan pangan penduduk Simalungun Bawah yang semakin padat berkenaan dengan pendatang-pendatang baru buruh perkebunan. Usaha yang mula-mula dilakukan kolonial adalah mengalihkan pola pertanian orang Simalungun dari sistem perladangan ke sistem persawahan, namun tidak berhasil. Usaha berikutnya dengan membuka jalan raya menghubungkan daerah Simalungun ke Tapanuli Utara sebagai lumbung padi, namun produksi padi daerah ini juga tidak mampu ditingkatkan lagi, karena luas lahan Tapanuli sangat terbatas, sementara jumlah penduduknya cepat meningkat. Lihat R. William Liddle, *op. cit.*, hlm. 30.

³¹Kebijakan kolonial Belanda antara lain adalah dengan mengadakan perjanjian dengan raja-raja Simalungun, tahun 1908 yaitu Raja Siantar, Panei untuk memberi jaminan keamanan bagi orang Batak Toba yang membuka persawahan di wilayahnya. Lihat J. Tideman, *op. cit.*, hlm. 186-187.

³²Pihak kolonial Belanda telah berhasil membangun jalan raya yang menghubungkan daerah Balige-Porsea-Parapat-Pematangsiantar tahun 1915, sehingga mempercepat mobilisasi penduduk daerah ini. Lihat Clark Cunningham, *The Postwar Migration of The Toba-Bataks to East Sumatra* (New Haven London: Yale University, 1958), hlm. 85.

³³Lothar Schreiner, "The Church in Northern Sumatra: A Look at Its Past and Future" dalam William L Danker & Wi Jo Kang, *The Future of The Christian World Mission* (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1971), hlm. 57.

³⁴G. K. Simon seorang zendeling RMG pada tahun 1904 mencoba membuka persawahan di daerah Pematang Bandar (Simalungun Bawah), namun proyek ini hanya berjalan beberapa lama, karena hasilnya sangat sedikit dan

akhirnya ditutup. Lihat M. Joustra, van Medan naar Padang en Terug (Leiden: S. C. Van Doesburgh, 1915), hlm. 15.

³⁵R. William Liddle, op. cit., hlm. 30-31.

³⁶J. Tideman, op. cit., hlm. 188.

³⁷Pada tahun 1914 Andreas Simangunsong seorang guru zending yang berasal dari Sigumpar pernah bertugas sebagai pegawai raja Purba, atas saran zendeling Nommensen diangkat pemerintah kolonial menjadi Hoofd der Tobanezen (Raja Ihutan) dan bersama dengan itu dibukalah Immigratie Bureau Tobanezeen (Biro Urusan Migrasi Toba) untuk mengatur proses perpindahan orang-orang Batak Toba. Lihat Koloniaal Verslag 1915, hlm. 95. Juga O. H. S. Purba dan Elvis F. Purba, op. cit., hlm. 1. Juga Batara Sangti, op. cit, hlm. 184.

³⁸M. S. M. Panjaitan, Ahu do Donganmuna: Sejarah 75 Tahun HKBP Siantar Sawah (19070-1982), (Pematang Siantar: Panitia Jubileum, 1982), hlm. 21-22. Lihat juga O. H. S. Purba dan Elvis F Purba, Migran Batak Toba di luar Tapanuli Utara : Suatu Deskripsi (Medan: Monora, 1998), hlm. 10.

³⁹J. Tideman, op. cit., hlm. 187.

⁴⁰ANRI, SoK, Serie Ie, No . reel film 21 Aanvullende Memorie van Overgave van de Asistent Resident van Simeloengoen en Karolanden, Sumatra Oostkust M van Rhijn, 1936, hlm. 6.

⁴¹Anthony Reid, loc. cit.

⁴²Dada Meuraxa, Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara (Medan: Sastrawan, 1973), hlm. 633. Lihat juga Batar Sangti, Sejarah Batak (Balige: Karl Sianipar & Co, 1977), hlm. 181.

⁴³Dada Meuraxa, Ibid, hlm. 634, juga Batara Sangti, Ibid, hlm. 180.

⁴⁴Lance Castles, "The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940", Disertasi tidak dipublikasikan: Yale University, 1972, hlm. 194.

⁴⁵Pada awal abad ke-20 persoalan tenaga kerja merupakan hal yang pelik bagi usaha perkebunan di luar Jawa, sehingga imigrasi merupakan solusinya. Bambang Purwanto menyatakan bahwa kebutuhan dan kehadiran tenaga kerja asing seiring dengan munculnya kesempatan kerja akan menciptakan pola migrasi, hubungan kerja dan menciptakan masalah yang kompleks dalam hubungan antara produksi dan tenaga kerja. Lihat Bambang Purwanto, "Migrasi dan Kesempatan Kerja: Persoalan Tenaga Kerja dalam

Perkebunan Karet di Sumatra bagian Selatan pada Akhir Masa Kolonial", (Makalah pada Kongres Nasional Sejarah di Jakarta, Nopember, 1996), hlm. 12.

⁴⁶R. William Liddle, *Partisipasi Politik dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafiti, 1992), hlm. 27.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Sekolah zending pertama kali didirikan di daerah Parausorat Sipirok Tapanuli Selatan tahun 1868, di mana penduduknya mayoritas Muslim. Lihat Jan S Aritonang, *Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), hlm. 180. Lihat juga Elisa Sutan Harahap, *Perihal Bangsa Batak* (Djakarta: Dep. P.P. dan K, 1960), hlm. 68.

⁴⁹R. William Liddle, *Partisipasi.....* op. cit., hlm. 28.

⁵⁰Volkstelling 1930, Deel IV (Batavia: Departemen van Econmische Zaken Landrukkerij, 1935), hlm. 30-31:113.

⁵¹R. William Liddle, *Partisipasi.....*loc. cit.

⁵²Th. Van den End, *Ragi Carita 2, Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an-sekarang* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 173.

⁵³Mengenai adanya pembagian Santri-Abangan yang dimaksudkan di sini adalah berasal dari Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 6-7.

⁵⁴Daging babi merupakan makanan utama dalam upacara-upacara keagamaan orang Batak Toba, dan setiap ada acara adat makanan ini akan selalu ditampilkan. Paul Bodholdt Pedersen, *Batak Blood and Protestant Soul*, (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1970), hlm. 46. Lihat juga E. H. Tambunan, *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 25.

⁵⁵R. William Liddle, *Partisipasi...op. cit.*, hlm. 31.

⁵⁶H. Kraemer, "Sending Di Hindia Belanda" dalam H. Baudet dan I. J. Brugmans (ed.), *Politik Etis Dan Revolusi Kemerdekaan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1987), hlm.331.

BAB IV

AGAMA-AGAMA DI SIMALUNGUN

A. Agama Lokal Simalungun

Ditinjau dari banyaknya perbendaharaan idiom kebahasaan dan upacara ritual kepercayaan kuno orang Simalungun yang berdekatan dengan bahasa Sansekerta, seperti bisa disaksikan dari bahasa sehari-hari dan bahasa ritual di dalam pustaha dan tulisan kuno lainnya, diduga kuat bahwa dahulu di zaman kuno, orang Simalungun pernah bersentuhan dengan pengaruh Hindu India. Kebiasaan mengikatkan secarik kain putih pada upacara kematian di Simalungun pada kepala setiap laki-laki merupakan sisa kebiasaan Hindu yang sampai sekarang pun masih bisa kita saksikan pada kebiasaan serupa di masyarakat Hindu di Pulau Bali.

Kalau diperhatikan dari praktik agama suku Simalungun sebelum masuknya agama Islam dan Kristen serta sisa-sisanya yang masih dapat ditemui di pedalaman Simalungun, maka tidak salah bila dikatakan bahwa religi dan budaya suku Simalungun itu bertalian erat dan dipengaruhi oleh budaya Hindu dari India. Artinya, selalu ada kaitan antara kepercayaan asli suku Simalungun dengan adat istiadat dan budaya Simalungun yang dipengaruhi unsur Hinduisme dari India tersebut. Istilah-istilah seperti *sibiangsa*, *boraspati*, *bataraguru*, nama-nama hari dan *parhalaan* jelas sekali menunjukkan pengaruh Hindu dari India itu pernah hidup di antara leluhur orang Simalungun. Adanya pertalian antara "roh-roh" dalam upacara adat dapat menjelaskan hal ini, di mana menurut pemahaman orang Simalungun pra Kristen,



Gambar 18. Tuan Silumbak Sorbaraja Saragih dengan pakaian tradisional Guru Bolon (Pemimpin Ritual Kuno Simalungun, berpakaian polang-polang bermotif warna merah-putih-hitam yang identik dengan pengaruh Hinduisme. (Sumber: P. Voorhoeve, 1930)

masih ada koneksi di antara manusia yang masih hidup di dunia tengah (nagori tongah) dengan manusia yang sudah mati di dunia bawah (*nagori toruh*). Roh-roh jahat itu dalam keyakinan Hindu diakui adalah perwujudan dari Batara Kala yang akan dikalahkan oleh Roh Kebajikan melalui Dewa Wisnu yang menunggang burung sakti Garuda yang dalam keyakinan orang Simalungun kuno disebutkan Batara Guru dengan burung sakti Nanggordaha sang pemberi keadilan dan kebenaran yang mengalahkan kejahatan dan ketidakadilan.

Agaknya seiring dengan perjalanan waktu, konsep Hinduisme itu tidak terlalu berkembang dalam kehidupan orang Simalungun. Alih-alih berkembang, kepercayaan asli orang Simalungun rupanya mengadopsi paham Hindu itu yang makin memperkaya agama asli mereka. Jadi meskipun tidak sampai melahirkan tumbuhnya agama Hindu Simalungun seperti di Bali, inti sari agama itu seperti nyata dalam semboyan orang Simalungun *Habonaron do Bona* hidup terus dalam kehidupan sehari-hari orang Simalungun yang mengedepankan keadilan dan kebenaran (*habonaron*) dalam hidupnya sehari-hari. Sesuatu paham yang juga terdapat dalam Hinduisme dan Buddhisme dari negeri India.

Bila agama Hindu mengenal dewa Trimurti (Brahma, Wisnu dan Syiwa), orang Simalungun percaya bahwa Naibata sebagai oknum ilahi tertinggi itu bermanifestasi dalam diri tiga dewa yang menguasai tiga alam dunia (kosmos). Naibata sebagai oknum yang ilahi ini dipercayai sebagai ilah yang maha tinggi (*The High God*).¹ Eksistensi yang maha tinggi ini dalam kepercayaan suku Simalungun kuno diyakini hadir dalam setiap kehidupan manusia suku Simalungun, baik personal maupun komunal. Oknum ilahi ini diyakini menguasai seluruh kosmos baik dunia atas, kediaman para dewa (*nagori atas*), dunia tengah, kediaman manusia (*nagori tongah*) maupun dunia bawah, kediaman orang mati (*nagori toruh*). Masing-masing dunia kosmos orang Simalungun itu dipercaya dikuasai ilah semacam Trimurti itu. Nagori Tengah tempat manusia hidup dikuasai oleh dewa Tuan Tobal Dunia, Nagori Toruh tempat para jin dan orang mati dikuasai oleh Tuan Padukah ni Aji dan Nagori Atas tempat para dewata dan orang-orang baik nan suci dikuasai oleh Tuan Sahinehine. Penguasa dunia kosmos tradisional Simalungun ini

selalu dipanggil dalam rumusan mantra para datu (imam tradisional).² Ketiganya dipuja dalam ritual khusus dan di tempat khusus yang disebut *anjap-anjap*, altar tradisional Simalungun dalam rangka pemujaan kepada sang dewa yang dipercayainya di bawah bimbingan seorang *guru huta* atau *guru tahun* yang disebut juga *datu*. Ritual ini biasanya diselenggarakan oleh seisi kampung atas perintah raja atau kepala kampung di suatu daerah dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan.

Masyarakat Simalungun memahami oknum Naibata sebagai oknum yang maha adil yang memberikan keadilan kepada orang yang tertindas dan penghukuman kepada orang yang jahat, bahkan pemahaman orang Simalungun ini dinyatakan dalam bentuk *bija* (sumpah) yang disebut "*pittor bilang*" yang menyatakan bahwa keadilan Naibata akan mendatangkan akibat dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya mengapa orang Simalungun kuno lebih menyerahkan seluruh totalitasnya kepada oknum Naibata itu, yang diyakini adalah oknum yang maha adil daripada berniat membalas dengan perlakuan serupa atas perbuatan tidak adil pihak lain.

Selain Naibata yang kita sebut di atas, orang Simalungun juga percaya akan makhluk-makhluk gaib yang merupakan sembahsan satu-satu keluarga atau marga yang disebut: *sinumbah* dan *simagod*. *Sinumbah* dalam pemahaman orang Simalungun adalah roh-roh gaib yang mendiami tempat-tempat keramat yang ada kaitannya dengan sejarah leluhur suatu keluarga atau marga yang lokasinya dinamakan "*parsinumbahan*". Di daerah Bandar terkenal lokasi untuk pelaksanaan ritual tempo dulu, seperti di Dolog Sinumbah dan Bah Pamujian. Hutan keramat yang

disebut "*harangan pulouan*" atau tempat-tempat tertentu di sungai, batu atau pohon keramat dianggap tempat para roh-roh leluhur berdiam dan harus dihormati, tidak boleh sembarangan berbuat asusila atau mengucapkan kata-kata yang dianggap dapat menyebabkan kemarahan para roh leluhur (*pasul*). Ke tempat ini pemujanya yang biasanya sekelompok orang yang seketurunan atau sekampung mempersesembahkan sesajen (*manggalang*) kepada *sinumbah* tersebut. Akan tetapi, eksistensi *sinumbah* bersifat mobil (berpindah-pindah), karena ia dapat dipindahkan oleh pemujanya ke lokasi yang baru.³ Yang menarik, makam (*tanoman*) tidak diperhitungkan orang Simalungun sebagai tempat yang ideal untuk dijadikan parsinumbahan, meskipun dalam anggapan suku Simalungun kuno, kuburan identik dengan perkampungan orang-orang mati.

Selain, *sinumbah* yang identik dengan parsinumbahan, orang Simalungun percaya juga bahwa kuasa dari nenek moyang mereka bisa hadir dalam bentuk *simagod*, yang sesewaktu dapat hadir bila dipanggil melalui ritual yang disebut "*pahutahon*" atau "*pasiarhon*" dengan membunyikan seperangkat alat musik tradisional Simalungun (*gonrang* Simalungun). *Simagod* dapat dipanggil dalam ritual pengobatan tradisional dan *marsirni uhur*, *mamokkot rumah* dengan perantara seorang medium baik laki-laki maupun perempuan yang dinamakan *paniaran*. Untuk itu, diperlukan persiapan yang khusus, kebersihan batin dan tubuh, oleh karena itu sebelum upacara diadakan dahulu upacara pembersihan yang dinamakan *maranggir* (mandi dengan ramuan jeruk purut). Dari informan yang lain, ternyata *simagod* juga dapat hadir dengan spontan tanpa diadakannya upacara khusus untuk itu, apabila keturunan dari

satu-satu nenek moyangnya “terpaksa” hadir dalam kasus-kasus tertentu yang memaksa *simagod* nenek moyangnya itu harus hadir dalam rangka melindungi martabat dan keselamatan keturunannya.

Meskipun demikian, walau di samping oknum *naibata* ada sembahsan lain yang dipuja orang Simalungun pra zending (seperti *sinumbah* dan *simagod*), puncak tertinggi dari ilah orang Simalungun adalah *naibata*, dialah oknum yang esa yang menguasai baik dunia tengah, dunia bawah dan dunia atas. Kepadanyalah alamat permohonan orang Simalungun pra zending, kepadanyalah juga orang Simalungun menyerahkan nasibnya dan keadilannya. Dan karena orang Simalungun berusaha keras memenuhi tuntutan *habonaran* tersebut, maka orang Simalungun pra zending menabukan segala perbuatan yang bertentangan dengan eksistensi *naibata* sebagai *habonaran* (sembahsan yang menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk tertentu). Untuk menyatakan ketundukannya itu, maka setiap insan Simalungun diwajibkan mengerjakan perbuatan yang benar yang tergambar dalam filosofisnya orang Simalungun: *Habonaron do Bona* (kebenaran dan keadilan adalah pangkal dari segala sesuatu). Peningkaran terhadapnya akan berdampak buruk kepada sipemujanya, sebagaimana jelas dinyatakan dalam ungkapan: “*habonaron do bona, hajungkaton do sapata*” (kebenaran adalah pangkal segala sesuatu, kejahatan berbuah sumpah serapah).

Seiring dengan peralihan orang Simalungun ke agama Kristen dan Islam, jumlah penganut agama suku Simalungun ini merosot terus. Saat ini di Simalungun hampir tidak ada ditemukan lagi yang mengaku penganut agama

suku ini. Dengan pengecualian di daerah sekitar Delitua Deli Serdang masih terdapat sejumlah kecil penganut agama suku Simalungun yang dominan dari klan Girsang. Penganut agama suku ini menyebut nama agamanya dengan sebutan Agama Habonaron Do Bona yang tercatat sebagai aliran kepercayaan.

B. Agama Islam



Gambar 19: Pendakwah Islam dan bangsawan Simalungun di Bandar, 1905
(Sumber: RMG, 1905)

Belum ada penelitian yang pernah dilakukan mengenai masuknya agama Islam ke Simalungun. Catatan zending menyebut sebelum tahun 1850 sudah ada yang memeluk agama Islam di antara bangsawan Simalungun di Bandar yang berdekatan dengan daerah orang Melayu. Islam itu awalnya dari Batu Bara di sebelah Timur ke pedalaman Simalungun dan makin meluas di daerah Kerajaan Siantar

dan Tanah Jawa. Tichelman seorang pejabat Belanda di Simalungun melaporkan bahwa di Raya pada tahun 1933 di antara 15,000 jiwa penduduknya hanya 300 orang penduduk asli yang beragama Islam dan 413 buruh/kuli kontrak dari pulau Jawa, tetapi data ini sendiri menurut dia masih diragukan. Pertumbuhan agama Islam di daerah Raya tidak sepesat pertumbuhan agama Kristen, meskipun demikian pertumbuhan agama Islam semakin pesat seiring dengan masuknya kuli kontrak Jawa dan pendatang orang Mandailing serta Melayu yang masuk ke Simalungun sesudah tahun 1907. Di Raya melalui kehadiran kerabat raja Raya dari Padang Tebingtinggi bernama Orangkaja Alinaviah pada tahun 1937 yang diberi izin raja Raya membuka sebidang tanah untuk perkebunan dan masjid kecil untuk beribadah selama dia berada di ibu negeri kerajaan itu.

Berbeda situasinya dengan Simalungun Atas yang dominan penduduknya beragama Kristen, di Simalungun Bawah agama Islam menjadi agama dominan dianut penduduk. Tichelman sesuai informasi yang dia peroleh dari Tuan Sawadim Damanik yang beragama Islam menyatakan bahwa sesuai dengan keterangan daripada wakil raja Siantar (*wd. Zelfbestuurder van Siantar*), Toean (Radja) van Bandar, Toean Siattar, Toean Sawadim Damanik, bahwa pada 37 tahun lalu atau kira-kira tahun 1850 mulailah islamisasi di Simalungun di distrik Bandaryang berdekatan dengan daerah Melayu dan setelah satu tahun kemudian, barulah Islam mulai masuk ke pedalaman Siantar. Orang Simalungun pertama, yang memeluk agama Islam sejauh diketahui sesuai laporan Tichelman adalah Parbapaan Bandar Tongah bernama Tuan Sariani Damanik, dan sesudah dia masuk menjadi Islam,

diiikuti rakyatnya. Raja Siantar Tuan Sangnawaluh Damanik, yang dibuang ke Bengkalis menyusul masuk Islam antara tahun 1901 atau awal 1902 dan giat menjalankan syiar Islam kepada rakyatnya yang masih beragama suku. Mengikuti jejak Sangnawaluh ada beberapa kepala-kepala adat (*adathoofden*) Siantar masuk Islam. Tuan Bandar Sawadim Damanik rupanya sudah sejak lahir beragama Islam sebab ayahnya Toean Olorani Damanik sudah lebih dulu Muslim. Jabatan Tuan Bandar dipangku sementara oleh Tuan Adjib Damanik yang sejak kecil sudah Muslim. Tuan Adjib adalah bapa anggi dari Tuan Sawadim Damanik yang memangku Raja Bandar sesudah ayah Sawadim mangkat.

Biasanya seorang kepala adat yang masuk Islam langkahnya akan diikuti oleh kepala-kepala di bawahnya atau rakyatnya. Dengan cara ini agama Islam makin meluas di Simalungun Bawah. Menurut Tichelman, ketertarikan seorang bawahan kepada Islam karena dianggap dapat memberikan keuntungan atau hak-hak khusus walau ini bertentangan dengan aturan adat. Kepala-kepala yang lain dengan sendirinya mengikuti pimpinannya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan supaya mereka tetap berada di posnya masing-masing. Kondisi demikian seiring dengan pendapat umum pada masa itu, karena struktur pemerintahan yang feodal di daerah Batak Timur. "*Hoedja oeloe, hoedjin ma mangihoet ihoerni*", demikian pameo umum ketika itu. Di Bandar guru dakwah Islam bernama Toean Sjech Machmoed, berasal dari Batubara tetapi dia selama ini mendapat hambatan juga menjalankan dakwahnya. Oleh karena itu dia diusir dan meninggal di Tandjong Balei.

Dari Bandar Islam memasuki ke bagian barat dan timur, di daerah Dolog Batu Nanggar dan Bosar Maligas, di daerah mana agama Islam disiarkan oleh pedagang-pedagang dari Batubara.

Propaganda Islam di Siantar Toean Goeroe Joesoef, berasal dari Siak Seri Idrapoera. Penyebar-penyebar agama Islam adalah melalui Batubara ke Simalungun, yang secara administratif Simalungun ini dahulu masih di bawah Batubara yang merupakan resort (daerah) di bawah Kontroleur Batu Bahra di Laboehan Roekoe.

Seorang Simalungun (*een Simaloengoener*), Toean Nabolon Damanik dari Pematang Siantar, berangkat pada masa kecilnya ke Tebing Tinggi, di mana dia mendapat pendidikan Islam dan menjadi Islam. Dia menjalankan hajinya ke Mekah dan kembali ke Siantar menjadi Hadji Moehammad Thaib Damanik dari Siantar. Dia adalah seorang pemuka orang Simalungun, seorang yang mengepalai suatu daerah (*soehi*), tetapi pada waktu dia pindah ke Tebingtinggi, dia kehilangan jabatannya (*partuanon*) dan seorang penganjur agama Islam yang rajin menyebarkan agamanya yang baru itu di lingkungannya sendiri. Dia tidak diizinkan berdiam di Simalungun, sesudah dia berangkat tanpa persetujuan, dihukum kerja paksa bekerja di pekerjaan umum. Rupanya dari pihak masyarakat Simalungun ada pengaduan. Tidak ada diterima nabi di negerinya. Dari masyarakat Islam Simalungun pun ada pengaduan masyarakat tentang dirinya.

Dari Siantar, agama Islam menyebar ke Tanah Djawa. Pemuka Simalungun di Tanah Jawa yang pertama memeluk agama Islam adalah Toean Sahma Sinaga, Toean Anggi, saudara dari Toean Tandjoeng Tongah, yang banyak

membantu memperluas agama Islam di Tanah Djawa.

Di distrik-distrik Silou Kahean dan Raya Kahean, daerah hilir (*benedengebieden*) Dolog Silou dan Raya, agama Islam masuk dari Padang dan Bedagai. Pemeluk Islam yang pertama di Raya Kahean (yang masih dikenal) pada permulaan abad ini adalah Lobei Mohammad Said, yang kemudian namanya berubah menjadi Raden Mohammad Said yang berasal dari Bengkulu. Raden Mohammad Said ini menjadi "panglima" dari raja Raya, Toean Kapoltakan Saragih dan menjadi penganjur dari agama Islam di sana. Dia kawin dengan adik Tuan Hapoltakan dari ibu yang lain, Panakboroe Inim, sebelum ia ditetapkan menjadi Pangulu Parik Lombu, diberikan tanah kepadanya seluas 210 hektar (ada di dalam peta) dan akhirnya ditetapkan dia oleh Tuan Kapoltakan yang masih beragama kafir (*heiden*) menjadi Thaib Kadli untuk Raya Kahean. Tetapi tidak ada kemajuan yang besar dalam pertumbuhan agama Islam di Raya Kahean. Sampai tahun 1930-an, kondisi orang yang beragama Islam di Raya Kahean dan Silou Kahean, masing-masing sebanyak 1385 orang dan 240 orang.

Atas usul dari wakil raja Siantar, Tuan Bandar, yaitu Tuan Sawadim Damanik, ditetapkan menjadi kepala Guru Agama Islam dari Minangkabau, Tuan Goeroe Baringin lk. 1925 ditugaskan di Raya Kahean.

Ini adalah menurut adat Batak yang lama, menurut ketentuan adat "anak boru" dan "tondong". Raya sejak 1903 menjadi "tondong" dari Bandar, dan Raya mengharapkan bantuan, yaitu mengenai urusan agama (*religieuzen*) bantuan dari "anak boru" -nya sendiri.

Wakil raja Siantar adalah satu-satunya raja yang

beragama Islam di tengah-tengah para raja Simalungun. Meski tidak segera memeluk Islam seperti rekannya raja Siantar, raja Tanah Jawa bersimpati kepada agama Islam. Meskipun raja Tanah Jawa tidak makan daging babi, tidak oleh karena agama, tetapi karena pantangan (pantangan badan). Sikap serupa dianut hampir seluruh raja-raja dan kaum bangsawan Simalungun lainnya. Sikap ini rupanya sudah menarik minat para bangsawan Simalungun belakangan kemudian untuk memantapkan langkahnya memeluk agama Islam sesudah pecah revolusi sosial tahun 1946.

Di Parapat, Sipolha, Tigaras dan Poerba Sariboe (Haranggaol) di daerah pesisir Danau Toba, di Sidamanik, Mardjanji Panei, dan Negeri Dolog di sana ada komunitas-komunitas Simalungun Muslim dan semakin memperoleh penganutnya sesudah tahun 1940-an. Salah satu penganjur Islam yang terkenal di Parapat adalah Haji Pardede yang berasal dari Tapanuli. Praktik Islam yang telah tersedia dalam ritual dan kultur masyarakat Simalungun itu, menjadi "jembatan" peralihan orang Simalungun memeluk agama Islam. Di kalangan raja-raja Simalungun yang sudah memeluk agama Islam, agama Islam dianggap sebagai senjata melawan kolonialis Belanda. Kenyataan ini diungkapkan seorang tokoh Muslim Simalungun (pendiri Pesantren Al-Kautsar di Marjandi-Simalungun), Haji Amir Purba Dasuha. Ia menjelaskan:

"... bahwa dalam pandangan masyarakat Simalungun tradisional (terutama raja-raja Simalungun) ada pandangan yang sangat positif sekali dengan agama Islam itu. Islam tidak bertentangan dengan budaya masyarakat Simalungun

tradisional, dari sejak leluhur orang Simalungun sudah bersahabat dengan makanan yang “mengharamkan” ternak babi (terutama di antara raja-raja yang berguru ilmu kebatinan), mereka sudah biasa bersunat (Simalungun: ‘marsopit’), perkawinan poligami (banyak isteri) terutama di antara raja-raja dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang tidak bertentangan dengan paham Islam”.

Persahabatan yang erat dengan raja-raja Melayu dengan raja-raja Simalungun (lewat perkawinan) dan kunjungan tali silaturahmi sesama seketurunan (raja Raya dengan raja Padang Tebingtinggi) semakin memperkuat pengaruh dan penetrasi agama Islam di antara orang Simalungun (terutama di antara kaum bangsawan). Untuk membantu raja-raja Simalungun dalam tugasnya sehari-hari, mereka banyak mengangkat orang Islam (yang seringkali adalah anggota keluarganya sendiri yang telah memeluk agama Islam) yang dengan perantaraan pegawai Muslim itu banyak di antara keluarga raja atau kawula kerajaan yang akhirnya memeluk agama Islam. Raja Raya Tuhan Kapoltakan pada 1930-an (yang setia dengan agama suku) telah mengangkat iparnya Lobei Muhammad Said (orang Bengkulen) menjadi Tuan Kadli di Raya Kahean dan memberikannya tanah seluas 210 hektar.⁴ Perasaan tidak puas dengan agamanya yang lama sering digantikan dengan beralih memeluk Islam. Peralihan agama itu semakin terbuka terutama di kalangan bangsawan Simalungun melalui perkawinan, baik dengan sesama raja Simalungun maupun dengan bangsawan Melayu. Sebagai contoh raja Panei bermarga Purba Dasuha mengambil permaisuri dari puteri raja Siantar bermarga Damanik. Raja Siantar sudah

sejak 1901 masuk Islam, tentu saja peralihan ke agama Islam menjadi lebih terbuka di Panei. Meskipun dalam praktiknya, peralihan ke agama Islam itu tidak otomatis terjadi melalui perkawinan itu. Raja Panei terakhir Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha meski mengambil permaisuri dari puteri raja Siantar yang Muslim, raja tetap bertahan dengan agamanya yang lama dan memberikan kebebasan kepada permaisuri dalam hal agama (wawancara dengan putera raja Panei T. Kamen Purba Dasuha). Dalam hal ini bangsawan Simalungun yang sudah memeluk Islam itu rajin berdakwah menarik banyak orang Simalungun beralih ke agama Islam. Pada 1901 Raja Siantar yang sudah sejak lama bersimpati kepada agama Islam dan secara resmi memeluk agama Islam dan sangat giat mengajak rakyatnya memeluk agama Islam (Tideman, 1922:44).

Di daerah Simalungun Bawah sejak 1920-an agama Islam semakin memperoleh tempat yang mantap. Masuknya para pendatang Muslim (khususnya orang Mandailing dari Tapanuli Selatan) makin meningkatkan syiar Islam di Simalungun, terlihat dari hadirnya ormas Islam seperti Muhammadiyah (1927) yang berpusat di Yogyakarta, al-Djam'iyatul Al-Washliyah (1930)⁵ () dan Persatuan Guru-guru Agama Islam (PEGGI) di Pematang Siantar (1936) (Hasanuddin, 1988:71). Meskipun beredar surat raja Siantar di Kerasaan yang melarang rakyat Kerajaan Siantar memasuki Muhammadiyah, tetapi tidak efektif, pertumbuhannya tetap berjalan dan menarik minat orang Simalungun Muslim memasuki organisasi itu.

C. Agama Kristen Protestan

Dibandingkan dengan daerah Tapanuli Utara, daerah Simalungun agak terlambat menerima kedatangan agama Kristen. Bila di Tapanuli, zending sudah bekerja sejak tahun 1861, maka perhatian RMG baru muncul sejak tahun 1903 pada saat August Theis salah seorang misionarisnya ditetapkan bertugas di Pamatang Raya. Buah pekerjaan Theis inilah kemudian yang mewujudkan dirinya dalam organisasi gerejawi bernama Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) salah satu denominasi gereja terbesar di Simalungun yang anggota-anggotanya dominan suku Simalungun.

Sebelum tibanya penganjil Jerman ke Simalungun, sudah ada kontak antara penduduk Simalungun di pesisir Danau Toba (Tigaras, Parapat/Girsang Sipanganbolon, Sipolha dan Haranggaol) dengan penganjil Batak Toba (Pardonganon Mission Batak) dari Tapanuli.⁶ Pada 1900 Samuel Panggabean dan Friederich Hutabarat sudah mendirikan pos pekabaran Injil di Tigaras.⁷ Dari Habinsaran dan Samosir (Lontung, Pollung dan Tomok), mereka tiba di Sipolha (Simalungun) pada 14 Februari 1900 dan sempat berbicara dengan Tuhan Sipolha Damanik yang menguasai daerah itu dan melarang keduanya memasuki daerahnya dan hanya mengizinkan kedua pendeta Batak itu menginap di perahunya. Mereka mengabarkan Injil kepada penjaga perahu Tuhan Sipolha dalam bahasa Batak Toba. Keesokan harinya mereka mengunjungi Siboro kampung di dekat Haranggaol (daerah kekuasaan Tuhan Purba). Mereka bertemu dengan kepala pasar (tuan tiga) di Haranggaol dan mengabarkan Injil kepada pengunjung pasar dalam bahasa Toba. Pada tanggal 16 Februari 1900 mereka mengelilingi daerah sekitar Tiga Langgiung. Reaksi

masyarakat Simalungun pada waktu itu beragam, ada yang antusias mendengar hal yang dianggap asing bahkan mustahil, karena kedua pandita Batak itu menyebut Tuhan Yesus. Padahal orang Simalungun hanya mengenal tuhan Purba yang menguasai daerah itu yang dianggap sebagai perwujudan dari *"naibata na taridah"*. Bahasa Toba yang dipakai kedua pandita Batak itu dianggap asing, karena sangat jarang orang dari Sigumpar atau Balige mengunjungi daerah itu. Kotbah mereka juga kurang dipahami penduduk setempat yang hanya mengenal bahasa Simalungun.⁸



Gambar 20. Gereja Pertama didirikan RMG di Simalungun, 1907

(Sumber: kitlv.nl)

Bukan hanya kepada rakyat kebanyakan, kedua pendeta Batak itu mengabarkan Injil. Tuhan Rahalim Purba Pakpak yang menguasai daerah itu turut mendapat kunjungan, mereka langsung menemuinya di Pamatang Purba. Dalam kunjungan itu Tuhan Purba tidak berada di tempat, setelah menunggu keesokan harinya, pada 17 Pebruari 1900 mereka bertemu dengan Tuhan Purba dan bercakap-cakap dengan Tuhan Purba. Sebelum kembali ke Sigumpar melalui Silalahi, keduanya memberikan kitab Injil Matius dan Yohanes dalam bahasa dan aksara Batak Toba kepada Tuhan Purba. Pada waktu mereka kembali ke Langgiung, mereka dikawal sepasukan bersenjata yang ditugaskan Tuhan Purba mengawasi mereka, karena di situ telah menunggu delapan orang rombongan mereka kembali ke Sigumpar.¹⁰



Gambar 21. Ephorus Gereja Batak Dr. I L. Nommensen

(Sumber: koleksi pribadi)

Dengan demikian, empat tahun sebelum RMG menetapkan zendeling Theis bertempat di Pamatang Raya Simalugun, penginjil pribumi Batak Toba sudah menginjili orang Simalungun dan H. Guillaume yang sering melintasi daerah Simalungun Atas sudah bertemu dengan penguasa setempat. Meskipun tidak diikuti dengan pembaptisan orang Simalungun, selama empat hari (14-17 Februari 1900) pekabar Injil Batakmission itu sudah bekerja di Simalungun dan merintis pekerjaan selanjutnya dalam memenangkan orang Simalungun kepada agama Kristen.¹¹ Dari perjumpaan masyarakat Simalungun dengan penginjil Batakmission dari Kongsi Batak (Pdt. Samuel Hutagalung dan Friederich Hutabarat) kita melihat bahwa masyarakat Simalungun (terutama di sekitar Haranggaol) merasa asing dengan kehadiran “orang Silindung” dan tidak memahami apa yang mereka sampaikan kepada penduduk Haranggaol. Orang Simalungun tidak peduli dengan kehadiran mereka, dalam pandangan orang Simalungun pada waktu itu, kehadiran orang dari “seberang” (Samosir) adalah sama saja dengan hadirnya beberapa orang penduduk Samosir ke Haranggaol yang hendak berdagang atau mencari pekerjaan.¹² Pemberitaan penginjil tentang adanya “tuhan” yang lain selain “Tuhan Purba” dianggap hal yang aneh. Ketaatan orang Simalungun kepada rajanya mengakibatkan hampir tidak ada minat penduduk untuk mendengar lebih lanjut khotbah para pendeta Batak itu. Bahasa Toba yang mereka pakai juga semakin menyulitkan penduduk memahaminya. Sikap Tuhan Purba yang bernada diplomatis, “Saya kurang mengerti semuanya itu; tetapi akan saya pikirkan”¹³, mengingatkan kita pada sifat orang Simalungun yang sangat berhati-hati menyikapi hal-hal yang dianggap

baru, apalagi yang berkaitan dengan hal agama. Tuhan Rahalim yang memerintah pada waktu itu kemungkinan masih mencurigai orang asing yang datang ke daerahnya, karena peperangan yang dialaminya dengan tuhan Raya (Rondahaim) pada 1882 masih membekas dalam dirinya.¹⁴ Setiap orang asing dicurigai kedatangannya. Kecurigaan itu dapat kita lihat dengan diperintahkannya para pengawalnya menyertai rombongan pendeta itu ke Langgiung di tepi Danau Toba. Apalagi jika kita mengingat bahwa pasukan pemerintah Belanda sudah datang ke daerah Simalungun Atas (Purba dan Silimakuta) pada 1883 dipimpin pejabat kolonial J. A. M. van Cats Baron de Raet dan Dr. Hagen.¹⁵ Munculnya pemberontakan daerah bawahannya menjadi sebab sikap curiga dan waspada dari penguasa Purba pada waktu itu mengantisipasi segala sesuatu yang dianggap dapat membahayakan pemerintahannya.



Gambar 22. Misionaris Henry Guillaumie dan Keluarga, 1904

(Sumber: koleksi pribadi)

Keadaan yang sama juga dialami penginjil di Parapat. Pada 28 Maret-4 April 1901 Kongsi Batak menemukan sikap penduduk Simalungun yang belum menunjukkan kesediaannya menerima Injil. Di Parapat daerah kekuasaan Raja Girsang A. Raja Hantu Sinaga tidak bersedia menerima Injil dengan alasan menunggu keputusan pemerintah kolonial Belanda di Batubara. Di kalangan rakyat sendiri, mereka menuntut zending agar membebaskan mereka dari kekuasaan penjajah Belanda di Batubara terlebih dahulu sebelum mereka bersedia menjadi Kristen (*padjongdjong pormingguan*).¹⁶

Tidak dapat dipungkiri faktor agama Islam berperan dalam menentukan pilihan RMG dalam proses zending di Simalungun.¹⁷ Sudah dijelaskan di atas, bahwa ada kerisauan di pihak zending dan pemerintah mengenai kemajuan agama Islam di Simalungun. Kemajuan itu semakin meluas terus di antara orang Simalungun yang melihat agama Islam dengan sangat positif. Berdasarkan arsip *Algemeene Nederlandse Zendelingconferentie* tahun 1911 yang dikutip Aqib Suminto, pengkristenan daerah Simalungun ternyata telah diminta oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada lembaga zending RMG.¹⁸ Permintaan menginjili orang Simalungun itu datang dari laporan-laporan pejabat kolonial Belanda yang sudah pernah berkunjung atau bertugas di Simalungun. Salah satunya, C. J. Westenberg (pejabat kolonial yang mengurus masalah orang Batak berkedudukan di Damak Jambu Serdang), Westenberg melihat perembesan agama Islam dari daerah Serdang dan Batubara ke daerah pedalaman Simalungun dan dusun Batak Timur (Serdang) yang masih belum dimasuki agama Islam.¹⁹ Banyak kepala-kepala daerah di daerah Batak Timur (Simalungun) yang

sudah memeluk agama Islam atau sedang berjalan ke arah itu, seperti telah ditunjukkan raja Siantar Raja Sang Nauluh Damanik. Selain Westenberg yang sudah disebut di atas, pejabat kolonial Belanda yang lain P. A. L. E. van Dijk (diserang Tuhan Raimbang pada 11 September 1892 di Aek Buluh Tanoh Jawa)²⁰ juga berpikiran sama dan menyarankan kepada RMG agar mengkristenkan orang Simalungun sebelum seluruhnya masuk Islam. Dia sebelumnya menjabat sebagai controleur Toba dan sudah sering berkunjung ke Simalungun. Melalui van Dijk, Nommensen mendapat informasi seputar masyarakat Simalungun yang berada di balik pegunungan bukit barisan itu.²¹ Laporan van Dijk mengenai Kerajaan Siantar, Tanjung Kasau dan Tanoh Jawa telah terbit pada 1894²² dan mendorong RMG untuk segera menjalankan misi ke Simalungun.

Dari pihak Zending, permintaan untuk menginjili orang Simalungun secara resmi datang dari zendeling Henry Guillaume (yang dipinjamkan RMG ke NZG). Guillaume yang sudah sering berkunjung ke Simalungun Atas menandatangani usulan yang sama pada 6 Februari 1903 dalam suatu acara konferensi para zendeling di Laguboti (3-8 Pebruari 1903) yang dipimpin Nommensen.²³ Zendeling G. K. Simon bahkan menyebut pekerjaan menginjili orang Simalungun sebagai pekerjaan yang penting dan mendesak mengingat agama Islam juga sedang bergerak mengislamkan orang Simalungun dan mereka sudah mempunyai penganut yang kuat di Simalungun, terutama di Bandar.²⁴ Menurut Bregenstroth, zendeling Guillaume melaporkan kondisi daerah Simalugun yang tidak aman, karena raja-raja saling berperang dan rakyat berada dalam kondisi yang menderita hidup dalam kemiskinan. Wabah penyakit cacar

yang disertai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan semakin memperparah penderitaan masyarakat Simalungun, hampir 50 persen anak-anak meninggal akibat penyakit cacar.²⁵

Berdasarkan pertimbangan dan usulan di atas, maka konferensi sepakat menetapkan daerah Simalungun sebagai lapangan pekabaran Injil yang baru (*nieuwe werk*).²⁶ Dalam mengatur strategi penginjilan masyarakat Simalungun, Paul B. Pedersen menggambarkannya seperti suatu kampanye militer.

*Pertama, suatu ekspedisi yang terdiri dari 23 evangelis dan missionaris mengadakan perjalanan keliling di daerah Simalungun, memberitakan Injil dan memperbincangkan kemungkinan untuk bekerja tetap dengan kepala-kepala kampung. Kedua, semua keputusan diperbincangkan dengan seksama, dengan mendapat bantuan setempat, baik dari pemerintah Belanda maupun dari raja dalam setiap kampung Simalungun. Ketiga, ada penitikberatan atas pendidikan, pembentukan sekolah-sekolah dan pekerjaan di kalangan pemuda. Akhirnya, ada suatu jaringan pos pekabaran Injil dan evangelis-evangelis Batak yang disebarkan di seluruh tanah Batak Simalungun.*²⁷

Rekomendasi dari kantor pusat RMG juga diminta dengan catatan bahwa Barmen akan mengirimkan tenaga zendeling dan uang dalam pekerjaan itu.²⁸ Faktor agama Islam itu disebutkan Nommensen dalam suratnya ke Kantor Pusat RMG di Barmen seperti dikutip zendeling Bregenstroth:

Saya meminta kepada Direktur mengirim seorang laki-laki yang kuat untuk pekerjaan yang baru (nieuwe werk) ini. Tetapi bukan orang yang lekas marah

yang dapat mengendalikan dirinya, orang yang bukan berkarakter sanguinis, orang yang sebentar-sebentar sudah mengucapkan hosana tetapi kemudian menjadi lemah dan tidak bangkit lagi oleh karena kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam tugas-tugasnya sebagai zendeling. Saya mengharapkan laki-laki yang percaya kepada Tuhan daripada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Raja-raja Simalungun adalah kejam (despoten), hampir tidak ada hubungan dengan Toba, maka sebab itu kita membutuhkan laki-laki yang berpendirian teguh. Apabila ini kita tunda, maka kita akan terlambat (telaat beteekenen) oleh karena Islam itu sudah maju di depan (daar de Islam met geweldt naar voren dringt). Tuhan memang memanggil kita untuk masuk ke mari, maka oleh sebab itu dengan pertolongan Tuhan biarlah sahabat-sahabat zending (zendingsvrien) berani maju ke depan.²⁹

Bertolak dari pengalaman RMG di Tapanuli Selatan yang mengalami kekalahan yang pahit dalam persaingannya dengan Islam di Tapanuli Selatan,³⁰ RMG semakin menyadari pentingnya pengkristenan orang Simalungun dalam rangka memenangkan persaingannya dengan Islam sebab Islam dianggap berbahaya.³¹ Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka kolonisasinya di Simalungun berharap masuknya orang Simalungun ke agama Kristen dapat menjamin stabilitas dan loyalitas penduduk kepada pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, pada saat Nommensen melalui utusannya Guillaume, Simon dan Meissel setelah kunjungannya di Simalungun Atas menghadap pemerintah di Medan, sambutan pemerintah sangat baik. Bregenstroth mengatakan dalam laporannya berkata, *"De Resident was*

de heeren zeer behulpzaam (“Residen Sumatra Timur pada waktu itu sangat suka menolong”). Ia juga memberikan saran supaya dapat menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat di Batavia. Tidak lama setelah itu, permohonan dijawab dengan adanya persetujuan dari pemerintah pusat.”³²

1. **Tanggapan Masyarakat Simalungun Atas**

Di Simalungun meski struktur masyarakatnya berpola feodal, apa yang terjadi di Tapanuli, ternyata tidak berlaku di Simalungun. Masyarakat Simalungun dalam hal agama atau keyakinan ternyata bergantung kepada pribadi masing-masing, bukan kepada salah satu sosok yang disegani seperti raja-raja yang berkuasa. Di pihak lain lagi, raja-raja kadang-kadang mau juga menerima zending masuk ke daerahnya, tetapi itu dalam rangka memajukan daerahnya, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit atau kegiatan sosial lainnya yang berguna bagi masyarakat. Sikap penolakan yang tegas terhadap zending ternyata hanya datang dari raja-raja Simalungun yang sudah beragama Islam atau yang bersimpati dengan agama itu. Dengan mencatat apa yang dikatakan Bregenstroth, “tetapi penghalang yang terbesar adalah raja-raja” menunjukkan bahwa zending tidak banyak memperoleh bantuan atau dukungan dari raja-raja dalam rangka pengkristenan. Anggapan zending merupakan kaki tangan pemerintah kolonial menjadi faktor yang menyulitkan raja-raja itu bersimpati dengan agama Kristen.³³

Wilayah Simalungun Atas terletak di pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan daerah Karo dan Serdang Hulu dan daerah pesisir Danau Toba. Kebanyakan

penduduk pada waktu itu masih belum dipengaruhi agama Islam kecuali sedikit di daerah Raya. Ia meliputi daerah kerajaan-kerajaan: Raya, Purba, Silimahuta dan Dolog Silou. Penetrasi kekuasaan kolonialisme Belanda mulai masuk ke daerah ini setelah masuknya serombongan pasukan Belanda dipimpin controleur J. A. M. van Cats Baron de Raet yang mengunjungi daerah Silimakuta dan Purba pada tahun 1883. Kunjungan ini disusul kemudian oleh Dr. Hagen tetapi karena sikap bermusuhan dari raja-raja Simalungun yang mengancam keselamatannya, pejabat kolonial Belanda itu terpaksa harus mengundurkan diri.³⁴ Musuh Belanda yang paling kuat di daerah ini Tuhan Rondahaim Saragih sangat mengancam keselamatan orang Eropa, sehingga harus menghindarkan daerah pedalaman. Empat tahun setelah itu, pasukan Rondahaim menyerang kedudukan Belanda di Tebingtinggi (Hulu Padang). Serbuan Tuhan Rondahaim terhadap para raja dan partuhunan di Simalungun Atas menimbulkan kekacauan di antara rakyat, serbuan yang oleh Jahutar Damanik disebutnya dengan Perang Saudara itu berlangsung selama sepuluh tahun (1880-1890).³⁵ Dengan adanya peperangan di antara raja-raja Simalungun yang dipicu Tuhan Rondahaim yang ingin memperluas wilayahnya, muncul saling curiga-mencurigai dan hubungan yang kurang harmonis di antara masyarakat Simalungun. Setiap masuknya orang asing dipandang dengan penuh kecurigaan. Masyarakat bersiaga tinggi menghadapi serangan dari luar apalagi dengan desas-desus yang berkembang bahwa Belanda sudah mulai mengerahkan pasukannya ke Simalungun. Terbukti pada ekspedisi keempat pemerintah Belanda tahun 1889/1892, pasukan

Kerajaan Dolog Silou dipimpin rajanya Tuhan Tandjarmahei (1856-1923) terlibat pertempuran yang memaksa Belanda mundur.³⁶ Perang Raya sendiri sudah selesai dengan kematian Tuhan Rondahaim pada 1891 di Pamatang Raya. Penggantinya Tuhan Kapoltakan bersama dengan raja Panei Tuhan Jontama menyerahkan diri (*onderwerping*) kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Dua tahun kemudian, Silimakuta dan Sipitukuta mengakui kekuasaan Belanda. Keberhasilan Belanda tidak terlepas dari peranan Controleur C. J. Westenberg yang mengendalikan pemerintahan kolonial dari Damak Jambu (Serdang).³⁷ Dia ditugaskan sebagai pejabat kolonial untuk urusan orang Batak pada 1888.³⁸

Controleur Westenberg yang berpegang pada kebijakannya yang anti Islam sudah barang tentu sangat senang dengan maksud zending yang ingin bekerja di daerah Simalungun Atas ini. Peranan serupa sudah dilaksanakannya di Tanah Karo. Menurut Westenberg, pengkristenan masyarakat pedalaman di Tanah Karo (dan juga Simalungun) akan menjauhkan penduduk asli dari agama Islam. Pada 1889 seorang zending NZG sudah didudukkan di Deli Dusun atas saran Cremer seorang tuan kebun.³⁹ Supaya tidak terjadi zending ganda, maka daerah Purba ditetapkan sebagai darah misi RMG, di mana kemudian akan didirikan suatu pos zending. Jalinan komunikasi yang baik antara Westenberg di satu pihak sebagai pejabat kolonial dengan Guillaume sebagai seorang zending RMG yang diperbantukan ke NZG membuka jalan bagi Nommensen sebagai pimpinan zending di Tanah Batak untuk membuka pos zending. Terbukti pada Maret 1903 sekembalinya dari

Medan, Guillaume turut dalam rombongan Nommensen dalam merintis pos zending di Purba.⁴⁰

Rupanya dalam kunjungan yang dilakukan Guillaume ke daerah Simalungun Barat tidak luput dari kebijakan politis pemerintah Belanda, hal ini semakin jelas dengan latar belakang Guillaume sebagai seorang pekabar Injil yang lahir di Vlissingen Belanda (1865) dan bekas sersan tentara Belanda.⁴¹ Pada usia 34 tahun dia sudah dipinjamkan ke NZG oleh RMG dalam rangka penginjilan di Dataran Tinggi Karo dan dengan cepat beradaptasi dengan masyarakat Karo. Dengan latar belakangnya ini, komandan pasukan kolonial Letnan Kolonel Bleckman dalam eksepedisinya ke pedalaman Sumatra dari Aceh (1904) memanfaatkan Guillaume sebagai penunjuk jalan, penerjemah dan mediator. Tidak lama setelah itu, sehabis kontraknya dengan NZG, Guillaume kembali ke Purba. Guillaume dikenang sebagai seorang perintis bagi terbukanya daerah Karo dan Simalungun bagi masuknya zending.⁴² Apalagi jika kita mengingat terbukanya dataran tinggi Karo bagi pekabaran Injil adalah dalam rangka “menjinakkan” perlawanan orang Karo melawan Belanda atas pesanan Cremer seorang pengusaha perkebunan dengan memakai tenaga NZG.⁴³ Orang Karo (terutama di Karo Dusun yang berdekatan dengan Deli) suka membakar gudang penyimpanan tembakau milik kolonial Belanda. Perlawanan orang Karo yang paling heroik melawan tuan kebun Belanda dan tindakan sewenang-wenang sultan Deli Sultan Mahmud Perkasa Alam terhadap masyarakat Karo pecah di Sunggal dipimpin Datuk Kecil, Datuk Jalil dan Sulung Barat penguasa Karo di Sunggal (1872).⁴⁴

Dengan demikian, dapat dipahami apa yang

melatarbelakangi sejarah penginjilan di Simalungun, di satu pihak zending bertujuan dalam rangka menghempang Islam dan dalam rangka kolonialisme yang dipahami sebagai suatu mandat ilahi (*Divine mandate*)—yang tujuannya dalam rangka perluasan Kerajaan Allah dan pengadaban bangsa-bangsa kafir yang perlu diselamatkan. Di pihak pemerintahan kolonial, kerjasamanya dengan zending bukanlah semata-mata karena motivasi Injil, tetapi lebih pada kepentingan politik. Banyak di antara pejabat kolonial pada zaman itu yang meskipun secara lahiriah beragama Kristen, tetapi menunjukkan hidupnya yang jauh dari nilai-nilai agama Kristen, bahkan mengutip Rita Kipp Smith, “...*Dutch civil servant, conversely, did not agree about the value of Christian missions for the government.*”⁴⁵ Kenyataan inilah yang kita lihat berpengaruh selanjutnya pada pandangan dan sikap orang Simalungun terhadap usaha kristenisasi masyarakat Simalungun. Dalam pandangan masyarakat Simalungun, RMG dipandang punya kepentingan yang sama dengan Pemerintah Kolonial Belanda, apalagi dengan ikut sertanya penginjil-penginjil suku Batak Toba yang sudah kebarat-baratan itu yang dipandang dengan penuh kecurigaan.⁴⁶

Di daerah Purba, sambutan Tuhan Rahalim (1886-1921) cukup baik. Simon, Meissel dan Guillaume disambut raja dengan baik, di sini pula mereka bertemu dengan rombongan Nommensen. Guillaume sebelumnya sudah pernah bertemu dengan raja. Dalam percakapan itu, raja Purba memberikan izin bekerja kepada RMG. Ia menunjuk Purbasaribu sebagai pos zendeling di Purba. Lokasinya terpencil dan menurut anggapan penduduk “angker” yang dalam pandangan raja Purba hal itu disengajanya

untuk menguji kelebihan zendeling. Dia mulai bekerja di Purbasaribu pada 1905, tetapi pada 1912 dia terpaksa pindah ke Saribudolog karena rumahnya mengalami kebakaran. Mengenai pekerjaannya di sini, E. St. Harahap berkata, "Lama pekerdjaan dinegeri ini sebagai tidak berhasil, karena perdjalan mengchabarkan Indjil disini amat soekar, seperti namanja SariboeDolog".⁴⁷ Khusus di SaribuDolog sampai tahun 1928 hampir tidak ada anggota jemaat dari suku Simalungun, sebagian besar jemaat terdiri dari keluarga guru-guru Injil Batak Toba dan sebagian kecil petobat baru dari suku Karo (penduduk Cingkes) yang pindah ke Saribudolog. Baptisan pertama di Saribudolog terjadi pada 11 Agustus 1918 atas sejumlah suku Karo yang tinggal di SaribuDolog.⁴⁸

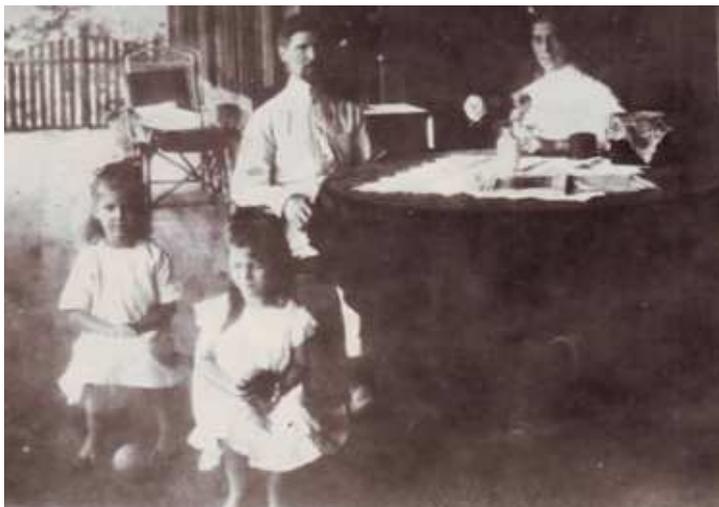
Dalam perjalanan ke Raya, raja Purba menunjuk seorang penunjuk jalan bernama Raja Hotang. Dalam perjalanan, Raja Hotang menunjuk tempat-tempat di mana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dagingnya dimakan dan sisanya dibuang ke kuburan. Pada waktu menceritakannya, sedikit pun tidak ada mimik bersalah kelihatan di muka sang penunjuk jalan.⁴⁹ Di Pematang Raya, pada saat zending masuk, yang berkuasa adalah Tuhan Hapoltakan, Tuhan Sumayan Saragih Garingging (1857-1932). Ia adalah anak Tuhan Rondahaim dari permaisuri yang berasal dari Baja Linggei (Padang Tebingtinggi).⁵⁰ Baja Linggei sebelum masuk ke Serdang merupakan wilayah Panei. Dengan demikian, Baja Linggei, Panei dan Raya masih memiliki ikatan kekeluargaan. Antara 1889-1891 pecah perang perebutan tahta di Pematang Raya. Masing-masing putera Tuhan Rondahaim berperang satu sama lain merebut

tahta. Tuhan Dolog Maraya, Tuhan Dolog Saribu bernama Salain Saragih di satu pihak menyerang Tuhan Hapoltakan di Sinondang. Akhirnya, Tuhan Hapoltakan diakui menjadi raja menggantikan ayahnya Tuhan Rondahaim sedang Tuhan Dologsaribu keluar dari Raya dan mengaku daerahnya masuk ke Panei.⁵¹

Bayang-bayang kekuasaan Belanda semakin mendekat ke pedalaman Simalungun, Westenberg yang berkuasa di Damak Jambu Serdang berusaha merebut Raya dengan kekuatan senjata. Tuhan Hapoltakan melihat melawan Belanda bukan kebijakan yang tepat di tengah kondisi daerahnya yang semakin terkepung oleh kekuasaan Belanda. Ia segera berangkat ke Damak Jambu menemui Westenberg, akhirnya pada 1902 Tuhan Hapoltakan, Tuhan Sumayan Saragih Garingging mengakui kekuasaan Belanda. Bagi Tuhan Hapoltakan mengakui kekuasaan Belanda sama artinya dengan masuk ke dunia kemajuan. Ia banyak belajar dari pergaulannya dengan Westenberg dan raja Padang di Tebingtinggi. Lantas bukan berarti Tuhan Hapoltakan menerima begitu saja agama Kristen (seperti yang mungkin sering disebutkan Westenberg), ia menerima Belanda masuk hanya satu: membawa rakyat menuju kemajuan dan kesejahteraan. membuka wawasannya pada kemajuan (tetapi tidak berminat dengan agama Kristen).⁵²

Terhadap kunjungan Nommensen, Tuhan Hapoltakan menerima mereka dengan baik di Pematang Raya, ia percaya dengan ucapan Nommensen, bahwa zending akan membuka sekolah di Raya, harapan yang telah dinantikannya selama ini. Ia mengizinkan zending bekerja di daerahnya dan memberikan sebidang tanah untuk mereka di dekat

rumahnya.⁵³ Meskipun demikian, ia tidak berminat memeluk agama Kristen. Sebaliknya menunjukkan simpati terhadap agama Islam, seperti menghunjuk Lobe Muhammad Said dari Siak (menikah dengan adik perempuannya) sebagai kepala urusan agama Islam di Raya Kahean. Sebuah masjid juga berdiri di Raya di atas tanah yang dihibahkannya kepada O. K. Alinaviah dari Padang-Tebingtinggi.



Gambar 23. Keluarga August Theis (1874-1968) di rumahnya di Pamatang Raya
(Sumber: A. Munthe, August Theis 1982)

Meski menerima masuknya zending ke Raya—dengan alasan “kemajuan”—zending dipandanginya dengan sikap curiga, ia tidak melihat ketulusan zending dalam pekerjaanya di Raya. Ia mencurigai zending selaku tuan kebun yang hendak merampas tanahnya untuk perkebunan. Hadirnya sepasukan tentara Belanda pada 1904 di Pamatang Raya (membuat penduduk Raya takut) makin memperbesar sikap curiga raja terhadap zending yang dicurigainya memiliki

hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda itu.⁵⁴ Pada malam Natal 24 Desember 1905 ia ingin membuktikan dugaannya itu dengan berkunjung ke rumah Theis yang berada di dekat istananya. Setelah melihat tidak ada hal-hal yang mencurigakan di rumah Theis, sejak itu ia tidak pernah lagi datang ke rumah Theis, padahal Theis berharap banyak dengan kunjungannya dalam rangka tugasnya itu.⁵⁵

Menurut Taralamsyah Saragih ada dua kali Belanda membawa Tuhan Hapoltakan ke luar dari Raya dan menanyakan kapan raja itu masuk Kristen yang dijawab dengan "nanti Tuan". Pertama ke Sidikalang tahun 1907 setelah kematian Sisingamangaraja XII, kedua di Kutacane pada 1910. Belum dapat dipastikan, adakah tindakan pemerintah Belanda itu berhubungan dengan kebijakan "anti Islam"-nya di Simalungun yang lebih menghendaki raja Raya masuk Kristen? Yang jelas, sampai ia meninggal (1 Januari 1933), ia tetap tidak mau masuk Kristen.⁵⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah zending masuk ke Pematang Raya, ia mendorong kemajuan penduduk melalui sekolah dan kesehatan.⁵⁷ Untuk tujuan itu, Tuhan Hapoltakan ikut mendorong rakyatnya menempuh pendidikan di sekolah-sekolah zending.⁵⁸ Dengan dukungan itu, pada Juli 1932 (setahun sebelum kematiannya) sudah ada 1505 murid sekolah zending, di antaranya beragama Kristen 320 orang, Islam 12 orang, Tionghoa 2 orang dan penganut agama suku 1171 orang.⁵⁹ Ia juga mendirikan poliklinik dan bekerjasama dengan pemerintah menempatkan beberapa petugas kesehatan di daerah-daerah, seperti di Raya Kahean. Pendeknya, sungguh banyak yang diperbuat Tuhan Hapoltakan untuk kemajuan rakyatnya.

Kedua sikap raja yang berpengaruh di Simalungun Atas ini menunjukkan bahwa mereka terbuka dengan zending dalam rangka memajukan daerahnya sambil tidak lupa memberikan pengawasan kepada zendeling. Kecurigaan bahwa zendeling berkaitan dengan kolonialisme Belanda memegang peranan dalam menjelaskan sikap raja-raja itu. Ch. D. Tappenbeck dalam tulisannya mengenang August Theis berkata, "Pendeta Theis mendengar banyak kata-kata yang baik dari Tuan Raya, tetapi dia mengalami banyak tindakan-tindakan yang menghalangi kerjanya dari pada Tuan itu pada waktu permulaan".⁶⁰

2. Simalungun Bawah

Kekuasaan pemerintah telah berjejak di daerah Simalungun Bawah (takluknya Tanoh Jawa dan pengakuan Raja Sang Nauluh) mendahului zending yang tiba di sana pada 1904. Perlawanan raja Panei, raja Siantar dan Tanoh Jawa sudah dapat diakhiri Belanda dengan diplomasi, intimidasi, intervensi maupun pendudukan militer. Sudah dijelaskan di depan, ekspedisi militer Belanda sudah dimulai pada 1865-1866 di Tanoh Jawa yang selanjutnya berhasil ditundukkan Belanda pada 20 Juli 1889. Pemberontakan Tuhan Naposo dan Tuhan Marjandi Asih yang dibantu pasukan dari Toba, Pardembanan dan Rondahaim dari Raya dapat ditundukkan pada 1890.⁶¹ Seterusnya Tanoh Jawa dimasukkan ke dalam lingkungan pengawasan Controleur Batubara di Labuhan Ruku. Situasi yang serupa juga dialami Siantar dan Panei. Sejak 1891 Controleur Kroesen sudah mencampuri urusan dalam negeri Kerajaan Siantar dan Tanjung Kasau.

Hubungan raja-raja Simalungun dengan Belanda

pada awalnya dianggap sederajat, kerajaan-kerajaan Simalungun dianggap negara berdaulat yang merdeka. Perjanjian antara raja-raja Simalungun hanya sebatas pengakuan hadirnya Belanda dalam rangka persahabatan dengan penguasa Simalungun.⁶² Tetapi seiring makin kuatnya posisi Belanda, posisi penguasa Sumatera Timur semakin lemah ditandai dengan ditekenya perjanjian-perjanjian yang menguntungkan Belanda dalam rangka politik ekonomi perkebunan mereka di Sumatera Timur.

Dengan demikian pada awal abad XX, posisi pemerintah kolonial Belanda di Pantai Timur Sumatra semakin kuat. Hal ini menjadi titik tolak bagi perluasan kekuasaan kolonial yang ditopang oleh tuntutan ekonomi lebih lanjut ke wilayah-wilayah lain di luar Pantai Timur Sumatera. Desakan investasi dan perluasan lahan perkebunan, yang memerlukan tanah dengan kualitas memadai untuk pengembangan produktivitasnya dan kesiapan aparat pemerintahan kolonial, telah membuka peluang bagi perhatian ekspansi kolonial ke arah Timur, sebagai satu-satunya daerah yang masih belum tersentuh kekuatan asing dan memiliki prospek yang besar bagi pengembangannya. Daerah di sebelah Timur ini merupakan wilayah pemukiman masyarakat Batak Simalungun.⁶³

Belanda dengan cerdas mampu memanfaatkan perseteruan politis di antara raja-raja Simalungun, akibatnya penguasa Simalungun berperang di antara mereka sendiri dan ini semakin memerosotkan wibawa kekuasaan mereka dan mencuatnya peran politis penjajah Belanda yang ujung-ujungnya diserahkannya kedaulatan kerajaan-kerajaan Simalungun kepada Belanda. Politik intervensi dilaksanakan

Belanda dengan skenario yang baik sekali di Tanah Jawa, Siantar dan Panei, kerajaan Simalungun utama di dataran rendah Simalungun yang menjadi incaran perkebunan Belanda. Atas kelihaihan Residen Michielsen, Belanda mampu masuk ke Simalungun Bawah dan mulai mengincar tanah untuk dijadikan kawasan perkebunan. November 1885 Belanda campur tangan urusan dalam negeri Kerajaan Siantar menyangkut Bandar, disusul takluknya Raja Tanjung Kasau (bekas daerah Kerajaan Siantar). Akibatnya, raja Siantar Tuhan Sang Naualuh dan raja Panei Tuhan Jontama bersama-sama Rondahaim menunjukkan perlawanannya kepada Belanda, tetapi dapat ditumpas dengan senjata.⁶⁴ Pada tahun 1899, Residen Michielsen berhasil memaksa raja Panei Tuhan Jadiamat (pengganti Tuhan Jontama) dan raja Raya Tuhan Kapoltakan (pengganti Tuhan Rondahaim) mengakui kekuasaan Belanda dan menyerahkan pengawasan daerah itu kepada Asisten Residen Batubara-Asahan.⁶⁵

Di tengah konflik itu, Raja Sang Naualuh menunjukkan simpatinya kepada Islam dan memeluk Islam (1901) dalam rangka perlawanannya kepada Belanda.⁶⁶ Masuk Islamnya raja Siantar tidak memuaskan Belanda, Controleur Cox di Batubara meminta raja Siantar murtad dan beralih keyakinan menjadi Kristen, tetapi ditolak mentah-mentah raja Siantar.⁶⁷ Atas kepindahannya ke agama Islam itu, Belanda menuduh raja Siantar memaksa rakyatnya masuk Islam yang dijadikannya alasan memakzulkannya dari tahta Kerajaan Siantar. Selain itu, raja Siantar dituduh bertindak kejam terhadap rakyat dan pejabat bawahannya (kasus pengusiran Tuhan Marihat yang juga Muslim). Perlu diketahui, sejak masuk Islam, Raja Sang Naualuh sangat giat menyebarkan

agama itu kepada rakyatnya. Di antara pembantunya terdapat guru-guru agama Islam dari Mandaling, Siak dan Batubara, di antaranya Tuan Guru Narudin, Lebai Udo, Ustad Manan dan Pangulu Panei.⁶⁸ Sang Nauluh mengorganisir pengajian, sunat masal dan mendirikan rumah pengajian di Pematang Siantar. Rakyat banyak tertarik masuk Islam atas wibawa dan pengaruh raja Siantar yang dikenal dekat dengan rakyatnya itu.⁶⁹

Kemajuan Islam yang pesat itu menggelisahkan Belanda, meskipun dihambat, ternyata makin berkembang, dengan segala cara Belanda berusaha menghempang kemajuan Islam di Siantar, mengusir orang asing (yang bukan suku Simalungun) dengan cara itu diharapkan guru-guru agama Islam yang bukan suku Simalungun akan meninggalkan Siantar, ternyata guru-guru agama itu menikahi perempuan Simalungun yang dengan itu terhindar dari pengusiran.⁷⁰ Selanjutnya setelah RMG memohon izin masuk ke Siantar (yang ditolak raja Siantar), Belanda mendukung zending dalam rangka membendung Islam, seperti telah dilakukannya di Pantai Barat (Singkel sekitarnya).⁷¹ RMG sendiri seperti kita ketahui bersikap ketakutan berlebihan melihat penetrasi Islam di Simalungun. Dan karena itu, maka didampingkanlah guru-guru Injil Batak Toba sebagai pembantu mereka mempercepat kristenisasi orang Simalungun.⁷² Pimpinan penginjil RMG ditetapkan G. K. Simon yang mengetahui agama Islam (sebelumnya melayani di Pangaloan Tapanuli) di Pematang Siantar tetapi mengingat sikap bermusuhan dari raja Siantar, dialihkan ke Pematang Bandar.⁷³ Hal ini disebutkan J. Tideman:

Sebenarnya, rencana mula-mula zending

direncanakan di Pematang Siantar, tetapi oleh karena hubungan yang tidak bersahabat dengan raja Siantar dan kecenderungannya mempertahankan agama Islam sehingga dipindahkan ke Bandar. Setelah raja diasingkan (verbanning) zendeling Bandar dipindahkan ke Siantar pada tahun yang sama, bersamaan dengan pemindahan pejabat pemerintah (bestuurambtenaar) Simalungun sendiri yang berkedudukan di Bandar ke Pematang Siantar.⁷⁴

Setelah raja Siantar Tuhan Sang Naualuh diasingkan Belanda ke Bengkalis pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda menitip puteranya Tuhan Riah Kadim Damanik di bawah asuhan zendeling Ed. Muller dan dibaptis (sebelumnya ia adalah Islam). Pada 1912 ia selesai sekolah zending, dipersiapkan menjadi pendeta dalam rangka membawa orang Simalungun ke agama Kristen, tetapi pada 1915 ia diangkat Belanda jadi raja Siantar.⁷⁵ Harapan zendeling meleset, selama jadi raja Siantar, Riah Kadim tidak sempat mempengaruhi kehidupan gerejawi di Pematang Siantar.⁷⁶

Dalam sejarah HKBP Pematang Siantar dalam periode 1907-1912 tercatat Ogom Damanik dari Nagahuta, Datok Damanik bersama anggota keluarganya yang dibaptis dari kalangan suku Simalungun.⁷⁷ Keluarga bangsawan Siantar lainnya memeluk agama Islam (tuhan Marihat dan tuhan Bandar).

Di Bandar orang Simalungun sebagai penduduk asli daerah itu hampir seluruhnya sudah masuk Islam dan cenderung memusuhi zending dan pendatang Batak Toba Kristen yang sudah hadir di sana pada 1904. Di antara yang masuk Islam itu adalah Tuhan Bandar sendiri (Tuhan

Sawadim Damanik), Tuhan Nagodang Bandar Tuhan Satia Bisara Damanik (November 1910) yang pada zaman Belanda sangat berpengaruh di Bandar.⁷⁸ Orang Simalungun Muslim di daerah ini melihat G. K. Simon dan para pembantunya penganjur Batak Toba dengan sikap benci, para pendatang dipandang sebagai manusia "*janglas*" (tidak tahu sopan santun, kasar dan menyebalkan).⁷⁹ Masyarakat Simalungun di sini tidak tertarik sedikitpun dengan agama Kristen yang disebarkan para zendeling dan guru-guru Batak Toba, Islam dilihat sebagai peradaban yang jauh lebih tinggi daripada agama Kristen. Memang Simon mendirikan sekolah yang berlokasi di sekitar Ujung Paret (masih sekitar Pamatang Bandar), mengajar anak-anak Simalungun menulis dan berhitung, tetapi meski banyak juga anak-anak orang Simalungun yang masuk sekolah, tetapi tetap tidak ada yang dibaptis. Sebaliknya, dari antara orang Batak Toba yang datang kemudian ke Bandar atas izin Tuhan Bandar—membuka persawahan—yang di Tapanuli sudah beragama Kristen, sesuai ketentuan di daerah itu, banyak yang menyesuaikan dirinya dengan masyarakat Simalungun setempat, mengaku dirinya orang Simalungun (menyesuaikan dirinya dengan marga Simalungun asli)⁸⁰ dan murtad menjadi Islam.⁸¹ Di antara orang Batak Toba itu adalah Kaliopas Pasaribu yang beralih agama menjadi Islam dan mendapat tanah dari Tuhan Bandar (tetapi setelah kerajaan hapus, ia kembali menjadi Kristen). Menurut Tuan Kaliasan Damanik dan Atin Saragih, orang Simalungun di Bandar beralih memeluk agama Islam karena adat-istiadat dan kebudayaan Simalungun bersesuaian dengan ajaran Islam, Islam mengajarkan kesopanan dan tingkah laku

yang tertib, kebersihan serta tuntutan moral yang baik, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran yang juga terdapat dalam falsafah orang Simalungun "*Habonaron do Bona*". Karena orang Bandar banyak merantau ke Medan Deras dan Tanjung Kasau di pesisir (Batubara) di mana mereka menuntut ilmu agama, setibanya di Bandar mereka menjadi guru-guru dakwah yang rajin kepada keluarganya atau masyarakat desanya, dan upaya itu didukung oleh pemerintah swapraja di Bandar, seperti Haji Usin Damanik dan Haji Jalaluddin Sinaga.⁸² Sayangnya, penyebaran agama Islam tidak diikuti berdirinya sekolah-sekolah Islam yang permanen dan terorganisir, sehingga sangat sedikit ulama Islam yang muncul dari Bandar.⁸³ Agama Islam di Bandar lebih bersifat tradisional dan baru mengalami perubahan setelah munculnya organisasi-organisasi Islam modern dari Jawa seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi Islam dari Medan seperti Jamiyatul al-Washliyah sekitar tahun 1930-1950.⁸⁴ Hanya di Sidamanik yang masih bertahan dengan agama suku, termasuk tuhan Sidamanik yang berkuasa di daerah itu.

Selain raja Siantar, sikap menolak kedatangan zending ditunjukkan raja Panei dan Tanoh Jawa. Penolakan ini dapat kita pahami, karena menurut adat, raja Panei dan Tanoh Jawa berkedudukan sebagai "*anakboru*" raja Siantar, setiap permaisuri di dua kerajaan ini berasal dari Siantar dan Bandar. Secara politis, kedua raja yang wilayahnya berbatasan dengan daerah kesultanan Melayu (Serdang dan Asahan) punya pengalaman berkonflik dengan tetangganya sultan Melayu dalam perebutan daerah, di mana Belanda berada dalam posisi menguntungkan sultan-sultan Melayu.⁸⁵

Sama seperti raja Siantar, kedua raja itu juga bersimpati dengan Islam bahkan raja Tanoh Jawa akhirnya beralih memeluk agama Islam (Raja Kaliamsyah Sinaga). Dengan kondisi ini, kedatangan zending dicurigai sebagai bahagian dari kolonialisme Belanda. Zending disambut dengan tidak ramah bahkan sikap permusuhan ditunjukkan raja Panei Tuhan Jadiamat Purba Dasuha terhadap Nommensen, Meissel dan Guillaume pada waktu kunjungan mereka ke Panei.⁸⁶ Sebaliknya Tuhan Dologsaribu, Tuhan Salain Saragih Garingging salah satu penguasa bawahan dalam lingkungan kekuasaan raja Panei menyambut baik kedatangan zendeling. Hubungan raja Panei dan Tuhan Dologsaribu pada waktu itu kurang baik. Tuhan Dolog Saribu, Tuhan Salain Saragih (anak Tuhan Rondahaim Saragih Garingging) bahkan mendukung pekerjaan zending di daerah kekuasaannya. Diperintahkannya penguasa Tigaras Ompu Raja Timbun Saragih Sitio dan Tuan Tambatuah Saragih Turnip menjamin keamanan para zendeling yang datang dari Tapanuli.⁸⁷ Sepuluh tahun kemudian (1913), ada yang dibaptis di Dologsaribu termasuk di dalamnya Tuhan Salain Saragih Garingging.⁸⁸

Sikap raja Siantar, Tanoh Jawa dan Panei menolak kedatangan penginjil RMG bermotif sama, yaitu perasaan antikolonialisme dan Islam. Di Bandar, Bosar Maligas, Siantar, Dolog Batu Nanggar (sebagian daerah Kerajaan Panei di hilir), agama Islam sudah menjadi agama mayoritas penduduk.⁸⁹ Daerah Bandar sendiri pada waktu kedatangan zending hampir seluruhnya sudah beragama Islam. RMG akhirnya menugaskan Pdt. Jonas di Batunanggar dan Pdt. Martin di Hadataran Tanoh Jawa membantu pekerjaan G.

K. Simon. Di daerah Tanah Jawa selanjutnya ditempatkan zendeling Weissenbruch pada 1905, tepatnya di daerah Tigaraja (Parapat Sipiak). Setahun kemudian (1906) pecah pemberontakan di daerah ini, Weissenbruch menunjukkan sikap tidak memihak, baik kepada Belanda maupun pemberontak. Mengatasi kecurigaan masyarakat, dengan nada pietis ia berkata :

Pekerjaan saya lain dari pekerjaan kompeni. Kalian melihat bahwa saya bekerja dengan damai di tengah-tengah kalian. Tetapi bila kalian mengutamakan kekuatan, ketahuilah bahwa walaupun hanya 2 orang pembantu ini kawan saya di sini, masih ada lagi yang menyertai saya, yang lebih kuat dari 1000 laskar, yaitu Tuhan yang saya percayai.⁹⁰

Perkembangan agama Kristen di Simalungun mengalami jalan berbeda dengan di Tapanuli. Bila di Tapanuli pertobatan seorang kepala kampung disertai pertobatan seisi kampungnya, tidak demikian halnya di Simalungun, meskipun pada prinsipnya, struktur masyarakat Simalungun yang feodalistik itu mendukung pertobatan yang sedemikian. Bagi orang Simalungun, keyakinan atau memeluk suatu agama tergantung pada pilihan pribadi masing-masing bukan terletak pada wibawa para pemimpinnya (tetapi tidak sepenuhnya pada Islam).⁹¹ Namun dalam minat bersekolah, para raja Simalungun sangat mendukung, mereka ikut mendorong rakyatnya menempuh pendidikan. Raja-raja Simalungun percaya pada ucapan Nommensen bahwa tujuan zending ke Simalungun adalah dalam rangka mendidik anak-anak mereka di sekolah menuju kemajuan, di samping mengajarkan agama yang benar. Meskipun pada mulanya, muncul keengganan para orangtua menyekolahkan anak-

anaknya karena khawatir anaknya dijadikan serdadu Belanda. Wajar apabila disebutkan bahwa, "jalan perkembangan jemaat di Simalungun pada mulanya adalah dengan dasar mendirikan sekolah zending" karena melalui sekolah itu, banyak anak didik yang menerima baptisan dan dengan jalan itu pula menjadi "penginjal" di tengah keluarganya.⁹² Di Simalungun, di samping tempat ibadah (gereja) berdiri juga sekolah zending (sesuai prinsip *pargodungan* seperti di Tapanuli) sebagai petunjuk bahwa zending hadir bukan hanya mengkristenkan orang Batak tetapi sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pendidikan dan kesehatan.

RMG sebagai badan zending dengan sedaya upayanya mencoba menarik orang Simalungun ke agama Kristen meskipun menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Pdt. Samuel Panggabean dalam tugasnya di Tigaras dan Dologsaribu pada 1904 menulis, "*Bakkol do rohani halak Simaloengoen mandjalo barita na oeli, hira magopo do panopoton toe nasida.*"⁹³ ("Sulit sekali perasaan orang Simalungun menerima Injil, sepertinya sia-sia saja mengunjungi mereka"). Terutama para raja-raja tidak tertarik dengan agama Kristen ("*pambobai-pambobaitta nihita bani panorang aipe lang sai satuju bani agama na baru on*"),⁹⁴ malah sebaliknya lebih memilih agama Islam atau bertahan dengan agama sukunya. Raja-raja Simalungun, meski tidak melarang rakyatnya masuk Kristen, namun dengan peralihan rakyatnya ke agama Kristen dianggap akan mengurangi kekuasaannya. Para raja Simalungun merasa takut bahwa rakyatnya akan lebih mendengar nasihat evengelis yang hanya rakyat biasa dan mengabaikan raja-raja itu.⁹⁵ Rupanya

agama Kristen lebih menarik minat kaum rakyat jelata (baptisan pertama di Simalungun atas seorang gadis di Purbasaribu, 19 September 1909) dan terbatas di kalangan datu atau bangsawan Simalungun. Mereka melihat agama Kristen akan membawa mereka keluar dari “kegelapan” dan membawanya ke arah kemajuan (*hamajuan*). Sedangkan dari kalangan para *datu* (seperti Tuan Silumbak) peralihan ke agama Kristen lebih pada pergulatan dan refleksi pribadi yang menemukan adanya “kecocokan” prinsip religiusitasnya dengan teologi trinitarian Protestan. Ternyata baptisan atas tokoh-tokoh ini tidak otomatis seluruh keluarga ikut menjadi Kristen.⁹⁶ Di Kerajaan Purba, ketika Tuhan Kinalang (setelah menjadi Kristen bernama Raja Gayus Purba Pakpak) dibaptis dengan seluruh keluarganya pada tanggal 23 Juni 1912, tidak seluruh penduduk Kinalang beralih masuk Kristen.⁹⁷ Meskipun para raja itu sulit menjadi Kristen, RMG tetap berharap pada konversi mereka ke agama Kristen seperti ditulis Bregenstroth zendeling di Pematang Siantar, “Terus menerus zendeling mengusahakan agar raja-raja itu masuk menjadi Kristen, dan dengan cara itu mempengaruhi rakyatnya masuk Kristen, tetapi sayang tidak ada manfaatnya”.⁹⁸

Dari kalangan rakyat jelata, keputusan beralih kepercayaan itu kadang-kadang ditentukan sikap sang raja (meskipun tidak secara umum berlaku). August Theis dalam pekerjaannya di Raya misalnya, sering mendengar perkataan rakyat kepadanya, “*Mintor sonaha ma parrohnami, anggo rajanta pe lape roh?*” (“Bagaimana mungkin kami datang, kalau raja sendiri belum datang?). Dengan mengutip Pdt. Samuel Panggabean, “... *mansai*

pir do rohani halak Simaloengoen mandjalo hatani Debata” (sungguh keras sekali hati orang Simalungun menerima Injil) menggambarkan bagaimana sulitnya proses konversi ke agama Kristen itu. Hujan yang turun atas doa Pdt. Samuel Panggabean di tengah musim kemarau yang melanda daerah Dologsaribu tetap tidak mampu membawa lebih banyak orang Simalungun ke agama Kristen, dilaporkan hanya dua rumah tangga saja yang beralih menjadi Kristen akibat peristiwa itu, selainnya tetap “kafir”.¹⁰⁰

Meskipun demikian, kristenisasi masyarakat Simalungun berkembang terus, meski lambat. Pada periode ini ada dua orang Simalungun melanjutkan ke sekolah guru, Jason Saragih dari Naga Hasiangan ke Depok dan Jaulung Wismar Saragih ke Narumonda Tapanuli. Keduanya adalah bekas pejabat pemerintah di Simalungun. Pengerja awam dari kalangan Simalungun yang diangkat menjadi penatua (sintua) terutama di Pematang Raya semakin banyak, di antaranya: St. Jonas Purba, St. Jakobus Sinaga, St. Natanael Purba dan St. Parmenas Purba. Melalui mereka, perlahan-lahan, kekristenan semakin menarik perhatian penduduk yang beragama suku.¹⁰¹ Selain itu peningkatan jumlah murid sekolah zending ikut mendorong pertumbuhan orang Kristen di Raya sehingga Raya muncul sebagai pusat agama Kristen Protestan di Simalungun. Dari Pematang Raya lahir gerakan emansipasi kaum Kristen Simalungun.

3. Hambatan Orang Simalungun Memeluk Agama Kristen

Seperti sudah disinggung di atas, selama seperempat abad (1903-1928) zending RMG bekerja di Simalungun,

sedikit sekali angka baptisan di antara orang Simalungun. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:¹⁰²

Pertama, situasi geografis, secara geografis, daerah Simalungun masih terisolir, di mana jarak perkampungan yang satu dengan yang lain saling berjauhan, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki dengan menerobos hutan lebat dan rimbunan ilalang yang kadang-kadang dalam perjalanan harus menyelamatkan diri dari terkaman harimau atau kawanan gajah. Sementara itu, di kampung-kampung yang kecil hanya ada sedikit penduduk, umumnya penduduk setempat lebih suka tinggal di ladangnya menjaga ladangnya dari hewan liar perusak tanaman, seperti kera dan babi hutan.

Kedua, sikap pemimpin tradisional Simalungun, dalam hal ini raja-raja dan kaum bangsawan Simalungun. Meskipun mereka mengizinkan zendeling bekerja di daerahnya masing-masing, tetapi mereka sangat konservatif dalam adat istiadat dan kebiasaannya. Sebagai contoh, mereka sangat marah dan melarang rakyatnya meniru kebiasaan orang Kristen Batak Toba yang sudah kebarat-baratan itu yang terbiasa memakai payung dan celana panjang seperti model Eropa. Raja Raya misalnya, memerintahkan tukang-tukang Batak Toba yang datang ke Raya membangun rumah zendeling Theis untuk memakai sarung seperti biasa dipakai rakyat Simalungun. Raja-raja itu sendiri sangat tertutup terhadap Injil—walaupun menunjukkan keramahannya terhadap zendeling—sikap mereka sukar ditebak, apakah mereka bersedia masuk Kristen atau tidak, (*“sonai homa urah do sidea mangkatahon ‘eak’ hape hadobanni lang idalankon”*).

¹⁰³ Meskipun zendeling berupaya semampunya mereka untuk

mendekati para penguasa Simalungun, kebanyakan mereka tetap bertahan dengan agama sukunya atau beralih agama ke Islam. Contohnya adalah Raja Silimakuta Tuan Padi Radja Purba Girsang, dia sangat antusias mendukung zending dalam membuka sekolah di SaribuDolog, bahkan dia mempergunakan pengaruhnya untuk tujuan itu, meskipun dia hadir dalam setiap acara gereja, tetapi sampai akhir hayatnya dia tidak menjadi Kristen.¹⁰⁴ Adat poligami di antara raja-raja Simalungun, dan keengganan (kalau bukan suatu hal yang mustahil) mendengar nasihat dan khotbah dari para kaum awam (yang umumnya adalah rakyat kebanyakan), kebiasaan mereka memelihara budak (*jabolon*) merupakan halangan bagi raja-raja itu untuk menjadi Kristen.

Ketiga, sikap anti penjajahan, semangat nasionalisme (lokal) menentang penjajahan Belanda dari pihak raja-raja yang mulai tumbuh pada saat itu menyebabkan tingginya sikap curiga raja-raja terhadap zendeling yang dianggap bersekongkol dengan penjajah Belanda. Dari kalangan rakyat sendiri, beredarnya isu bahwa anak-anak sekolah zending akan direkrut menjadi serdadu Belanda menyebabkan keengganan mereka memasukkan anak-anaknya ke sekolah zending.

Keempat, penghalang yang terbesar adalah bahasa Toba, yang dipakai dalam pekabaran Injil di Simalungun.¹⁰⁵ Selama pekerjaannya di Simalungun RMG mengabaikan unsur ke-Simalungun-an dalam meraih orang Simalungun kepada Injil dan sebaliknya menerapkan kebijakan tobanisasi di Simalungun.¹⁰⁶ Kebijakan RMG yang “tidak tepat, sedikit arogan dan melukai perasaan orang Simalungun” itu menimbulkan kemacetan pekabaran Injil di Simalungun.¹⁰⁷

Orang Simalungun merasa “di-Toba-kan” dalam perjumpaannya dengan agama Kristen yang diwartakan RMG. Mereka jengkel dengan sikap zending RMG yang tetap mempertahankan pemakaian bahasa yang kurang dimengerti orang Simalungun itu.¹⁰⁸ Untuk itu, mereka melakukan serangkaian protes dan gerakan perlawanan terhadap kebijakan RMG yang keliru itu di bawah pimpinan Pdt. J. Wismar Saragih.¹⁰⁹

Rata-rata zendeling RMG menguasai bahasa Toba, tetapi hampir tidak ada yang bisa berbahasa Simalungun. August Theis sendiri meski sudah 18 tahun tinggal di Raya (1903-1921), tetap tidak mampu berbahasa Simalungun, sehingga pada waku perpisahannya jemaat Raya harus mengarang lagu perpisahan dalam bahasa Toba.¹¹⁰ Stereotip¹¹¹ orang Batak Toba yang terlanjur buruk di mata orang Simalungun ikut menambah kurang berminatnya orang Simalungun menjadi Kristen.¹¹² Faktor itu berdampak luas pada sikap orang Simalungun terhadap zending, sampai-sampai ada anggapan yang terlanjur meluas di antara orang Simalungun menganggap Yesus orang Batak Toba, seperti diungkapkan seorang Simalungun beragama suku kepada guru zending, *“Ai halak Toba do Toehan Jesoes Goeroe?” nini. “Ai sai hata Toba do tong iloearhon Toehan Jesoes hoebogei ibasa ham?”* (Apakah Tuhan Yesus itu orang Toba, Guru? Karena hanya dalam bahasa Toba saja Tuhan Yesus berbicara, saya dengar dari bacaan Anda?).¹¹³ Orang Simalungun sendiri sudah sejak lama memandang orang Batak Toba dengan rendah, mengaitkan mereka sebagai buruh upahan tuan tanah Simalungun.¹¹⁴ Ephorus HKBP dalam khotbahnya (teks 1 Kor 3:16-17) di Gereja Raya Usang

(6 Oktober 1935) masih tetap dalam bahasa Toba meski ia sadar pendengarnya mayoritas suku Simalungun. Seorang jemaat Simalungun menulis dengan nada prihatin di *Sinalsal*, “*Ra buei do na mangantoesi ambilan ni Ephoroes in namin, tapi bahatan do naso mangantoesi, halani sahap Toba do isahapkon, ai seng ibotoh sahap Simaloengoen*”. (“Mungkin saja banyak yang mengerti khotbah Tuan Ephorus itu, tapi lebih banyak juga yang tidak mengerti, karena disampaikan dalam bahasa Toba, dia tidak dapat berbahasa Simalungun”). Sebaliknya memuji pendeta SaribuDolog dan Controleur Simalungun yang berbicara dalam bahasa Simalungun, padahal pejabat kolonial itu seorang Belanda.¹¹⁵

Diabaikannya pemakaian bahasa dan kebudayaan Simalungun dalam pekabaran Injil di Simalungun termasuk suatu hal yang mengherankan, karena Nommensen sendiri selaku pimpinan RMG di Tanah Batak sudah menerjemahkan Injil Yohanes ke dalam aksara dan bahasa Batak Toba tidak lama setelah ia bekerja di Silindung. Terjemahannya itu terbit pada 1894 diterbitkan *Amsterdam For The British and Foreign Bible Society*.¹¹⁶ Pimpinan RMG sendiri seperti Schreiber dan Warneck menyadari betul pentingnya pemakaian bahasa Batak Toba dalam pekerjaannya di Tapanuli. Untuk itu, zending berusaha keras menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak Toba dengan sesempurna mungkin, menghindari kesalahan fatal (PB terjemahan Nommensen terbit 1885 dan PL terjemahan Johannsen terbit 1894).¹¹⁷

Pentingnya memakai bahasa Simalungun dalam meraih orang Simalungun itu terlihat dari upaya zendeling G. K. Simon yang bekerja di Bandar pada 1904. Sepanjang

sejarah zending di Simalungun, Simon-lah perintis pertama dari kalangan zending yang sudah mencoba membuat terjemahan Injil Lukas dalam bahasa Simalungun.¹¹⁸ Dia juga mengarang sejumlah buku pelajaran dalam bahasa Simalungun untuk dipakai di sekolah zending di Bandar di mana kebanyakan muridnya terdiri dari anak-anak Simalungun. Kepada guru-guru Injil Batak Toba yang menyertainya diarahkan agar sedapat mungkin berbahasa Simalungun dalam berkomunikasi dengan orang Simalungun, terutama di sekolah dan aktivitas penginjilan. Sayangnya pekerjaannya tidak berkelanjutan, pada 1906 isteri Simon jatuh sakit dan harus pulang ke Jerman. Penggantinya zendeling Edward Muller tidak meneruskan pekerjaannya, ia malah sibuk mengurus jemaat Batak Toba yang sudah datang ke Bandar membuka persawahan pada 1907.¹¹⁹ Kesadaran serupa juga sudah disampaikan zendeling R. Schneider di Pematang Siantar (meski tidak dilaksanakannya juga). Laporrannya tahun 1928/1929, menekankan pentingnya meraih orang Simalungun dengan tenaga penginjil orang Simalungun sendiri yang mengetahui bahasa Simalungun dan adat istiadatnya.¹²⁰ Motif pengabaian ini semakin jelas pada saat makin dominannya populasi migran Batak Toba Kristen (umumnya dari Toba, Silindung dan Humbang) di Simalungun (terutama di Pematang Siantar, Bandar dan Panei) dalam rangka membuka persawahan mulai tahun 1906 dan 1907. Mereka juga mengisi lowongan-loewongan pekerjaan administratif di pemerintahan dan perkebunan, dengan bekal pendidikan zending yang sudah mereka terima di Tapanuli.¹²¹ Tenaga para zendeling terkuras dalam melayani jemaat-jemaat baru yang berasal dari

Tapanuli itu dan dengan demikian secara tidak langsung telah mengabaikan orang Simalungun. Kondisi ini semakin diperparah lagi dengan ketegangan yang terjadi di antara raja-raja Simalungun dengan pendatang Batak Toba sekitar tahun 1914-1930-an yang berdampak luas pada pandangan orang Simalungun selanjutnya terhadap orang Toba. Dalam analisisnya, Martin L. Sinaga mengatakan:

Tentu kasus Simalungun ini sedikit unik. Guru Toba yang datang (yang dipuji selaku komunikator terbaik untuk bangsa-bangsanya) mengalami persoalan justru dalam komunikasi itu sendiri. Seperti yang sudah cukup luas saya bahas di atas, hal itu antara lain bermula dari seruan tergesa (Tole! Segeralah!) Nommensen/Barmen karena ketakutan kepada Islam, dan mengira orang Toba dapat menjadi "laskar Kristus" (pembantu Zendeling Jerman) yang efektif melindungi jiwa orang Simalungun dari penetrasi Islam. Tentu ada juga soal keangkuhan antropologis zending yang tidak cukup cangguh dan rela memahami perbedaan "bangsa" Toba dan Simalungun, dan mengira bisa menemukan sebetulnya identitas buat orang Simalungun (melalui proses tobaisasi). Padahal, penolakan identitas murahan itu sebenarnya adalah cara orang Simalungun bernegosiasi di ruang kolonial. Di samping itu, tentu saja ada kebutaan di pihak zending dalam memahami proses-proses dan konsekuensi historis invasi-invasi tanah dari Toba-Tapanuli ke Sumatra Timur. Akibatnya, dengan serta merta ditempatkan para guru Toba tanpa pernah berdialog dengan situasi sosial historis (apalagi psikologis) riil orang Simalungun. Belum lagi struktur hubungan para zendeling dengan guru yang hierarkhis dan paternalistis. Semua ini tentu saja memacetkan

*perjumpaan yang lebih tulus dan bernas antara RMG (lewat agency-nya) dengan masyarakat Simalungun. Bukankah apa yang terjadi ini merupakan kolonialisasi yang membuat lifeworld dan identitas Simalungun mangkir akibat wacana dan ke-hadir-an Zending plus agen-agen Tobanya?*¹²²

Tetapi, segera orang Simalungun sadar akan permasalahan yang dihadapinya. Dengan semangat meraih orang Simalungun kepada Injil dengan bahasa dan adat istiadat Simalungun, tokoh-tokohnya seperti J. Wismar Saragih, Jason Saragih, Jaudin Saragih, Kerpanius Purba dan kawan-kawan maju menerobos kebuntuan pekabaran Injil di Simalungun. Selama periode 1928-1942 itu, orang Kristen Simalungun benar-benar berupaya keras mengatasi kebuntuan dan sikap RMG yang tidak memberi ruang bagi warna Simalungun dan hasilnya sangat mengejutkan, banyak penganut agama suku Simalungun yang beralih menjadi Kristen. Dengan demikian boleh dikatakan, tahun 1928 adalah permulaan gerakan kemandirian orang Kristen Simalungun menuju terwujudnya Gereja Simalungun yang mandiri dalam sejarah pekabaran Injil di Simalungun.

4. Usaha Menarik Orang Simalungun ke Agama Kristen

a. Mendirikan Organisasi Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen

Menanggapi tobanisasi yang dilancarkan RMG di Simalungun, tokoh-tokoh Kristen Simalungun mendirikan organisasi pelestarian kebudayaan Simalungun dan pekabaran Injil yang diberi nama "*Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen*". Kesadaran itu mulai tumbuh sejak tahun

1916 pada waktu dua orang putra Simalungun, J. Wismar Saragih dan Guru Jason Saragih lulus dari sekolah guru (Laguboti dan Depok).¹²³ Berangkat dari keprihatinan yang dialami orang Simalungun, lambatnya kristenisasi dan "hamajuon" orang Simalungun dalam pandangan J. Wismar Saragih adalah dampak dari tobanisasi yang dialami orang Simalungun dari pihak zending, baik di sekolah maupun gereja. Dengan nada prihatin Wismar berkata:

Setelah zending (Rijnsche Zending) bekerja di Simalungun ini, saudara kita dari Toba yang menyertai pekabaran Injil dan menyelenggarakan sekolah, karena mereka yang dipakai sebagai guru agama dan guru sekolah di sini. Kalau mereka yang datang itu tidak seberapa yang mengetahui bahasa Simalungun, dan mereka menganggap tidak perlu untuk mempelajari bahasa itu. Selain itu, perlu pekerjaan itu mudah, karena buku-buku yang tersedia dalam bahasa Toba sudah tersedia sebelumnya di Toba, dapat terus dipakai di Simalungun. Jadi itulah yang berjalan terus sampai munculnya rencana mendirikan Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen.

Karena lama berjalan buku dan bahasa Toba di sekolah dan di perkumpulan orang Kristen, ikut juga mengalir masuk bahasa dan adat Toba ke tanah Simalungun. Semakin lama semakin jelas dirasakan orang Simalungun yang telah belajar dulu di sekolah dalam bahasa Toba. Karena melalui bahasa Toba itu, semakin merembet pula adat Toba ke Simalungun, perembetannya itu berakibat rusaknya bahasa dan adat Simalungun. Karena meskipun ada yang bersesuaian adat Batak Toba dengan adat Batak Simalungun, banyak juga yang berselisih, dan yang bertentangan dengan adat dan bahasa

Simalungun. Sering sekali dirasakan orang Simalungun sakit hatinya akibat pergaulannya dengan orang Toba, karena salah paham, karena adat yang hormat di Toba, kalau disampaikan kepada orang Simalungun, menjadi dianggap melecehkan orang Simalungun atau merendahkan. Dari situ, makin muncullah cita-cita pada sebagian orang Simalungun, supaya bahasa Simalungun lah yang sepatutnya dipakai di sekolah dan gerejanya orang Simalungun. Tetapi rencana itu seperti tidak kesampaian dan sia-sia saja (songon manangkih palia gunung do, mulak sibar gutulni lobei).¹²⁴

Dalam analisis H. Volmer seorang zendeling RMG di Simalungun di tahun 1930-an, kondisi itu disebutnya sebagai bentuk penganaktirian ("*stiefmutterlich*") orang Simalungun itu.¹²⁵ Populasi orang Simalungun yang dianggap kecil dibanding populasi orang Toba pendatang, menjadi alasan dari pihak RMG mengabaikan pemakaian bahasa Simalungun dalam menjangkau orang Simalungun.¹²⁶ Terbukti tidak ada kelanjutan dari pekerjaan yang sudah dirintis G. K. Simon dari pihak RMG. Dengan segala keterbatasan, orang Simalungun harus bergerak sendiri tanpa dapat berharap banyak pada "kemurahan" RMG yang tetap ngotot mempertahankan pemakaian bahasa Batak Toba.¹²⁷ Mengenai hal ini Swellengrebel berkata:

Bertahun-tahun lamanya, RMG menganggap kegiatan di daerah ini sebagai sekedar tambahan bagi pelayanan mereka di Tanah Toba. Mereka mencoba antara lain menjadikan bahasa Toba sebagai bahasa pengantar di sekolah. Hanya bahasa itu tidak serta merta jelas bagi orang Simalungun, kendati mereka dapat cukup cepat belajar memakainya. Di bidang ekonomi, pengaruh orang

*Toba juga bertambah besar, antara lain karena pendatang dari Toba mulai menggarap tanah-tanah kosong di daerah Simalungun.*¹²⁸

Kondisi ini mengalami perubahan, seiring dengan munculnya generasi Simalungun terdidik (baik di sekolah zending maupun pemerintah kolonial) sejak tahun 1916. Di antaranya terdapat Jason Saragih yang sudah menjadi guru (jabatan yang cukup bergengsi pada waktu itu) lulusan sekolah guru di Depok Jawa Barat dan Jaulung Wismar Saragih lulusan sekolah guru dari Sipoholon Tapanuli. Terutama J. Wismar Saragih pada 1917 sudah menerjemahkan dan mencetak buku-buku rohani yang biasa dipergunakan dalam kebaktian dan upacara-upacara Kristen dalam bahasa Simalungun tetapi tidak sempat dipakai karena ketiadaan izin dari zendeling Muller di Pematang Siantar.¹²⁹ Dia bergerak mengisi kekosongan penyediaan literatur Kristen dalam bahasa Simalungun yang mangkir dari pekerjaan RMG di Simalungun. Toh, usahanya tidak mulus, Swellengrebel berkata untuk upayanya itu:

Akan tetapi, para utusan RMG, yang tetap tidak dengan sepenuh hati menerima penggunaan bahasa Simalungun menyesali kegiatan-kegiatan Pendeta Saragih itu demi bahasa ibunya. Sang Pendeta sungguh-sungguh menyadari sikap mereka itu. Ketika tahun 1935, Ephorus menunjuk dia sebagai peginjil yang diperbantukan dengan tugas di Pearaja, 5 km di sebelah selatan Danau Toba, ia yakin dengan penempatan yang jauh dari wilayah bahasa Simalungun ini bertujuan menghalangi perkembangan bahasa Simalungun dan dengan demikian memperbesar peluang bagi bahasa Toba di daerah Simalungun. Jadi

ia menolak pengangkatan itu, dengan alasan bahwa ia telah bersedia menjadi pendeta hanya demi pekerjaan di daerahnya sendiri. Ketika ephorus tetap mendesak, ia melibatkan mantan Ephorus J. Warneck, yang telah menjadi Direktur RMG di Barmen (Jerman). Berkat campur tangan Warneck, pemindahan tugas itu dibatalkan.¹³⁰

Politik Tobanisasi yang diterapkan pengurus gereja Batak (HKBP) di Simalungun itu¹³¹ menghadapi perlawanan dari orang Simalungun dengan cara yang cerdas. Dukungan yang diperoleh dari raja-raja Simalungun dan pemerintah kolonia Belanda yang lebih positif terhadap kelestarian bahasa dan adat-istiadat Simalungun memantapkan rencana orang Kristen Simalungun untuk mendirikan suatu lembaga bahasa dan pengadaan literatur Kristen dalam bahasa Simalungun.¹³² Pada peringatan seperempat abad penginjilan di Simalungun yang dilangsungkan di Pematang Raya pada 2 September 1928, ide pendirian komite bahasa itu semakin menggema dan disambut gembira oleh masyarakat dan raja-raja Simalungun.

Setelah beberap kali pertemuan Komite Na Ra Marpodah resmi berdiri pada 13 Oktober 1928 di rumah Pangulu Balei Jaudin Saragih yang dihadiri 14 orang tokoh Simalungun yang kemudian menjadi pengurus dari komite itu. Mereka adalah: J. Wismar Saragih, Gr Jason Saragih, St. Jakobus Sinaga, Pangulu Balei Jaudin Saragih, Jotti Saragih, St. Benyamin Damanik, Gr. Augustin Sinaga (kemudian menjadi pendeta Metodis), Gr. Jainus Saragih, Gr. Kenan Sinaga, Gr. Lamsana Saragih, Gr. Kilderik Saragih dan St. Jonas Purba (dua orang lagi tidak ditemukan namanya).¹³³ Dari ke-14 tokoh itu terdapat 6 orang guru zending, 1 orang

kerani pekan, 1 orang pejabat pemerintah (*pangulu balei*), dan 1 orang ningrat (*Parbapaan Raya Usang*).¹³⁴ Komposisi status dan profesi kaum terpelajar orang Simalungun itu menggambarkan adanya permufakatan yang bulat dari orang Simalungun untuk menggapai kemajuan melalui organisasi komite bahasa itu. Selain itu, ada harapan yang kuat dari para pendirinya bahwa kristenisasi orang Simalungun akan mengalami kemajuan yang berarti dengan hadirnya komite itu. Meskipun dalam anggaran dasar tujuan dari organisasi itu adalah "*manramothon ampa patorsahon hata Simaloengoen*" (memelihara dan memberdayakan bahasa Simalungun), tugas penginjilan kepada orang Simalungun itu mendapat tempat yang penting dalam rangka kemajuan orang Simalungun.

Selain dukungan dari raja-raja Simalungun yang menyambut gembira lahirnya komite itu, dukungan serupa ditunjukkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Atas kebijakannya, pemerintah memberikan bantuan dana dan politis dengan disahkannya statuta (anggaran dasar) komite itu oleh asisten residen Simalungun dan Tanah Karo pada tanggal 5 Pebruari 1929 di Pematang Siantar. Pada bulan Agustus 1929 pemerintah memberikan bantuan sebesar f. 300 dari keuangan pemerintah (*Landschapkas Simeloengoen*)¹³⁵ Sepuluh tahun kemudian, RMG mulai memperhitungkan karya orang Kristen Simalungun itu, Ephorus Dr. E. Verwiebe, dalam kata sambutannya, selain mengucapkan selamat, Dr. Verwiebe mengatakan pentingnya setiap zendeling mempelajari dan menghormati bahasa penduduk setempat yang diinjilinya seperti yang sudah diamanatkan lembaga-lembaga zending di dunia.¹³⁶ Tahun 1934 organisasi ini

yang sudah berkantor sendiri di Pematang Raya aktif menerjemahkan dan menerbitkan literatur yang berguna bagi kemajuan masyarakat Simalungun, baik dalam bidang pendidikan (buku ajar di sekolah), pemerintahan, bercocok tanam, dan buku-buku gerejawi lainnya. Pada tahun 1936 dengan bantuan pemerintah dari cukai karet (*rubbergelden*), *Partikkian ni Hata Simaloengoen*, kamus Simalungun pertama diterbitkan, kamus itu merupakan karya J. Wismar Saragih yang dicetak di percetakan zending di Laguboti. Di seluruh Hindia Belanda, pada masa itu, J. Wismar Saragih orang pribumi pertama yang menyusun kamus seperti itu. Selanjutnya Museum Simalungun di Pematang Siantar diresmikan pada 30 April 1940 atas inisiatif Komite dan dukungan raja-raja Simalungun dan pemerintah kolonial Belanda.¹³⁷

Setelah berkarya selama 8 tahun, komite sudah mengeluarkan 20 jenis buku dalam bahasa Simalungun yang dicetak sebanyak 27000 eksemplar dan telah laku terjual sebanyak 15000 eksemplar, bukan hanya di Simalungun tetapi juga di daerah luar Simalungun yang penduduknya orang Simalungun (Padang, Bedagai, Serdang dan Batubara). Bukan hanya buku, tetapi kalender bulanan (*Maandkalender*), almanak saku (*Susukkara*). Dari laporan pengurus komite tahun 1936 terbitan pertama kali (1929) adalah buku yang mengajak masyarakat menanam kopi (*Parkoboenan Kopi*), cara memerintah (*Panggomgomion*), nasihat bekerja (*Podah Marhordja*) dan meningkatkan pemahaman akan iman Kristiani (*Katekismus*), disusul buku-buku tata ibadah (*Leiturgie*) dan nyanyian gereja (*Haleluja*) pada 1930. Buku-buku pelajaran sekolah terbit pada 1931

(*Rudang Ragi-ragian dan Sitolusaodoran*), 1932 terbit buku mengenai cara bersawah (*Parsabahon*) dan buku pelajaran, tahun 1933 buku tata ibadah (Agenda) dan buku pelajaran sekolah, tahun 1934 buku pelajaran, renungan harian (*Manna*), saduran Perjanjian Lama (*Padan Na Basaia*) dan Tatabahasa Simalungun (*Ruhut Manurat*) dan pada 1936 terbit almanak Kristen (*Susukkara*), saduran Perjanjian Baru (*Padan Na Baru*).¹³⁸ Buku pelajaran sekolah berada di posisi teratas dalam tingkat penjualan disusul buku-buku yang berkenaan dengan peningkatan taraf kehidupan dan buku ibadah di jemaat. Ini menunjukkan komite berhasil menarik perhatian masyarakat Simalungun untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang sekaligus secara perlahan-lahan menarik simpati masyarakat Simalungun kepada agama Kristen.

Seluruh terbitan karya komite itu merupakan jawaban orang Kristen Simalungun menepis pandangan pemerintah yang memberi stereotip "kalian pemalas", "tidak mampu memerintah". Dengan demikian, ditegaskan, bahwa orang Simalungun juga dapat merengkuh kemajuan di segala bidang sekaligus mendengar Injil dalam bahasanya sendiri, sebab orang Simalungun juga adalah umat pilihan Tuhan sama seperti orang Toba yang lebih dahulu menerima Injil.¹³⁹

Karya yang terpenting dan membawa pengaruh besar pada perubahan masyarakat Simalungun adalah majalah *Sinalsa* (Cahaya) yang terbit dari tahun 1931-1942. J. Wismar Saragih dan Benjamen Damanik tercatat menjadi inti majalah gereja Simalungun perdana itu. Hoekema mengatakan, "*Sinalsa* adalah sarana memperjuangkan emansipasi yang diinginkan orang Kristen-Simalungun"¹⁴⁰.

Warna emansipasi itu sangat jelas kelihatan dalam majalah *Sinalsa*, hal itu dapat dipahami mengingat pada periode itu (1931-1942) semangat nasionalisme dan kemandirian mendapat banyak perhatian di Hindia Belanda.¹⁴¹ Melalui majalah *Sinalsa*/juga, orang Simalungun menjalin komunikasi intelektual, memberi nasihat kepada orang Simalungun bagaimana caranya meninggalkan adat-kebiasaan yang merintangai kemajuan, dan mencapai sukses di bidang ekonomi.¹⁴² Apulman Saragih menyebut *Sinalsa* benar-benar memperhatikan keadaan masyarakat, mempersiapkan masyarakat Simalungun menghadapi perubahan zaman dan menyongsong kemajuan dengan menerima Kristus.¹⁴³

b. Mendirikan Kongsi Laita dan Saksi ni Kristoes di Sondiraya

Pandangan Pdt. J. Wismar Saragih dengan mottonya: *“Siparutang do Ahu Bani Simalungun”* (saya berhutang kepada Simalungun) menggambarkan tanggungjawab sosial-religius orang Kristen Simalungun untuk memenangkan suku Simalungun kepada Injil dalam langgam Simalungun.¹⁴⁴ Motto itu ternyata menggugah kaum Kristen Simalungun untuk membawa berita Injil kepada saudara-saudaranya yang masih beragama suku. Dengan semangat itu pula, organisasi-organisasi penginjilan dibentuk orang Kristen Simalungun. Mereka ingin menjangkau sejauh mungkin lingkaran suku bangsa Simalungun ke dalam jangkauan jemaat-jemaat Simalungun.¹⁴⁵ Dengan mendanai sendiri, mengorganisir sendiri, kaum Kristen Simalungun menginjili bangsanya ke seluruh pelosok di mana saja terdapat orang Simalungun yang belum Kristen.¹⁴⁶

Organisasi “Kongsi Laita” (marilah kita pergi) yang berdiri pada 15 November 1931 di Sondi Raya merupakan organisasi penginjilan yang dikelola kaum Kristen Simalungun sendiri. Dengan semangat zending, tokoh-tokoh Kristen Simalungun seperti: St. Gr. Willimar Saragih, St. Parmenas Purba, St. Jonas Purba, Melanthon Saragih, St. J. Martin Sinaga dan Mailam Purba mendirikan organisasi misi ini dalam rangka pengkristenan suku Simalungun.¹⁴⁷ Anggota kongsi ini melibatkan seluruh potensi jemaat tanpa terkecuali, masing-masing anggota terlibat langsung dalam pekabaran Injil dengan sukarela, terorganisir dengan baik. Motto mereka, “Apabila engkau berbicara di manapun dengan sahabatmu selama lima menit, khususnya yang belum beragama (Kristen),¹⁴⁸ haruslah diusahakan memberitakan firman Tuhan”.¹⁴⁹ Anggota Kongsi Laita giat mengabarkan Injil ke seluruh pelosok Simalungun, tetapi dalam kunjungan di Tanoh Jawa, Kongsi Laita mendapat hambatan dari Pendeta Resort HKBP Tanoh Jawa (padahal mereka sudah menunjukkan surat jalan dari Pendeta HKBP Pematang Raya).¹⁵⁰ Dalam catatannya mengenai sejarah kongsi ini, St. Guru Jonas Girsang menulis :

*Perjalanan ketiga dilakukan ke Tanoh Jawa. Sesampai di Tanoh Jawa, utusan tadi lebih dahulu melapor dan minta izin kepada pendeta HKBP Resort Tanoh Jawa,—izin tidak diperoleh,—bahkan utusan tadi “diusir” disuruh kembali setelah diketahui bahwa utusan ini adalah suku Simalungun yang dapat menggugah hati orang-orang Simalungun. Bahkan utusan ini dianggap datang untuk berevangelisasi sambil membicarakan pemisahan diri Kristen Simalungun dari HKBP.*¹⁵¹

Meski mendapat hambatan dari pihak HKBP, secara umum Kongsi Laita diterima dengan baik. Pada 1941 mereka mengutus tenaga penginjil yang mendapat honorarium ke daerah pedalaman Simalungun. Menunjang pekerjaan ini, pada 1934 dibentuk pula "Saksi ni Kristoes" dari guru-guru Simalungun yang menyisihkan 1 (satu) persen gajinya untuk zending Batak Simalungun.¹⁵² Pada 1941 mereka mampu membiayai Kenan Saragih dan Johansen Purba menjadi guru di Dolog Silou dan Panduman. Upaya penginjilan ini masih berlanjut terus dengan dibentuknya PSK (*Parguru Saksi ni Kristus*) pada 1942 yang rutin melakukan kursus bagi para penginjil awam di bawah bimbingan pendeta-pendeta orang Simalungun dalam rangka mengabarkan Injil kepada orang Simalungun. Menggambarkan kemajuan penginjilan dengan pengerja Simalungun ini, Hoekema berkomentar atas perlawanan J. Wismar Saragih terhadap RMG (yang secara pragmatis melihat Simalungun bagian dari distrik Batak Toba), "Pada akhirnya Saragih berhasil meyakinkan pimpinan gereja bahwa perlawanannya terhadap usaha "tobanisasi" mutlak diperlukan bagi pemberitaan Injil".¹⁵³ Dan berkaitan dengan pendekatan budaya Simalungun ini, Martin L. Sinaga menyimpulkan, "Jadi, gerakan pengabaran Injil di dalam dunia etniklah yang menjadi *raison d'être* gereja Simalungun".¹⁵⁴ Gereja Simalungun lahir dari semangat penginjilan kaum Simalungun memenangkan orang Simalungun dengan semangat mandiri dengan menekankan bahwa tugas penginjilan merupakan tugas seluruh orang Kristen Simalungun tanpa terkecuali.

Dalam rangka itu pula perjuangan orang Simalungun selangkah demi selangkah memperoleh kemajuan.

Setelah J. Wismar Saragih ditahbiskan Ephorus HKBP J. Warneck pada 15 Desember 1929 menjadi pendeta di gereja HKBP Simanungkalit Tapanuli ¹⁵⁵ (pendeta pertama orang Simalungun), semakin besarlah semangat orang Simalungun menerima agama Kristen dengan perantaraan pengerja Simalungun ini. Sukacita orang Kristen Simalungun bertambah dengan hadirnya terjemahan Injil Lukas yang dikerjakan Pdt. J. Wismar Saragih dalam bahasa Simalungun. Buku ini diterbitkan pada 1939 dengan bantuan Dr. P. Voorhoeve dan Lembaga Alkitab Belanda dan Inggris.¹⁵⁶ Hadirnya terjemahan Injil ini ke dalam bahasa Simalungun, dirasakan orang Simalungun sebagai suatu anugerah yang besar bagi orang Simalungun agar lebih giat lagi mengabarkan Injil. Pdt. J. Wismar Saragih dalam sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, adalah "satu-satunya orang Indonesia yang atas prakarsa sendiri membuat terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa ibunya".¹⁵⁷ Untuk kegigihannya ini, J. L. Swellengrebel menggelarnya sebagai "Luther dari Simalungun", karena sama seperti Luther di abad pertengahan yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Wismar berbuat serupa untuk terjemahan Alkitab dalam bahasa Simalungun atas inisiatif sendiri. Ini berbeda dengan penerjemahan Alkitab bahasa Toba dan Karo yang sepenuhnya dilakukan atas inisiatif dan dukungan dari zendeling Eropa (Jerman dan Belanda). Usaha penerjemahan dilakukan sendiri oleh kaum Kristen Simalungun mengingat tidak ada upaya zendeling Jerman mengusahakan terjemahan Alkitab Simalungun. Penerjemahan yang telah dirintis G. K. Simon pada 1904 di Bandar tidak berkelanjutan. Kaum Kristen Simalungun harus

mengambil alih tugas itu dalam rangka menyediakan Alkitab sebagai dasar dan alat pekabaran Injil kepada orang-orang Simalungun.

C. HKBP-S Menjadi GKPS

Sejak tahun 1930-an, makin banyak orang Kristen Simalungun di Pematangsiantar bekerja dan menetap di kota ini. Pejabat pemerintah Jaudin Saragih tokoh Kristen Simalungun meminta agar diadakan kebaktian minggu dalam bahasa Simalungun (1933). Sekitar 30-40 warga Kristen Simalungun telah mengadakan kebaktian minggu di Gereja HKBP Pematang Siantar (Kampung Kristen) dalam bahasa Simalungun dipimpin Williamer Saragih.¹⁵⁹ Selanjutnya orang Kristen Simalungun meminta agar seorang Kristen Simalungun jadi anggota Majelis Pusat HKBP. Karena tuntutananya tidak juga digubris, orang Kristen Simalungun meminta distrik tersendiri buat mereka di Simalungun, namun lama sekali mendapat tanggapan dari HKBP.

Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya keinginan orang Kristen Simalungun disetujui, pada 26 September 1940 Pucuk Pimpinan HKBP di Pearaja Tarutung meresmikan jemaat-jemaat Simalungun di bawah satu distrik yang diberi nama Distrik HKBP Simalungun yang berkedudukan di Pamatang Raya.¹⁶⁰ Distrik itu terdiri dari empat resort yang membawahi 63 jemaat *filial* (cabang) dengan jumlah anggota jemaat sebanyak 7.994 orang pada akhir tahun 1940.¹⁶¹ Praeses pertama HKBP Distrik Simalungun adalah Ds. J. Mulywijk¹⁶² dari Kabanjahe mengungguli Pdt. Gustav Pasaribu, Pdt. Kerpanius Purba dan Pdt. J. Wismar Saragih dalam pemilihan suara. Meskipun HKBP Distrik Simalungun



Gambar 24. Pdt. J. Wismar Saragih (3 dari kiri) diapit Misionaris Vollmer dari Jerman dan pendeta generasi pertama berdirinya HKBP-Simalungun berpose di Kantor HKBP-S yang sangat sederhana di Pamatang Raya, 1952.
(Sumber: A. Munthe, August Theis, 1985)

meliputi daerah yang berbahasa Simalungun (*na marhata Simalungun*) tetapi tidak tertutup bagi orang Kristen Simalungun di luar ketiga daerah itu yang hendak bergabung termasuk di luar *Onderafdeeling Simeloengoen*.¹⁶³

Selanjutnya pada 10 Desember 1940 HKBP Distrik Simalungun bersidang dipimpin Praeses J. van Muylwijk dari Kabanjahe. Terpilih pengurus Distrik Simalungun yang terdiri dari: Pandita Onderdistrict, Pdt. J. Wismar Saragih (Pamatang Raya), Sekretaris, Gr. Friederich Damanik (Raya Usang), *Kerkbestuur*, Pdt. J. Wismar Saragih dan utusan ke Sinode Godang HKBP, Tuan Saoer Poerba.¹⁶⁴

Orang Kristen Simalungun tetap tidak puas dengan otonominya dalam HKBP Distrik Simalungun sebab mereka merasa diabaikan oleh HKBP. Di dalam Sinode Istimewa

HKBP Distrik Simalungun tanggal 5 Oktober 1952 di Pematang Raya mengumumkan berpisahya mereka dari HKBP dengan mendirikan organisasi bernama HKBP Simalungun (HKBP-S). Pdt. J. Wismar Saragih diangkat menjadi wakil ephorus HKBP-S dan Pdt. A. Wilmar Saragih sebagai sekretaris jenderal HKBP-S. HKBP sendiri yang pada waktu itu Pdt. Justin Sihombing sebagai Ephorus HKBP dan Pdt. G. H. M. Siahaan sebagai Sekjen HKBP kurang merespon keinginan orang Kristen Simalungun. Mereka bersikukuh dengan kesatuan HKBP sebagai satu-satunya Gereja Batak. Orang Kristen Simalungun tidak patah arang, perjuangan mereka sudah bulat harus memisahkan diri dari HKBP yang didominasi orang Kristen Batak Toba itu. Akhirnya HKBP memenuhi keinginan jemaat Kristen Simalungun dengan mengakui kemandirian jemaat-jemaat Kristen Simalungun. Pada tanggal 1 September 1963 tepat pada saat 60 tahun pekabaran Injil di antara suku Simalungun, naskah kemandirian ditandatangani kedua belah pihak disaksikan wakil dari pemerintah Indonesia Ds Marantika dan utusan dari gereja-gereja di luar negeri di gereja HKBP-S Jalan Mangga (sekarang Jl Sudirman) Pematangsiantar. Sejak itu HKBP dan gereja-gereja di seluruh Indonesia dan dunia mengakui berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) nama yang dipilih orang Kristen Simalungun untuk nama organisasi gerejawi mereka.¹⁶⁵ Pdt. Jenus Purbasiboro dipilih sebagai Ephorus Pertama GKPS dan Pdt. A. Wilmar Saragih sebagai Sekretaris Jenderal GKPS pertama. Pada saat itu jumlah warga GKPS sudah mencapai 120.000 umat di seluruh Indonesia.

Selain GKPS seiring masuknya aliran-aliran Kristen ke

Simalungun, sejak tahun 1930-an ke daerah ini sudah masuk pula aliran Pentakosta, Kharismatik, Adventis, Metodis dan lain-lain. Di Pematangsiantar berdiri HChB yang merupakan cikal bakal berdirinya gereja HKI (Huria Kristen Indonesia). Berhubung sejarah berdirinya HChB bermula di Simalungun, maka dalam buku ini perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai sejarah gereja ini yang berubah nama menjadi HKI (Huria Kristen Indonesia) berkantor pusat di Pematangsiantar.

d. Hoeria Christen Batak (HChB) Cikal Bakal HKI

Sesudah dibukanya arus migrasi pendatang dari Tapanuli ke Simalungun, makin besar angka kaum Kristen Batak Toba di Simalungun, khususnya di sekitar Siantar. Secara umum, orang Batak Toba Kristen ini diasuh oleh Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) badan zending Jerman yang berhasil mengkristen orang Batak di Sumatera.

Populasi kaum Kristen Batak Toba itu umumnya terkonsentrasi di daerah sekitar perkebunan yaitu di Tanah Jawa, Siantar dan Panei, tiga daerah kerajaan-kerajaan Simalungun yang dibuka Belanda sebagai daerah kapitalis perkebunan di Simalungun. Sejak munculnya semangat kebangsaan Indonesia pada tahun 1928, orang-orang Batak Kristen merasakan ketidakpuasan mereka diasuh oleh zending Jerman yang dianggap sama dengan penjajahan. Timbul keinginan orang Batak Kristen supaya mereka dapat mandiri dari pengasuhan badan zending Jerman. Di Simalungun perjuangan melepaskan diri dari kekuasaan tuan pandita Jerman (RMG) dicetuskan seorang terpelajar Batak Toba bernama Soetan Maloe Panggabean, sosok tokoh terkemuka di zamannya yang memiliki sawah yang

luas dan rumahnya yang dibangunnya dengan meniru arsitektur rumah panggung bangsawan Melayu di Pantoan Dolog Marlawan Siantar.¹⁶⁶ Dia mendirikan Hoeria Christen Batak (HChB) mewadahi perjuangan gerakan nasionalisme orang-orang Batak Toba Kristen yang resmi mengumumkan perpisahannya dengan RMG pada tanggal 1 Mei 1927. Pemerintah Hindia Belanda terkejut dengan keberanian Sutan Malu ini. Pada tanggal 30 April 1937 dia dipanggil oleh Adviseur Gubernur Jenderal dari Bogor ke rumah Asisten Residen Simalungun dan Tanah Karo di Pematangsiantar. Atas pertanyaan pejabat kolonial yang mempertanyakan dasar pemisahannya dari zending Jerman, Sutan Malu menjawab bahwa pemisahan diri itu didasarkannya pada Alkitab yang tertulis dalam Yakobus 1:22 yang bunyinya: "Tetapi hendaklah kamu menjadi penurut pengajaran itu, bukannya orang yang mendengar sahaja dengan memperdayakan dirinya sendiri." Mendengar jawaban pendiri HChB yang memisahkan dirinya dari asuhan zending Jerman itu, pemerintah kolonial tidak keberatan atas berdirinya HChB. Keesokan harinya tanggal 1 Mei 1937 para pejabat pemerintah, yakni, Asisten Residen dari Bogor, *Adviseur Gezaken* dari Jakarta, Asisten Residen Simalungun menghadiri pendirian "*Vereniging Hoeria Christen Batak*" di Pantoan Dolog Marlawan Siantar di rumah kediaman Soetan Maloe Panggabean. Ketiga tamu pemerintah ini dalam kata sambutannya mengucapkan selamat, "Horas ma Hoeria Christen Batak".¹⁶⁷

Untuk memperkuat status HChB di depan pemerintah Hindia Belanda, maka sudah sejak awal HChB berupaya memperoleh badan hukum dari pemerintah. Pada bulan

April 1933 Sutan Malu Panggabean berangkat ke Jakarta menghadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda meminta pemerintah mengakui HChB sebagai "*rechtspersoon*" (badan hukum) di Hindia Belanda. Perjuangan Sutan Malu berhasil dengan diterimanya hak badan hukum resmi HChB oleh pemerintah Hindia Belanda dengan beslit nomor 29 tanggal 27 Mei 1933. Dengan demikian, HChB sejajar dengan HKBP yang baru memperoleh status itu tiga tahun sebelumnya. Pemerintah mengumumkan status HChB itu dalam surat kabar berbahasa Belanda *De Javaansche Courant* tanggal 9 Juni 1933 nomor 46. Atas pengakuan pemerintah, jemaat HChB merayakannya dengan meriah di Pematangsiantar sebagai pesta *recht-persoon* sepulangannya Sutan Malu dari Jakarta di awal bulan Juni. Nama *vereeniging* diubah menjadi *zendingsgenootschap* HChB sejajar dengan RMG/HKBP.¹⁶⁸

Tahun itu juga, HChB mendirikan sekolah-sekolah termasuk seminari untuk mendidik calon guru jemaat dan pendeta. Pada tahun 1933 jemaat HChB tersebar di seluruh Simalungun yaitu: Pantoan, Dolog Merangir, Sirpangdua (Sawah), Baris, Sirapu, Pematangsiantar, Pematang Tanoh Jawa, Muara Mulia, Bosar Galugur, Raja Hombang, Bangun Putih, Huta Bayu, Nagojor, Jawa Tengah, Hatonduhan, Balata, Dolog Marlawan, Saribu Jawa, Dolog Maraja, Dolog Panribuan, Bukit Hataran dan Siborna (Bahal Gajah). Jemaat HChB yang lahir di Pantoan Dolog Marlawan (Siantar) pada tahun 1933 meliputi 2140 orang anggota jemaat, 372 murid sekolah dan 14 orang guru.¹⁶⁹ Pada tahun 1937 pertumbuhan jemaat-jemaat HChB yang pesat itu mengundang perpecahan di antara kelompok Sutan

Malu Panggabean dan A. Hutabarat yang adalah pamong pemerintah swapraja (pangulu/kepala desa) di Sirpang Dua (Panei) yang saling berebut pimpinan gereja. Perebutan jabatan ketua umum HChB (*voorzitter hoofdbestuur*) antara kelompok Sutan Malu dan A. Hutabarat memuncak pada tahun 1935. Untuk menyelesaikan kemelut, maka diadakanlah sinode luar biasa pada tanggal 1 Juli 1935 di Deli Bioscoop Pematangsiantar. Kemelut ini rupanya menggelisahkan pemerintah, terbukti dengan dihadapkannya seorang kepala polisi dengan pasukannya mengawal sinode tersebut. Sinode tidak berhasil menemukan kata sepakat di antara keduanya. Pemerintah lalu mengancam HChB jika tidak ada perdamaian, status badan hukumnya bisa dicabut. Kuatir dengan ancaman pemerintah ini, kedua pihak yang bertikai terpaksa berdamai. Namun kemelut belum selesai, sinode tahun 1937 memenangkan Sutan Malu sebagai ketua dan kelompok Hutabarat dimasukkan ke dalam *Hoofdbestuur* atas permintaan Mr. Dirkzwager seorang pejabat pemerintah di Siantar.

Konflik belum usai juga, setelah Indonesia merdeka, HChB yang dikenal sebagai gerakan nasionalisme Kristen di Indonesia mengikuti gerakan Sarekat Islam kembali pecah pada Sinode yang diadakan sepihak di Patane Porsea (16-17 Nopember 1946). Sinode yang tidak dihadiri Ketua Umum HChB Sutan Malu Panggabean dinilai liar oleh pengurus pusat di Pematangsiantar. Meski disebut liar, Sinode HChB di Porsea resmi mengubah namanya menjadi Hoeria Kristen Indonesia (HKI) menyesuaikan nama gereja itu dengan semangat nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Sinode memilih Pdt. J. T. Sitorus sebagai Ketua Umum HKI.

Perubahan nama ini ditentang oleh pendiri HChB Sutan Malu Panggabean dan pimpinan HChB di Pematangsiantar bersikukuh menilai sinode di Patane Porsea itu tidak sah sebab melanggar Anggaran Dasar HChB. Mereka memperjuangkan kepada pemerintah hak-hak HChB dan merubah nama HChB menjadi Hoeria Christen Batak (HCB) dalam sinode tahun 1950 di Pantoan Pematangsiantar.¹⁷⁰

Atas berdirinya HKI, Sutan Malu Panggabean menggugat HKI ke pengadilan atas harta milik, gedung gereja dan kantor pusat HKI di Pematangsiantar sebagai milik HCB. Gugatan Sutan Malu Panggabean dikalahkan pengadilan. Berangsur-angsur seiring perjalanan waktu, HCB tidak lama bertahan, jemaat-jemaat HChB yang semula mendukung Sutan Malu Panggabean bergabung dengan HKI. Akhirnya HCB hapus berhubung jemaatnya seluruhnya menggabungkan dirinya ke HKI. Pematangsiantar selaku pusat kedudukan kantor pusat HKI tetap dipertahankan dengan alasan historis berdirinya HKI, walaupun sejak tahun 1946 jemaat-jemaat HKI sudah lebih besar di Tapanuli daripada di Simalungun.¹⁷¹ Kini jemaat HKI sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan anggota jemaat 250.000 anggota.

D. Katolik Roma

Sebelum tahun 1930 Gereja Katolik belum masuk ke Simalungun, walaupun jauh sebelumnya sejak tahun 1878 dan 1884 umat Katolik Eropa di Sumatera Timur sudah dikunjungi oleh pastor-pastor Jesuit seperti Wennecker, SJ yang rajin mempelajari bahasa Batak dan Keling dalam rangka persiapannya menggarap orang Batak dan India

Tamil yang bekerja di perkebunan tembakau di Deli.

Pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu melarang *dobel zending* di Indonesia sesuai Buku Hukum Hindia Belanda pasal 123 dan pasal 177. RMG yang sudah sejak 1861 bekerja di Tanah Batak memperoleh hak bekerja antara orang Batak, sedangkan Gereja Katolik pada masa itu masih dilarang berkarya di antara orang Batak, meskipun sudah sejak masuknya pastor-pastor Kapusin di Medan, ada keinginan orang Batak sendiri untuk masuk Gereja Katolik. Atas kegigihan pihak Katolik, akhirnya izin bekerja diberikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 di Sibolga Tapanuli Tengah dan pada tanggal 3 Juli 1931 Pastor Aurelius Kerkers memulai pekerjaannya di Pematangsiantar. Di kota ini Kerkers bekerja di antara orang Batak Toba dan Simalungun yang pada masa itu sudah bergama Kristen Protestan sebagai hasil pekerjaan zending RMG. Sejak itu upaya Gereja Katolik meraih pengikutnya di Simalungun semakin berhasil. Di perkebunan Laras didirikanlah stasi pertama buat orang Batak Katolik. Kenan Hutabarat diangkat sebagai katekis tetap yang rutin mengunjungi umat Katolik di daerah ini.¹⁷²

Gereja Protestan dalam hal ini RMG memandang Katolik sebagai ancaman pada awalnya. Apalagi setelah tahun 1931 umat Katolik dari orang Batak semakin banyak seperti di Sawahdua-Panei (1936) dan SaribuDolog (1938). Sekolah-sekolah Katolik dan klinik yang mereka dirikan menjadi penarik yang kuat dari orang Batak masuk agama Katolik. Pastor Elpidius van Duijnhoven yang oleh penduduk lokal dinamai "*Ompung Dolog*" sangat menarik perhatian orang Simalungun khususnya di Simalungun Atas untuk



Gambar 25. *Pastor van Duijnhoven (pakai topi bulat) bersama pejabat Kolonial Belanda saat peresmian gereja Katolik Pamatang Purba, 1937.*
(Sumber: kitlv.nl)

masuk agama Katolik karena keramahan dan adaptasinya dengan penduduk setempat. Setahun sebelumnya di Pamatangraya Gereja Katolik memulai perkerjaannya (1937) dan kehadirannya di jantung misi Protestantisme RMG merisaukan pendeta-pendeta Protestan. Untuk melawan Katolik, pihak Protestan membagikan selebaran-selebaran menentang Katolik; pertemuan-pertemuan para penatua Protestan pun diadakan untuk menjelaskan perlawanan Protestan terhadap Katolik. Gabriel seorang misionaris Protestan menyusun selebaran khusus melawan Katolik yang diberi judul dalam bahasa Simalungun: *Dalan Parsaoran Hubani Naibata Mangihutkon Podah ni Roma Katolik pakon Protestan* (Jalan Pertemuan dengan Tuhan Allah Menurut Ajaran Roma Katolik dan Protestan). Tetapi arus konversi orang Protestan ke Katolik makin deras, khususnya di sekitar

perkebunan di antara perantau kaum Batak Toba Kristen dan Simalungun di Simalungun Bawah. Sementara itu arus pertumbuhan agama Katolik perlahan-lahan semakin maju di basisnya orang Simalungun Protestan di Simalungun Atas, terutama di daerah Purba dan Silimakuta. Apalagi sesudah menetapnya Pastor Duijnhoven¹⁷³ di Saribudolog pada tahun 1939 dengan dibantu katekis Petrus Datubara mantan penatua HKBP yang berasal dari Lau Baleng Tanah Karo.¹⁷⁴ Sekarang umat Katolik bisa dengan mudah ditemui di Simalungun Atas di samping umat Protestan yang mayoritas di samping umat Islam tentunya yang populasinya lebih sedikit dibanding umat Katolik. Bahasa gerejawi yang pada awalnya berbahasa Batak Toba sejak tahun 1990-an sudah digantikan dengan bahasa Simalungun khusus di jemaat-jemaat Katolik yang kebanyakan umatnya orang Simalungun, terutama di Simalungun Atas yang mayoritas penganut Katolik adalah suku Simalungun asli. Kidung dan liturgi gerejawi pun banyak diadopsi dari unsur budaya Simalungun; pun arsitektur gereja disesuaikan dengan corak bangunan tradisional Simalungun seperti gereja Katolik di Simpang Hinalang dan Pamatang Purba. Akhir-akhir ini pastor dari kalangan suku Simalungun pun sudah semakin banyak mengabdikan dirinya untuk melayani umat Gereja Katolik.

Catatan

¹ Ph. O. L. Tobing, *The Structure of the Toba Batak Belief in the High God* (Amsterdam: Jacob van Campen, cet. ke-2, 1963), hlm. 30.

² Josep Sipayung, *Pustaka Ahar Mulajadi*, manuskrip tulisan tangan, Pematangsiantar, 1980.

³ J. Jahiram Sinaga, "Upacara Kematian dan Ziarah—Sebuah Kajian Kasus Budaya Simalungun dalam Kehidupan Kristiani", dalam J. R. Sipayung, *Perjumpaan Injil dan Budaya Simalungun* (Jakarta, 2002), hlm. 41.

⁴ Tichelman, *Islam in Simeloengoen* (Pematangsiantar, 1937), hlm. 4-5.

⁵ R. W. Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration* (Yale University, 1970), hlm. 37

⁶ "Pardalanan ni Evangelist" dalam: *Immanuel No. 8/Agustus 1901/Thn. XII*, hlm. 2-4.

⁷ Jan S. Aritonang, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 199.

⁸ A. Munthe, "Bonani Jubileum Haranggaol" dalam: *Jubileum 80 Tahun GKPS Haranggaol, 3 Maret 1906-1986* (Haranggaol: Panitia Jubileum, 1986), hlm. 16.

⁹ Kepercayaan suku Simalungun pra zending, raja-raja dan keluarganya (laki-laki) disebut "tuhan" karena dianggap sebagai keturunan dewa. Istilah itu masih dipertahankan penulis-penulis Belanda, seperti J. Tideman dalam karyanya yang sudah kerap disinggung. Istilah itu mengalami perubahan menjadi "tuan" setelah dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda (Westenberg) dan masuknya paham agama Islam dan Kristen ke Simalungun. Wawancara dengan Harto Juwono, Agustus 2008 di PamatangSiantar dan Tuan Djariaman Damanik di Medan.

¹⁰ Lihat juga J. T. Nommensen, *Ompui...*, hlm. 187.

¹¹ A. Munthe, "Bona ni...", hlm. 17.

¹² Bnd. Paul B. Pedersen, *op. cit.*, hlm. 104.

¹³ J. T. Nommensen, *op. cit.*, hlm., 187.

¹⁴Pasukan Tuhan Rondahaim tercatat ada empat kali menyerang daerah kekuasaan tuhan Purba. Dalam serangan itu, banyak rakyat Purba yang tewas dan mengungsi. Lihat J. Wismar Saragih, "Baritani Tuan Rondahaim" dalam: Mansen Purba, op. cit., hlm. 182-3.

¹⁵Lihat J. Tideman, op. cit., p. 40.

¹⁶"Pardalanan ni Dua Evangelist" dalam: Immanuel No. 12/Desember 1901/Thn. XII, hlm. 7.

¹⁷Martin Lukito Sinaga, Identitas..., hlm. 69-71.

¹⁸Lihat, Aqib Suminto, op. cit., hlm. 190.

¹⁹C. J. Westenberg, "Nota over de Onafhankelijk Bataklanden", in Overgedrukt van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkekunde, deel XXXIV (Batavia: Albrecht en Rusche, 1890), pp. 5-14.

²⁰J. Tideman, Simeloengoen..., p. 40-1.

²¹Pimpinan Pusat GKPS, 60 Tahun Injil Kristus..., hlm. 10-1.

²²Lihat P. A. L. E. van Dijk, op. cit., pp. 166-7.

²³Pan Djaporman, "Tole", dalam: Sinalsal No. 5/Agustus 1931/Thn. I, hlm. 6.

²⁴Paul B. Pedersen, op. cit., hlm. 101.

²⁵Bregenstroth, "De Rijnsche...", p. 1.

²⁶Ibid., p. 2

²⁷A. Munthe, Pandita August Theis: Missionar Voller Hoffnung (PematangSiantar: Kolportase GKPS, 1987), hlm. 8.

²⁸Bregenstroth, "De Rijnsche...", p. 2.

²⁹Ibid.

³⁰Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan..., hlm. 111-5. RMG sudah mengalami pengalaman yang pahit dalam kristenisasi masyarakat Tapanuli Selatan, Simon Siregar yang dibaptis pada 1861 berbalik melawan zending setelah ia murtad dari Kristen dan memeluk agama Islam.

³¹Theodorus Kobong, Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 126-7.

³²Bregenstroth, "De Rijnsche...", p. 3

³³Kenyataan seperti ini juga dialami masyarakat Batak Toba di daerah Tapanuli Utara, lihat Jan S. Aritonang, Sejarah Pendidikan..., hlm. 157.

³⁴J. Tideman, Simeloengoen..., p. 40.

³⁵Jahutar Damanik, Jalannya Hukum Adat Simalungun (Medan, 1974), hlm.

44.

³⁶T. B. A. Purba, *Sejarah Keturunan Silou (PamatangSiantar, 1967)*, hlm.

28.

³⁷J. Tideman, *Simeloengoen...*, p. 46.

³⁸W. H. M. Schadee, *De Uitbreiding van Ons Gezag in de Bataklanden.*

Uitgaven van het Bataksch Instituut No. 19 (Leiden: S. C. van Doesburgh, 1920), p. 18.

³⁹*Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁰Rita Kipp Smith, *The Early...*, p. 212-3.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 197.

⁴²*Ibid.*, hlm. 220.

⁴³P. Sinuraya, *Diakonia GBKP: Sejarah Pelayanan Diakonia NZG di Tanah Karo, 1890-1940 (Medan: Percetakan Merga Silima, 1997)*, hlm. 25.

⁴⁴Erwiza Erman, "Pemberontakan Sunggal 1872 di Deli—Jawaban terhadap Perubahan Sosial" dalam: *Masyarakat Indonesia No. 1 Tahun XII (Jakarta: LIPI, 1985)*, hlm. 55ff.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 224.

⁴⁶Paul B. Pedersen, *Darah...*, hlm. 102.

⁴⁷E. St. Harahap, *op. cit.*, hlm. 37.

⁴⁸Pesta Jubileum 75 Tahun GKPS SaribuDolog (6 September 1909-6 September 1984), hlm. 15.

⁴⁹Bregenstroth, "De Rijnsche...", hlm. 3-4.

⁵⁰Taralamsyah Saragih, *Saragih Garingging (Medan, 1981)*, hlm. 24.

⁵¹J. Wismar Saragih, *Memorial...*, hlm. 25-6.

⁵²Sinalsal No. 31/Okttober 1933/Thn. II, hlm. 9-10.

⁵³B. Damanik, "Toeian Kapoltakan" dalam: *Sinalsal No. 25/ Februari 1933/Thn. III*, hlm. 9.

⁵⁴Pdt. J. Wismar Saragih, *Memorial...*, hlm. 34.

⁵⁵A. Munthe, *Pandita August Theis...*, hlm. 17.

⁵⁶Surat Tuan Taralamsyah Saragih..., hlm. 15.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁸A. Munthe, *Pandita August Theis...*, hlm. 17

⁵⁹J. Wismar Saragih, "Statistik ni Sikolah Zending na masoek bani beheerder Toeian Pandita na i Sariboe Dolog bani boelan Juli 1932" dalam:

Sinalsal No. 21/Desember 1932/Thn. II, hlm. 7.

⁶⁰Ch. D. Tappenbeck, August Theis” dalam Jubileum 75 Tahun 2 September 1903-1978 GKPS (PamatangSiantar: Kolportase GKPS, 1978), hlm. 36.

⁶¹J. Tideman, Simeloengoen..., pp. 42-43.

⁶²Tuan Djariaman Damanik, wawancara, 23 Juli 2008 di Medan.

⁶³Djoko Marihandono dan Harto Juwono, “Dominasi..., hlm. 10.

⁶⁴Ibid., hlm. 11-7.

⁶⁵Ibid, hlm. 17

⁶⁶Harto Juwono berdasarkan surat yang ditandatangani Raja Sang Nualuh berpendapat bahwa raja Sang Nualuh sudah lama masuk Islam, mungkin di sekitar tahun 1887, karena raja Siantar sudah memakai tahun Hijriah dalam surat-suratnya dengan Belanda. Wawancara dengan Harto Juwono di PamatangSiantar, Agustus 2008.

⁶⁷M. D. Purba, Mengenal..., hlm. 50.

⁶⁸Ibid., hlm. 21.

⁶⁹Ibid., hlm. 17.

⁷⁰Ibid., hlm. 21.

⁷¹Jan S. Aritonang, Sejarah Pendidikan..., hlm. 205.

⁷²Martin Lukito Sinaga, Identitas..., hlm. 69.

⁷³A. A. Sitompul, Perintis Kekristenan di Sumatera Bagian Utara (terj) Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 154.

⁷⁴J. Tideman, Simeloengoen..., p. 276.

⁷⁵Sejarah HKBP PamatangSiantar..., hlm. 36.

⁷⁶J. R. Hutaaruk, Kemandirian..., hlm. 158.

⁷⁷Sejarah HKBP PamatangSiantar..., hlm. 38.

⁷⁸Tuan Kaliasan Damanik, wawancara, 8 Oktober 2008 di Pamatang Bandar.

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Karena marga orang Simalungun hanya empat: Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba, maka pendatang Batak Toba menyesuaikan marganya dengan marga Simalungun yang ada—meskipun dengan penyesuaian itu sudah menyimpang dari kebiasaan di Toba—di antaranya marga Tambunan menjadi marga Sinaga Tambunan, marga Sitorus menjadi marga Purba Sitorus, marga Sitepu menjadi marga Sinaga Sitopu, marga Silalahi menjadi marga Sinaga

Silalahi. Menurut Tuan Kaliasan Damanik, jika tidak demikian, maka pendatang itu tidak dapat menetap di Simalungun dan mendapat tanah dari pangulu atau partuhanon di kampung yang dikunjunginya.

⁸¹Menurut Tuan Kaliasan Damanik, sebelum Revolusi Sosial, hampir seluruh orang Toba di Pamatang Bandar mengaku dirinya orang Simalungun dengan menyesuaikan marganya dengan marga yang ada di Simalungun, beradat dan berbahasa Simalungun, serta sebagian beralih menjadi Islam, tetapi setelah pecah Revolusi Sosial (3 Maret 1946), mereka kembali ke suku dan agamanya semula. Wawancara 8 Oktober 2008 di Pamatang Bandar.

⁸²Atin Saragih, wawancara di Pamatang Bandar, 8 Oktober 2008.

⁸³Muhammad Syukur Purba, wawancara di Pamatang Bandar, 8 Oktober 2008. Beliau adalah pengurus Muhammadiyah di daerah ini.

⁸⁴Ibid.

⁸⁵M. D. Purba, Mengenal..., hlm, 54.

⁸⁶Justin Sihombing, Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestant, 1861-1961 (Medan: Philemon & Liberty, 1961), hlm. 55.

⁸⁷Pucuk Pimpinan HKBP Simalungun, op. cit., hlm. 122.

⁸⁸Ibid., hlm. 119.

⁸⁹Tengku Luckman Sinar, Bangun..., hlm. 415.

⁹⁰J. T. Nommensen, op. cit., hlm. 194.

⁹¹Ibid., hlm. 201.

⁹²Ibid.

⁹³Barita ni Pandita Samuel Panggabean (naskah tulisan tangan, t. t.). Arsip Perpustakaan STT HKBP PamatangSiantar, hlm. 56.

⁹⁴Pesta Jubileum 75 Tahun GKPS SaribuDolog..., hlm. 15.

⁹⁵Paul B. Pedersen, op. cit., hlm. 104.

⁹⁶Martin Lukito Sinaga, Identitas..., hlm. 82.

⁹⁷Sejarah Pardongni Kuria GKPS Kinalang (naskah tulisan tangan, t. t.), hlm. 3-4.

⁹⁸Bregenstroth, "De Rijnsche...", hlm. 10.

⁹⁹A. Munthe, Pandita..., hlm. 13.

¹⁰⁰Baritani Pandita Samuel Panggabean..., hlm. 53.

¹⁰¹J. B. Saragih, Sejarah GKPS Sondi Raya (Sondi Raya, t.t.), hlm. 12.

¹⁰²Pimpinan Pusat GKPS, The Simalungun Protestant..., hlm. 18-20.

¹⁰³Pesta Jubileum 75 Tahun GKPS SaribuDolog..., hlm. 15.

¹⁰⁴Ibid., hlm. 16-7.

¹⁰⁵Pimpinan Pusat GKPS, 60 Tahun Indjil Kristus..., hlm. 11-18 dan 23.

¹⁰⁶Th. van den End dan J. Weitjens, Ragi Carita 2..., hlm. 197. Van den End menambahkan, "Di samping watak orang Simalungun yang tidak seasyik orang Toba menempuh jalan modernisasi".

¹⁰⁷Martin Lukito Sinaga, Identitas..., hlm. 65.

¹⁰⁸Sebagai contoh, kata "ho" (kamu) ada dalam kosakata Simalungun dan Toba. Dalam bahasa Batak Toba, "ho" dapat dipakai selain untuk orang yang lebih tua juga ketika berdoa kepada Tuhan. Bagi orang Simalungun, hal ini dianggap tidak sopan (impolite) dan kasar (disrespectful). Untuk ini orang Simalungun menyediakan kata "ham" untuk orang ketiga tunggal dan "nasiam" untuk orang ketiga jamak. Lihat Pimpinan Pusat GKPS, The Simalungun Protestant..., p. 21. Bnd. Komentar dalam buku sejarah GKPS SaribuDolog, "Halani hata Toba do ipakei i Gereja, tarlobih halani adong piga-piga humbani bahasa on naso bulih hatahonon ibagas sahap Simalungun, gabe mahol marsiarusan", lihat Pesta Jubileum 75 Tahun GKPS SaribuDolog..., hlm. 15.

¹⁰⁹A. G. Hoekema, op. cit., hlm. 154-156.

¹¹⁰A. Munthe, Pandita August Theis..., hlm. 43.

¹¹¹"Stereotip mengenai suatu sukubangsa itu muncul dari pengalaman seseorang atau sejumlah orang yang menjadi anggota sebuah sukubangsa dalam berhubungan dengan para pelaku dari sesuatu sukubangsa tersebut. Dari sejumlah pengalaman yang terbatas, yang dipahami dengan mengacu pada kebudayaannya, maka pengalaman tersebut menjadi pengetahuan", demikian penjelasan Parsudi Suparlan, Hubungan Antar sukubangsa (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004), hlm. 25.

¹¹²J. L. Swellengrebel, Mengikuti Jejak Leijdecker.... (jilid 2), hlm. 185.

¹¹³J. Wismar Saragih, "Partoeboeh ampa Pargoeloehon ni Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen Ibagas 10 Tahoen na Salpoe" dalam: Sinalsa No. 90/September 1937/Thn. VIII, hlm. 4.

¹¹⁴Istilah "toba" dalam pemahaman Simalungun tradisional berarti "buruh" yang bekerja pada seorang tuan tanah Simalungun. Sampai hari ini istilah itu masih hidup di Simalungun Atas, apabila ada sekelompok pekerja (buruh tani) datang dari Samosir mereka disebut "toba". Bila disebut "patobahon" berarti

mempekerjakan orang dari Samosir pada tuan tanah Simalungun. Dengan demikian dapat dipahami keengganan kaum elit Simalungun menerima Injil lewat penginjil-penginjil Toba yang dianggap rendah.

¹¹⁵W. D. P. S., "Mamongkot Garedja Raja Oesang" dalam: *Sinalsals* No. 56/November 1935/Thn. V, hlm. 3

¹¹⁶Injil Yohanes itu diberi judul dalam bahasa dan aksara Batak di atasnya disusul judul dalam bahasa Inggris: *The Gospel according to St. John, Translated out of the Original Greek into Batta (Toba), The Language of the Batta in The Island of Sumatra*. Dicitak oleh Roelofzen & Hubner tahun 1894 di Negeri Belanda.

¹¹⁷J. L. Swellengrebel, *Mengikuti Jejak Leijdecker*, jilid 1..., hlm.162-3

¹¹⁸Pimpinan Pusat GKPS, *The Simalungun Protestant...*, hlm. 20.

¹¹⁹E. St. Harahap, *Hikajat Perdjalanannya Indil Ditanah Batak, 1861-7-10-1936* (tp., t.t.), hlm. 35-6; juga Justin Sihombing, *Saratus Taon HKBP...*, hlm. 55.

¹²⁰J. R. Hutauruk, "Sejarah Pengabaran Injil Sampai Tahun 1931 di Tanah Batak" dalam *Hidup dalam Kristus II. Penataran Pelayan-pelayan Gereja (P3G), PamatangSiantar 6 Juli-19 Agustus 1981*. Diterbitkan oleh Dewan Gereja Indonesia di Wilayah Sumut-Aceh dalam *Kerjasama Dengan Departemen Pembinaan dan Pendidikan DGI*, hlm. 51; juga J. L. Swellengrebel, *Mengikuti Jejak Leijdecker...* (jilid 2), hlm. 183.

¹²¹Justin Sihombing, *Saratus Taon HKBP...*, hlm. 56.

¹²²Martin Lukito Sinaga, *Identitas...*, hlm. 73-4.

¹²³"Hikajat dan Oesaha dari Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen di PamatangRaja dari tahoen 1928-1934" dalam: *Sinalsals* No. 48/Maret 1935/Tahun V, hlm. 6-7.

¹²⁴J. Wismar Saragih, "Partoeboeh", hlm. 2-3. Lihat juga laporan pengurus Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen kepada Toeane Controleur Simalungun dalam: *Sinalsals* No. 48/Maret 1935/Thn. V, hlm. 6-10.

¹²⁵F. M. Witteborg, Herman Vollmer, *ein Missionar unter den Simalungun-Batak* (Wuppertal-Barmen: Verlag der Rheinischen Missions, 1967), p. 19; Martin Lukito Sinaga, *Identitas...*, hlm. 68.

¹²⁶Pernah ditulis di *Deli Courant* yang terbit di Medan, jumlah suku Simalungun hanya 36.000 orang saja. Kemudian J. Wismar Saragih menyelidiki jumlah sesungguhnya suku Simalungun itu. Dalam *Susukkara* 1937 terdapat

87.696 orang suku Simalungun, terbanyak ada di Kerajaan Tanah Jawa (21.274 orang). Di Serdang = 10.016 orang dan di Padang Bedagai = 5.675 orang, total = 103,387 orang. J. Wismar Saragih, Memorial..., hlm. 29.

¹²⁷Ibid., hlm. 4.

¹²⁸J. L. Swellengrebel, Mengikuti Jejak Leidejker ... (jilid II), hlm.183.

¹²⁹J. Wismar Saragih, "Partoeboeh...", hlm. 4.

¹³⁰J. L. Swellengrebel, Mengikuti Jejak Leijdecker.... (jilid II), hlm. 191-2.

¹³¹Ibid., hlm. 193.

¹³²Ibid., hlm. 192. Pada tahun 1937, atas permintaan raja-raja

Simalungun (dalam rangka mematahkan tobanisasi itu) pemerintah mengirim seorang pakar bahasa Dr. Petrus Voorhoeve sebagai peneliti bahasa (taalambtenaar) Simalungun. Dia ditempatkan di Pamatang Raya yang disambut dengan sangat gembira oleh Pdt. J. Wismar Saragih yang menjadi rekan kerjanya. Bantuannya sangat berarti bagi kelangsungan perjuangan orang Simalungun dalam organisasi Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen. Lihat J. L. Swellengrebel, Mengikuti Jejak Leijdecker... (jilid II), hlm. 192.

¹³³Pucuk Pimpinan HKBP Simalungun, Jubileum 50 Tahun..., hlm. 142.

¹³⁴J. Wismar Saragih, "Partoeboeh...", hlm. 6.

¹³⁵Ibid., hlm. 8-9.

"¹³⁶Hata Horas-horas Bani Hordja ni Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 90/September 1931/Thn. VIII, hlm. 13.

¹³⁷Ibid., hlm. 143.

¹³⁸Het Bestuur, "Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen" na mamorloehon hamadjoen pakon Sahap Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 63/ Juni 1936/Tahun VI, hlm. 9-10.

¹³⁹"Bangsa ni Naibata do age halak Simaloengoen" Sinalsal No. 89/ Augustus 1938/Tahun VIII, hlm.3-4.

¹⁴⁰A. G. Hoekema, op. cit., hlm. 156.

¹⁴¹Ibid.

¹⁴²Th. Van den End dan J. Weitjens, Ragi Carita 2..., hlm. 197.

¹⁴³Apulman Saragih, "Gema Sinalsal: Suatu Tinjauan Historis-Theologis terhadap Majalah "Sinalsal" yang Terbit tahun 1931-1942 di Simalungun". Skripsi (Jakarta: STT Jakarta, 1977), hlm. 75.

¹⁴⁴J. Wismar Saragih, Memorial..., hlm. 120-121. Dalam otobiografinya,

J. Wismat menulis: "Setelah mereka sampai di Aek Nauli, mobil mereka berhenti di sebuah pemandangan yang terang ke daerah Simalungun. Pada waktu keadaan demikian dirasakan seolah-olah Tuhan bersuara kepada Pendeta Wismar yang mengatakan, "Itulah daerah Simalungun yang terhadapnya kamu mempunyai hutang!" Kemudian meneteslah air matanya, teringatlah dia jauh sebelumnya akan tuntutan yang mengatakan bahwa dia berhutang kepada orang Simalungun. Ia berdoa dalam hatinya mengatakan: "Berikanlah tenaga kepada saya ya Tuhan untuk membayar hutang saya. Amin". Peristiwa ini dalam perjalanan pulang J. Wismar Saragih ke Tanah Simalungun (Desember 1929).

¹⁴⁵Apulman Saragih, op. cit., hlm. 59.

¹⁴⁶Catatan menarik dari J. S. Aritonang bahwa dalam diri Warneck cita-cita Three-Self tidak cukup, kekristenan harus meresapi seluruh kehidupan seluruh bangsa. Missiologi Warneck berangkat dari pandangan tugas mission (Missionaufgabe) adalah pengkristenan bangsa-bangsa selengkapnya (Volkschristianisierung) sedangkan tujuan akhirnya (Missionsziel) adalah perwujudan gereja rakyat yang mandiri. Jadi bukan sekedar memenuhi cita-cita Tri-Mandiri (Three-Self) semata. Warneck banyak belajar dari Henry Venn dan Rufus, tokoh-tokoh pencetus Tri-Mandiri (Mandiri Menginjili, Mandiri Membiayai dan Mandiri Menatalayani). Lihat, Jan S. Aritonang, Sejarah Pendidikan..., hlm. 116 dan 147.

¹⁴⁷Jan Jahaman Damanik, "Sejarah 'Kongsi Laita' Tahun 1931: Arti dan Maknanya Bagi Gerakan Kekristenan Warga GKPS Dasawarsa ini" dalam: Ambilan pakon Barita GKPS No. 259/November 1995, hlm. 41.

¹⁴⁸Sada Ngawan ni Kongsi Laita, "Kongsi Laita i Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 72/Maret 1937/Thn. VII, hlm. 3.

¹⁴⁹Aslinya: "Anggo marsahap ham atap ija pakon hasomanmu ibagas lima minut, tarlobih naso siparugama ope, ningon isolotkon ham hatani Naibata". Lihat Pimpinan Pusat GKPS, 60 Tahun Injil Kristus di Simalungun, hlm. 62.

¹⁵⁰Paul B. Pedersen, op. cit., hlm. 105; juga "Kongsi Laita" PamatangRaja" dalam: Sinalsal No. 89/Augustus 1938/Thn. VIII, hlm. 11-2.

¹⁵¹Jonas Girsang, Sejarah Kongsi Laita (Manuskrip, Sondi Raya, t. t.), hlm. 6.

¹⁵²Sada Ngawan ni Saksi ni Kristoes, "Saksi ni Kristoes" dalam: Sinalsal No.72/Maret 1937/Thn. VII, hlm. 4.

¹⁵³A. G. Hoekema, op. cit., hlm. 155.

¹⁵⁴Martin Lukito Sinaga, op. cit., hlm. 89.

¹⁵⁵J. Wismar Saragih, Memorial..., hlm. 119.

¹⁵⁶J. Wismar Saragih, "Ambilan Na Madear Ev. Loekas, hata Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 96/Maret 1939/Tahun IX, hlm. 10-1.

¹⁵⁷J. L. Swelengrebel, Mengikuti Jejak Leijdecker... (jilid II), hlm. 197.

¹⁵⁸Ibid., hlm. 199.

¹⁵⁹Jubileum 75 Taon HKBP PematangSiantar..., hlm. 51.

¹⁶⁰Pan Djasmin Sipajoeng hoen NagoriDolog, "District Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 118.Januari 1941/Thn. XI, hlm. 5.

¹⁶¹T. R. K. A. Poerba, "Statistiek ni H. K. B. P. Simaloengoen bani oedjoeng ni tahoen 1940" dalam: Sinalsal No. 120/Maret 1941/Thn. XI, hlm. 7.

¹⁶²Dia merupakan pendeta Belanda yang bekerja di Kabanjahe. Perang Dunia II (1939-1945) melibatkan Jerman yang berhadapan dengan Belanda (bergabung dengan Sekutu/Amerika, Inggris). Setelah kejatuhan Belanda ke tangan Jerman (10 Mei 1940), tentara Belanda di Indonesia menangkap semua yang berkebangsaan Jerman tidak terkecuali para zendeling dan pengerja RMG di Tanah Batak. Zendeling berkebangsaan Belanda menggantikan zendeling Jerman yang ditangkap itu. Di antara zendeling Belanda yang terus melayani orang Kristen Batak adalah: de Kleine, Karelse, Krijkhoek dan Muijlwijk. Lihat, J. W. S., "Hoeria Kristen Batak Protestant (HKBP)" dalam: Sinalsal No. 111/Juni 1940/Thn. X, hlm. 3. Belum diketahui alasan yang pasti dari pengerja pribumi yang tidak memilih pribumi menjadi praeses Distrik Simalungun itu. Data mengenai hal itu juga belum penulis temukan. Padahal semangat kemandirian di kalangan kaum Kristen Simalungun pada waktu itu sangat besar. Mengenai internering zendeling Jerman lihat, J. S. Aritonang, Sejarah Pendidikan..., hlm. 365.

¹⁶³J. Wismar Saragih, "Koeria ni Kristen Simaloengoen na so masoek ope hoe District Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 116/November 1940/Thn. X, hlm. 6.

¹⁶⁴"Roenggoean ni Goeroe-goeroe, "District Simaloengoen" i Sariboedolog, ari 28 ronsi 30 April 1941" dalam: Sinalsal No. 123/Juni 1941/Tahun XI, hlm. 10.

¹⁶⁵Buku Panduan Jubileum 85 Tahun Injil di Simalungun (Pelpem GKPS Pematangsiantar, 4 September 1988), hlm. 28-29;

¹⁶⁶Rumah beliau itu masih ada di Kilometer 4 Jalan Asahan Dolog Marlawan Kecamatan Siantar Simalungun.

¹⁶⁷Walter Lempp, *Benih yang Tumbuh 12: Gereja-gereja di Sumatera Utara* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1976), hlm. 262-263.

¹⁶⁸Ibid. hlm. 264.

¹⁶⁹J. R. Hutauruk, *Kemandirian Gereja (terj.)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hlm.134-135.

¹⁷⁰Walter Lempp, *op. cit.*, hlm. 265.

¹⁷¹Bungaran Antonius Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba* (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 383.

¹⁷²Djasamen Saragih, *The Impact of Christianization in Simalungun, North Sumatra, 1903-1963*, tesis MA University of Sydney Australia, 1979, hlm. 65-71.

¹⁷³Pastor Elpidius van Duijnhoven lahir di Erp Belanda tanggal 7 Oktober 1906. Ditahbiskan imam Kapusin di Gereja Katolik pada usia 27 tahun (11 Maret 1933). Diutus ke Hindia Belanda tepatnya ke Pematangsiantar yang tiba di Belawan 6 Pebruari 1934. Bekerja bersama Pastor Aurelius Kerkers di antara orang Batak Toba di Pematangsiantar. Kemudian meluaskan jangkauan misinya ke Simalungun Atas setelah menerima izin dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935. Dia berkarya terus sampai tahun 1985. Pastor yang sederhana ini dikenang sebagai Ompung Dolog. Beliau meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1993. Biografi lengkapnya lihat Simon Saragih, *Elpidus van Duijnhoven: Oppung Dolok, Rasul dari Simalungun Atas* (Medan: Bina Media Perintis, 2014).

¹⁷⁴Benyamin Purba (ed.), *Omnibus Omnia: Biografi Mgr Pius Datubara, OFM Cap* (Medan: Bina Media Perintis, 2008), hlm. 20-28.

BAB VI

REVOLUSI KEMERDEKAAN (1945-1950)

A. Pendudukan Jepang

Pada tanggal 12 Maret 1942 pasukan Jepang mulai mendarat di Sumatera Timur¹. Sembilan hari kemudian, unit pasukan Jepang bergerak maju ke seluruh Sumatera Timur menduduki Pematang Siantar dan Parapat. Setelah itu masuk ke Tapanuli menduduki kota Balige, Tarutung, Sibolga dan Padang Sidempuan. Pasukan Belanda menyerah pada tanggal 29 Maret 1942.² Dua hari kemudian markas besar Angkatan Darat ke 25 Jepang di Singapura mengumumkan, bahwa *"punitive operation in the whole are of Northen Sumatera is completed..."*³



Gambar 28. Balatentara Jepang memasuki pantai Perupuk Tanjung Tiram Batubara, 1943. (Sumber: koleksi pribadi)

Setelah berhasil menguasai Sumatera, Jepang segera menyusun pemerintahan. Pulau Sumatera bersama sama dengan Semenanjung Malaya dan Singapura berada dibawah pemerintah Militer Tentara ke 25. Pusat pemerintahan militer berada di Singapura, dibawah pimpinan Letnan Jendral Tomoyuki Yamashita yang kemudian dikenal dengan Tomi Group (Tomi Syudan).⁴ Struktur pemerintahan untuk kawasan Sumatera dan Malaya adalah : Panglima Tentara., Kepala Staf, Pemerintahan Militer (*Guseikanbu*) yang terdiri dari beberapa departement yaitu Departement perusahaan dan Industril, Polisi, Kehakiman, Penerangan, Pemindahan dan pengiriman, Meteorologi, Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, dan Keuangan.⁵ Dalam struktur Pemerintahan militer (*Gunseikanbu*) pembagian struktur Pemerintahan Hindia Belanda masih tetap dipertahankan. Semua jabatan sipil dipegang oleh Militer, baik di pemerintahan maupun dalam pimpinan perusahaan dan perkebunan. Sumatera dijadikan satu propinsi yang berkedudukan di Bukit Tinggi.⁶

Simalungun dijadikan sebagai sebuah Gunseibu (Kabupaten) yang membawahi Gunco (kewedanaan), huku gunco (setingkat kecamatan), hanco (penghulu) huku hanco (kepala kampung) dan kumio hanco (kepala lorong). Jepang tidak menghapuskan sistem pemerintahan kerajaan. Raja-raja masih tetap berkuasa, namun berada dalam pengawasan militer Jepang dalam hal ini Gunco (bupati). Jepang masih memerlukan para penguasa pribumi ini untuk kepentingan memobilisasi masa dalam rangka memenuhi logistik militernya seperti tenaga romusya dan bahan makanan. Kumico hanco dan Huku hanco adalah pemerintahan ditingkat kampung yang dipilih oleh rakyat

dan bertugas untuk memantau pergerakan orang yang berada di kawasanya. Pada hakekatnya pemerintahan militer Jepang tidak mengubah secara mendasar sistem pemerintahan yang berlaku di Simalungun. Jepang hanya mengganti nama-nama lembaga pemerintahan itu dengan istilah Jepang dan memanfaatkan semua lembaga pemerintahan itu untuk kepentingan militer Jepang dalam menghadapi peranga melawan Sekutu di Asia Pasifik.

Masa pendudukan Jepang sejak 1942-1945 sebenarnya berjalan bersamaan dengan munculnya kesadaran akan zaman baru, terutama di kalangan kaum muda. Kesadaran baru ini disebabkan oleh perubahan sosial ekonomi dalam tiga dasawarsa sebelumnya, yang diakibatkan oleh dampak gabungan dari ekonomi kolonial dan meluasnya kesadaran nasionalisme Indonesia. Zaman Jepang menjadi penting dalam membantu mempercepat tersebarnya kesadaran nasional. Ia membawa perubahan radikal terhadap struktur masyarakat Sumatera Utara. Jepang sudah sejak awal pendudukannya telah memutuskan hubungan administratif dan politik antara Jawa dan Sumatera. Sampai bulan Mei 1943 Sumatera dan Malaysia merupakan suatu wilayah administratif. Sesudah itu Sumatera di perintah oleh sebuah pemerintahan militer dari kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat.

Jepang memasukan sejumlah besar kaum nasionalis baik yang radikal maupun moderat ke dalam sistem pemerintahannya dan membolehkan mereka menggunakan lembaga-lembaga resmi untuk propaganda politik dan mobilisasi massa. Pada tahun 1943, Jepang mulai mengatur strategi militernya untuk mengantisipasi serangan

balasan Sekutu. Untuk itu pada bulan Nopember Jepang membentuk Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia (BOEMPA). BOEMPA dimaksudkan untuk memobilisasi rakyat guna mendukung pemerintahan militer Jepang. Dengan cepat kaum nasionalis mendominasi BOEMPA seperti Mr. Muhammad Yusuf, Xarim M.S., Loeat Siregar, Dr. Pringadi, Adnan Nur Lubis dan lain-lain. Melalui BOEMPA mereka berhasil membakar semangat rakyat untuk berjuang mencapai kemerdekaan Indonesia.

Disamping itu Jepang juga membentuk Heiho yang berfungsi sebagai tentara pembantu pasukan regular Jepang dan Gyu-Gun yang berfungsi sebagai lasykar rakyat yang memiliki kemampuan untuk bertempur di lapangan. Bila Heiho terbatas pada peranan membantu membangun jembatan, jalan, kamp, benteng pertahanan, maka Gyu-Gun sudah dilengkapi dengan pakaian seragam militer Jepang. Gyu-Gun terdiri dari sejumlah unit-unit garnizun infantry di seluruh Sumatera. Beberapa ribu pemuda, banyak diantaranya yang berasal dari golongan rakyat biasa mendapat pendidikan militer. Pendidikan militer ini menekankan pada dasar-dasar etika militer Jepang tentang disiplin, semangat kesatria dan semangat anti Barat.⁷ Para pemuda inilah kemudian menjadi pelopor utama perjuangan menegakkan pemerintahan republik di Simalungun.

B. Berdirinya Pemerintahan Republik di Simalungun

Proklamasi adalah merupakan akhir dari sebuah kolonialisme, dan awal dari sebuah nasionalisme yaitu berdirinya sebuah negara nasional. Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dari Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kabar proklamasi ini tidak secepatnya dapat disebarkan di seluruh tanah air, disebabkan Jepang masih tetap berkuasa, sarana komunikasi sangat sulit dan terbatas sekali, serta yang menguasainya masih tentara pendudukan Jepang.

Utusan dari Sumatera yang turut duduk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah Mr. Teuku Muhammad Hassan, Mr. Abbas dan dr. Amir. Mereka ini dengan utusan dari berbagai wilayah tanah air di Jakarta secara bersama-sama telah merancang persiapan proklamasi sedemikian rupa. Kepada tokoh ini oleh pemerintah pusat ditugaskan untuk menyampaikan berita proklamasi tersebut ke daerah Sumatera.

Ketika Mr. Teuku Muhammad Hassan dan dr. Amir berada di Pematangsiantar dalam perjalanannya dari Jakarta - Medan melalui pengangkutan darat beliau singgah di kantor BOMPA Simalungun yang berada di Pematangsiantar. Mereka bermaksud menjumpai ketua BOMPA cabang Simalungun dr. Rooskandar, guna menyampaikan berita proklamasi itu. Ternyata ketua BOMPA dimaksud tidak berada di Pematangsiantar, dan yang berhasil ditemui adalah pengurus lainnya yaitu Azis Siregar, Burhanuddin, Kuncoro, dan Robinson Lumbantobing. Namun karena adanya keraguan terhadap orang-orang yang ditemui tersebut, maka berita proklamasi serta perkembangan terakhir di pusat tidak mereka jelaskan. Mereka hanya berbincang sebentar dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Medan.

Sesampainya di Medan mereka menemui masyarakat

dalam keadaan tegang dibawah ancaman dan pengawalan tentara Jepang yang sudah menyerah kepada Sekutu. Para pemimpin pergerakan kemerdekaan yang sudah mendengar berita proklamasi belum ada yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan proklamasi. Malahan sebahagian dari tokoh pergerakan nasional telah ada yang menyingkir ke pedalaman. Hal ini disebabkan karena adanya suara-suara sumbang yang bernada mengancam bagi mereka sedangkan suasana di Sumatera Timur umumnya masih kabur.

Dalam masyarakat dapat dikelompokkan adanya tiga pandangan politik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan RI 17-8-1945. Kelompok itu secara sederhana adalah : (1) Pihak tentara pendudukan Jepang yang masih berkuasa dimana mereka masih menunggu kehadiran tentara Sekutu yang nantinya akan menentukan nasib mereka. (2) Kelompok para raja-raja atau kaum bangsawan yang sebahagian besar menantikan kedatangan Belanda kembali untuk berkuasa, dan (3) Pihak Pergerakan Nasional yang sudah tidak sabar lagi menantikan komando untuk untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia di Sumatera Timur yang merupakan bagian dari Simalungun.

Pada tanggal 3 September 1945 Mr.Teuku Muhammad Hassan dan dr. Amir mengundang pemuka-pemuka Nasional untuk menjelaskan tentang keadaan dan perkembangan terakhir tentang proklamasi yang baru dicetuskan di Jakarta, serta apa yang harus dilakukan di Sumatera Timur. Tetapi akibat sebahagian daripada tokoh yang diundang tidak hadir maka pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Timur belum

terlaksana.

Rakyat Sumatera Timur yang sudah mendengar desas-desus kemerdekaan semakin terbakar semangatnya untuk menyambut dan merealisasikan kemerdekaan di daerahnya. Mereka itu terutama dari kaum pemuda yang lebih antusias dan mendengar maklumat-maklumat pemerintah pusat yang menganjurkan untuk tampil mendukung dan membela negara Indonesia yang telah diproklamasikan itu.

Para pemuda mulai mendesak Mr. Teuku Muhammad Hassan dan dr. Amir untuk tidak ragu-ragu bertindak dan mengambil inisiatif sebagai pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Timur. Suhu politik di kota Medan memanas, yang dibuktikan dengan adanya rapat para pemuda di Fuji Dori (Hotel Dirga Surya Saat ini). Mereka mendirikan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) pada tanggal 23 September 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan proklamasi di daerah Sumatera Timur. Dengan keberanian dan tekad pantang mundur maka pada tanggal 4 Oktober 1945 berkibarlah untuk pertamakalinya di alam kemerdekaan bendera Merah Putih bertempat di lapangan Fukuraido (sekarang lapangan merdeka) Medan.

Suhu politik masyarakat di daerah Simalungun makin hari makin menggeliat dan semakin bergelora setelah mengetahui situasi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dicetuskan. Berita proklamasi secara pasti telah diketahui utusan masyarakat Simalungun yaitu Abdullah Yusuf dan kawan-kawan yang kembali dari Medan mengikuti pertemuan yang dilaksanakan Mr. Teuku Muhammad Hassan dan dr. Amir. Segenap masyarakat telah siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan walaupun belum

mendapat instruksi tentang apa yang harus diperbuat.

Ditengah-tengah antusias masyarakat untuk mewujudkan proklamasi terdapat pula suara-suara sumbang yang datang darikalangan *ambtenar* (pegawai-pegawai Belanda pada masa kolonial), para raja-raja yang pro Belanda, serta orang-orang yang tidak percaya jika bangsa Indonesia telah merdeka dan mengatur penyelenggaraan negara sendiri. Suara-suara sumbang berupa ejekan, dan sejenisnya tidak sedikitpun meredakan semangat para pejuang Simalungun. Para pejuang terus berjuang demi terwujudnya suatu kemerdekaan yang telah lama didambakan. Pemuda-pemuda bangkit dengan suatu tekad "lebih baik mati berlumur darah daripada hidup terjajah". Didorong oleh rasa kesadaran yang penuh, mereka berjaga-jaga mulai dari jalan-jalan sampai ke lorong-lorong dengan peralatan yang sederhana dan tradisional seperti terbuat dari bambu runcing, tombak, parang dan sebagainya.

Tentara pendudukan Jepang tidak lagi dihiraukan, malahan para serdadu Jepang mulai takut kepada para pemuda yang berambut pendek ala serdadu Jepang yang pernah dididik militer Jepang seperti bekas tentara *Heiho*, *gyugun*, dan *Rhomusa*. Masyarakat awam masih banyak yang belum mengerti tentang apa sebenarnya arti kemerdekaan. Namun dimana-mana hal ini merupakan pembicaraan pokok. Berita kekalahan Jepang dan berita kemerdekaan menjadi ramai diperbincangkan sampai ke pelosok daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk pedesaan kebanyakan terdiri dari para petani yang tidak mengerti akan arti kemerdekaan. Namun mereka turut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penduduk yang berada di pedesaan pada umumnya sangat senang menyambut kemerdekaan. Mereka beranggapan bahwa jika sudah merdeka maka akan terjadi kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, dan mereka menganggap bahwa mereka akan bebas pajak, bebas bertindak karena yang berkuasa adalah bangsa kita sendiri.

Para tokoh politik Simalungun menyadarkan tanggapan masyarakat itu, dan kepada masyarakat dijelaskan bahwa kemerdekaan yang baru diperoleh tersebut masih harus sambutan dan dibela, serta diperjuangkan secara sungguh-sungguh karena Belanda akan kembali lagi melakukan penjajahan. Masyarakat mulai menyadari akan kekeliruan tanggapan mereka itu sehingga lahir kesadaran nasional diantara mereka untuk turut menyambut, membela dan mempertahankan kemerdekaan tanpa merasa gentar. Semboyan-semboyan pun muncul diantara masyarakat seperti "Hidup atau Mati", "horas", dan "sekali merdeka tetap merdeka" menjadi ucapan salam jika sesama mereka bertemu dimana saja.

Inisiatif utama dalam menyambut berita proklamasi kemerdekaan Indonesia datang dari para pemuda. Diantara mereka adalah Abdul Azis Siregar, Burhanuddin Kuncoro dan Menses Tampubolon, Muhammad Kasim, S. Hasibuan, Abudullah Yusuf, Ricardo Siahaan, Jaidim Purba, Urbanus Pardede dan T.M. Sinaga. Setelah mendapatkan selebaran proklamasi dari Abdul Xarim M.S., Abdul Razak dan Boerhanuddin bertemu dengan Abdul Azis Siregar di Jalan Bandar Pematang Siantar untuk menggelorakan gema proklamasi di Simalungun. Mereka kemudian memobilisasi para pemuda mengadakan rapat di Kongsis Enam (jalan

Merdeka 58) untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia (Boerhanuddin, 1957: 12). Rapat itu berhasil membentuk sebuah organisasi yang diketuai oleh Abdul Azis Siregar. Organisasi ini kemudian dinamakan Badan Kebaktian Pemuda Indonesia Cabang Simalungun.

Pada tanggal 27 September 1945, para pemuda yang bergabung dalam BKPI Cab Simalungun mengadakan pertemuan di Lapangan Pagoda (Lapangan Merdeka sekarang) untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada seluruh rakyat Simalungun. Pertemuan itu diawali dengan pengibaran bendera merah-putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pidato oleh Abdul Azis Siregar sebagai Ketua BKPI Simalungun.

Setelah Proklamasi secara resmi diumumkan dan diketahui oleh masyarakat maka telah terjadi penyambutan oleh masyarakat Simalungun dengan pusat penyambutan di kota Pematangsiantar. Dari kota Pematangsiantar menyebar ke daerah-daerah kedistrikan (sekarang kecamatan) yang pada masa itu masih dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang, namun tidak berkuasa lagi. Para pegawai kedistrikan yang berasal dari bangsa Indonesia mencoba menyampaikan berita tersebut sampai ke pedesaan. Namun persoalan sekarang adalah bahwa setelah berita proklamasi itu digenggam tibalah saatnya untuk dipertahankan melalui berbagai upaya masyarakat Simalungun dalam rangka menegakkan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada 3 Oktober 1945 utusan-utusan Partai dan Barisan Pemuda dari Simalungun berangkat ke Medan untuk melaporkan segala sesuatu yang telah dilaksanakan di

Simalungun dalam rangka mempertahankan proklamasi RI. Utusan yang berangkat adalah antara lain : Abdullah Yusuf, Urbanus Pardede, T. M. Sinaga, Pajabonar Sinaga. Tujuan utama pergi ke Medan adalah : (1) untuk melaporkan hasil-hasil yang sudah dicapai di daerah Simalungun, dan (2) untuk turut menghadiri perayaan dan menyemarakkan upacara nasional yang pertama kalinya di Medan yang bertempat di lapangan Fukuraido (lapangan Merdeka sekarang). Upacara ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1945.

Pada tanggal 4 Oktober 1945 di Simalungun telah terjadi pergolakan yaitu perebutan kekuasaan dari tangan kepolisian Jepang ke tangan kepolisian bangsa Indonesia yang terjadi di kantor kepolisian Pematangsiantar. Pada waktu itu Tengku Abdul Azis selaku Waka Kepolisian Jepang di Simalungun melaksanakan upacara dipagi hari telah melakukan tindakan yang patriotik. Tengku Abdul Azis dengan gagah berani menurunkan bendera Jepang "Hinomaru", lalu dengan menggantikan bendera "merah Putih". Kepala kepolisian Jepang di Simalungun yakni Tanaka sempat mengadakan perlawanan dengan menaikkan kembali "Hinomaru". Sesaat kemudian Tengku Abdul Azis beserta rekan-rekannya bertindak untuk menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya kembali dengan merah putih. Selanjutnya dipersilahkan kepada kepala polisi Jepang untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu resmilah kantor kepolisian itu menjadi milik bangsa Indonesia. Maja Purba diangkat menggantikan kepala polisi Tanaka.

Sekembalinya para utusan Simalungun dari Medan, mereka telah membawa suasana politik yang baru.

Mereka secara seksama membeberkan kepada masyarakat Simalungun tentang situasi yang sedang dan bakal terjadi. Para utusan ini memberitahu kepada masyarakat bahwa tentara Sekutu telah mendarat di lapangan udara Polonia Medan, dan kemungkinan akan mendarat tentara tambahan di Belawan secara besar-besaran. Kepada masyarakat diminta agar tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi.

Abdul Azis Siregar membakar semangat masyarakat Simalungun dengan pidato-pidato yang membangkitkan api perjuangan. Sikap dan sambutan serta upaya untuk mempertahankan kemerdekaan semakin meluap-luap. Berdasarkan instruksi yang diterima dari Gubernur Sumatera yang berkedudukan di Medan dan juga BPI Medan agar segera diambilalih kekuasaan dari tangan Jepang. Tindak lanjut dari realisasi proklamasi kemerdekaan itu adalah pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Demikianlah setelah adanya instruksi langsung dari Gubernur Sumatera, Mr. T.M. Hasan, maka pada bulan Oktober 1945 para pemuda yang bergabung dalam BKPI, BPI, KNI, PNI dan Cap Rante mengambil alih kantor *Bunsuco* (kantor Walikota Pematangsiantar saat ini) dan instansi lainnya di Simalungun tanpa kekerasan senjata. Para pemuda menyarankan kepada pembesar Jepang untuk meninggalkan tempat. Sejalan dengan itu, para pemuda dibawah pimpinan Umbar Subroto kemudian merampas senjata Jepang di Sibatu-Batu. Sedang massa rakyat yang datang berduyun-duyun berpencah di sekitar kantor tersebut dan lapangan "Pagoda" (Lapangan Merdeka sekarang) dengan meneriakkan "merdeka", "merdeka", "merdeka atau mati".



Gambar . Tuan Madja Poerba
(Sumber: koleksi pribadi)

Sepeninggal *Bunsyuco*, di kantor tersebut diadakan upacara sederhana dan utusan-utusan rakyat mempersilahkan Maja Purba menggantikan kedudukan pembesar Jepang itu, yang kemudian diterima Maja Purba dengan senang hati dan berjanji akan berusaha untuk memimpin rakyat Simalungun (Jahutar Damanik, 1974 : 67).⁸ Madja Purba kemudian diangkat sebagai Kepala Pemerintahan (Bupati) di Simalungun. Pengangkatan beliau didasarkan kepada pengalamannya dalam bidang pemerintahan selama pendudukan Jepang yakni sebagai wakil *Bunsuco* (Bupati).

Kejadian di kantor *Bunsyuco* itu menambah semangat juang rakyat Simalungun. Setelah upacara usai para pemimpin bersama-sama dengan masyarakat yang berjubel-jubel banyaknya berkumpul di halaman kantor

tersebut dan bendera merah putih pun dikibarkan. Upacara diikuti dengan hikmat, dan banyak yang meneteskan air mata dan ketika Sang Saka merah Putih sampai di ujung tiang, hadirin berteriak-teriak "merdeka", "merdeka", "merdeka". Para tentara Jepang tidak dapat berbuat apa-apa sehingga upacara berlangsung tanpa insiden.

Jadi sejak bulan Oktober 1945, secara resmi sudah wujud pemerintah Republik di Simalungun, yakni dengan adanya Bupati sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) dan KNI Daerah Simalungun sebagai lembaga legislatif. Namun mengingat situasi yang belum kondusif, sistem pemerintahan di Simalungun masih belum banyak berubah. KNI dibawah Mr. Jaidim Purba belum begitu efektif untuk menggiring roda pemerintahan sebagaimana dikehendaki dalam proklamasi kemerdekaan. Madja Purba masih memerlukan tenaga-tenaga dari kalangan kerajaan untuk mengisi jabatan camat, wedana dan penghulu. Di luar Siantar, pemerintahan kerajaan masih berjalan sebagaimana biasanya. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih sementara pengawal keamanan rakyat belum ada yang optimal dalam hal pengamanan, maka didirikanlah laskar rakyat. Laskar rakyat adalah organisasi rakyat yang bertugas untuk mengamankan partainya beserta pimpinan partainya.

Sejak bulan Desember 1945 di daerah Simalungun lahir laskar rakyat seperti laskar Barisan Harimau Liar (BHL), laskar Taman Latihan Petani (TALAPETA), laskar Gerindo, Laskar Hisbullah dan sebagainya. Kesemuanya laskar rakyat ini bertujuan untuk mengawal kemerdekaan yang telah di raih. Untuk daerah Simalungun salah satu laskar rakyat yang sangat berpengaruh adalah BHL, yang dipimpin

oleh AE.Saragih Ras. Laskar BHL terkenal sebagai laskar pemberani dan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak dan bukan segolongan saja. Dalam perkembangan selanjutnya setelah berdirinya berbagai laskar di Simalungun maka secara tidak disangka-sangka terjadi juga semacam persaingan diantara laskar. Persaingan ini telah mengakibatkan kepada pergolakan sosial dan telah pula memakan korban manusia.

Sementara itu hampir dua bulan setelah proklamasi di kumandangkan, RI belum memiliki tentara resmi. Semua tugas kemiliteran di Sumatera Utara dipegang oleh BPI dan BKPI. Mengingat banyaknya organisasi perjuangan, maka Menteri Penerangan Amir syarifuddin tanggal 15 Oktober 1945 memerintahkan agar semua organisasi pemuda Indonesia berfusi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI). Di Medan, BKPI dan BPI melebur menjadi PRI dengan ketuanya Achmad Tahi, sedangkan di Simalungun Boerhanuddin diangkat sebagai ketua PRI. Setelah kongres PRI di Yogyakarta 9-10 November 1945, PRI diubah menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Di Sumatera Utara Pesindo dibentuk tanggal 20 November 1945 yang diketuai oleh Sarwono Sastro Sutardjo. Achmad Tahir kemudian lebih memfokuskan diri membentuk TKR.

Pada masa awal revolusi kemerdekaan, pertumbuhan TKR ternyata kalah cepat dengan lasykar rakyat. Lasykar rakyat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Partai-Partai Politik. Sebagaimana diketahui setelah keluarnya maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta 3 November 1945, maka berdirilah beberapa partai politik di Indonesia. Partai-Partai Politik ini tidak saja berjuang secara politik, tetapi juga

berjuang secara fisik dengan membentuk barisan-barisan bersenjata yang dikenal dengan lasykar rakyat. Antara lain Lasykar Pesindo (Partai Sosialis), Lasykar Napindo (PNI), Hizbullah (Masyumi) dan Divisi Panah (PARKI). Di Simalungun ada juga barisan bersenjata yang tidak terikat dengan salah satu partai politik, seperti Barisan Harimau Liar dan Pasukan Cap Rante. Pasukan yang dikomandani oleh SMT Simanjuntak ini akhirnya melebur ke dalam lasykar Napindo dan Pesindo. Lasykar Divisi Panah dibawah Melanchton Siregar bermarkas di beberapa sekolah kristen yang ada di Pematang Siantar.

Sementara itu, pembentukan TKR di Simalungun diprakarsai oleh BPI sebagaimana juga di Medan. Sebagian besar anggota BPI dan pimpinannya adalah para mantan gyu-gun dan heiho. Di Simalungun, sebagai kordinator pembentukan TKR adalah Ricardo Siahaan, Ketua III BPI dan bekas Letnan I Gyu-Gun, Hotman Sitompul kemudian diangkat sebagai Komandan TKR Simalungun. TKR Simalungun ini pada dasarnya adalah sebuah divisi bayangan dari TKR Divisi IV yang bermarkas di Medan. Kedua organisasi tentara ini, baru melebur ke dalam TRI Divisi Gajah II pada tanggal 26 April 1946, setelah melalui rapat yang alot di Bah Jambi, Simalungun. Hotman Sitompul diangkat sebagai Kepala Markas Oemom Divisi Gajah II. Meleburnya TKR Simalungun ke dalam Divisi Gajah II terjadi ketika Markas Komando Divisi IV TKR dan Pusat Pemerintahan Sumatera dipindahkan ke Siantar akibat kondisi yang tidak kondusif di Medan akibat peristiwa revolusi sosial Maret 1946 dan aktivitas militer pasukan Sekutu dan NICA/Belanda.

C. Turbulensi Politik dan Kekerasan

Perjalanan pemerintahan Republik di Sumatera Timur pada awal revolusi mengalami berbagai hambatan dan terombang-ambing antara perjuangan diplomasi dan bersenjata. Problem utama yang dihadapi tidak hanya kekuatan militer Belanda/NICA, tetapi juga menetralsir kelompok garis keras dalam barisan pendukung Republik itu sendiri., baik dari lasykar rakyat maupun dari partai-partai politik. Kelompok radikal lebih memilih perjuangan bersenjata melawan musuh-musuh Republik daripada melalui perjuangan diplomasi sebagaimana dijalankan Gubernur Mr. T. Hassan, khususnya dalam menghadapi sikap sebagian kerajaan yang ada di Sumatera Timur. Untuk itu pada pertengahan bulan Februari 1946, sejumlah tokoh pergerakan radikal seperti; Saleh Umar, Marzuki Lubis, dan Jacob Siregar (PNI/Napindo), Loeat Siregar, dan Nathar Zainuddin (PKI), Sarwono Sastrosutardjo (Pesindo), Bachtiar Yunus (Hisbullah) membentuk Volksfront (Front Rakyat). Dibawah pimpinan Loeat Siregar, Saleh Umar dan Sarwono, cabang-cabang Voksfront berkembang pesat di seluruh Sumatera Timur. Volksfront merupakan gabungan dari partai politik dan lasykar rakyat.⁹

Golongan radikal yang diwadahi dalam Volksfront frustrasi terhadap kebijaksanaan Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan, yang berusaha merangkul golongan kerajaan dalam kubu Republik. Tokoh-tokoh politik dan lasykar rakyat dengan keras menyerukan kepada rakyat untuk berjuang melawan musuh-musuh Republik. Semboyan yang disuarakan adalah *"Lipat kaki tangan Nica. Sikat orang-orang Anti Republik, Halal darah feodal"*¹⁰

Disamping *Volksfront*, kaum radikal juga membentuk Ekonomi Rakyat Republik Indonesia (ERRI). ERRI dibentuk untuk menguasai perkebunan Sumatera Timur, terutama karet dan kelapa sawit.¹¹ Melalui ERRI dan *Volksfront* kaum radikal menguasai Pemerintahan Republik di Sumatera Timur. Cita-cita untuk menjalankan revolusi sosial menjadi tema umum pembicaraan tokoh-tokoh politik di Sumatera Timur. Di Medan dan Pematang Siantar selama bulan Januari sampai Februari 1946 pembicaraan tentang revolusi sosial telah meluas dikalangan tokoh tokoh politik/lasykar. Keadaan gawat ini semakin di peruncing dengan adanya keputusan komandan pasukan Inggris yang baru (Heddy) untuk menyerang kaum "ekstrimis". Pasukan Inggris mulai menyerang dan menggeledah basis-basis lasykar rakyat di perbatasan Medan Area dan beberapa tokoh politik ditahan, seperti Saleh Umar.¹²

Pada tanggal 3 Februari 1946, diadakan musyawarah di Gedung KNI Medan. Kerajaan diwakili oleh Sultan Langkat, Deli, Asahan, Siak, Putra Mahkota Serdang, Datuk Sukapiring dan Batubara, Yang Dipertuan Kualuh Ledong, Sultan Panai, Sultan Bilah, dan Raja-raja dari Tanah Karo dan Simalungun. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. T.M. Hasan, Dr. Amir, Abdul Xarim M.S., Loeat Siregar, Muhammad Yusuf, Tengku Hafaz, Tengku Dr. Mansoer, Tengku Damrah dan Tengku Bahriun. Dari Simalungun hadir Raja Panei Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha, Raja Purba Tuan Mogang Purba Pakpak, Raja Silimakuta Tuan Padiraja Purba Girsang yang sudah aktif di Markas Agung, Raja Siantar Tuan Sawadim Damanik, Raja Raya diwakili Tuan Jan Kaduk Saragih Garingging dan Raja Tanoh Jawa Mr.

Tuan Kaliamsyah Sinaga. Rapat Komite Nasional Indonesia (KNI) itu dipimpin oleh Ketua KNI Sumatera Timur Mr. Luat Siregar.

Dalam pidato pembukaannya, Mr. T.M. Hasan menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengakui secara resmi pemerintahan raja-raja. Mr. T.M. Hasan mendesak agar raja-raja memutuskan hubungannya dengan Belanda, melakukan proses demokratisasi dan mendukung Pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Langkat atas nama raja-raja Sumatera Timur menyatakan, bahwa kami akan mendukung Republik dan turut memperkuat Pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Langkat sebagai mewakili seluruh pemerintah swapraja Sumatera Timur dengan tegas menyatakan dalam pidatonya "kami sultan-sultan dan raja-raja telah mengambil keputusan bersama untuk melahirkan sekali lagi itikad kami bersama untuk berdiri teguh di belakang Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia dan turut menegakkan dan memperkokoh Republik kita". Sultan Langkat juga berjanji akan melakukan proses demokratisasi sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Mr. T.H. Hasan.¹³

Musyawah itu akhirnya melahirkan kesepakatan membentuk panitia bersama untuk mempersiapkan proses demokratisasi di wilayah pemerintahan swapradja. Mr. Mahadi dan Yunus Nasution masing-masing dipilih sebagai Ketua dan Koordinator. Yunus Nasution ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan di wilayah itu sambil menanti penggabungannya dengan Republik.¹⁴ Dalam kondisi seperti itu sebenarnya jelas, bahwa kerajaan telah bersedia mendukung Republik Indonesia. Akan tetapi

sangat disesalkan, bahwa golongan revolusioner mengambil jalan pintas.

Pada bulan Maret 1946, tokoh-tokoh PNI dan PKI seperti Saleh Umar, Yakub Siregar, Marzuki Lubis telah mendorong buruh-buruh perkebunan untuk bereaksi menghancurkan kerajaan, Belanda dan Cina. Mereka kerjasama dalam menghancurkan status quo kerajaan. Abdul Xarim M.S., Saleh Umar, Yakub Siregar, Nathar Zainuddin, Loeat Siregar bersinergi dalam membangkitkan semangat para pemuda. Sebagai Ketua PKI Abdul Xarim M.S. memiliki andil besar dalam menempatkan PKI pada posisi penting dalam barisan depan Republik. Abdul Xarim M.S. memainkan peranan penting dalam membangkitkan radikalisme pemuda, terutama lasykar rakyat Pesindo. Sementara Hamka, Abdul Rachman Syihab cenderung bersikap moderat, mengikuti garis kebijaksanaan Mr. T.M. Hasan. Namun demikian beberapa pemuda yang bergabung dalam Hisbullah ingin melakukan perang suci melawan musuh-musuh Republik.

Pemerintah Republik lumpuh akibat adanya konflik yang terus terjadi selama hampir lima bulan. Republik terombang ambing antara perjuangan diplomasi dan bersenjata, antara revolusi dan evolusi. Kondisi ini benar-benar menghambat proses pemerintahan di Sumatera Timur dan mengancam eksistensi Republik. Republik pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan ekonomi, meskipun telah berdiri sebuah Departemen Perkebunan dan Lembaga Keuangan untuk mengontrol aktivitas ekonomi.¹⁵ Uang yang beredar di Sumatera Timur kebanyakan adalah Inggris dan NICA, meskipun sejak bulan Oktober 1945 pemerintah

Republik hanya mengakui uang keluaran Java Bank dan uang Jepang.¹⁶ Demikian juga aktivitas ekonomi di wilayah perkebunan dikuasai pimpinan Pesindo melalui departemen perkebunannya.

Militansi para pemuda kini semakin meningkat akibat evakuasi dan ditariknya sebagian besar pasukan Jepang ke Medan¹⁷, serta berita akan ditariknya pasukan Sekutu (Inggris) dari Indonesia. Radikalisme Pemuda kini memiliki wadah yang tepat di dalam Persatuan Perjuangan untuk menghancurkan kekuasaan raja-raja. Karena kerja penghancuran ini dilakukan pada saat gubernur mengadakan perjalanan ke Sumatera Selatan selama satu bulan.¹⁸. Memuncaknya tekanan terhadap raja-raja, menyebabkan Dr. Amir melakukan perjalanan ke seluruh Sumatera Timur untuk meninjau daerah yang paling genting. Dalam rombongan Dr. Amir, ada Mayor Ferguson dari tentara Inggris, Yunus Nasution.¹⁹ Dr. Sunaryo, Mangatas Nasution, Abbas, Nurmatias, S.H. Simatupang, Mukhlis, Ajib, Nasir, Harun Lubis, Y. M. Zein, M.H. Kasiman, Sabirin Gani, dan Soufron.²⁰ Bagi tokoh-tokoh PKI dan Pesindo, perjalanan rombongan Amir merupakan sarana untuk membuktikan, bahwa rakyat benar-benar telah siap untuk menghancurkan kerajaan.

Di Tebing Tinggi dan Kisaran, rakyat telah mengeluarkan tuntutan kepada rombongan itu, agar secepatnya melenyapkan musuh-musuh republik. Di Pematang Siantar, rombongan Amir disambut dengan slogan-slogan "raja-raja penghisap darah rakyat", "rakyatlah yang menjadi hakim", dan sebagainya. Pekik merdeka dan penghancuran terhadap raja-raja saling berbau menyambut kedatangan rombongan Amir. Di Asahan, rombongan

mengadakan pertemuan dengan Sultan Asahan. Dalam pertemuan itu, sultan Asahan menyatakan mendukung dan mempertahankan republik, tetapi 20.000 pengunjung menuntut tindakan kongkrit.²¹ Tampaknya rakyat benar-benar mengetahui akan terjadi pergolakan besar di Sumatera Timur. Pendatang asal Tapanuli yang menjadi Melayu, kini kembali memakai nama marganya.²²

Setelah kembali ke Medan pada tanggal 2 Maret 1946, Dr. Amir merasa yakin mampu mengendalikan tokoh-tokoh partai untuk menunda gerakannya, minimal sampai rombongan Hasan kembali ke Medan. Akan tetapi besoknya turbulensi politik mulai berkobar di Sumatera Timur. Pemimpin-pemimpin utama di dalam Persatuan Perjuangan (Volksfront) seperti Sarwono, Saleh Umar dan lainnya telah menginstruksikan kepada semua cabang Persatuan Perjuangan di seluruh Sumatera Timur untuk menangkapi raja dan keluarganya.²³ Komandan TRI dalam sebuah pertemuan dengan Volksfront menyetujui rencana itu, dengan catatan harus dilakukan tanpa pertumpahan darah.²⁴ Lemahnya posisi TRI pada saat itu diperkirakan menjadi penyebab utama TRI menyetujui rencana akan terjadinya turbulensi politik..

Kekerasan pertama terjadi di Sunggal pada tanggal 3 Maret 1946. Unit-unit lasykar rakyat menyerang markas PADI/Pasukan ke V di dekat rumah Datuk Hitam. Dalam kerusuhan itu, jatuh korban di kedua belah pihak. Datuk Hitam dan sejumlah tokoh-tokoh bangsawan termasuk Datuk Hafiz Haberham melarikan diri ke Medan. Persatuan Perjuangan cabang Sunggal menangkap sekitar 40 orang keluarga bangsawan. Bentrokan antara kedua belah pihak

terus terjadi, meskipun telah diadakan *cease fire* ²⁵ Berita tentang kekerasan itu dengan cepat meluas ke Medan, Tanah Karo (Berastagi), Asahan, Labuhan Batu, Binjai, Langkat dan Simalungun (Pematang Siantar). Di Labuhan Deli terjadi penangkapan terhadap empat puluh orang Melayu, termasuk pemimpin PADI dan para penghulu. Pasukan ke-V dipukul hancur dan Dr. Nainggolan ditangkap. Dr. Nainggolan berhasil selamat dari usaha pembunuhan, tetapi istri dan putrinya dibunuh.²⁶

Di Simalungun sendiri eksekutornya adalah komandan Barisan Harimau Liar (BHL) A. E. Saragihras yang masih kerabat Kerajaan Panei. Menurut Tengku Luckman Sinar, "kebanyakan pelaksananya adalah suku Toba meskipun pimpinan utamanya adalah Saragihras putera Simalungun asli dan Saleh Umar memberikan instruksi rahasia untuk menangkapi raja-raja di sana kepada Pesindo".²⁷ Mohammad Said yang mewawancarainya di penjara (setelah aksi pembantaian itu) berdasarkan pengakuan Saragihras sendiri, bahwa dia pada tahun 1944 sudah menjadi anggota Kenkoku Teisintai (Barisan Harimau Liar) yang dibentuk Inoue dan tahun 1945 memimpin BHL. Perintah menghabisi para raja itu diperoleh atas perintah Sarwono pimpinan Markas Agung dan Sekretaris Zainal Abidin yang mengunjunginya menyampaikan perintah rahasia itu.²⁸ Saleh Umar pimpinan tertinggi Markas Agung ketika dimintai ketegasan hitam di atas putih oleh Saragihras, dijawab oleh Saleh Umar: "Perintah ini adalah rahasia dan sayalah yang menanggung akibatnya". Menurut Saragihras dari perintah Saleh Umar itu, raja-raja yang dianggap penghalang kemerdekaan yang harus dihabisi adalah Raja

Panei Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha, pemangku Raja Raya Tuan Jan Kaduk Saragih Garingging dan lainlain.³⁰ Untuk Kerajaan Tanoh Jawa eksekusi atas kaum bangsawan di sana dipercayakan kepada Bagus Saragih pimpinan PKI di Tanoh Jawa. Harta rampasan dari para bangsawan itu diserahkan pada awal tahun 1949 kepada Mohammad Saleh Umar yang sudah diangkat menjadi Residen Sumatera Timur (setelah menggulingkan Tengku Hafaz). Harta benda bangsawan itu pernah dipakai sebanyak dua kali, pertama untuk membiayai perbekalan TNI di Sidikalang dan kedua, ketika mereka berada di Pasar Matanggor (Tapanuli Selatan) untuk membeli senjata dari Singapura yang untuk ini ditugaskan Saleh Umar kepada saudagar Tionghoa Oei Boen Tjoen yang ternyata melarikannya. Selanjutnya harta benda yang tersisa diserahkan kepada komandan teritorium Sumatera Kolonel Alex Kawilarang pada tahun 1950. Yang sempat dirampas Belanda sempat disimpan di kluis NHM Pematangsiantar dibawah pengawasan Teuku Mohammad Hasan dan dikembalikan kepada pemiliknya tahun 1948.³¹ Aksi penghancuran kerajaan itu dijelaskan sebagai berikut.

1. Kerajaan Panei



Gambar: Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha-Raja Panei
(Sumber: Koleksi Tn. Kamen Purba)

Pada 1946 yang memerintah di Panei adalah Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha. Pada hari Minggu pagi, 3 Maret 1946 Tuan Mailan Purba Dasuha, anak tertua Tuan Marjandi adik kandung raja Panei (Tuan Anggi Panei) menginformasikan kepada keluarga raja Panei di Pematang Panei bahwa akan ada malam itu gerakan revolusi sosial terhadap raja-raja dan sultan-sultan, supaya raja dan keluarga menyelamatkan diri ke rumah pesanggerahan raja Panei di Jl. Sekolah (sekarang Jl Sudirman) Pematangsiantar. Pada hari itu juga Tuan Nagapanei (berdasarkan informasi dari Richard Nainggolan) melaporkan kepada raja Panei bahwa A. E. Saragihras dan laskarnya yang sudah terlatih

akan datang menculik dan menjarah ke istana raja, supaya raja maklum dan segera menyelamatkan diri. Anehnya, meskipun raja Panei sudah mengetahui akan kedatangan pasukan BHL pimpinan laweinya sendiri A. E. Saragihras itu, dia bergeming tidak menyelamatkan diri ke Pematangsiantar. Pihak istana hanya melakukan tindakan antisipatif dengan menempatkan pengawal yang terdiri dari laksar Pesindo dengan pengawalan Raja Muda Panei Tuan Margabulan Purba Dasuha dan adik-adiknya yang sudah dewasa. Menurut Tuan Kamen Purba, abangnya Raja Muda pada waktu itu sudah aktif di pasukan Marsose yang berjuang melawan Belanda. Rakyat yang berkumpul pada waktu itu di sekitar istana menjaga keselamatan raja dan keluarganya. Tuan Aliamta Purba yang masih berumur 5 tahun pada waktu itu sedang sakit dikelilingi oleh keluarga besar raja. Di tengah malam tiba-tiba listrik padam, rupanya pasukan BHL sudah mengepung istana. Pasukan pengawal tidak berdaya menghadapinya, ada yang tewas dan sebagian diikat. Pasukan BHL berjumlah lebih kurang 50 orang itu naik ke istana, mereka tidak berbicara dan memakai penutup wajah. Serempak mereka masuk dan menjarah seluruh istana raja membawa karung masuk ke dalam kamar perbendaharaan raja, mengambil emas banyak sekali dari peti, uang perak gulden dan uang kertas Jepang. Pokoknya semua disikat tidak ada yang ketinggalan. Raja, raja muda dan Tuan Djautih dan seluruh perempuan dewasa diikat tangannya. Senjata revolver rajamuda turut dirampas. Seluruh isi istana dijarah dan raja, dua puteranya dan 28 rakyat yang tidak rela meninggalkan rajanya turut diikat dan dinaikkan ke dalam 2 buah truk. Iringan BHL berjalan menuju ke Tigaras, sepanjang

perjalanan raja Panei disiksa dan akhirnya seluruh rombongan dibunuh dengan sadis di Nagori, dekat Tiga Sibuntuon. Beruntung Tuan Marga Idup Purba dan Tuan Iden, Tuan Abraham dan adik-adiknya berhasil melarikan diri dari istana berlari ke Nagahuta melewati kebun teh ke tempat markas tentara Jepang yang pada Minggu siang masih sempat berkunjung ke istana. Dari sana berangkat ke Pagarjawa dan dijemput pasukan TRI dan diamankan di Pematangsiantar (rumah Tuan Madja Purba Bupati Simalungun). Tuan Kamen sendiri pada malam itu bersama denggan Inang Bona (*Puang Bona*), isteri raja Panei/puteri dari Siantar di ladang raja Panei di Nagahuta. Abangnya Tuan Nalim sedang bersekolah di Pematangsiantar. Rumah pesanggerahan raja Panei di Jl. Sekolah (sekarang Jl. Sudirman) sudah dikuasai BHL dan dijadikan markas mereka. Mobil pribadi raja Panei dirampas dan dipakai Urbanus Pardede yang sudah meng kudeta Tuan Madja Purba sebagai Bupati. Harta raja Panei habis disikat dan istana (rumah panggung berasiterktur semi Melayu) kemudian dibakar atas pimpinan seorang marga Sinaga. Sedangkan Rumah Bolon yang merupakan istana lama utuh tetapi puluhan tahun tidak terawat runtuh dimakan usia, karena ketiadaan perawatan.

Sesudah berita penculikan raja Panei terdengar oleh TRI, maka tentara pun mengejar jejak BHL ke arah Saribudolok dan Tigaras. Akhirnya mereka menemukan mayat keluarga aristokrat Panei berikut rakyat yang telah tewas mengenaskan itu. Mayat raja kemudian dimakamkan di dekat istananya yang sudah rata dengan tanah di Pamatang Panei, berikut seluruh keluarga dan rakyat kerajaan yang tewas itu. Sampai raja Panei meninggal, dia masih bertahan

dengan agama suku dan tidak pernah menjadi Islam atau Kristen (tetapi lebih condong ke Islam). Anakboru Panei Tuan Djademan Saragih Garingging tuan Dologsaribu (ayah Prof. Dr. Boas Saragih) tewas dibantai dengan kejam. Tuan Nagapanei Tuan Djamonang Purba Sidadolog juga tewas dibunuh. Pembantaian terhadap keluarga raja Panei masih berlanjut sampai bulan April 1947, putera-putera raja Panei yang sudah aktif di perjuangan yaitu Tuan Margaidup Purba tewas dibunuh BHL, menyusul Tuan Kortas tuan Marjandi dan Tuan Mintari Purba kerani Kerajaan Panei. Nyaris saja seluruh keluarga bangsawan Panei punah bila tidak diselamatkan dengan sangat rahasia di Belawan.³²

2. Tanoh Jawa



Gambar : Raja Tanoh Jawa Tn Kaliamsyah Sinaga (berdiri paling kiri) delegasi NST bersama Mohammad Hatta sebelum bertolak ke KMB Den Haag, 1950.

(Sumber: kitlv.nl)

Raja Muda Tanoh Jawa Tuan Omsah Sinaga dan saudaranya raja Tanoh Jawa Tuan Kaliamsyah Sinaga selamat dari penculikan BHL dengan menyamar dan menyelamatkan diri ke daerah Asahan dan selanjutnya tinggal di Pematangsiantar. Beliau kemudian lama berkiprah di Negara Sumatera Timur wadah perjuangan kaum pribumi Sumatera Timur sebagai wakil wali negara bersama Tengku Mansyur selaku Wali Negara NST seorang dokter beristerikan perempuan Belanda masih saudara sepupu Sultan Asahan. Berbeda dengan Raja Kaliamsyah Sinaga, nasib nahas menimpa saudara sepupunya penguasa Distrik Dolog Panribuan gelar Tuan Dolog Panribuan Tuan Mintahain Sinaga dan puteranya rajamuda Tuan Hormajawa Sinaga (ayah Mayor Jatiman Sinaga) tewas dibunuh BHL beberapa bulan kemudian, yaitu 16 Agustus 1946. Menurut Killian Lumbantobing, mayatnya dicincang dan dicampur dengan daging kerbau serta disuguhkan untuk santapan pasukan BHL³³. Menurut Tuan Gindo Hilton Sinaga masih banyak korban revolusi sosial di Tanoh Jawa yang masih belum terungkap.³⁴

3. Kerajaan Siantar

Pemangku raja Siantar Tuan Sawadim Damanik pada waktu itu luput dari pembunuhan oleh BHL, karena pada waktu itu, beliau berada di rumahnya di Pamatang Bandar dilindungi oleh pendatang Batak Toba yang menggarap sawah di sana. Tetapi di Sipolha, beberapa kaum bangsawan tewas dibunuh, termasuk tuan Sipolha Tuan Sakhuda Humala Raja Damanik (ayah Tuan Djabanten Damanik). Bangsawan di Sipolha yang paling banyak mengalami pembantaian oleh BHL, berhubung dengan lokasinya yang relatif lebih terisolir di pantai Danau Toba, jauh dari pengawasan TRI.

Banyak keluarga tuan Sipolha yang menyelamatkan diri ke daerah Parapat bahkan mengungsi sampai ke luar negeri. diperkirakan ada ratusan korban mati dibantai oleh BHL di Sipolha. Tuan Sidamanik sendiri Tuan Ramahadim Damanik bersama rajamuda Sidamanik Tuan Mr. Djariaman Damanik (lahir 1920) sudah mengetahui gelagat buruk ini, mereka menyingkir ke Pematangsiantar. Mr. Djariaman bertolak belakang dengan tuduhan Markas Agung adalah seorang republikein sejati yang turut melatih pasukan TKR di Tapanuli dengan pangkat Letnan Satu. Setelah bermufakat di rumah pesanggerahan Tuan Sidamanik, Tuan Bisara Sinaga tuan Djorlang Hataran, Tuan Baja Purba tuan Dolog Batunanggar, Tuan Djansen Saragih tuan Raya Kahean



*Gambar Kiri: Mr Tuan Djariaman Damanik Rajamuda Sidamanik dan kanan Tn Kamen Purba Dasuha putera kandung Raja Panei Tn Bosar Sumalam Purba Dasuha pada HUT Kota Pematangsiantar di Jerat raja Siantar Pamatang
(Sumber: Koleksi Pribadi)*

(anak Tuan J. Kaduk Saragih) berlindung di Kantor Polisi RI.³⁵ Beberapa hari kemudian Tuan Djariaman Damanik menemukan buku kecil berwarna merah darah beredar di kota Pematangsiantar yang judulnya "Revolusi Perancis dan Revolusi Soviet Rusia" di sampul terdapat lukisan palu arit, simbol partai komunis. Penulis buku itu menginformasikan bahwa tindakan "revolusi sosial di Sumatera Timur" pada 3-4 Maret 1946 adalah gerakan yang sama. Melihat keadaan yang semakin memanas, Tuan Djariaman Damanik memilih berangkat ke Tapanuli bergabung dengan TKR RI atas saran Komandan TKR Pematangsiantar Rikardo Siahaan. Dikawatirkan bergabungnya Rajamuda Sidamanik ke dalam TKR menimbulkan kesan TKR = Tentara Keamnanan Raja.³⁶

4. Kerajaan Purba



Gambar : Tn Mogang Purba Pakpak-Raja Purba
(Sumber: M. D. Purba, Museum Simalungun, 1985)

Meskipun raja Purba Tuan Mogang Purba telah mengungsi ke Markas Langit bersama anaknya Tuan Jamin Purba, tetapi keduanya tewas secara misterius. Tuan Jamita Purba dan Tuan Lintar Purba tewas disekitar Tigaras. Semuanya berlangsung di sekitar bulan April tahun 1947 (agresi kedua).. Saat itu, pesisir Haranggaol dikabarkan penuh dengan mayat-mayat manusia yang tewas dibantai dengan sadis, sampai-sampai orang enggan mengkonsumsi ikan tangkapan danau Toba, karena sering kedapatan jari manusia dalam perut ikan itu. Rentetan aksi 3 Maret 1946 beruntun sampai agresi II tentara Belanda 1947, pemangku raja Purba Tuan Karel Tanjung gelar Parajabayak tewas terbunuh oleh BHL di Haranggaol. Anaknya Tuan Madja Purba pejabat pemerintah RI yang pernah menjadi Bupati Simalungun (dan dikudeta tokoh PKI Urbanus Pardede pasca revolusi) dan pejabat Gubernur Sumatera Utara. Keturunan raja Purba yang lain Mr. Tuan Djaidin Purba pernah menjabat sebagai walikota Medan. Tuan Djomat Purba (Tuan Anggi) terakhir Kolonel TNI aktif memimpin pasukan *Blaw Pijper* NST (untuk mempertahankan diri dari pelaku revolusi). Baik Tuan Mogang dan Tuan Djomat adalah putera Simalungun yang pantas dibanggakan, keduanya adalah anak yang dilahirkan Puangbolon Kerajaan Purba dari Siantar.³⁷ Selain bangsawan Kerajaan Purba, penguasa Siboro Haranggaol Tuan Willem Purba Siboro juga turut dibunuh BHL dan tidak ditemukan kuburnya sampai sekarang.

Frans Purba seorang turunan Tuan Purba Hinalang menceritakan ayahnya pada masa itu bekerja sebagai pembantu pastor Belanda bernama van de Laar di Sabah Dua yang jangkauan misinya sampai ke sekitaran Haranggaol

(Liang Deak dan Liang Nangka) sempat ditangkap pasukan BHL saat bertugas mengajar agama Katolik di Liang Deak. Dibawa dengan solu ke arah Simarbabi (sekitar Haranggaol) untuk dibunuh. Namun nyawanya tertolong berkat bantuan seorang anggota polisi turunan Tuan Sipinggan marga Purba Tanjung yang memintanya ikut dengan dirinya karena mereka menahan buronan polisi. Karena khawatir akan keselamatannya, ayahnya mengungsi menyelamatkan diri ke daerah Sipituhuta, Pansur Batu- Naga Lingga, dan Dokan tempatnya mengajar agama Katolik. Frans Purba juga menambahkan bahwa seluruh laki-laki anggota kerabat Partuanon Hinalang/Purba Hinalang sudah didaftar untuk dieksekusi oleh Barisan Harimau Liar. Daftar ini diketahuinya dari seorang anggota BHL berpangkat Mayor bermarga Purba. Salah seorang korban yang tewas diculik dan dibantai BHL kerabatnya bernama Tuan Kasim Purba Pakpak di Simarbabi Haranggaol sekitar bulan Juli 1946. Sampai sekarang mayatnya belum ditemukan keluarganya.³⁸

5. Kerajaan Silimakuta

Raja Silimakuta yang sudah aktif di Markas Agung juga tewas dan tidak diketahui di mana makamnya, sewaktu mengungsi ke Tanah Karo. Dalam buku Saribudolok Area dijelaskan bahwa beliau meski masih memegang pemerintahan secara resmi saat itu, namun pemerintahan praktis dikendalikan penguasa politik lokal saat itu yang berafiliasi dengan PNI, Pesindo dan Parkindo. Rumahnya juga digeledah Kepala Polisi Wilayah Simalungun T. Aziz bersama Oskar Tambunan Ketua Umum Pesindo memeriksa apakah raja Silimakuta ada kaitan dengan Belanda. Hasil



Gambar: Tn Padiraja Girsang-Raja Silimakuta
(Sumber: Janamin Girsang-Nagasaribu)

pemeriksaan ternyata tidak terbukti. Hanya ada alat-alat dapur yang mencerminkan kemiskinan seorang raja di Simalungun ini. Rupanya saat ditahan di Berastagi oleh laskar BHL, beliau sempat meloloskan diri dari tahanan dengan maksud bergabung dengan pasukan Oskar Tambunan di Saribudolok.³⁹ Nahas, beliau tertangkap dan menurut informasi keluarga mayatnya dibuang ke sungai Lau Dah Kabanjahe.⁴⁰ Di Saribudolok saat itu turut tewas dan tidak diketahui makamnya beberapa pejabat RI seperti: Camat Silimakuta Jauli Girsang, Johannes Silitonga (Guru Kepala Sekolah Saribudolok), Sibarani (Kepala Urusan Candu dan Garam Saribudolok), Humala Tambunan (Anggota Polisi Tentara Pematangsiantar dan Lukas Tanjung rekan seangkatannya.⁴¹ Ini diperkirakan terjadi tahun 1947 pada aksi agresi Belanda kedua. Keluarga raja Silimakuta kemudian

mendirikan tugu baginya di Tigaraja Kec. Silimakuta Barat. Konon mayat Raja Silimakuta dihanyutkan di sungai Lau Dah dekat Kabanjahe.

6. Kerajaan Dolog Silou



Gambar : Tn Bandar Alam Purba Tambak-Raja Dolog Silou

(Sumber: koleksi keluarga)

Raja Dologsilou terakhir Tuan Bandar Alam Purba Tambak berhasil diselamatkan rakyatnya sendiri dari keganasan pasukan BHL dan berdiam di Pematangsiantar. Beliau kemudian menjadi Kepala Agraria Kabupaten Simalungun di era Kemerdekaan RI. Kiprah beliau aktif dalam kegiatan kebudayaan dan penggalian sejarah budaya Simalungun. Beliau juga gigih mempertahankan hak-hak ulayat leluhurnya di Dolog Silou dan Silou Kahean dari penyerobotan tanah-tanah adat dari pihak yang tidak

berhak. *Gotong* Simalungun yang baku sekarang ini adalah hasil disain beliau mengadaptasi model *tengkulok* Melayu tanpa menghilangkan ciri khas budaya Simalungun yang asli pada Seminar Kebudayaan Simalungun se Indonesia yang pertama tahun 1964 dengan dukungan penuh Bupati Simalungun Radjamin Poerba.

7. Kerajaan Raya



Gambar: Tuan Jan Kaduk Saragih Garingging-Pemangku Raja Raya

(Sumber: Koleksi Pribadi)

Nasib naas menimpa pemangku raja Raya Tuan Jaulan Kaduk Saragih Garingging gelar Tuan Raya Kahean. Beliau seorang maestro seni Simalungun yang tidak ada tandingannya sampai hari ini dan perintis pembangunan jalan

penghubung Sondiraya-Sindarraya. Semasa dia menjabat sebagai penguasa swapraja di Raya, sungguh banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat seperti pengadaan listrik dan air minum serta transportasi bus yang diberi nama "Sinanggalutu" dengan rute Pematangsiantar-Pematang Raya. Beliau ditangkap pasukan BHL sewaktu menghadiri acara keluarga saudaranya Tuan Manakraya, bersama Opas Radan Sitopu dan Penilik Sekolah (*Schoolopziner*) Saulus Siregar. Ketiganya ditangkap dan dibawa ke bawah jembatan Bah Hutailing (dekat Sirpang Sigodang). Opas Radan Sitopu dapat meloloskan diri dengan berpura-pura mati dan menjatuhkan dirinya ke sungai, sedangkan Saulus Siregar dan Tuan Kaduk tewas dipenggal lehernya dan dihanyutkan di sungai Bah Hutailing tersebut. Mayatnya kemudian ditemukan TRI dan dibawa ke Pematangsiantar dan dimakamkan secara agama Kristen di belakang Gereja HKBP Kampung Kristen Pematangsiantar oleh pendeta HKBP. Pada waktu dia meninggal baru dua orang anaknya yang sudah berumah tangga dari 12 orang putera-puterinya. Salah seorang yang terkenal di antaranya adalah Tuan Bill Amirsjah Rondahaim Saragih yang dikenal sebagai seorang komponis jazz yang lama berdiam di Australia dan Aberson Marle Sihaloho yang dikenal selaku politisi. Tuan Anggi Raya yang dikenal dengan gelar Tuan Pamah (Tuan Pusia Saragih Garingging) memilih harakiri (gantung diri) di kampung Hutadolog Merekraya ketimbang ditangkap BHL. Keluarga bangsawan Raya lainnya melarikan diri ke hutan atau tempat yang aman.⁴² Menurut Dja Sarlim Sinaga, turut dibunuh Bisa Lingga, Willem Saragih, Bungaronim Damanik, Parudo Girsang dari Saribudolok. Mereka-mereka ini adalah orang

yang sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan raja Raya, tetapi dibantai juga.⁴³ Sasaran BHL bukan lagi kaum bangsawan, tetapi juga mereka yang kebetulan posisinya sebagai pejabat sipil, tenaga medis (dokter, mantri, bidan), guru bahkan mereka yang kesan hidupnya terlihat kebarat-baratan. Revolusi sosial dilihat sebagai sebagian orang sebagai ajang balas dendam dengan motif-motif pribadi yang berdampak sampai sekarang ini.

Selain itu, turut tewas dibunuh, dokter pertama orang Simalungun dr. Djasamen Saragih (anak Pangulubalei Djaudin Saragih). Turut juga ditangkap Pangulubalei Djaudin Saragih abang Pdt. J. Wismar Saragih dan ditahan di Raya Berastagi tetapi beliau mujur masih hidup diselamatkan TRI.

Tidak cukup rasanya hanya dengan sekian lembar halaman uraian tentang sejarah pembantaian kaum bangsawan Simalungun ini. Topik ini sangat menarik untuk dikaji oleh sejarawan yang berminat pada masalah perubahan sosial. Kita melihat bahwa revolusi sosial yang dikatakan dr. Amir (otak pembantaian) bukanlah revolusi dalam arti yang sesungguhnya yang mendatangkan kesejahteraan, tetapi justru sejarah kelam. Masyarakat Simalungun menjadi terkotak-kotak dan mengalami beban sejarah. Orang Simalungun terpaksa harus menjalani hidupnya dengan segala ketertekanan akibat pengaruh revolusi ini. Identitas selaku orang Simalungun apalagi yang kebetulan marganya dekat atau masih ada keturunan dengan marga kerajaan sudah cukup untuk alasan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan kekerasan, sehingga keturunan raja-raja Simalungun menjadi risau dan khawatir akan keselamatannya, banyak yang akhirnya menutupi

identitasnya dan memakai identitas yang dirasakannya aman. Menanggalkan identitas kebangsawanannya dengan identitas yang aman di daerah pengungsian atau bahkan di kampungnya sendiri.

Kita lihat bahwa korban-korban yang jatuh itu adalah *top leaders*-nya masyarakat adat Simalungun, pemegang hak ulayat di Simalungun, yang banyak mengetahui mengenai adat, sejarah dan budaya Simalungun. Kita dapat merasakan dampaknya sampai hari ini, kita sangat kekurangan figur tokoh yang benar-benar mengetahui dan faham benar akan adat, sejarah, budaya dan hak-hak adat masyarakat Simalungun. Kita menjadi kehilangan identitas, jatidiri dan cenderung melarutkan diri dengan identitas lain yang dirasakan aman. Kita juga kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketinggalan dengan suku-suku tetangga, khususnya Karo dan Toba. Pada tahun 1958 sewaktu nasionalisasi perkebunan eks Belanda di Sumatera Timur, orang Simalungun dan Melayu tidak mampu duduk di jajaran penting di perkebunan itu karena kekurangan sumber daya manusia. Tempat itu kemudian diisi orang Karo dan Mandailing dari Tapanuli Selatan.⁴⁵

Seperti disebutkan Tengku Luckman Sinar, etnis Karo, Melayu dan Simalungun sebagai penduduk asli Sumatera Timur harus bersatu, sebab mereka memiliki beban sejarah yang sama. Memang pemerintah pusat melalui KNIP Pusat tidak membenarkan aksi pembantaian itu. Para menteri seperti Sultan Hamengkubowono IX, Mrs. Maria Ulfah Santoso, Mr. Mohammad Roem dan Mr. Syarifuddin Prawiranegara pernah menjanjikan bahwa para korban revolusi sosial 1946 itu akan dikembalikan kehormatan, harta

benda mereka dikembalikan oleh negara. Janji itu harus bersama-sama kita perjuangkan. Simalungun, Melayu dan Karo harus menuntut janji itu dipenuhi oleh pemerintah—yang memang terbukti gagal melindungi para pemerintah swapraja itu—pemangku adat Simalungun (PMS) harus berjuang untuk itu.

Dapat kita pahami analisis Liddle bahwa sebagai dampak revolusi itu, telah mengakibatkan orang Simalungun berada dalam posisi terancam dan mereka harus memilih bergabung dengan saudaranya senasib suku Melayu dan Karo penduduk asli Sumatera Timur dalam wadah Negara Sumatera Timur yang mereka proklamirkan tidak lama setelah revolusi itu, mempersenjatai dirinya dan masuk kesatuan *Blaw Pijper*, tentara NST yang dikomandani Tuan Djomat Purba, bangsawan Purba yang berhasil lolos dari pembantaian. Tuan Madja sendiri dipaksa mundur oleh PKI dari jabatannya sebagai bupati Simalungun dan harus menyerahkannya kepada seorang Batak Toba penganut paham komunis bernama Urbanus Pardede yang telah merampas mobil raja Panei untuk keperluannya pribadi.

Dari kajian ini, sangat mengherankan mengapa seorang Saragihras yang jelas punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan "*lawei*" nya sendiri Tuan Bosar Sumalam raja Panei dengan tega hati membantai dan menjarah isi istana. Begitu gampangkah orang Simalungun diagitasi dan diprovokasi sampai harus tega membunuh keluarganya sendiri?

Setelah peristiwa ini, sistem pemerintahan kerajaan yang sudah berdiri ratusan tahun dan dijamin secara konstitusional dalam UUD 45, lenyap dalam sehari.

Seminggu setelah kejadian itu, Urbanus Pardede kemudian “dipilih” menjadi Bupati Simalungun. Beberapa hari sesudah meletusnya turbulensi politik Dr. Amir dan Komandan TRI Achmad Tahir segera mengadakan pertemuan. Hadir dalam pertemuan itu; Residen Sumatera Timur, Tengku Hafaz, Loeat Siregar, Yunus Nasution, Mr. Muthalib Moro, Mahruzar, Mohammad Yusuf, Tengku Dhamrah, Tengku Dr. Mansoer, dan Kepala Polisi Sumatera. Dr. Amir berusaha menolak cara kekerasan melawan lasykar dan menolak saran Mr. Mohammad Yusuf agar TRI dan Polisi dibolehkan mengambil tindakan melindungi kerajaan. Sebaliknya Dr. Amir mengumumkan pergantian Tengku Hafaz dengan Yunus Nasution sebagai Residen Sumatera Timur. Loeat Siregar diberi tugas sebagai juru damai dalam upaya pemulihan keamanan dan ketertiban. Loeat dan Yunus kemudian ditugaskan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Sumatera Timur untuk mengadakan negosiasi mencegah tindakan kekerasan terhadap kerajaan.⁴⁶

Pada tanggal 12 Maret turbulensi mulai mereda. Serangan fisik terhadap kerajaan dengan cepat menurun. Volksfront menghadapi persoalan pelik menangani para tawanan dan harta benda mereka. Marnicus Hutasoit sebagai Wakil Ketua Volksfront berhasil mempertemukan seluruh cabang Volksfront Sumatera Timur di Pematang Siantar. Pertemuan yang dihadiri oleh 200 utusan itu akhirnya memutuskan pertama, tawanan revolusi sosial laki-laki diserahkan kepada pemerintah dan mereka ditawan sampai selesai perjuangan. Kedua, tawanan revolusi sosial yang perempuan diserahkan kepada pemerintah dan mereka dibolehkan kembali ke tempat asalnya masing-

masing, tetapi harus tetap diawasi. Ketiga, harta benda kerajaan harus diserahkan kepada pemerintah.⁴⁷ Para tawanan ini akhirnya diserahkan kepada Pemerintah dan TRI diperintahkan untuk mengumpulkan para tawanan di Kabanjahe, sedangkan para tawanan wanita ditempatkan di dalam sebuah kompleks perkebunan di Siantar.⁴⁸ Para tawanan akibat turbulensi politik ini akhirnya baru bebas setelah Belanda melancarkan agresi militernya pada bulan Juli 1947.

Peristiwa itu akhirnya menjadi memori yang menakutkan bagi masyarakat Simalungun dan sekaligus menjadi amunisi yang kuat bagi van Mook untuk menyudutkan pemerintah RI dan sekaligus membawa kehancuran bagi penggeraknya yakni Junan Nasution, Saragih Ras, Urbanus Pardede dan yang lainnya yang akhirnya mendekam dalam tawanan T.R.I.⁴⁹

Secara teoritis, revolusi adalah wujud perubahan sosial paling spektakuler; sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi tidak menyisakan apapun dari keadaannya sebelumnya. Dalam pengertian ini menurut Stzompka, revolusi adalah tanda kesejahteraan sosial. Jalannya revolusi menurut para sosiolog berada dalam sepuluh tahapan, yang pertama sekali didahului oleh kondisi khas yang disebut "*revolutionary prodrome*" yang ditandai oleh ketidakpuasan, keluhan, kekacauan dan konflik yang disebabkan krisis ekonomi atau fiskal. Selanjutnya menjalar pada perpindahan kesetiaan intelektual sebagai hasil agitasi kelompok tertentu dengan cara-cara tertentu seperti penyebaran pamflet atau doktrin

yang menentang rezim yang lama.⁵¹

Dari paparan teoritis ini, revolusi muncul akibat adanya ketidakpuasan yang selanjutnya disulut oleh agitasi dan provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan menunjukkan kelemahan atau rasa kebencian pada rezim yang akan dijatuhkan. Artinya suatu revolusi tidak pernah berjalan spontan, dia berada dalam posisi direncanakan secara rapi dengan memanfaatkan situasi ketidakpuasan publik. Jadi sangat tidak benar bila dikatakan bahwa revolusi sosial di Sumatera Timur itu adalah suatu peristiwa yang berjalan spontan. Kasus revolusi sosial (yang pertama sekali diungkapkan oleh dr. Amir) yang terjadi di Sumatera Timur itu betul-betul suatu gerakan yang sudah direncanakan secara matang oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan dengan pembantaian para kaum bangsawan dan cendekiawan Sumatera Timur itu. Untuk kasus di Sumatera Timur, sudah jelas otak di balik serangkaian tindakan kejam di luar perikemanusiaan itu adalah Markas Agung yang dilaksanakan Volksfront dengan pimpinan utama Sarwono Sastro Sutardjo, Zainal Baharuddin, M. Saleh Umar, Nathar Zainuddin dan Abdul Xarim MS yang bekerja di balik layar.⁵² Laskar yang berperan dalam aksi ini adalah Pesindo, Napindo, Barisan Harimau Liar, Barisan Merah (PKI) dan Hizbullah didukung buruh Jawa dari perkebunan serta kaum tani, demikian ulasan majalah Tempo edisi 50/ Feb/1997.⁵³

Motif pembantaian kaum aristokrat dan cendekiawan Sumatera Timur lebih dominan pada intrik politik dan balas dendam, seperti dituturkan saksi mata Maxinius Hutasoit, "Sudah tentu bahwa dalam revolusi sosial itu terselundup

pula segala macam hal yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya secara obyektif dengan persoalan feodal. Kepentingan-kepentingan sendiri diboncengkan, dendam pribadi dibalas, nafsu rendah memperoleh pelampiasannya”⁵⁴. Apa yang dikatakan oleh saksi mata di atas akan kita lihat kebenarannya pada uraian selanjutnya.

Sungguh beruntung kita mendapat informasi terkini dari saksi mata hidup dari kalangan korban revolusi sosial Tengku Luckman Sinar tentang duduk perkara *Comite van Onvangst* (Panitia Penyambutan) yang dijadikan dasar tuduhan dari golongan kiri membenarkan tindakan kejam yang disebut mereka revolusi sosial itu. Menurut keterangan Tengku Luckman Sinar, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, berita itu masih desas-desus di Sumatera (maklum komunikasi tidak secanggih sekarang ini). Berita seperti itu pun cenderung ditutupi kantor-kantor berita pemerintah fasis Jepang. Muncul desas-desus bahwa tentara Sekutu (Belanda, Inggris, Amerika) akan masuk ke Sumatera mengurus tawanan perang Jepang setelah kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Atas inisiatif Tengku Mansyur (kerabat Sultan Asahan) selaku Ketua Shu Sangi Kai Sumatera Timur pada tanggal 25 Agustus 1945 mengundang para tokoh dan penguasa tradisional Sumatera Timur ke rumahnya di Jl Raja/Jl. Amaliun Medan, seperti Xarim MS dan Mr. Yusuf berunding di rumahnya membentuk panitia diketuai Sultan Langkat dan wakil ketua Tengku Mansyur untuk menjelaskan kepada Sekutu alasan mereka bekerjasama dengan Jepang. Panitia inilah yang diisukan kaum kiri sebagai *Comite van Onvangst*, panitia yang akan menangkap para tokoh kemerdekaan.⁵⁵ Tuduhan yang

sampai hari ini tidak terbukti, meskipun para pelaku revolusi sosial telah menggeledah dan membakar istana-istana raja Simalungun, sultan Melayu dan Sibayak Karo. Slogan-slogan bernada revolusioner, seperti “rajar-raja penghisap darah rakyat”, “kaum feodal yang harus dibunuh” dan lagu “Darah Rakyat” menggelora di mana-mana. Para provokator ini kebanyakan adalah dari etnis bukan Simalungun, selain A. E. Saragihras yang menjadi eksekutor di lapangan, tidak diketahui apakah ada etnis Simalungun yang duduk di belakang meja mengatur tindakan biadab itu. Tetapi sudah pasti berdasarkan dokumen rahasia dari pihak Sekutu tanggal 2 Maret 1946 (sehari sebelum revolusi) sudah mereka ketahui bahwa PKI dan Harimau Liar bekerjasama erat sekali dalam tindakan itu. Volksfront (front perjuangan rakyat) dan PARS yang berdiri pertengahan Februari 1946 yang mana “Pasukan Kelima” dari dr. F. J. Nainggolan turut bergabung. Pesindo sendiri selaku organisasi pemuda pejuang sudah sedemikian rupa dipengaruhi oleh PKI. Tetapi yang lebih mengejutkan dari penelitian Tengku Luckman Sinar, ternyata aksi revolusi sosial itu ternyata sudah lama juga direncanakan pihak penjajah Belanda sejak tahun 1906, di mana kekuasaan kerajaan bumiputera semakin diperkecil, bahkan ada yang dihapus, seperti kerajaan Riau (1911). Pada tahun 1926, Belanda sudah mengangkat panitia untuk itu yaitu *Extraterritorialiteitcommissie* yang bertujuan bahwa wilayah pemerintahan sendiri yang otonomi itu harus dilenyapkan secara perlahan-lahan dan tatkala raja-raja sudah tidak ada lagi maka demokrasi lokal akan berkembang dan hapuslah kerajaan bumiputera itu.⁵⁶ Dan untuk tujuan itu, Belanda telah memakai agennya bernama dr. Amir wakil gubernur

Sumatra seorang teosof lulusan Belanda yang beristrikan seorang perempuan Belanda (yang pada zaman Belanda sudah disamakan statusnya dengan Belanda) yang membelot ke NICA pada 23 April 1946. Dia kemudian meninggal di Belanda tahun 1949.⁵⁷

Pembantaian atas kaum bangsawan Simalungun ini memang sejarah yang sulit diterima logika, sebab hanya dengan alasan “antek penjajah” yang dialamatkan kepada kaum bangsawan Sumatera Timur sudah menjadi dasar untuk tindakan pembantaian, perampokan bahkan pemerkosaan yang jelas tindakan manusia-manusia yang tidak bertuhan. Tengku Luckman Sinar dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa tindakan segerombolan orang yang mengaku republikain itu merupakan proyek rahasia dari Markas Agung pimpinan komunis Sarwono dan Zainal Baharuddin dan Saleh Umar serta eksekutor lapangan A. E. Saragihras dari Barisan Harimau Liar (BHL) di Simalungun. Dalam pemeriksaan oleh pihak berwajib mereka mengaku bahwa tindakan itu digerakkan atas perintah Sarwono, Saleh Umar dan Yacob Siregar sebagai gembongnya untuk menghapuskan kerajaan di Sumatera Timur yang dituduh penghalang pada kemerdekaan. Eksekusi dilaksanakan mulai pukul 00.00 WIB tanggal 3-4 Maret 1946 tepat pada saat Gubernur Sumatera tidak berada di Medan, sebab pada hari itu Gubernur sudah “sengaja” diatur Markas Agung untuk kunjungan ke Sumatera Selatan. Kehadiran Gubernur Teuku Mohammad Hasan di Medan dianggap akan menggagalkan rencana Markas Agung tersebut. Wakil Gubernur Mohammad Amir yang sepaham dengan Markas Agung (Residen Abdul Karim) mengatur perjalanan Gubernur mulai 6 Februari 1946.

Di saat Gubernur tidak berada di Medan, dilancarkanlah aksi pembantaian tersebut. Sehari sebelum gubernur berangkat, Residen Sumatera Timur Tengku Hafas (yang kemudian dipecat Markas Agung) mengunjungi gubernur di rumahnya, mengungkapkan firasat buruknya, bahwa sepeninggal gubernur akan terjadi suatu peristiwa. Ternyata firasat Tengku Hafas benar. Teuku Hasan menulis: "Firasat itu benar, 1 Maret bertempat di kediaman Mr. Luat Siregar di Medan, volksfront/PKI—M. Yunus Nasution dan Marzuki Lubis bersama divisi IV-TRI-Kol. A. Tahir dan Mahruzar (adik Sutan Syahrir), dan dengan bantuan wakil gubernur Moh. Amir—bermusyawarah untuk menumpas kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur pada tanggal 3 Maret 1946.⁵⁸



Gambar : dr. Mohammad Amir (1900-1949)
Tokoh intelektual Tragedi Berdarah Sumatera Timur 1946
(Sumber: Masrul Purba)

Revolusi sosial adalah refleksi dari ketegangan golongan dan kesukuan yang sudah terbentuk sejak masa kolonial dan meledak ketika para pendukung Republik yang mengaku revolusioner itu melakukan aksi pembantaian terhadap kaum bangsawan. Gerakan ini dipelopori oleh empat organisasi poli-tik Republik yakni PNI, PKI, Pesindo, dan Masyumi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Peristiwa ini dapat dipahami dengan baik dengan menerangkan faktor-faktor penggerakannya tidak hanya berdasarkan golongan-golongan, ide-ide atau per-sengkongkolan tertentu, tetapi menjelaskan berdasar-kan sejarah hadirnya kolonialisme dan kapitalisme perkebunan di Sumatera Timur.

Daerah Simalungun yang penduduk aslinya adalah *halak* (suku bangsa) Simalungun berada di antara suku-suku Batak lainnya, seperti Tapanuli yang dihuni suku Batak Toba dan Pakpak, Karo dan di timur dekat pantai berdiam orang-orang Melayu. Sejak abad XIII diberitakan bahwa orang Simalungun sudah bersentuhan dengan budaya Jawa-Hindu yang dibuktikan dengan pemakaian destar batik sebagai tutup kepala laki-laki Simalungun. Sedangkan budaya India-Hindu diperkirakan sudah hadir di antara orang Simalungun setidaknya sejak abad ke VI dengan hadirnya Kerajaan Nagur yang menurut kisah orang-orangtua berketurunan dari tanah India nun jauh di seberang pulau Sumatra. Seterusnya pengaruh Aceh pun masuk ke Simalungun lewat vazal-vazalnya di pesisir (Serdang dan Deli) dengan kehadiran lembaga konfederasi Raja Marompat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Panei, Dolog Silou, Siantar dan Tanoh Jawa pada abad XV. Demikian seterusnya sampai kedatangan

penjajah Belanda ke Simalungun sejak akhir abad XIX yang membawa perubahan sosial yang besar di Simalungun lewat kehadiran para planters (tuan-tuan kebun), para buruh kuli kontrak dari Jawa dan petani penggarap sawah dari Tapanuli Utara (Batak Toba) yang sengaja didatangkan Belanda demi menunjang kelanggengan usaha para planters yang menguntungkan keuangan kolonial itu. Seterusnya demi menghempang masuknya pengaruh Islam yang semakin meluas di kalangan suku Simalungun, maka didatangkanlah suku Batak Toba Kristen sebagai penyeimbang populasi (dan malahan melampaui populasi penduduk asli). Dengan demikian orang Simalungun semakin terjepit dan menjadi kelompok minoritas di kampungnya sendiri.

Meskipun demikian, rupa-rupanya pemerintah Belanda yang sudah menguasai daerah Simalungun sejak tahun 1888 itu (takluknya Tanah Jawa, Tanjung Kasau dan Siantar) dan dipatahkannya perlawanan sekelompok masyarakat di Raya oleh Rondahaim yang wafat 1891 masih mempertahankan struktur sosial masyarakat Simalungun yang berpola kerajaan itu. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah kolonial dalam rangka penghematan anggaran dan mempermudah pengawasannya atas daerah ini, mereka tidak perlu repot membentuk struktur pemerintahan baru, sebab daerah Simalungun sudah diatur secara struktur birokrasi yang berpola monarki dengan pusat pemerintahan yang disebut pematang tempat kedudukan raja dan para pejabat-pejabat kerajaannya. Demikianlah sampai masuknya dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 daerah Simalungun berdiri atas pemerintahan tersendiri yang terbagi atas kerajaan-kerajaan (urung) yaitu: Tanah Jawa,

Siantar, Panei, Raya, Purba, Dolog Silou dan Silimakuta. Daerah Simalungun sendiri berada dalam lingkup wilayah Propinsi Sumatera Timur yang berkedudukan di Medan. Bersama etnis Melayu dan Karo, suku Simalungun diakui oleh para antropolog dan sejarawan sebagai penduduk asli (native groups) daerah Sumatera Timur.⁵⁹

Sesudah kekalahan Jepang dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia di Jakarta yang wilayahnya diklaim meliputi bekas daerah kekuasaan Hindia Belanda (dengan demikian termasuk Sumatera Timur) pada 17 Agustus 1945. Untuk daerah Sumatera Utara deklarasi kemerdekaan diumumkan kemudian tanggal 30 September 1945 dalam suatu pawai para pemuda nasionalis di Medan ibukota keresidenan Sumatera Timur. Semangat kemerdekaan yang besar di kalangan rakyat tidak diikuti semangat serupa di kalangan kaum bangsawan. Sebaliknya kaum aristokrat Sumatera Timur itu dengan terang-terangan menunjukkan sikap yang menyebabkan kebencian di kalangan pendukung kemerdekaan; mereka berharap kedatangan Belanda kembali akan merestorasi kedudukan mereka sebelum perang. Akibatnya pecah ketegangan di antara kaum pergerakan nasionalis Indonesia dengan para aristokrat itu yang menyebabkan garis di antara kedua kelompok itu semakin tajam perbedaannya. Gaya hidup serba kemewahan dan keborosan serta kesombongan kaum aristokrat Melayu semakin menuai kebencian dan dendam di antara rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Khususnya terhadap sultan Langkat dan sultan Deli yang merupakan penguasa pribumi Melayu yang cukup kaya dengan keuntungan minyaknya dan sewa

atas tanah perkebunan dari para planters. Situasi rawan yang seperti ini sudah pasti menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak dan dengan sangat baik sekali dimanfaatkan kaum berhaluan kiri, khususnya orang-orang Komunis. Gagasan komuis sendiri sudah sejak 1925 masuk ke Sumatera di bawah pimpinan Sutan Said Ali. Setelah pecah pemberontakan PKI di Jawa dan Sumatera pada 1926-1927 para tokoh-tokoh PKI banyak yang ditangkap dan dibuang Belanda ke Boven Digul Papua. Di antara yang dibuang itu terdapat seorang pemuda Batak Toba terpelajar berpendidikan Belanda, Urbanus Pardede yang kelak memimpin aksi Revolusi Sosial di Simalungun dan menggantikan Maja Purba sebagai Bupati Simalungun.⁶⁰ Selanjutnya Xarim MS (Mau Senang) seorang ahli pidato dan tokoh komunis terkemuka di Aceh yang sudah malang-melintang di gerakan PKI sejak tahun 1926-1927. Pada zaman Jepang dia berhasil mengambil simpati *sunseibucho* (Gubernur Jepang) Nakashima dan membentuk organisasi BOMPA (Badan Oentoek Membantoe Pertahanan Asia),⁶¹ Selain itu masih terdapat nama Saleh Umar seorang pemimpin nasionalis yang sudah memimpin PNI, Partindo dan Gerindo sejak zaman Belanda. Kemudian Jakub Siregar anak Martua Raja Siregar yang aktif di politik bersama dengan Saleh Umar. Mereka kemudian membentuk dan memimpin pada tahun 1944 organisasi Ken Ko Ku Tui Sin Tai atau Barisan Harimau Liar di bawah pelatihan dari Inoue seorang perwira Jepang.⁶² Organisasi ini diresmikan secara rahasia pada 20 Maret 1945 sebagai suatu organisasi militer, dengan Inoue sebagai komandan, Jacob Siregar sebagai wakil komandan, Saleh Umar sebagai kepala staf dan Abdullah Jusuf dan

Nulung Sirait sebagai perwira staf. Para pemuda direkrut untuk dikirim mengikuti pelatihan Talapeta dalam bidang pertanian, strategi militer dan ajaran nasionalisme selama satu sampai tiga bulan. Jumlah kadernya sekitar 50000 orang yang terdiri dari kaum tani dan nelayan dari etnis Batak Toba, Simalungun dan Karo yang beroperasi di dataran tinggi Sumatra Timur.⁶³ Selanjutnya masih ada nama Luat Siregar sahabat karib Xarim MS yang menjadi anggota PKI sejak 1945 dan pernah menjabat residen Sumatera Timur (April-September 1946) setelah berhasil menyingkirkan Tengku Hafas kerabat Sultan Deli dari Bedagai. Lalu dr. Mohammad Amir seorang ahli jiwa dokter pribadi Sultan Langkat yang menjabat Wakil Gubernur Sumatera yang setelah pecah Revolusi Sosial membelot ke pihak Belanda (isterinya seorang Belanda). Sedangkan Saragihras sebagai komandan BHL di Simalungun lebih berperan sebagai eksekutor atas perintah dari para aktor intelektual di atas.

Ada kalimat bernada provokatif dari buku Batara Sangti Simanjuntak: "Maka tidak heran apakala revolusi sosial meletus pada bulan Maret-April 1946, lebih berkecamuk di daerah Simalungun, di mana banyak jatuh korban di pihak raja-raja, pegawai dan penghulu-penghulu yang memegang peranan dalam *aksi-aksi penindasan rakyat* itu, yakni dipelopori oleh A. E. Saragih alias Saragih Ras pimpinan Barisan Harimau Liar yang terkenal dan Urbanus Pardede dari PKI (yang menjadi Bupati Kabupaten Simalungun pertama sesudah revolusi sosial tersebut)"⁶⁴ Benarkah statement di atas? Perhatikan kalimat yang dia tulis di halaman 187: "Hasil pembangunan Simalungun yang begitu rupa, merupakan durian runtuh tiba-tiba; menyebabkan

kantong pihak raja-raja dan kas pemerintahan swapraja-swapraja Simalungun mendadak dalam waktu singkat terus kaya-raya. Dengan sendirinya pihak raja-raja menjadi mewah terutama Siantar, Tanah Jawa, Pane dan Raya. Kemewahan inilah yang menyebabkan raja-raja bertambah angkuh dan bersifat feodal. Sedang orang-orang Toba yang berjiwa dinamis dan demokratis itu memandang ... tidak lebih dari saudaranya sendiri sebagai kepala masyarakat hukum adat Dalihan Natolu ... sikap mana sebaliknya dipandang ... pihak raja-raja tidak menghormatinya atau menentang mereka”.

Benarkah “raja-raja menindas rakyat” seperti yang diutarakan oleh Batara Sangti? Tuan Kamen Purba Dasuha putera raja Panei terakhir dan Tuan Djariaman Damanik Raja Muda Sidamanik terakhir, secara diplomatis, (Tuan Kamen) berkata, “Apakah kaum pendatang tidak pantas untuk menghormati dan tunduk kepada aturan pemerintah yang berlaku di Panei?” Dengan menunjuk persawahan yang luas di sekitar Pamatang Panei sampai ke Sabah Dua, Tuan Kamen berkata, “Kalau ayah saya (Raja Panei maksudnya) menindas pendatang dari Tapanuli ini, tidak mungkin mereka dapat memiliki persawahan dan pemukiman yang luas di Panei ini. Justru kami sebagai ahliwaris raja Panei yang akhirnya kebagian lahan warisan yang paling sedikit dibanding kaum pendatang”.⁶⁵Sementara itu Tuan Djariaman Damanik juga berkata senada dengan Tuan Kamen Purba Dasuha, dia mengatakan bahwa jika Tuan Sidamanik menindas para pendatang dari Tapanuli tidak akan mungkin penduduk Tapanuli yang pindah ke Sidamanik melampaui jumlah penduduk asli Simalungun dan menguasai tanah yang lebih luas dari keturunan Tuan Sidamanik.⁶⁶

Dari buku yang ditulis Batara Sangti Simanjuntak itu tergambar sekilas bagaimana ketegangan etnis yang sempat terjadi di Simalungun sebagai eksekusi dari migrasi kaum pendatang Batak Toba ke Simalungun dengan penduduk asli Simalungun. Perlu diingat sejak masuknya para planter yang didukung pemerintah kolonial Belanda, praktis kekuasaan dan pengaruh penduduk asli Simalungun semakin terabaikan. Sepertiga atau 151.000 hektar (luas Simalungun 441.380 hektar) berada dalam penguasaan para pengusaha perkebunan asing.⁶⁷ Sementara itu penduduk asli Simalungun merosot jumlahnya menjadi kelompok minoritas (69.852 jiwa), migran Batak Toba (26.531 jiwa), migran lain kebanyakan orang Jawa (23.653 jiwa) dan kuli kontrak orang Jawa (44.040 jiwa). Penduduk orang Eropa 816 jiwa dan Timur Asing 10.865 jiwa.⁶⁸ Persoalan perebutan lahan garapan di antara kaum pendatang Batak Toba itu menjadi perkara yang memusingkan raja-raja Simalungun; sementara penduduk asli semakin terpinggirkan dan akhirnya pindah ke daerah yang relatif tandus di pegunungan, khususnya di sekitar gunung Simbolon. Di Pematangsiantar sendiri kota itu semakin kehilangan identitas aslinya sebagai kediaman tradisional suku Simalungun, identitas pendatang semakin dominan, khususnya identitas Batak Toba.⁶⁹ Data-data ini menunjukkan bahwa sesungguhnya akibat politik kolonial Belanda, penduduk asli Simalungun yang berada dipihak yang sangat dirugikan dibanding para pendatang, terutama di daerah konsentrasi perkebunan dan persawahan di Simalungun Bawah.⁷⁰ Dengan demikian pernyataan di buku-buku sejarah selama ini yang menyatakan ketertindasan rakyat oleh para kaum aristokrat Simalungun pantas untuk

diteliti kembali kebenarannya.

Sebenarnya pada peristiwa itu banyak serangan digerakkan oleh keinginan mengambil alih tanah, uang dan harta benda. Dalam hal ini, revolusi sosial mengarah keperampokan tanpa pandang bulu. Diluar semua itu, tidak adanya kontrol sosial dan rapuhnya kekuasaan Republik, menyebabkan semakin memuncaknya ketegangan kelas, etnis, dan ideologi. Akibatnya ada juga para pejabat republik yang dipandang sebagai penghalang revolusi dan orang-orang yang memperagakan gaya hidup Barat serta enggan mengikuti gerakan anti-kolonial dan feodal menjadi sasaran dalam peristiwa tersebut.

Revolusi sosial telah memberi dampak negatif bagi kehidupan sosial politik masyarakat Sumatera Timur dan jalannya roda pemerintahan Republik di Medan. Kekacauan yang ditimbulkan oleh revolusi sosial dan hadirnya pasukan Sekutu/NICA Belanda menyebabkan para petinggi sipil dan militer republik memindahkan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera dari Medan ke Simalungun (Pematang Siantar).

Mengakhiri bab ini, perlu dicatat kesimpulan tragedi memilukan 3 Maret 1946 seperti ditulis antropolog dari Unimed Dr Erond Damanik dalam bukunya, *Dalih Pembunuhan Bangsawan*: "Pembunuhan bangsawan swapraja di Simalungun pada 3 Maret 1946 bukanlah 'revolusi sosial'. Kenyataan ini didasarkan bukan saja karena alpnya gerakan itu memberikan dampak kepada kaum tanni, kaum miskin dan kaum marginal lainnya di Simalungun, tetapi juga didasarkan pada fakta bahwa perencanaan pembunuhan bangsawan di Simalungun ini tidak *muncul dari internal orang Simalungun...[..]*. Penghancuran kelas bangsawan di

Simalungun tahun 1946 bukan saja telah melenyapkan sistem swapraja (*zelfbestuur*) Simalungun. Namun pada gilirannya turut serta memudarkan loyalitas (kesetiaan) kawula kepada rajanya, serta turut memporak-porandakan tatanan sosial etnik Simalungun itu, membuat orang Simalungun itu bersusah payah membangun dan membangkitkan kesetiaan maupun solidaritas etniknya."⁷¹

Catatan

¹Lihat T. Lah Husny, *Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur/Tapanuli Disertai Pangkal dan Akibatnya*, Medan: Badan Penerbit Husny, hlm. 3; George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980, hlm. 126; Takao Fukuyama, "The Second Imperial Guard Division of Japan and The Indonesian Independence", dalam Nip Xarim (ed.), *The Japanese Army and The Indonesian Independence*, Medan: Circulated by Prima and Lina Computer, 1992, hlm. 179.

²T. Luckman Sinar, "Hari-Hari Terakhir Menjelang Takluknya Hindia-Belanda di Sumatera Timur", dalam *Harian Waspada*, 16-Oktober 1985.

³Michael van Langenberg, "National Revolution in North Sumatera: Sumatera Timur and Tapanuli 1942-1950", Disertasi Tidak diterbitkan, University of Sidney, 1976, hlm. 172.

⁴Jepang membagi kawasan Selatan dalam lima Divisi, Divisi ke 16 dibawah pimpinan Letnan Jendral Imamura Hitoshi (Osamu Group) menguasai pulau Jawa dan wilayah Sulawesi, Maluku, Dutch Borneo, kepulauan Sunda kecil, New Guinea, Guam, Bismarch, dibawah pimpinan Angkatan Laut Jepang.

Pusat komando untuk wilayah Selatan ini dipusatkan di Saigon (Dalat). Baca, Benda, Irikura, Kishi, Japanese Military Administration in Indonesia Selected Documents, (Michigan: Yale University Southeast Asia Studies, 1965), h1m. 4 dan 53.

⁵Lihat Ibid.

⁶Pada tanggal 11 Mei 1943 Markas besar tentara ke 25 dipindahkan dari Singapura ke Bukit Tinggi. Baca, Saya Sraishi, dalam Akira Nagazumi, op.cit., h1m. 53.

⁷Pada masa akhir pemerintahan militer Jepang, sekitar 3000-4000 pemuda telah menjadi anggota Heiho dan Gyu-Gun yang tersebar dalam 9 garnizon di Kabanjahe, Pematang Siantar, Kisaran, Pulau Raja, Rantau Prapat, Medan, Tebing Tinggi, Sungai Priok, dan Labuhan Bilik. M. Syarif Lubis, 1962: 81-86.

⁸Tuan Madja Poerba bangsawan Kerajaan Purba lahir di Pematang Purba Simalungun, tanggal 12 Juli 1909 putera kandung pemangku Raja Purba Tn Karel Tanjung Purba Pakpak gelar Parajabayak. Menempuh pendidikan HIS di Pematangsiantar, MULO di Medan dan Jakarta. Menempatkan pendidikan tinggi MOSVIA di Bukittinggi Sumatera Barat. Bekerja di Algemene Dienst sebagai Mantri Kepala di Pematangsiantar, Kepala Urusan Pajak (belasting) kerajaan-kerajaan Simalungun sampai pendudukan Jepang yang mengangkatnya sebagai Sekretaris Gunseibu. Kemudian diangkat menjadi wakil Pemerintah Indonesia untuk kerajaan-kerajaan Simalungun dengan jabatan Bupati Simalungun. Sempat jadi target pembunuhan oleh BHL dalam aksi 3 Maret 1946. Namun, beliau dengan cerdas mampu membaca situasi dan mengungsi ke Singapura. Dari sana kembali lagi ke Simalungun. Jabatannya yang semula sempat dikudeta pimpinan PKI Urbanus Pardede dikembalikan lagi ke beliau hingga 1947. Tahun 1947-1949 beliau diangkat menjadi Bupati Tapanuli Utara, putera Simalungun yang pernah menjabat kedudukan Bupati di luar Kabupaten Simalungun. Lalu menjadi Walikota Medan (3 Juli 1958-27 Februari 1962). Pada masanya beliau mengusahakan pertapakan gereja GKPS dan asrama untuk putera-puteri Simalungun yang bersekolah di Medan. Beliau menikah dengan puteri Sibayak Lingga dan salah satu puteranya dr. Darwan Madja Purba pemilik RS Mata di Jakarta.

⁹Mengenai pembentukan Volksfront lihat M.Said, "What was the social revolution of 1946 in is East Sumatera"?, translated by Benedict Anderson and

Toenggoel Siagian, dalam Indonesia, No. 15 (April), Cornell: Modern Indonesia Project, 1973, (hal.) 173.

¹⁰T.Lah Husny, Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur/Tapanuli Disertai Pangkal dan Akibatnya, Medan: Badan Penerbit Husny, 1983, (hal.) 50.

¹¹ERRI dibentuk melalui SK Wakil Gubernur untuk menggantikan peranan BAPER. Lihat Kementerian Penerangan R.I, Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara, 1953, Medan: Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara, (hal.) 53.

¹²F.Bruggeman, Verslag van Noord Sumatra Periode 13-16 Januari 1946, (hal.) 3.

¹³"Pidato Gebernur Sumatera di Depan Para Sultan dan Raja-raja pada tanggal 3 Februari 1946" ; "Pidato Sultan Langkat di depan para Sultan dan anggota Delegasi Republik pada tanggal 3 Februari 1946"; Surat Gouverneur Chief C.O. NICA Sumatera. Medan, (A.I. Spits) kepada Lt. Gouverneur General, Batavia, Politiek Verslag Sumatra Over de Maand Februari 1946, hal. 4.

¹⁴T.Luckman Sinar, "Revolusi Pihak Kiri 1946 di Serdang", dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Revolusi Nasional di Tingkat Lokal, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1989, (hal.) 29; Hasan Basrie Z.T., "Tentang Pimpinan dan Struktur Pemerintahan di Sumatera pada awal tahun 1946", Medan: makalah tanpa tahun, (hal.) 1.

¹⁵Semua pengawasan ekonomi republik di Sumatera pertama kali berada di dalam Badan Poesat Perekonomian Rakyat (BAPER). Pada bulan Januari 1946, badan ini akhirnya diubah menjadi ERRI atas desakan tokoh-tokoh PKI. Baca, Kementerian Penerangan R.I., Republik, 531.

¹⁶J.J. van de Velde, Surat-Surat Dari Sumatera, Jakarta: Pustaka Azet, (hal.) 143.

¹⁷Pada tanggal 24 Januari 1946 tinggal 20.341 tentara Jepang di Sumatera Timur. Mereka berada di Pangkalan Berandan (3510), Medan-Belawan (581), Kabanjahe (605), Tebing Tinggi (2860), Pematang Siantar (5624), Lima Puluh/ Tinjauan (2865), Kisaran (4467), 26 Indian Division, Medan, Weekly Intelligence Summary , No. 19. hlm. 16.

¹⁸Perjalanan ke Sumatera Selatan, merupakan saran Abdul Xarim M.S. Hal ini memang sengaja dipersiapkan oleh beliau. Rencana revolusi sosial sebenarnya sudah diketahui oleh Xarim, sebelum keberangkatan Mr. T. M.

Hassan. Baca Sofyan Effendi, Transkrip Wawancara Dengan Mr. T.M. Hassan , Berastagi, 1990, (hal.) 3-7; Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera, Jakarta: Sinar Harapan, 1987, (hal.) 397.

¹⁹M. Yunus Nasution sudah mengambil alih jabatan Tengku Hafazs sebagai Residen Sumatera Timur sejak akhir Januari 1946. Ibid., (hal.) 360; T. Luckman Sinar, Konsep Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Medan: Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang, 1986/1987, (hal.) 273.

²⁰Husny, Revolusi, 39.

²¹Reid, Revolusi, 372.

²²Husny, Revolusi, 39.

²³Marnicus Hutasoit, Percikan Revolusi di Sumatera, Jakarta: PT B.P.K. Gunung Mulia, 1986, (hal.) 40; Sinar, Konsep, 274.

²⁴Husni, Revolusi, 49.

²⁵Michael van Langenberg, "National Revolution in North Sumatra: Sumatera Timur and Tapanuli 1942-1950", Disertasi Doktor, University of Sidney, 1976, (hal.) 433.

²⁶Reid, Revolusi, 377.

²⁷Tengku Luckman Sinar, op. cit., hlm. 491.

²⁸Mohammad Said, op. cit., hlm. 184.

²⁹D. Kenan Purba, Sejarah Simalungun (Jakarta: Bina Budaya Simalungun, 1995), hlm. 98.

³⁰Mohammad Said, op. cit., hlm. 184.

³¹Prima, op. cit., hlm. 638.

³²Informasi via telepon dengan Tuan Kamen Purba Dasuha dari Jakarta, 18 Oktober 2010.

³³Immanuel, Agustus 2001, hlm. 44.

³⁴Kerajaan Tanoh Jawa meliputi wilayah terluas di seluruh Simalungun. Kedudukan raja berada di Pamatang Tanoh Jawa dibantu oleh partuanon-partuanon. Pada zaman Belanda, distrik Tanoh Jawa terdiri dari Dolog Panribuan di Tigadolog, Jorlang Hataran di Tigabalata dan Bosar Maligas di Pasarbaru. Tahun 1940 Girsang Sipanganbolon jadi satu distrik berkedudukan di Parapat dikepalai putera mahkota Kerajaan Siantar Tuan Sarmahata Damanik (anak raja Siantar T. Sangnaualah Damanik). Wilayah Girsang Sipangan Bolon masuk dalam wilayah partuanon Jorlang Hataran. Girsang pada zaman Belanda dipimpin

oleh Raja Na Onom yaitu: Tuan Sidasuhut Girsang (Tuan Kaha) yaitu Ompu Ranjo (leluhur dr. T. Maruahal Sinaga dan T. Gindo Sinaga), Tuan Sidahapittu Girsang, Tuan Porti Girsang, Tuan Sidasuhut Sipanganbolon, Tuan Sidahapittu Sipanganbolon dan Tuan Porti Sipanganbolon. Pada saat pelantikan raja di Tanoh Jawa, Tuan Girsang yang membawa “horbou panraja”, yang tanduknya disangkutkan di Tiang Nanggar Rumahbolon sebagai tanda pelantikan seorang raja, sedangkan dagingnya dibagikan kepada seluruh rakyat yang hadir untuk disantap bersama. Informasi dari Tuan Gindo Hilton Sinaga dari Tiga Dolog.

³⁵Bintan R. Saragih dan Darwan M. Purba, 80 Tahun Djariaman Damanik: Seorang Ningrat, Pejuang Kemerdekaan, Penegak Hukum dan Tokoh Masyarakat (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 29-30.

³⁶Ibid., hlm. 30-40. Sewaktu di Dolok Sanggul Tapanuli, T. Djariaman Damanik bertemu dengan A. E. Saragihras yang pasukan BHL-nya mundur ke Tapanuli. Ketika ditanyakan seputar revolusi itu, Saragihras tidak ingin membicarakannya lebih dalam. Dia hanya bertanya tentang keadaan keluarga T. Djariaman.

³⁷T. B. A. Purba Tambak, Sejarah Simalungun (Pematangsiantar: Percetakan HKBP, 1982), hlm.112.

³⁸Informasi dari Bapak Frans Purba Pakpak (67) seorang turunan Tuan Hinalang tinggal di Jakarta.

³⁹Liman Girsang, Ngian Raja Saragih, et. al., Saribudolok Area dan Sekitarnya, Perjuangan 1945-1949 (Jakarta: Universitas Justitia Press, 1985), hlm. 42-45.

⁴⁰Wawancara dengan Janamin Girsang di Nagasaribu salah satu kerabat beliau.

⁴¹Liman Girsang, Ngian Raja Saragih, Saribudolok Area....., hlm. 47.

⁴²Sinopsis Pemakaman Kembali Tuan J. Kaduk Saragih Garingging, Pamatangraya, 1995, hlm. 1-4.

⁴³Juandaha Raya P. Dasuha dan Martin L. Sinaga, Memoar 80 Tahun St. Dja Sarlim Sinaga (Jakarta: Sardo Sarana Media, 2004), hlm. 25. Dja Sarlim Sinaga yang sudah bergabung dengan Pesindo ikut ditangkap saat sedang bekerja di sawah oleh dua orang BHL (beliau tidak mau menyebut nama) dan ditahan di Sondiraya. Di dalam tahanan rakyat itu, dia ditahan bersama adiknya dan Parudo Girsang yang lebih dulu ditangkap. Dia diinterogasi seputar

aktifitasnya di politik, dan dia meyakinkan penculik bahwa dia adalah republikein. Akhirnya berkat pertolongan Tarianus Sigumonrong (ayah Mansen Purba) dia pun dibebaskan.

⁴⁴Liddle, R. William, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study* (New Haven and London: Yale University Press, 1970), hlm. 54.

⁴⁵Kansi Saragih, "Eksistensi Sumatera Timur dari Sudut Pandang Sejarah dan Budaya", makalah Simposium Pembentukan Propinsi Sumatera Timur, Pematangsiantar, 2002, hlm. 6.

⁴⁶Langenberg, "National..", 440; Kementerian Penerangan R.I., Republik, 78.

⁴⁷Hutasoit, Percikan, 50-51.

⁴⁸Diantara mereka yang ditawan adalah Sultan Langkat, Asahan, Raja Pane, Raja Purba, Sibayak Lingga, Langenberg, "National", 458; Wawancara dengan Datuk Anwaruddin, Perbaungan, 1994.

⁴⁹R. William Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: An Indonesian Case Study*, Yale University Press, 1970, hlm. 14.

⁵⁰Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (diterjemahkan Alimandan) (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 357.

⁵¹Ibid., hlm. 364.

⁵²Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, volume 1 (Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976), hlm. 628.

⁵³"Amuk Massal: Dari Awal sampai Akhir Abad ke-20", www.tempo.co.id/ang/min/01/50/nas.3.htm, diakses 6/8/2010 pukul 1:47 AM.

⁵⁴Marnixius Hutasoit, *Percikan Revolusi di Sumatera* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 46.

⁵⁵Tengku Luckman Sinar, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan, tp., 2008), hlm. 477; lihat juga Prima, op. cit., hlm. 94.

⁵⁶Ibid., hlm. iii.

⁵⁷Prima, op. cit., hlm. 727-728. Berbeda dengan Tengku Luckman Sinar, Mohammad Said dalam Prima lebih positif memandang pembelotan Amir.

⁵⁸Teuku Mohammad Isa (ed.), *Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Aceh ke Pemersatu Bangsa* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999), hlm. 363.

⁵⁹Michael van Langenberg, "Class and Ethnic Conflict in Indonesia's

Decolonization Process: A Study of East Sumatra'. Indonesia nomor 33/1982, hlm. 1. Native States di Sumatera Timur pada tahun 1945 terdiri dari 12 buah kerajaan-kerajaan Melayu yaitu: Hampan Perak (Deli), Sunggal (Deli), Sukapiring (Deli), Senembah (Deli), Percut (Deli), Bedagai (Deli), Padang (Deli), Indrapura (Asahan), Tanah Datar, Pesisir, Limapuluh, Sukudua. Tanah Karo terdiri atas kerajaan-kerajaan (sibayak): Kutabuluh, Sarinembah, Lingga, Suka dan Barusjahe. Terakhir Simalungun terdiri atas: Dolog Silou, Silimakuta, Purba, Raya, Panei, Siantar dan Tanah Jawa.

⁶⁰Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hlm. 111.

⁶¹Mohammed Said, "What was The "Social Revolution of 1946" in East Sumatra?" Transl. by Benedict Anderson and Toenggoel Siagian. Indonesia No. 15, 1973, Cornel South East Asia Program, hlm. 157-158.

⁶²Ibid., hlm. 159.

⁶³Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 219.

⁶⁴Batara Santi Simanjuntak, *Sejarah Batak* (Balige: Karl Sianipar Company, 1977), hlm. 188.

⁶⁵Dalam suatu percakapan dengan beliau di rumahnya di makam raja-raja Panei di Pamatang Panei sekitar bulan Maret 2007.

⁶⁶Dalam suatu percakapan di rumahnya di Medan, 2009.

⁶⁷Wolfgang Clauss, *Economic and Social Change among The Simalungun Batak of North Sumatra* (Saarbrucken Fort Lauderdale: Verlag BreitenbachPublishers, 1982), hlm. 54.

⁶⁸J. Tideman, *Simeloengoen* (Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Becherer, 1922), hlm. 84.

⁶⁹R. W. Liddle, *Ethnicity, Party and National Integration: Indonesian Case Study* (New Haven and London: Yale University Press, 1970), hlm. 40.

R. W. Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru* (Jakarta: Grafiti Press, 1992), hlm. 28.

⁷⁰Erond Litno Damanik, *Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun pada Maret 1946*, (Medan:Simetri Institute, 2017), hlm. 211-214.

BAB VII

MASA DEKOLONISASI

A. Siantar Sebagai Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera

Dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, kota Medan ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sumatera dan Mr. T.M. Hasan sebagai Gubernur Sumatera.¹ Hasan menetapkan sebuah gedung yang terletak di Jalan Istana No.15 sebagai Kantor Gubernur Sumatera. Di kawasan Medan inilah sesungguhnya awal dari proses panjang perjuangan menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara. Setelah menerima konfirmasi resmi mengenai pengangkatannya sebagai Gubernur tanggal 2 Oktober 1945, Mr.T.M.Hasan kemudian memerintahkan pengibaran bendera merah putih di seluruh Sumatera dan mulai mengeluarkan dekrit², sebagai Gubernur. Dekrit itu pula yang menandai secara resmi berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia Propinsi Sumatera di Medan. Namun demikian pembentukan pemerintahan Republik terus menghadapi rintangan. Rintangan itu datang dari kekuatan militer Belanda/NICA/Sekutu dan kaki tangannya.³ Brigjend TED Kelly sebagai Komandan Pasukan Sekutu di Medan tanggal 18 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat yang berisikan larangan memegang senjata kepada bangsa Indonesia dan harus menyerahkannya kepada tentara Sekutu.

Maklumat itu menimbulkan kecurigaan pemuda

Indonesia terhadap tentara Inggris dan menyakinkan para pemimpin Indonesia bahwa Inggris pada hakekatnya sebagai tentara kolonial yang membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Kecurigaan menjadi nyata setelah mereka melakukan provokatif dan teror terhadap bangsa Indonesia setelah berada di kota Medan. Akibatnya meletuslah berbagai bentrokan fisik antara para pemuda republik dengan pasukan Sekutu/NICA, yang membuat kota Medan menjadi tidak kondusif lagi sebagai ibukota Provinsi Sumatera. Insiden itu antara lain peristiwa Jalan Bali (Medan), Siantar Hotel (Pematang Siantar) dan Matahari Hotel di Berastagi.

Oleh sebab itu, maka pada tanggal 21 Maret 1946, hampir tiga minggu setelah meletusnya turbulensi politik, Hasan akhirnya kembali ke Medan dari Palembang. Sehari kemudian ia mengadakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin TRI dan sipil. Dalam rapat itu diputuskan, bahwa akan segera diadakan sidang KNI se-Sumatera dan memindahkan ibukota Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar, mengingat semakin meningkatnya tekanan dari tentara Inggris. Sebagian besar anggota-anggota pasukan Divisi pindah ke luar Medan, yaitu ke Brastagi, sedangkan Radio Republik Indonesia (RRI) juga pindah ke Pematang Siantar. Penyelenggaraan berita dilaksanakan setelah membangun kembali peralatan sehingga siaran-siaran berlangsung secara normal kembali. Perpindahan pasukan dan peralatan radio, ternyata diikuti dengan perpindahan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya secara berangsur-angsur ke Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi. Akhirnya pada 15 April 1946, Kantor Gubernur Sumatera dan semua

jawatan-jawatannya serta Markas Divisi IV TKR berserta seluruh stafnya pindah ke Pematang Siantar.

Pematang Siantar akhirnya menjadi kota yang sibuk pada periode awal proklamasi itu. Kota itu dipenuhi para pemuda pejuang, pegawai pemerintahan, dan para pengungsi dari Medan Area⁴. Tidak jarang sering terjadi adu mulut antara pemimpin laskar dengan pejabat pemerintahan Gubernur Sumatera mengenai masalah pemenuhan logistik perang. Marnicus Hutasoit salah seorang Staf Gubernur yang mengurus masalah lasykar melukiskan dengan baik suasana revolusioner itu sebagai berikut;

"Anak-anak kita tidak makan lagi; anak-anak di front sudah tidak ada pakaian. Jika anak-anak meninggalkan posnya, Belanda akan jalan terus... Apa harus anak-anak sendiri yang datang dari front untuk mengambil lisensi, nanti Bapak sendiri yang diambil oleh anak-anak. Bapak jangan lupa, karena anak-anak berjaga di front maka Bapak bisa duduk disini dengan tenang. Para pemimpin laskar biasanya berbicara dengan pistol diletakkan diatas meja, atau ikat pinggang gantungan pistol agak digeser ke depan sehingga pistolnya jelas kelihatan. Seorang kepala laskar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, kemudian mengeluarkannya dan berkata, "jangan tunggu jari ini kering. Uang harus ada"⁵

Itulah gambaran suasana revolusioner kota Pematang Siantar yang dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ketika kota Medan tidak kondusif lagi. Itu adalah salah satu dialog antara Marnicus Hutasoit seorang anggota Dewan Pertahanan Daerah dengan salah seorang pemimpin lasykar rakyat yang ditugaskan untuk mengambil logistik perang termasuk uang untuk keperluan perjuangan

di garis depan.

Di kota inilah pada bulan Mei dibentuk Departemen Perkebunan, Penerangan, dan Ekonomi. Pada awal bulan July dibentuk Dewan Penasehat Pemerintah untuk masalah Perkebunan dan Perkembangan Ekonomi. Dewan ini dipimpin oleh Ir. Indratjaya, dan Dr. Gindo Siregar. Dewan itu ditugaskan untuk mengawasi aktivitas ekonomi pemerintah di Sumatera, termasuk mengoperasikan tambang minyak di Pangkalan Berand dan Pangkalan Susu, mengontrol pajak dan sirkulasi mata uang dan perdagangan. Pada bulan Agustus departemen-departemen lainnya juga dibentuk yaitu, Kesehatan, Pendidikan, Agama, Pertahanan.⁶

Pemerintah Negara Republik Indonesia Propinsi Sumatera berusaha terus untuk merehabilitasi perekonomian yang telah hancur pada masa Jepang. Sejak pertengahan tahun 1946, keadaan makanan dan pakaian penduduk telah mengalami perbaikan. Pendudukan yang berpakaian goni sudah hampir tidak ada lagi. Di samping itu, perekonomian rakyat di-bimbing oleh pemerintah dengan cara koperasi. Salah satu usaha kearah ini adalah pemerintah telah berusaha memper-banyak penanaman padi, membuat irigasi, mendistribusikan tanah, dan memasukkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari luar negeri dengan cara barter dengan hasil bumi Indonesia. Di bidang sosial pemerintah telah membentuk sebuah panitia pengurus romusya dan orang-orang miskin yang kemudian bekerjasama dengan Jawatan Agama.⁷

Dalam bidang keuangan Pemerintah Republik mengalami kesulitan, sebab secara resmi sampai tahun 1946 belum memiliki mata uang sendiri. Di Sumatera yang

beredar adalah mata uang Jepang. Dalam peredarannya mata uang Jepang terlalu banyak di masyarakat, sehingga nilai terus merosot. Sebaliknya harga-harga barang terus melambung tinggi. Penyebab inflasi mata uang Jepang itu ternyata adalah ulah pemerintah Belanda. Diketahui umum bahwa Pemerintah Inggris di Singapura telah mendapatkan klise untuk mencetak uang itu dan kemudian alat-alat itu jatuh ke tangan Belanda. Dengan alat itu akhirnya Belanda dapat menyebarkan uang palsu ke daerah republik.⁸ Untuk mengatasi masalah itu maka Hasan mengeluarkan Maklumat No,20 /mgs Tanggal 2 Desember 1946 yang mengumumkan berlakunya Uang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang syah dengan kurs satu rupiah ORI sama dengan seratus rupiah uang Jepang. Namun demikian hal ini ternyata belum bisa mengatasi persoalan keuangan pemerintah propinsi Sumatera. Pada awal 1947 anggaran belanja untuk gaji pegawai dan biaya perjuangan sudah tidak terpenuhi. Kas negara belum cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Upaya meminta bantuan ke Pemerintah Pusat untuk mengirimkan ORI juga tidak berhasil. Akibatnya Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera meminta pertimbangan Menteri Keuangan RI, Mr. Syafruddin Prawiranegara agar Pemerintah Propinsi Sumatera dapat mencetak uang sendiri. Syafruddin menjawab, Sumatera mencetak *promesse* saja , bukan uang tapi "surat janji". Hasan memandang uang kertas lebih efektif daripada *promesse* Atas pertimbangan itu, maka Hasan memutuskan untuk mencetak uang kertas URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) dan diberlakukan pada tanggal 8 April 1947 melalui Maklumat

No. 92/KO. URIPS ditandatangani oleh Kepala Jawatan Keuangan Propinsi Sumatera dan Direktur Bank Negara Indonesia di Pematang Siantar. Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupiah ORI dan seratus rupiah uang Jepang. Hasan kemudian menetapkan Bank Negara Indonesia sebagai Bank milik pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946.⁹ Masalah keuangan sebagai penggerak roda pemerintahan dan perjuangan akhirnya dapat diatasi oleh Hasan. Upaya selanjutnya adalah mencari Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendukung kinerja Jawatan Keuangan Propinsi yakni dengan mencari ahli percetakan uang, ahli keuangan, ahli bank, dan ahli pegadaian. Termasuk dalam rangka itulah Mr. T. M. Hasan dan R.M. Amrin melawat ke Sumatera Selatan.

Setelah Pematang Siantar diduduki pasukan Belanda dalam Agresi bulan Juli 1947, ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera dipindahkan ke Bukit Tinggi. Setelah itu Pemerintah Propinsi Sumatera direorganisir kembali dengan kebutuhan perjuangan melawan Belanda dan efektifitas roda pemerintahan di Sumatera. Untuk itu sejak tanggal 1 Juni 1948, Sumatera dijadikan 3 Propinsi, yakni Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Wilayah Simalungun kemudian dikuasai oleh pasukan militer Belanda dan menjadi wilayah Negara Sumatera Timur.

B. Simalungun Dalam Rengkuhan Negara Sumatera Timur

Revolusi sosial pada hakekatnya adalah cerminan dari permusuhan mendalam yang dirasakan oleh sebagian

masyarakat terhadap sistem kolonial yang mereka pandang sangat eksploitatif. Peristiwa itu mengukuhkan terasingnya sebagian bangsawan Simalungun dari Republik dan menggoyahkan kepercayaan tokoh-tokoh republik yang konservatif terhadap kesanggupan RI untuk memberikan rasa aman kepada mereka. Peristiwa itu juga akhirnya menjadi faktor kuat mengarahkan mereka untuk mendukung sistem federal¹⁰ yang disodorkan oleh H.J.van Mook (Belanda) dalam memorandumnya tanggal 15-Nopember1945.¹¹

Van Mook menyatakan bahwa agar tidak terjadi perselisihan antara daerah Jawa dan daerah Luar Jawa, maka Hindia-Belanda perlu ditata dalam susunan Indonesia serikat atau *Common Wealth/Gemenebest Indonesia (Verinigde staten van Indonesia)*. Van Mook berhasil meyakinkan perdana Menteri Schermerhorn dan menteri Se berang Lautan, Logeman, tentang pentingnya gagasan federalisme diterapkan di Hindia-Belanda.¹² Gagasan van Mook secara resmi dimuat dalam Deklarasi Pemerintah tanggal 10 Februari 1946. Dalam siaran resmi itu dinyatakan dinyatakan, bahwa akan diadakan suatu Gemenebest (*Common Health*) Indonesia, sekutu dalam kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang tersusun dari daerah yang memiliki hak otonomi dengan tingkat yang berbeda-beda. Selama masa peralihan ini, kedaulatan Belanda akan tetap dipertahankan.¹³

Demikianlah pada tanggal 30 Juli 1947, sepuluh hari setelah Agresi Militer Belanda I, sebuah rapat umum diadakan di Medan untuk menuntut berdirinya daerah otonomi Sumatera Timur. Dalam rapat itu hadir Komandan Brigadir Z (Kolonel Scholten), Residen Sumatera Timur (Mr. J. Gerritsen) dan Penasehat Politik Pemerintah (Dr.

J.J van de Velde), Djomat Purba, juru bicara pertemuan itu “menyerang” Pemimpin-pemimpin Republik. Mereka menuntut kepada Pemerintah Belanda, untuk membentuk sebuah Daerah Istimewa Sumatera Timur dan mengakui daerah Sumatera Timur sebagai daerah otonomi sesuai dengan Perjanjian Linggarjati.¹⁴ Djomat Purba mengatakan, bahwa untuk mencapai tujuan itu akan segera dibentuk Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur (Komite D.I.S.T).¹⁵

Tokoh-tokoh D.I.S.T. adalah bekas tokoh P.S.T. dan gerakan bawah tanah Siap Sedia yang sudah bergerak sejak zaman Jepang. Mereka adalah kaum intelektual Melayu yang bergabung dengan golongan Batak Simalungun dan Karo. Tiga golongan masyarakat ini merasa terancam kaum pendatang yang sangat agresif menguasai wilayah Sumatera Timur, yang menganggap seluruh daerah Pantai Timur sebagai daerah kerja.¹⁶

Van de Velde memuji keberanian penduduk Pantai Timur Sumatera, karena berani mengambil inisiatif untuk menentukan masa depan mereka. Van de Velde menyatakan bahwa rencana pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Timur akan disampaikan kepada Letnan Gubernur Jendral di Batavia.¹⁷

Beberapa hari kemudian pertemuan massa seperti itu diadakan di Binjai, Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, dan Pematang Siantar.¹⁸ Gerakan D.I.S.T. mengadakan pawai di kota Medan, Perbaungan, Lubuk Pakam, Pematang Siantar dan Binjai. Pawai ini diikuti oleh sebagian besar masyarakat Melayu dan golongan kecil masyarakat Simalungun, Karo, dan Cina.¹⁹



Gambar . Aksi demonstrasi rakyat Sumatera Timur mendukung berdirinya Negara Sumatera Timur, 1947. (koleksi: kitlv.ni)

Kegiatan Komite D.I.S.T., mendapat ancaman serius dari pemuda Republik. Di Siantar pertemuan itu hanya dapat dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1947, karena adanya teror dari sejumlah lasykar rakyat. Di sekitar Tebing Tinggi, 13 orang pendukung Gerakan D.I.S.T. dibunuh. Di Lubuk Pakam beberapa anggota keluarga bangsawan dibunuh. Di kampung Selesai pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1947, 15 orang pendukung gerakan D.I.S.T. dibunuh dan ada yang dibakar hidup-hidup.²⁰

Setelah melakukan pertemuan di kota-kota besar di Sumatera Timur, pada tanggal 23 Agustus 1947 para anggota Komite D.I.S.T. dan pejabat senior Belanda dibawah pimpinan Dr.J.J. van de Velde, bertemu di rumah Dr. T. Mansoer. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas masalah mendasar yang berkaitan dengan akan didirikannya

Negara Sumatera Timur (N.S.T.) Dalam pertemuan itu, pejabat Belanda menegaskan, bahwa negara yang akan dibentuk nanti harus dalam struktur demokrasi. Negara itu harus diperluas di atas sisa-sisa feodalisme dan harus mencerminkan adanya dukungan dari segenap masyarakat. Sisa-sisa kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa tradisional harus segera dlenyapkan.²¹



Gambar . Kiri ke kanan depan: Tuan Sawadim Damanik (Raja Siantar), dr. Tengku Mansyur (Walinegara NST), Radja Kaliamsjah Sinaga Radja Tanah Djawa (Wakil Walinegara NST) usai sholat ied di Masjid Raya Medan, 1948.
(Sumber: koleksi T. Irwansjah Sinaga-Bogor)

Pada tanggal 18 Oktober 1947 H.J. van Mook mengeluarkan dekrit mengakui Komite D.I.S.T.²² Dekrit Van Mook terdiri- dari lima point. Point 1, 2, dan 5 menetapkan Komite akan diubah menjadi Dewan Perwakilan Sementara Sumatera Timur, setelah ditambah dengan wakil-wakil dari golongan yang belum terwakili dalam Komite D.I.S.T.

Komite harus bekerjasama dengan Recomba²³ untuk merancang bentuk organisasi ketatanegaraan dan status daerah itu. Sebelum N.S.T., dewan akan menjalankan tugasnya dibawah nasehat Pemerintah Hindia-Belanda. Point 3 dan 4 menyinggung tentang kerajaan tradisional. Kedudukan kerajaan tradisional akan diputuskan kemudian, sesudah diadakan konsultasi dengan wakil-wakil yang dipilih oleh penduduk. Sambil menanti keputusan ini, dewan akan menjalankan kontrol kekuasaan atas kerajaan tradisional bersama-sama dengan Recomba.

Anggota D.I.S.T. dan Recomba pada tanggal 30 Oktober 1947 berhasil menyusun Dewan Sementara Sumatera Timur yang beranggotakan 28 orang. Sesuai dengan keputusan yang dicapai di Jakarta dan Medan, pada tanggal 8 Oktober 1947 menetapkan Komite D.I.S.T. menjadi dewan sementara dengan 10 anggota tambahan dari wakil masyarakat Jawa, Belanda, Eurasia, dan India. Dr. T. Mansoer, Tengku Zulkarnaen, Raja Kaliamsyah Sinaga dan Lalisang dipilih sebagai Dewan Eksekutif (Dewan Pekerja).²⁴ Penambahan anggota Dewan itu ternyata belum mencerminkan adanya usaha yang serius untuk mewujudkan prinsip demokrasi. Penambahan anggota baru itu diupayakan untuk menjaga dominasi orang asli, terutama Melayu dalam Dewan Sementara.

Dua minggu setelah Dewan Sementara dibentuk, naskah Konstitusi N.S.T. telah dipersiapkan dibawah pimpinan langsung dari Dr. Mansoer dan Komisi teknik Dewan. Anggota Komisi Teknik Dewan itu adalah Mr. Djaidin Purba, Tengku Mr. Bahriun, Tengku Hafaz, G.J. Forch, G. van Gelder dan Tengku Ubaidullah.²⁵

Pada tanggal 15 Nopember 1947, Dewan Sementara bersidang untuk memutuskan rancangan UUD dan memilih Wali Negara N.S.T. Dr. Mansoer dipilih sebagai Wali Negara dan Tengku Bahriun serta C.J.J. Hoogenboom masing-masing dipilih sebagai wakil ketua I dan II Dewan Sementara.²⁶ Dr. Tengku Mansoer adalah satu-satunya kandidat Wali Negara.



Gambar . Bendera dan lambang serta pin jabatan Walinegara Negara Sumatera Timur (NST) (Sumber: koleksi Tengku M. Dicky)

Pada tanggal 25 Desember 1947, Van Mook mengeluarkan dekrit yang secara resmi menyatakan, Bahwa daerah Istimewa Sumatera Timur diakui sebagai Negara dengan nama N.S.T.²⁷ Enam hari kemudian, Dewan Sementara mengesahkan Peratoeran Tentang Organisasi Ketata-negaraan Soematera Timoer.²⁸ Pada Tanggal 19 Januari 1948, N.S.T. secara resmi di proklamasikan dalam sebuah upacara di Medan. Ratusan tamu resmi hadir dalam upacara itu diantaranya Dr. H.J. van Mook. Dalam upacara *Sejarah Etnis Simalungun*

itu dilakukan pengambilan sumpah terhadap Dr. T. Mansoer sebagai Wali Negara N.S.T. dan anggota Dewan Sementara. Pada kesempatan itu bendera N.S.T., Kuning, Putih dan Hijau, dikibarkan.²⁹ Warna bendera N.S.T. ternyata memiliki warna khusus yaitu kuning (kemuliaan atau kebesaran), putih (ketenangan), dan hijau (kesejahteraan).

Setelah terbentuknya NST, Simalungun dijadikan satu dari enam wilayah NST dengan ibu kotanya Pematang Siantar. Lima wilayah lainnya adalah; Langkat, Tanah Karo, Deli-Serdang, Labuhan Batu dan Asahan. Melalui S.K. Wali Negara Sumatera Timur, sebagai kepala Wilayah Simalungun diangkat M. Rafii Damanik³⁰. Secara hirarkhi, pembagian wilayah NST setelah Wilayah adalah Luhak dan Kampung. Wilayah dipimpin oleh Kepala Wilayah, Luhak oleh Kepala Luhak dan Kampung oleh Kepala Kampung. Pada masa NST, Simalungun tidak hanya menjadi bagian penting dari wilayah NST, tetapi orang-orang Simalungun juga memainkan peranan penting dalam melahirkan negara ini. Para kaum intelektualnya menduduki posisi penting dalam struktur negara itu. Raja Kaliamsyah Sinaga adalah Wakil Wali Negara, Djomat Purba yang aktif menggerakkan demontarsi menuntut pembentukan Komite DIST kemudian menjadi Komandan Barisan Pengawal NST dan Binsara dan Philemon Sinaga diangkat sebagai Komandan Batalion Barisan Pengawal anggota Parlemen RIS mewakili NST.

C. Akhir Revolusi: Simalungun Menjadi Bagian Propinsi Sumatera Utara

Pada periode revolusi antara tahun 1945-1950-an, daerah Simalungun memainkan peran penting dalam

sejarah Sumatera umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya. Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa ketika pusat pemerintahan republik dipindahkan ke kota Siantar, maka Siantar menjadi kota yang sangat sibuk. Di kota ini berbagai kebijakan politik dan ekonomi republik di Sumatera ditetapkan. Dari Simalungun (Siantar) diatur strategi dan pembagian logistik militer dilakukan untuk mendukung operasi militer digaris depan front Medan Area. Menjelang agresi militer Belanda pertama, Juli 1947 Simalungun dijadikan markas komando TRI Gajah II yaitu di perkebunan Bah Jambi. Pada saat yang sama, TRI Komandemen Sumatera memindahkan pusat komandonya dari Palembang ke Parapat. Di Parapat juga didirikan Sekolah Kader Tentara yang diberi nama Tepol Marsuse yang lasung dibawah pengawasan Komandan TRI Sumatera, Letjend Suhardjo H. Wardoyo. Jadi pimpinan tertinggi militer (Letjend. Suhardjo H. Wardoyo) dan sipil (Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan) berada di Simalungun.

Berbagai lasykar rakyat juga tumbuh di Simalungun seperti Barisan Harimau Liar pimpinan A.E. Saragih Ras yang sudah memiliki cabangnya di semua kecamatan di Simalungun. Sementara di kota Pematang Siantar diisi oleh pasukan TRI dan Divisi Panah. Divisi Panah dibawah pimpinan Jonathan Silitonga memindahkan pusat komandonya ke Parapat setelah Belanda berhasil menduduki kota Pematang Siantara pada agresi militer I. Sementara Pesindo Simalungun telah bersatu dengan Legiun Penggempur bermarkas di Parapat. Legiun Penggempur yang dipimpin oleh Timur Pane adalah gabungan dari beberapa lasykar rakyat yang berasal dari Medan Area, seperti Napindo Andalas Utara,

Naga Terbang, Pesindo Tanah Merah, Barisan Bintang Merah, Pesindo Simalungun, Barisan Merah Asahan dan Simalungun. Jadi di Simalungun terdapat tiga kekuatan bersenjata yakni; TRI Divisi Gajah II, Legiun Penggempur, dan Barisan Harimau Liar. Namun semua kekuatan bersenjata itu tidak mampu menahan gerakan maju pasukan Belanda pada agresi militer I, Juli 1947 yang melancarkan serangan ke Simalungun untuk menghancurkan pusat pemerintahan Sumatera dan sekaligus menguasai daerah Simalungun sebagai kawasan perkebunan penting di Sumatera Utara.

Agresi militer Belanda itu memaksa semua barisan bersenjata republik dan pemerintahan sipilnya mengungsi ke luar Simalugun. Belanda akhirnya mampu menguasai Simalungun. Setelah berhasil dalam Agresi Militer I dan membangun sejumlah Negara Federal seperti NST, untuk mematahkan kekuatan Republik yang berarti, Belanda kemudian melancarkan Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Di Sumatera Utara pedalaman Tapanuli Utara menjadi sasaran pertama: kota Balige diserang oleh Belanda dari udara pada pukul 5 pagi dengan dua pesawat Bomber dan tujuh Jager. Dengan cepat pasukan Belanda dapat menguasai seluruh Tapanuli dan ribuan pendukung Republik mengungsi dari kota-kota Porsea, Balige, Siborong-Borong, Tarutung, Sibolga, dan kemudian kota Sipirok dan Padang Sidempuan di Tapanuli Selatan. Para pemuda, tokoh politik, pejabat sipil dan masyarakat biasa dengan dikawal TNI masuk ke pedalaman. Ketika memasuki kota-kota pasukan Belanda hanya menjumpai bangunan-bangunan pemerintahan, pasar, sekolah yang ditinggal penghuninya. Penduduk yang tinggal hanya kaum wanita, orang tua, anak-anak dan bekas

pegawai sipil kolonial, dan pedagang Cina. Pada tanggal 31 Desember 1948, Pemerintah Federal Sementara Hindia Belanda menggabungkan Tapanuli sebagai “Daerah Istimewa” dibawah pemerintahan sipil yang dikepalai oleh TBA (territoriaal bestuursadviseur).³¹ Dengan demikian setelah Agresi Militer II seluruh Sumatera Timur dan Tapanuli berhasil dikuasai oleh Belanda.

Setelah Agresi Militer II, pihak Republik di Sumatera mengubah sistem pemerintahan dan komando militernya. Beberapa saat sebelum Yogyakarta dikuasai tentara Belanda dalam Agresi Militer ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta telah memberi mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri kemakmuran di Sumatera, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).³² Pada tanggal 19 Desember 1948 Kabinet PDRI dibentuk di Sumatera yang diketuai Mr. Syafruddin.³³ PDRI kemudian membentuk komisararis di tiap-tiap propinsi di Sumatera yang berfungsi mewakili pemerintah pusat di tiap propinsi itu.³⁴ Sebagai Komisararis Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dipilih Mr. S.M. Amin, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.³⁵ Di Sumatera Utara ada dua Gubernur Militer. Pertama, Tengku Daud Beureuh yang membawahi wilayah sebelah utara N.S.T. yakni mencakup Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Kedua adalah Dr. Ferdinand Lumban Tobing yang membawahi wilayah di sebelah barat dan selatan N.S.T., yaitu di Tapanuli dan wilayah barat Sumatera Timur.³⁶ Di setiap keresidenan, dibentuk Dewan Pertahanan Daerah (D.P.D.) yang berwenang mengurus pemerintahan sipil dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Militer.

Disamping melakukan reorganisasi struktur pemerintahan sipil, komando TNI juga mengalami perubahan. Mayor Jendral Suhardjo Hardjo Wardjoyo digantikan oleh Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorium Sumatera. Daerah Sumatera dijadikan 4 teritorium yakni; Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Tapanuli Sumatera Timur, dan Aceh.³⁷ Daerah Tapanuli, Sumatera Timur bagian Selatan (Asahan dan Labuhan Batu), menjadi sub-Teritorium VII di bawah Komandan Letkol A.E. Kawilarang.³⁸ Mayor Ibrahim Adjie diangkat menjadi wakil Gubernur Militer untuk daerah Tapanuli Selatan dan Sumatera Timur Selatan.³⁹

Pada dasarnya bentuk Pemerintahan Militer Republik saat itu terdiri dari struktur komando TNI dan pemerintahan sipil. Jadi setiap komandan Batalyon diberi wewenang oleh komandan TNI sub Teritorium VII Teritorium Sumatera untuk membentuk pemerintahan sipil. Secara hierarkis strukturnya adalah PDRI, Komandan TNI Teritorium Sumatera, Komandan sub-Teritorium IV, Komandan Sektor ada 4 buah dan Komandan Batalyon beserta kepala pemerintahan sipil (Bupati). Para komandan batayonlah mengorganisir pemerintahan sipil di daerah yang dikuasanya dengan melibatkan seluruh rakyat.

Yang sangat efektif dalam perencanaan dan pelancaran aksi gerilya kesatuan TNI adalah organisasi Pertahanan Rakyat Semesta (P.R.S.) yang biasa dibentuk di setiap daerah oleh komandan batalyon yang ditempatkan di situ. P.R.S. bertujuan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk menegakkan Negara Republik Indonesia, anti imperialis, dan tanpa kompromi dengan Belanda.⁴⁰ Dari

P.R.S.-P.R.S. inilah logistik TNI seperti beras dipenuhi dengan cara mengutip dari penduduk di daerah pendudukan Belanda/NST. P.R.S. juga berfungsi sebagai penyuplai informasi baik tentang kondisi militer pasukan Belanda dan memberikan perlindungan, ataupun tentang keadaan daerah-daerah yang akan dijadikan target serangan TNI. Wanita sering memainkan peran penting dalam organisasi P.R.S. ini, khususnya informasi tentang rencana-rencana militer Belanda.⁴¹ Informasi yang disampaikan P.R.S. ternyata sangat efektif bagi TNI untuk menghindari dari sergapan militer Belanda, melancarkan aksi sabotase, dan menghadang patroli Belanda. Organisasi P.R.S. juga berperan penting dalam menyebarkan propaganda Republik, baik melalui selebaran yang ditempel di pohon-pohon, dinding rumah atau memberikan ceramah langsung pada penduduk desa.

Disamping adanya bantuan logistik dari P.R.S., dukungan logistik lainnya seperti senjata, pakaian dan peralatan militer lainnya didapat dari perdagangan barter dengan Malaysia dan Singapura. Di tiap Komandan Batalyon ada didirikan Oesaha Batalyon yang berfungsi menyuplai logistik TNI. Sebagai contoh, Oesaha Batalyon TNI yang menguasai wilayah Langkat/Aceh melakukan bisnis hasil-hasil perkebunan karet yang mereka kuasai. Karet ini dijual ke Semenanjung Malaysia melalui pedagang-pedagang Cina. Para pedagang Cina ini atas nama Oesaha Batalyon memuat hasil-hasil perkebunan ke tongkang-tongkang atau boat yang di Aceh dikenal dengan kapal tjorak dan menembus blokade angkatan laut Belanda menuju Semenanjung Malaysia. Hasil-hasil perkebunan

ini ditukar dengan alat-alat militer seperti sepatu tentara, senjata, amunisi, motor angkutan, dan tekstil yang umumnya berasal dari bekas-bekas tentara sekutu.⁴² Dengan adanya dukungan logistik itulah TNI melakukan serangan gerilya terhadap daerah kekuasaan Belanda/ N.S.T. di Sumatera Utara.

Operasi gerilya TNI atau P.R.S. juga diarahkan untuk memperoleh senjata, bahan-bahan pakaian, makanan, obat-obatan dari daerah N.S.T. sendiri. Untuk mendapatkannya pos-pos Ondernemings Wachters (O.W.) dan polisi, dan konvoi militer Belanda diserbu. Selama bulan-bulan Januari, Februari dan Maret 1949 aksi gerilya TNI bertujuan untuk melumpuhkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah perkebunan N.S.T. Usaha sabotase terhadap perkebunan tembakau dilakukan dengan membakar dan memusnahkan bangsal-bangsal tembakau, gudang, dan kilang-kilang di perkebunan, serta memabat tanaman tembakau. Di perkebunan karet pohon-pohon karet dirusak. Pengusaha-pengusaha perkebunan serta pegawai-pegawainya yang dibenci buruh dibunuh. Sarana infrastruktur seperti jembatan-jembatan dirusak, dan ranjau darat ditanam pada jalan-jalan yang dilalui aparat militer dan pasukan musuh.⁴³

Di Langkat, pada bulan Januari 1949 serangan gerilya secara intensif masuk dari Aceh. Serangan ini dipusatkan pada Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, Namu Unggas, Kuala Namu dan Gebang. Beberapa perkebunan menjadi tidak aman; jalan-jalan di perkebunan ditanami ranjau dan banyak instalasi perkebunan yang dibakar. Pada tanggal 14 Januari 1949, bangsal buruh dan gudang getah di perkebunan Kuala Namu yang berisi 20 ton getah

karet dibakar. Serangan seperti ini tidak hanya terjadi di daerah Langkat, tetapi juga terjadi di hampir seluruh wilayah kekuasaan N.S.T.

Di Simalungun, wilayah-wilayah di sekitar jalan raya dari Lima Puluh ke Kisaran dan dari Tanah Jawa dijadikan pangkalan operasi Gerilya TNI di bawah komando Kapten Bunga Simanungkalit (Komandan Batalion IV). Serangan gerilya TNI dari Samosir masuk ke Simalungun menyerang pos-pos Barisan Pengawal N.S.T. dan merampas pesersenjataan mereka. Di Asahan Selatan/Labuhan Batu aksi-aksi sabotase terjadi di Sungai Kepayang, Merbau, Sipare-pare dan daerah Aek Kota Batu.⁴⁴

Sebagai contoh serangan gerilya yang sungguh-sungguh menggoncangkan pemerintah N.S.T. dan pihak Belanda bisa disebutkan serangan TNI pada tanggal 17 Februari 1949 terhadap Perkebunan Tembakau Klambir V/ Klumpang di daerah Deli Serdang, kira-kira 6 Km sebelah Barat kota Medan. Pada peristiwa itu 3 pengusaha perkebunan bangsa Belanda meninggal dan 33 bangsal tembakau hancur. Serangan ini cukup berhasil karena para buruh perkebunan ikut membantu. Serangan terhadap perkebunan Klambir V Klumpang ini menarik perhatian para petinggi militer Belanda dan penguasa N.S.T. Sejumlah pejabat seperti Komisaris Kerajaan Belanda untuk Sumatera Timur, Komandan militer Belanda Jenderal P. Scholten dan anggota Kabinet N.S.T. menghadiri pemakaman 3 pejabat perkebunan tersebut.

Yang juga menyulitkan pemerintahan N.S.T. adalah aksi TNI terhadap para kepala desa dan pegawai N.S.T. yang bertugas di dalam daerah yang dekat dengan pangkalan

gerilya TNI. Mereka juga menjadi sasaran serangan gerilya. Misalnya di Tanah Karo selama bulan April '49 gerilya TNI memasuki desa-desa di Deli Hulu sebanyak 90 kali dan menyerang kepala desa dan pegawai N.S.T. setempat yang dituduh sebagai kolaborator. Akibatnya 70 kepala desa tidak berani lagi tinggal di daerah itu dan ikut mengungsi ke pos-pos tentara keamanan Belanda atau ke Brastagi dan Kabanjahe. Kepala kampung N.S.T. yang mau bekerja sama tetap tinggal di wilayah itu. Di wilayah yang ditinggalkan kepala pemerintah lokal, TNI mengangkat kepala-kepala kampung yang baru.⁴⁵

Memasuki bulan Maret aktivitas serangan gerilya TNI semakin meluas. Para buruh perkebunan yang kemudian beralih menjadi petani, ikut dalam aksi serangan gerilya terhadap perkebunan-perkebunan. Daerah Simalungun sejak tanggal 24-27 Maret telah disusupi oleh rombongan TNI, P.R.S., pemerintahan sipil, tentara Pelajar dan kepolisian. Mereka membangun markas/pemerintahan militer di daerah Tigadolok, Sektor Pematang Siantar, Pane Tonga/Sidamanik, di sekitar Tanah Jawa dan Tebing Tinggi. Di Tanah Karo (Bandar Baru) juga terjadi serangan terhadap patroli Militer Belanda, menyebabkan seorang perwira anggota Komisi Tiga Negara (K.T.N.) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang sedang melakukan perjalanan dengan mobil dari Medan ke Berastagi, tewas.⁴⁶

Aktivitas serangan gerilya kemudian sampai pada tingkat melakukan penyusupan ke wilayah Langkat Hulu., Serdang Hulu, Tanjung Muda Hulu, Tanjung Muda Hilir dan Senembah Hulu. Di Simalungun (Tanah Jawa dan Tiga Dolok) dan Asahan Labuhan Batu serangan gerilya semakin

meningkat. Di Rantau Prapat serangan terhadap O.W. berhasil membujuk karyawan PU bergabung dengan T.N.I. Tujuh anggota PU tewas dan kepala administrasi perkebunan berbangsa Belanda dibunuh dan 12 orang luka-luka. Di Aek Pangka Asahan, rumah administatur perkebunan dirampok, 4 orang O.W. dengan 2 senapan dan sejumlah amunisinya dibawa kabur. Demikian juga di Panigoran rumah pejabat perkebunan dibakar, asisten dan kantor-kantor perkebunan dibakar.⁴⁷ Akumulasi serangan itu benar-benar mengancam pemerintahan N.S.T. Wilayah N.S.T. sudah banyak yang dikuasai Republik sementara Pemerintahan TBA di Tapanuli juga hanya eksis di Kota-kota, sepanjang radius 5 km.⁴⁸ Di luar itu adalah daerah kekuasaan pemerintahan Gerilya Republik.

Pemerintah N.S.T. dan militer Belanda segera mengambil tindakan terhadap aks-aksi gerilya itu. Pasukan Belanda dan Barisan Pengawal N.S.T. mulai mengambil tindakan balasan yang refresif sampai ke desa-desa di wilayah yang dinilai menjadi tempat utama aktivitas gerilya.⁴⁹ Operasi anti gerilya ini difokuskan untuk menghancurkan seluruh pasukan gerilya secara fisik, menghancurkan sumber-sumber perbekalan pasukan gerilya dan membebaskan tawanan. Usaha-usaha yang utama adalah menghancurkan sumber produksi rakyat dan melakukan teror, intimidasi, dan pembersihan terhadap rakyat. Rakyat juga dipaksa untuk pindah ke daerah yang dikuasai N.S.T. dengan bujukan dan rayuan. Disamping itu pasukan Belanda juga mengawasi dengan ketat lalu lintas penduduk yang masuk ke daerah gerilya. Penduduk yang membawa bahan-bahan pokok seperti beras, garam, gula, ikan asin, obat-obatan dan

minyak tanah diperiksa setiap melewati pos-pos penjagaan yang biasanya dijaga oleh Barisan Pengawal N.S.T.⁵⁰

Pihak Belanda dan N.S.T juga sering menyebarkan pamflet-pamflet yang melarang masyarakat setempat memberikan bantuan apapun kepada pasukan gerilya yang masuk ke wilayah N.S.T. Pemerintah N.S.T. meminta kepada semua penghulu atau kepala kampung dan kepala distrik (camat) untuk melaporkan kepada pos-pos polisi atau Barisan Pengawal N.S.T. terdekat, bila mendengar, menemukan dan melihat ada pasukan gerilya baik perseorangan atau kelompok. Mereka juga melarang dan menangkap orang yang berkumpul lebih dari tiga orang. Pengadilan N.S.T. sering menjatuhkan hukuman berat kepada rakyat yang terbukti bekerjasama dengan pasukan gerilya. Di Tanah Karo, Langkat Hulu, dan Serdang Hulu rakyat ada yang disiksa dengan kejam oleh Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service (Nefis) dinas intelijen angkatan bersenjata Belanda.⁵¹ Pemerintah N.S.T. juga membredel harian Waspada (harian pro republik yang terbit di Medan), menangkap tokoh-tokoh republik yang tergabung dalam Front Nasional⁵², seperti Sugondo Kartoprodjo, Dr. Djabangun, M.A. Dasuki, serta melarang semua pegawai N.S.T. masuk Front Nasional karena organisasi itu dianggap merusak negara.⁵³ Tindakan pemerintah N.S.T. itu mencerminkan kegusarannya menghadapi aktivitas gerakan republik di wilayah N.S.T. dan perkembangan-perkembangan politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

Perpecahan politik di dalam N.S.T. kemudian menjadi meluas. Ada tiga golongan yang saling berselisih tentang masalah kebijaksanaan penting N.S.T. Pertama

adalah golongan yang secara tegas menentang semua campur tangan terhadap otonomi politik N.S.T., baik itu dari Pemerintah Belanda, Pihak Kerajaan, ataupun Republik. Kedua, adalah golongan kerajaan, yang berusaha memulihkan kerajaan-kerajaan masa lampau. Ketiga adalah kelompok pro-republik, yang ingin segera mencapai kesepakatan dengan Republik.⁵⁴ Pemerintahan N.S.T. menjadi lumpuh akibat perselisihan yang muncul di antara tiga kelompok ini. Akan tetapi dalam masalah Federasi Sumatera mereka sepakat untuk menentangnya.

Pada tanggal 30 Juni 1949 akhirnya pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta dan kesatuan-kesatuan TNI kemudian mengambil alih daerah itu. Enam hari kemudian Soekarno dan pemimpin-pemimpin RI lainnya memasuki Yogyakarta dengan sambutan yang luar biasa meriah dari rakyat. Pada tanggal 21 Juli Dewan Siasat Militer mengadakan rapat untuk membicarakan hasil perundingan Roem-Royen dengan TNI. Pada saat yang sama Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat yang telah diberikan oleh Soekarno-Hatta sebagai Kepala Pemerintahan Darurat.⁵⁵

Perkembangan-perkembangan ini memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup Negara negara federasi di Sumatera. Pada tanggal 2 Agustus delegasi Republik dan B.F.O. dalam Konferensi Inter Indonesia, telah menyetujui prinsip-prinsip dasar Undang-undang Dasar Sementara Negara Indonesia Serikat.⁵⁶ Dengan kesepakatan ini, mereka akan menjadi satu front dalam Perundingan K.M.B. di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949. Kesepakatan itu juga menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat diantara Republik dan B.F.O.

Perjanjian Konferensi Inter Indonesia tidak hanya mengakui, bahwa Republik akan menjadi kesatuan yang besar dalam Negara Indonesia Serikat, tetapi persetujuan itu tidak ada menegaskan bahwa negara-negara federal dibolehkan memiliki angkatan bersenjata sendiri. Artinya? Mereka tidak mungkin akan bertahan kalau diserang kekuatan militer Republik. Sebaliknya unit-unit militer RI pada saat pengakuan kedaulatan akan digabung ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), dengan TNI sebagai kekuatan intinya.⁵⁷

Selak bulan Desember kekuatan politik di Sumatera Timur dengan terang terangan berusaha untuk menghancurkan Negara Sumatera Timur (NST). "Penyerahan" kedaulatan menandai tercapainya tujuan Revolusi Indonesia yang utama. tetapi sebelum perhatian semua orang tertuju pada masalah sosio ekonomi, terjadi suatu perkembangan penting yang bermuara pada politik. Perkembangan ini dikenal dengan "Gerakan Penyatuan (Unitarisme)", suatu perkembangan yang mendominasi perkembangan lainnya dalam masa tujuh bulan tahun 1950.⁵⁸ Setelah Belanda tidak lagi menjadi musuh, kini N.S.T. menjadi lawan mereka. Gerakan Unitaris di Sumatra Timur dimulai dari Tanah Karo, daerah N.S.T. yang paling kuat dibawah kekuasaan de facto Republik. Pada tanggal 28 Nopember sebuah pertemuan Massa diadakan oleh Pertahanan Rakyat Semesta (P.R.S.) Tanah Karo di Tiganderkat Ibukota Pemerintahan Pentabdiran Militer Karo RI) mengeluarkan suatu resalusi, yang menyatakan, bahwa rakyat Kabupaten Tanah Karo Republik Indonesia dengan tekad bulat menuntut kepada Pemerintah Pusat RI, agar Sumatera Timur dimasukkan ke

dalam daerah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Pada bulan berikutnya demonstrasi yang dikenal dengan nama Aksi Tuntutan Rakyat (A.T.R.) menjalar ke seluruh Tanah Karo. Antara tanggal 17 Februari sampai 5 Maret 1950 tercatat delapan kali terjadi aksi demonstrasi yang diperkirakan tiap hari dihadiri oleh 50.000 orang. Pertemuan antara delegasi Aksi Tuntutan Rakyat (A.T.R.) dengan Pemerintah N.S.T. mencapai 5 kali, baik di Medan, Brastagi, maupun di Kaban-jahe.⁵⁹

Demonstrasi menuntut pembubaran N.S.T. kemudian menialar sampai ke Asahan Labuhan dan Batu (AsLab). Sebuah pertemuan 22 kepala desa dari wilayah Kualuh Hulu Asahan Selatan menyatakan tuntutan agar daerah AsLab dijadikan bagian dari Republik Indonesia.⁶⁰ Pada tanggal 16 Februari 1950 dibawah pimpinan Ibrahim Nasution sebanyak 706 orang rakyat Aslab melakukan demonstrasi di Medan. Para demonstran yang mewakili 76.291 orang rakyat AsLab menyatakan "Rakyat menuntut supaya Asahan Selatan, Labuhan Batu dengan segera diserahkan kepada Republik Indonesia dengan tidak bersyarat"⁶¹ Hanya dalam dua minggu setelah RIS berdiri N.S.T. telah menghadapi gerakan "pemisahan diri".

Gerakan Unitaris (kesatuan) selama bulan Januari-Agustus 1950, yang melibatkan Front Nasional, Vaksentral, Partai politik, Organisasi Keagamaan dan sosial, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa Organisasi Pemuda, Perkumpulan Wanita, Serikat Buruh, Organisasi Petani, P.R.S., dan Komandan TNI, telah meluas ke seluruh daerah Sumatera Timur. Demonstrasi massa, pertemuan umum dan resolusi resolusi, pemogokan, dan pendudukan tanah perkebunan,

semuanya diarahkan untuk menghancurkan N.S.T.⁶²

Pada tanggal 19 Maret Parlemen RIS menerima mosi yang diajukan oleh 24 anggota Parlemen yang menuntut pembubaran N.S.T. dan penggabungan Sumatera Timur ke dalam Republik Indonesia.⁶³ Perdebatan mosi yang dikenal dengan Mosi Yamin itu, berlangsung alot. Sejumlah tokoh federalis terutama dari Negara Sumatera Timur yang menjadi anggota Parlemen, seperti Nerus Ginting Suka, O.K. Ramli, Philemon Sinaga, menentang habis habisan mosi itu. Mereka berusaha mengarahkan agenda sidang ke pembahasan masalah Undang-Undang Federal dan tidak ingin mempersoalkan tentang penggabungan negara negara bagian. Akan tetapi suara mereka tenggelam dilanda gelombang dahsyat cita cita negara kesatuan dari sebagian besar anggota Parlemen. Parlemen RIS telah menyetujui Mosi Yamin untuk mengga-bungkan Sumatera Timur menjadi bagian dari Republik Indo-nesia dengan perbandingan suara 73 lawan 11.⁶⁴ RIS sekar-ang tinggal 3 negara, yaitu Republik Indonesia, N.S.T., dan Negara Indonesia Timur (N.I.T.).

Ketika Mosi Yamin diperdebatkan di Parlemen RIS, offensif politik yang baru untuk menghancurkan N.S.T. muncul di Medan. Sebanyak 44 wakil dari organisasi anggota Front Nasional memutuskan mengadakan Kongres Rakyat se-Sumatera Timur (K.R.S.S.T.) sebagai forum tunggal untuk menuntut pembubaran N.S.T.⁶⁵ Pada tgl 27 April Kongres Rakyat Sumatera Timur dibuka di sebuah bangsal besar di Medan. Ruangan dihiasi dengan bendera bendera Republik, gambar Presiden Sukarno, dan slogan slogan mendukung Negara Kesatuan. Sebanyak 417 delegasi dari

organisasi pro Republik di seluruh N.S.T. menghadiri kongres itu.⁶⁶ Delegasi Pemerintah RIS yang dipimpin oleh Wangsa Widjaya dan Mr. Tambunan (Wakil Parlemen RIS) juga hadir dalam kongres itu.⁶⁷

Pemerintah N.S.T. melarang pers meliput kongres itu. Meskipun demikian, melalui jaringan informasi internal peristiwa itu sebagai cerminan kuatnya dukungan gerakan negara kesatuan meluas ke seluruh wilayah Negara Sumatera Timur. Suasana kongres itu sendiri sudah menunjukkan bahwa moment itu sebagai upacara untuk memastikan keruntuhan N.S.T. dan RIS. Kongres yang berlangsung selama tiga hari itu dan dihadiri oleh ± 3.000 orang telah menghasilkan resolusi mendukung penggabungan Sumatera Timur ke dalam Republik Indonesia dan menghapuskan N.S.T.⁶⁸

Dalam pembukaan Kongres, Moh. Said menyatakan, bahwa persoalan utama pada masa itu adalah bukan pada paham federalis dan unitaris, tetapi sisa sisa kolonialis yang masih eksis di tengah tengah masyarakat Sumatera Timur. Kongres yang berlangsung selama tiga hari itu dan dihadiri oleh kira kira 3.000 orang telah menghasilkan resolusi mendukung penggabungan Sumatera Timur ke dalam Republik Indonesia dan menghapuskan N.S.T. Resolusi dan pidato - pidato itu secara panjang lebar mengkritik Pemerintah RIS, karena lambat melaksanakan Mosi Yamin dan Yunan Nasution Yang sudah disetujui oleh Parlemen RIS.⁶⁹

Secara eksternal pembongkaran negara Indonesia Seri-kat (Struktur Federal) telah berjalan semakin cepat bagi mereka yang berharap memulihkannya kembali. Pada tanggal 8 Mei 1950, Sidang Istimewa Dewan Perwakilan

N.S.T. telah memberikan persetujuan kepada Pemerintah N.S.T. untuk mengadakan negosiasi dengan RIS, khususnya tentang penggabungan Sumatera Timur ke dalam Negara Kesatuan. Pada tanggal 14 Mei Dr. Mansoer bersama-sama dengan Presiden N.I.T., Sukowati memberi kuasa kepada Moh. Hatta untuk bertindak atas nama kedua pemerintahan N.S.T. dan N.I.T. untuk berunding dengan Republik Indone-sia.⁷⁰

Pemimpin N.S.T. dan sebagian besar pendukungnya khawatir, jika Sumatera Timur digabungkan ke dalam Repu-blik sebelum negara kesatuan dibentuk, kontrol politik akan jatuh ke dalam kekuasaan kelompok radikal yang tampak semakin menguasai sebagian besar massa rakyat di Sumatera Timur. Terulangnya kembali revolusi sosial yang sangat menakutkan itu dalam kondisi itu nampak jelas di dalam pemikiran mereka. Itulah yang akan dihindari oleh P.M. RIS Moh. Hatta. Oleh karena itu permintaan pemimpin N.S.T. agar negara itu jangan dibubarkan dahulu sebelum negara kesatuan secara resmi dibentuk, diterima oleh Hatta. Sebaliknya Hatta menolak Resolusi Kongres Rakyat untuk menggabungkan N.S.T. ke dalam Republik. Hatta menyarankan kepada delegasi K.R.S.S.T. di Jakarta agar menggunakan kesabaran sehingga proses yang teratur dapat dilakukan un-tuk membubarkan sistem Federal.⁷¹

Pada tanggal 10 Mei secara resmi Hatta mengumumkan program untuk mendirikan Negara Kesatuan. Program itu me-rupakan piagam persetujuan antara Pemerintah RIS mewakili N.S.T. dan N.I.T dengan RI. Piagam Persetujuan itu menyatakan bahwa semua pihak telah setuju untuk melaksa-nakan bersama sama membentuk Negara

Kesatuan Proses penjelmaan RIS menjadi Negara Kesatuan adalah sebagai berikut: Setelah Pemerintah N.S.T. dan N.I.T. menyerahkan mandatnya kepada Panitia RIS, delegasi Pemerintah RIS berunding dengan delegasi Pemerintah RI. Sesudah itu dibentuk panitia untuk mengubah Konstitusi Sementara RIS yang anggotanya terdiri dari wakil RIS dan RI. Rencana UUD baru kemudian diajukan kepada DPR dan Senat RIS, serta kepada B.P. KNIP. Setelah dilaksanakan perubahan Konstitusi Sementara RIS, Pemerintah RIS dan RI bubar, dan kemudian Presiden mengupayakan pembentukan pemerintahan baru Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷³

Pada tanggal 10 Juli Pemerintah RIS mengangkat 4 anggota Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur (PPNKST) untuk melakukan tahap akhir penggabungan N.S.T. ke dalam NKRI. Sarimin Rek-sodihardjo dipilih sebagai Ketua Panitia. Tiga anggota lainnya adalah Mr. Moh. Yusuf, Mr. Moh. Amin, bekas Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Raja Kaliamsyah Sinaga, Wakil Wali Negara Sumatera Timur.⁷⁴

Setelah enam hari melakukan diskusi dan perdebatan sengit dengan pemimpin pemimpin N.S.T. dan Republik, PPNKST mengumumkan Urgensi Program untuk memasukkan Sumatera Timur ke dalam Negara Kesatuan. Dalam Urgensi Program PPNKST dinyatakan, bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Sumatera Timur, daerah Sumatera Timur akan dijadikan sebagai daerah administratif (tidak otonomi) sesuai dengan azas Undang Undang Pokok Pemerintahan Daerah Republik Indonesia No. 22 1948.⁷⁵ Untuk mempercepat proses pembentukan Propinsi Sumatera Utara, maka Menteri Dalam Negeri RIS

membentuk Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU). Panitia itu terdiri dari wakil wakil dari 3 wilayah yang akan dijadikan Propinsi Sumatera Utara yaitu, Aceh, Tapanuli, dan Negara Sumatera Timur. Sarimin Reksodihardjo diangkat menjadi Ketua dan Pejabat Sementara Gubernur Sumatera Utara.⁷⁶



Gambar. Dr. T. Mansyur Walinegara NST diapit Kolonel Kawilarang (kiri) dan Komandan Barisan Pengawal NST Tn Djomat Purba (kanan) membacakan mandat penggabungan NST ke NKRI di Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, 1950. (Sumber: kitlv.nl)

Dengan dibentuknya P4SU, pemimpin pemimpin N.S.T. kehilangan harapan untuk mempertahankan otonomi Sumatera Timur. Raja Kaliamsyah bersedia diangkat sebagai anggota P4SU. Pejabat pejabat senior N.S.T. melepaskan Jabatannya, meskipun N.S.T. belum resmi bubar. Ada dua alasan, pertama, tidak. sanggup bekerja dengan Pemerintah Republik dalam membantu menghancurkan N.S.T. Kedua, mereka merasa karirnya agak terhambat di masa depan.

Sementara itu beberapa pegawai N.S.T. terutama di lapisan bawah tetap memilih masuk ke dalam pembentukan negara kesatuan, dan bekerjasama dengan Masyumi.⁷⁷

Akhirnya pada tanggal 13 Agustus Dewan N.S.T. menge-sahkan Undang undang pembubaran N.S.T. Semua kekuasaan, dan alat perlengkapan pemerintahan dialihkan kepada Pemer-intah Negara Kesatuan yang diwakili oleh PPNKST.⁷⁸ Dua hari kemudian Negara Kesatuan diproklamasikan di depan kantor Gubernur Militer di Medan. Dr. Mansoer secara resmi menyerahkan semua kekuasaan dan wewenang Pemerintah N.S.T. kepada Ketua PPNKST Sarimin Reksodihardio.⁷⁹ Pada hari ulang tahun ke 5, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan diseluruh Sumatera Timur. Simalungun bagian dari keresidenan Sumatera Timur, digabungkan dengan Aceh dan Tapanuli menjadi Provinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan. Kekuasaan otonomi dan administratif pemerintahan propinsi yang mencakup 15 wilayah pemerintahan diatur dengan UU No. 22/1948.

Dengan demikian berakhirilah era Negara Sumatera Timur, negara yang paling lama bertahan sejak terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya bertahan 3 tahun saja (1947-1950). Simalungun kemudian kembali menjadi wilayah NKRI dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang saat itu meliputi Aceh dan Tapanuli yang juga dilebur yang semula berstatus propinsi sendiri (Keresidenan Tapanuli) sejak zaman kolonial.

Catatan

¹Sofyan Effendi, Transkrip Wawancara dengan Mr.T.M Hasan, Brastagi, 1 Agustus 1990, hlm.9; Koesno Diprodjo, Himpunan Undang Undang, Praturan-peraturan, penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945, Jakarta, 1955, hlm. 117-120 dan M.Yamin, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Naskah Persiapan UUD 1945 I, Jakarta , 1959.

²Dekrit itu menetapkan 10 orang residen di seluruh Sumatera. Sofyan Effendi, Transkrip, Wawancara dengan Mr.T.M Hasan, Brastagi, 1 Agustus 1990, hlm. 26; Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Badan Musyawaran Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan : 1976, hlm. 150 dan 749.

³Penda-ratan tentara Sekutu di pelabuhan Belawan Medan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1945. Kedatangan Brigade-4 Divisi India ke-26 dibawah pimpinan TED Kelly, diikuti pula oleh para pembesar NICA. Upacara penyerahan serah terima kekuasaan dilakukan pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Sawamura se-dangkan pihak Sekutu diwakili oleh Brigadir Jenderal TED Kelly.. Setelah selesai serahterima kekuasaan, tentara Sekutu langsung berangkat ke Medan. Mereka ditempatkan pada tempat-tempat yang telah dipersiapkan oleh Letnan Brondgeest yang telah hadir di kota Medan , di beberapa tempat seperti di Hotel de Boer (Dharma Deli), Grand Hotel (Granada), Hotel Astoria (Angkasa), Gedung NHM (Nederlands Handels Maatschappij), dan lain-lain. Beberapa hari kemudian, kompi Batalyon-6/SWB pindah ke Brastagi dan menempati gedung Plantersschool (bekas tempat tawanan sipil Belanda) masa pendudukan tentara Jepang. Edisaputra, Sumatera dalam Perang Kemerdekaan : Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda, Jakarta: Yayasan Bina Satria '45, 1987, hlm. 165-167.

⁴Muhammad Radjab, Tjatatatan di Sumatera . Djakarta: Balai Pustaka, 1949, hlm. 17-20.

⁵Marnicus Hutasoit, Percikan Api Revolusi di Sumatera, Jakarta: BPK G. Mulia, 1986, hlm. 54-56.

⁶Tentang pembentukan departemen dan jawatan pemerintahan baca, Teuku M. Isa, op. cit., hlm. 383-410.

⁷T.M. Hasan, op.cit., hlm. 13-14.

⁸Rufinus Lumbantobing, dalam Pemerintah Poesat Soematera, hlm. 22-23.

⁹Teuku M. Isa (ed.), op. cit., hlm. 386-387.

¹⁰Tentang gagasan federal pada masa sebelum Perang Dunia II , baca A.Arthur Schiller, op. cit., hlm. 14-19. H.J. van Mook, Indonesie Netherland en de Wereld, Batavia: De Opbouw, 1949, hlm. 120.

¹¹H.J. van Mook, Indonesie Netherland en de Wereld, Batavia: De Opbouw, 1949, hlm. 120. Tentang riwayat H.J. van Mook baca, C. Smit, Dekolonisasi Indonesia Fakta dan Ulasan, Jakarta: Pustaka Azet, 1986, hlm. 59-83.

¹²C. Smit, op. cit., hlm. 14-15.

¹³Ibid., hlm. 15. Teks lengkap Deklarasi 10 Februari 1946, dicatat dalam Naar Een Nieuw Statuut, Indonesie Gelijkwaardig Deelgenoot Binnen Hetrijck Verband, hlm. 1921.

¹⁴Tuntutan mereka berdasarkan pasal 3 Perjanjian Linggarjati. Lihat Pemerintah Federal Sementara Indonesia, Lampran 2 Bagian Yang Kedoea Kearah Ketertiban Hoekoem Baroe di Indonesia, Batavia-C.: Vieser & Co, 1948, hlm. 9-15.

¹⁵Anggota Komite D.I.S.T. adalah Dr. T. Mansoer, Tengku Hafaz, Mr. T. Dzulkarnain, Datuk Hafiz Haberham, Djomat Purba, Raja Silimakuta, Madja Purba, Anak Raja Pane, Raja Kaliamsyah Sinaga, Orang Kaya Ramli, Sembiring Meliala, T. M. Bahar, Mr. Jaidin Purba. Propinsi Sumatera Utara, op. cit., hlm. 216.

¹⁶Wawancara dengan Tengku Luckman Sinar, Medan: 21-7-1994; J.J. van de Velde, op. cit., hlm. 203.

¹⁷Ibid., hlm. 192-193.

¹⁸Badan Penerangan Negara Sumatera Timur, op. cit., hlm. 9 dan Propinsi Sumatera Utara, op. cit., hlm. 216.

¹⁹S.M. Amin, Kenang-Kenangan di Masa Lampau, Jakarta: Pradnja Paramita, 1978, hlm. 123.

²⁰Recomba (J.J. van de Velde), "Rapport van den Recomba voor Noord-Sumatra over de eerste helft van September 1947", hlm. 5-6, Koleksi A.S. No.6

ARNAS

²¹Van Mook menjelaskan, bahwa masa depan kerajaan-kerajaan tradisional di Sumatera Timur harus menunggu perkembangan selanjutnya dan mereka harus berperan aktif dalam membangun struktur pemerintahan baru di daerah itu. Michael van Langenberg, op. cit., 591.

²²Staatsblad van Nederlandch-Indie, No. 176, 1947. Teks lengkap dekrit itu dicatat dalam, Kementerian Penerangan R.I., Propinsi..., hlm. 121 dan Badan Penerangan Negara Soematera Timoer, op. cit., hlm. 13.

²³Recomba adalah penguasa sipil tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Lt. Gouverneur Generaal di Batavia. Recomba Sumatera Utara didirikan pada bulan Juli 1947. Recomba bersama dengan tentara Belanda berupaya memperluas pengaruh Belanda di wilayah Sumatera. Recomba diperintahkan untuk membangun kembali pemerintahan sipil di Wilayah Sumatera. A.Arthur Schiller, op. cit., hlm. 74 dan 201.

²⁴Semua anggota dewan diangkat dari kelompok etnis tertentu. Susunan Dewan Sementara itu adalah; Ketua, Dr. T. Mansoer (Melayu) dan Ketua II, Raja Kaliamsyah Sinaga (Simalungun). Anggota-anggotanya adalah; Tengku Hafaz, O.K. Ramli, Datuk Kamil, Datuk Hafiz Haberham, Datuk Abdul Wahab, Sajoeti, Muhammad Noer, Tengku M. Bahar, Florencius Lumban Tobing, Dr. F.J. Nainggolan, H.F. Sitompul, Mr. Djaidin Purba, Djomat Purba, Raja Sembiring Meliala, C.B.W. Manusiwa, A.H.F. Rotty, Tan Bun Djinn, Tan Wee Beng. Anggota tambahan adalah Tengku Bahriun, Orang Kaya Djafar, Abdul Rahman, C.J.J. Hoogenboom, D.P. van Meerten, P.W. Jansen, J.F. Enkoroma Koffie, dan Partap Singh. Badan Penerangan Negara Soematera Timoer, op. cit., hlm. 27 dan T. Lah Husny, op. cit., hlm. 80-89.

²⁵Michael van Langenberg, op. cit., 1976, hlm. 611 dan Badan Penerangan Negara Soematera Timoer, op. cit., hlm. 14-15

²⁶Ibid., hlm. 14-15 dan 25-27; Kementerian Penerangan R.I., Propinsi...221-222.

²⁷Teks lengkap Dekrit Van Mook dimuat dalam Pemerintah Federal Sementara Indonesia, op. cit., hlm. 148-150 dan tentang proses pembentukan N.S.T. baca, Michael van Langenberg, op. cit., 1976, hlm. 588-666.

²⁸Peratoeran Oendang-Oendang Dewan Negara Soematera Timoer,

No.1, 31 Desember 1947. Teks selengkapnya peraturan itu dimuat dalam Pemerintah Federal Sementara Indonesia, op. cit., hlm. 158-181; Warta Resmi Negara Soematera Timoer, No. 3 1948.

²⁹Mengenai jalannya upacara itu dan nama-nama pejabat yang disumpah, baca Propinsi Sumatera Utara, op. cit., hlm. 220-233; Badan Penerangan Negara Soematera Timoer, loc.cit.; Rapolsum J.J. van de Velde, Politieke Problemen op Sumatra, Bijzonder Betreffende de Negara Sumatera Timur, dalam S.L. van der Wall, op. cit., vol 13, hlm. 76-83.

³⁰Suprayitno, Mencoba Lagi Menjadi Indonesia: Kasus Negara Sumatera Timur, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001, hlm. 107.

³¹TBA adalah singkatan dari Territorial Bestuursadviseur. Baca Langenberg, "National..", hlm. 741-742.

³²Kementerian Penerangan R.I., Republik ..., hlm. 256.

³³Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan), Mr. A.A. Maramis (Menteri Luar Negeri), Mr. Teuku Mohammad Hassan (Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, mewakili Urusan Agama), Ir. Sitompul (Menteri Pekerjaan Umum dan Kesehatan), Ir. Indratjaya (Menteri Perhubungan dan Kemakmuran). Ibid., hlm. 256; Surat Mr. T.M Hassan kepada PM NRI di Yogya, Arnas, No. 100; Sofyan Effendi, Transkrp Wawancara dengan Mr. T. M. Hassan, Berastagi, 1990.

³⁴Tentang Tugas Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera baca, Kementerian Penerangan R.I., Republik, hlm. 257-258.

³⁵Keputusan No. 23/Pem./PDRI, tanggal 17 Mei 1949.

³⁶T. Luckman Sinar, Konsep Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Medan: Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang, 1986/1987, hlm. 328; Kementerian penerangan R.I, Republik.., 257.

³⁷Abd. Haris Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas.: Kenang-Kenangan Masa Gerilya, Jilid IIA, Jakarta: Gunung Agung, 1982, bab I.

³⁸Hasan Basrie, Z.T., "Perang Kemerdekaan 2, tanpa tahun dan penerbit, hlm. 10-13; Kementerian Penerangan R.I., Republik, hlm. 253.

³⁹Ibrahim Adjie adalah Kepala Staf Umum Sub -Teritorium VII, Komando Tentara dan Teritorium Sumatera. Komandan sub-Teritorium VII adalah Letkol Kawilarang berkedudukan di Sibolga. Keterangan selengkapnya tentang

struktur TNI saat itu baca Hasan Basrie, Z.T., "Perang.", hlm. 10-13

⁴⁰Anggaran Dasar PRS, Resimen IV Divisi X, dalam Hasan Basrie, Z.T., Laporan Dari Pinggang Gunung Sinabung, Medan: Sedjarah Militer Angkatan Darat Kodam II Bukit Barisan, tanpa tahun, hlm. 34-35.

⁴¹Seorang informan menjelaskan kepada penulis bahwa ia ditugaskan sebagai penjual buah-buahan di dapur umum militer Belanda. Pada saat itulah dia mendengarkan apa-apa yang dibicarakan anggota tentara Belanda diantaranya tentang rencana-rencana serangan militer ke berbagai daerah di Labuhan Batu. Informasi itu kemudian disampaikan pada anggota TNI yang setiap malam mendatangi rumahnya. Wawancara dengan Ibuk Kardiyem, Medan, 12-8-1997.

⁴²Michael van Langenberg, National.. , hlm. 750-752; Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area , Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 410-413.

⁴³Komandan Batalyon B, Instruksi Operasi No. 008/Kat/KG.49, tgl. 1 Djuli 1949

⁴⁴Keterangan detail tentang serangan gerilya TNI tersebut baca, Forum Komunikasi Ex Sub, Terirotium VII Komando Sumatera, Perjuangan Rakyat Semesta Suamtera Utara, Jakarta: Forum Komunikasi, Tanpa tahun, hlm. 307-325; Lampiran Surat Ketua A.V.R.O.S. (C.C.J. Maasen) kepada Adviseur van Kabinet H.V.K. (Jhr. Mr. Th. Baud), Medan, 12 Agustus 1949; F.J.J. Dotjes, Kroniek 1948-1949, Amsterdam, Oostkust van Sumatra Instituut, 1950, hlm. 11.

⁴⁵Michael van Langenberg, "National...", hlm. 761; Ginting, Bukit Kadir, Medan: CV Umum, 1962, hlm. 184.

⁴⁶Forum Komunikasi, Perjuangan..., hlm. 312.; Hasan Basri Z.T., Laporam ..., hlm. 102.

⁴⁷Ibid., hlm. 102; Forum Komunikasi, Perjuangan, hlm. 310-316, 369 ; Surat Ketua A.V.R.O.S., (C.C.J., Maasen) kepada Adviseur Kabinet H.V.K. (Jhr. Mr. Th. Baud), Medan, 12 Agustus 1949.

⁴⁸Langenberg, "National..", hlm. 742-743.

⁴⁹Daerah gerilya yang diperkirakan Belanda menjadi tempat aktivitas gerilya adalah di Deli Hulu , Hasan Basrie Z.T., Laporan., hlm. 118.

⁵⁰Mansoer, Gerilya di Asahan dan Labuhan Batu 1947-1949, Medan: Kaproco, 1977, hlm. 362; Hasan Basrie Z.T.,Laporan ., hlm. 119-120.

⁵¹Djamin Gintings, Bukit..., hlm. 146-148; Forum Komunikasi,

Perjuang..., hlm. 311.

⁵²Front Nasional adalah organisasi yang dibentuk para pendukung republik di daerah N.S.T. pada 8 Februari 1948. Di bawah kepemimpinan Ir. Indratjaya, Front Nasional mengambil sikap moderat terhadap N.S.T. dan mendukung perjuangan diplomasi. Namun dibawah kepemimpinan Sugon Kartoprojdo setelah Agresi Militer II, Front Nasional menentang keabsyahan N.S.T. Tentang aktivitas Front Nasional di N.S.T, baca Michael van Langenberg, "National...", hlm. 630, 642, 646-651.

⁵³Ketetapan Wali Negara Soematera Timoer No. 41/1949 dalam Warta Resmi N.S.T.No.3 /1949; F.J.J. Dootjes, Kroniek 1948 en 1949, hlm. 81.

⁵⁴Michael van Langenberg, "National...", hlm. 802.

⁵⁵Kahin, Nasionalisme, hlm. 522-523.

⁵⁶Schiller, Formation, hlm. 24.

⁵⁷Noto Soetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Boendar Sebelum, Sesudah dan pemboebarannya, Djakarta: Endang, 1956, hlm. 206.

⁵⁸George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980, hlm. 545.

⁵⁹A.R. Surbakti, Perana Kemerdekaan Di Tanah Karo. Karo Jahe dan Dairi Areg, Yayasan PRO PATRIA, Medan, 1979, h1m. 383 385, wawancara dengan Bapak Mbera Barus, 9 April 1994, Medan.

⁶⁰Waspada, 10 Januari 1950

⁶¹Tentang nama nama demonstiran itu lihat lampiran surat Ibrahim Nasution kepada Presiden Republik Indonesia Serikat, No. 3/AsLab, Medan, 23 Februari 1950 (IGNATIUS COLLEGE Jogjakarta).

⁶²Tentang perkembangan selama Januari Agustus 1950, yang akhirnya menuju kehancuran N.S.T baca Michael van Langenberg, op. cit., h1m. 840 917.

⁶³Ibid, teks lengkap mosi, yang secara resmi dinamai Mosi Dewan Perwakilan Rakyat RIS. Penggabungan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia di muat dalam, Ichtisar Parlemen No. 27/1950 "Berita Dewan Perwakilan Rakyat RIS" Jakarta, lihat Juga Harian Merdeka, 22 Maret 1950.

⁶⁴Risalah Sidang DPR RIS, h1m. 65 dan 213.

⁶⁵Waspada, 20 Maret 1950.

⁶⁶Tiap 1 orang mewakili 2.500 penduduk. Tentang tata cara pemilihan anggota delegasi dalam kongres itu lihat, " Petunjuk petunjuk untuk memilih wakil wakil yang akan duduk di dalam Kongres Rakyat se Sumatera Timur ...Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI Yogya No. 102 ARNAS.

⁶⁷Waspada 2 Mei 1950, Wawancara dengan H. Moh. Said, Perbaungan (Medan), 28 4 94, Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 346 347.

⁶⁸Wawancara dengan Mohd. Said, Perbaungan 1994; Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 354 357 dan Waspa-da, 2 Mei 1950.

⁶⁹Teks lengkap Resolusi Kongres Rakyat itu, lihat lampiran

⁷⁰Waspada, 15 Mei 1950, Herberth Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornel University Press, 1962), h1m. 69, Persiapan Propinsi Sumatera Utara, (Medan: Diabatan Penerangan, 1950), h1m. 23.

⁷¹Laporan Tambunan, loc. cit.

⁷²Lampiran Surat Ketua DPR RIS kepada P.M. RI di Yogyakarta, 19 April 1950. Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI Yogya, No. 100 ARNAS.

⁷³"Catatan singkat Rapat Delegasi RIS dan Delegasi RI tanggal 19 Mei 1950". Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI Yogya 1949 1950, No. 102 ARNAS

⁷⁴Waspada. 12 dan 13 Juli 1950, Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 381, Persiapan Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 23 25 dan 70 72.

⁷⁵Artikel 1, 1 2 dari Urgensi Program PPNKST. Menge-nai ketentuan Undang undang No. 22/1948, Lihat The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik. Indonesia*, Jilid I,(Jakarta: Gunung Agung, 1967), h1m. 109 120.

⁷⁶Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 385, Per-siapan Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 65 dan 70-72. The Liang Gie, op. cit., h1m. 197 198 dan 226. Schiller, op. cit., h1m. 390.

⁷⁷Wawancara dengan T. Luckman Sinar, Medan; Wahid E.R, Medan; Datuk Anwaruddin, Lubuk Pakam.

⁷⁸Propinsi Sumatera Utara, op. cit., h1m. 395 396.

⁷⁹Ibid; Persiapan Propinsi Sumatera Utara, op. cit h1m. 395 396; The Liang Gie, op. cit., h1m. 198, 226, 227.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, S. M. 1978. Kenang-Kenangan di Masa Lampau, (Jakarta: Pradnja Paramita).
- Amran, Rusli, Sumatra Barat hingga Plakat Panjang (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).
- Anderson, John . 1971. Mission to The East Coast of Sumatra in 1823 (London New York, Oxford University Press).
- Anderson, John 1971. Mission to the East Coast of Sumatra in 1823. Kuala Lumpur: Oxford University
- Anggaran Dasar PRS, Resimen IV Divisi X, dalam Hasan Basrie, Z.T., Laporan Dari Pinggang Gunung Sinabung, Medan: Sedjarah Militer Angkatan Darat Kodam II Bukit Barisan, tanpa tahun.
- Anonim. 1948. Lampran2 Bagian Yang Kedoea Kearah Ketertiban Hoekoem Baroe di Indonesia, Batavia-C.: Vieser & Co.
- Aritonang, Jan S. 1988. Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Barlett, H.H.. 1952. Batak and Malay Chant on Rice Cultivation, with Introductory Notes on Bilingualism and Acculturation in Indonesia. Proceeding of the American Philosophical Society, XCVI, Pages 118-125.
- Basrie Z.T, Hasan. "Tentang Pimpinan dan Struktur Pemerintahan di Sumatera pada awal tahun 1946", Medan: makalah tanpa tahun.
- Basrie, Hasan, Z.T., "Perang Kemerdekaan 2, tanpa tahun dan penerbit.

- Battuta, Ibn. 1929. *Travels in Asia and Africa 1325-1354*. translated by HAR.Gibb, George Routledge and Sons. London.
- Bellwood, Peter . 2003. *Prasejarah Kepulauan Nusantara* (terj.) (Jakarta: Gramedia).
- Benda, Irikura, Kishi. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia Selected Documents*,(Michigan: Yale University Southeast Asia Studies, 1965)
- Biro Sejarah Prima. 1976. *Medan Area Mengisi Proklamasi*, volume 1 (Medan: Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area).
- Bosch, F. D. K. 1974. *Masalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia* (terj.) (Jakarta: Bharatara).
- Brahmaputro, 1983. *Karo Dari Zaman ke Zaman*. Medan: Merga Silima.
- Breman, Jan. 1997. *Menjinakkan sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20* (Jakarta: Grafiti).
- Bruggeman, F. 1946. *Verslag van Noord Sumatra Periode 13-16 Januari 1946*.
- Castles, Castles. 1972. "The Political Life of a Sumatran Residency: Tapanuli 1915-1940", Disertasi tidak dipublikasikan: Yale University).
- Castles, L. 1975. "Statelessness and Stateforming Tendencies Among The Batak Before Colonial Rule" in Anthony Reid and Lance Castles (eds.), in *Precolonial State System in Southeast Asia*, Monograph of The Malaysia Branch of The Royal Asiatic Society no. 6, Kuala Lumpur.
- Castles, Lance. 1975. "Statelessness and Stateforming Tendencies among The Batak Before Colonial Rule", dalam: Anthony Reid and Lance Castles (eds.), *Pre-Colonial State Systems*

in South East, Monograph of The Malaysia Branch of The Royal Asiatic Society, No. 6, Kuala Lumpur, 1975.

Clauss, Wolfgang . 1982. Economic and Social Change among The Simalungun Batak of North Sumatra (Saarbrucken Fort Laurderdale: Verlag BreitenbachPublishers).

Clauss, Wolfgang, 1982. Economic and Social Change among The Simalungun Batak of North Sumatra, vol 15 (Saarbrucken-Fort Laudardale: Verlag Breitenbach Publishers).

Cortesao, Armando (1967). The Summa Oriental of Tomme Pires. An account of the East, from the Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1513. Armanda Cortesao (editor), 1967, Nendeln/Liechtenstein: Kraus Reprint Limited.

Cunningham, Clark E.. 1958. The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra. Yale University.

Cunningham, Clark. 1958. The Postwar Migration of The Toba-Bataks to East Sumatra (New Haven London: Yale University)

Damanik, 1981. Jahutar Sang Naoealoeah dalam Arena Perjuangan Bangsa Indonesia (t.p.: Medan).

Damanik, B. 1933. "Toean Kapoltakan" dalam: Sinalsal No. 25/ Februari 1933/Thn. III.

Damanik, Benjamen . 1933. "Harajaan Silima Huta", dalam: Sinalsal No. 25/ April 1933/Tahun II, hlm. 9-11.

Damanik, Djariaman. 2006. "Hukum Tanah di Daerah Simalungun (Zaman Raja-raja di Daerah Simalungun) dalam Jef Rudiantho Saragih (ed.), Bunga Rampai Pemikiran Mr Djariaman Damanik: Berpikir dalam Multidisiplin Belajar dari Sejarah (Medan: t. p.).

Damanik, Erond Litno. 2017. Dalih Pembunuhan Bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun pada Maret

- 1946, (Medan:Simetri Institute).
- Damanik, Jahutar. 1974. Hukum Adat Simalungun (Pematangsiantar: PD Aslan).
- Damanik, Jahutar. 1974. Jalannya Hukum Adat Simalungun (Medan: PD Aslan).
- Damanik, Jan Jahaman "Salib dan Sirih", disertasi Doktor Teologi (Jakarta: STT Jakarta, 2009), hlm. 69-74.
- Damanik, Jan Jahaman. 1995. "Sejarah 'Kongsi Laita' Tahun 1931: Arti dan Maknanya Bagi Gerakan Kekristenan Warga GKPS Dasawarsa ini" dalam: Ambilan pakon Barita GKPS No. 259/ November.
- Damanik, T. Amin dan Jaramen Damanik. 1976. Sidamanik: Turi-turianni Oppung Na I Horsik (Pematangsiantar: Persatuan Oppung Na I Horsik).
- Dasuha, Juandaha R. P. dan Martin L. Sinaga, 2004. Memoar 80 Tahun St. Dja Sarlim Sinaga (Jakarta: Sardo Sarana Media).
- Dasuha, Juandaha Raya P (editor). 2011. Orang Simalungun Pendiri Tebingtinggi: Mengungkap Tabir Sejarah Awal Berdirinya Kerajaan Padang dan Tebingtinggi (Tebingtinggi: DPC PMS Tebingtinggi).
- Dasuha, Juandaha Raya P. dan Martin Lukito Sinaga (2003), Tole den Timorlandend das Evangelium. Pematang Siantar: Kolportase GKPS.
- Diprodjo, Koesno. 1955. Himpunan Undang Undang, Praturan-peraturan, penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945, Jakarta.
- Dotjes, F. J. J. 1950. Kroniek 1948-1949, Amsterdam, Oostkust van Sumatra Instituut.

- Edisaputra, Sumatera dalam Perang Kemerdekaan : Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda, Jakarta: Yayasan Bina Satria '45, 1987, hlm. 165-167.
- Effendi, Sofyan. 1987. Transkrip Wawancara Dengan Mr. T.M. Hassan , Berastagi, 1990, (hal.) 3-7; Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera, (Jakarta: Sinar Harapan)
- Erman, Erwiza . 1985. "Pemberontakan Sunggal 1872 di Deli— Jawaban terhadap Perubahan Sosial" dalam: Masyarakat Indonesia No. 1 Tahun XII (Jakarta: LIPI, 1985).
- Forum Komunikasi Ex Sub, Terirotium VII Komando Sumatera, Perjuangan Rakyat Semesta Suamtera Utara, Jakarta: Forum Komunikasi, Tanpa tahun.
- Fukuyama, Takao. 1992. "The Second Imperial Guard Division of Japan and The Indonesian Independence", dalam Nip Xarim (ed.), The Japanese Army and The Indonesian Independence (Medan: Circulated by Prima and Lina Computer).
- Geertz, Clifford.1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya).
- Geldern, Robert H. dengan judul 'The Archaeology and Art of Sumatra, dalam Sumatra: Its History and People (Edwin M. Loeb, ed). 1935. Singapore: Oxford University.
- Gie, The Liang. 1967. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik. Indonesia, Jilid I (Jakarta: Gunung Agung).
- Girsang, Liman, Ngian Raja Saragih, et. al. 1985. Saribudolok Area dan Sekitarnya, Perjuangan 1945-1949 (Jakarta: Universitas Justitia Press).
- Groenoveltd. 1960. Historical Notes on Indonesia and Malaya. Jakarta: Bharata.

Guillot, Claude, Lobu Tua: Sejarah Awal Barus (terjemahan Daniel Perret) (Jakarta: Obor, 2002).

Harahap, E. Sutan. 1936. Hikajat Perdjalanannya Indil Ditanah Batak, 1861-7-10-1936

Harahap, Elisa Sutan . 1960. Perihal Bangsa Batak (Djakarta: Dep. P.P. dan K).

Herberth Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornel University Press, 1962).

Herskovis, Merville J. . 1986. "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat" dalam T. O. Ihromi (ed.), Pokok-pokok Antropologi Budaya (terj.) (Jakarta: Gramedia).

Huan, Ma. 1970, Ying Yai Sheng Lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores 1433. Feng Ch;eng-Chun (editors). Cambridge: Hakluyt Society.

Husny, Tengku H. M. Lah Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950 (Medan: BP Husny, 1975)

Husny, Tengku Lah. 1980. Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur/ Tapanuli Disertai Pangkal dan Akibatnya, (Medan: Badan Penerbit Husny).

Husny, Tengku Lah. 1983. Revolusi Sosial 1946 di Sumatera Timur/ Tapanuli Disertai Pangkal dan Akibatnya, (Medan: Badan Penerbit Husny).

Hutasoit, Marnicus. 1986. Percikan Revolusi di Sumatera, Jakarta: PT B.P.K. Gunung Mulia.

Hutasoit, Marnixius. 1986. Percikan Revolusi di Sumatera (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Hutauruk, J. R. 1981. "Sejarah Pengabaran Injil Sampai Tahun 1931

di Tanah Batak” dalam Hidup dalam Kristus II. Penataran Pelayan-pelayan Gereja (P3G), PamatangSiantar 6 Juli-19 Agustus 1981. Diterbitkan oleh Dewan Gereja Indonesia di Wilayah Sumut-Aceh dalam Kerjasama Dengan Departemen Pembinaan dan Pendidikan DGI.

Hutauruk, J. R. 1993. Kemandirian Gereja (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Ichtisar Parlemen_No. 27/1950 “Berita Dewan Perwakilan Rakyat RIS” Jakarta.

Isa, Teuku Mohammad (ed.). 1999. Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Aceh ke Pemersatu Bangsa (Jakarta: Papas Sinar Sinanti).

J. W. S., “Hoeria Kristen Batak Protestant (HKBP)” dalam: Sinalsal No. 111/Juni 1940/Thn. X.

Jan S Aritonang, Jan S. 1988. Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Jansen, Arlin Dietric. 2003. Gonrang Simalungun: Struktur dan Fungsinya Bagi Masyarakat Simalungun. Medan: Bina Media.

Jansen, Dietrich. 2003. Gonrang Simalungun: Arti dan Fungsinya pada Masyarakat Simalungun. Medan: Bina Media

Joustra, M. 1915. van Medan naar Padang en Terug (Leiden: S. C. Van Doesburgh).

Kahin, George Mc. Turnan . 1980. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia)

Kahin, George McTurnan. 1980. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia).

- Kementerian Penerangan R.I. 1953. Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara (Medan: Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara).
- Kobong, Theodorus. 2008. Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi (terj.) (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2004)
- Kozok, Uli. 1992. Warisan Leluhur. Bahasa dan Aksara Batak, Jakarta: Gramedia dan 2007, Surat Batak: Sejarah dan Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangarajda. Jakarta: KPG.
- Kozok, Uli. 1999. Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak (Jakarta: KPG).
- Kozok, Uli. 1999. Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak. Jakarta: KPG.
- Kraemer, Hendrik. 1987. "Sending Di Hindia Belanda" dalam H. Baudet dan I. J. Brugmans (ed.), Politik Etis Dan Revolusi Kemerdekaan, (Jakarta: Yayasan Obor).
- Kramer, Hendrik. 1958. From Missionfield to Independent Church: Report on a Decisive Decade in The Growth of Indigeneous Churches in Indonesia (Broekentrum: The Hague).
- Lempp, Walter. 1976. Benih yang Tumbuh 12: Gereja-gereja di Sumatera Utara (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia).
- Liddle, R. W. 1992. Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru (Jakarta: Grafiti Press).
- Liddle, R. William. 1970. Ethnicity, Party and National Integration: Indonesian Case Study (New Haven and London: Yale

University Press).

Loeb, Edwin M. 1990. *Sumatra: Its History and People* (Singapore, New York: Oxford University Press).

M. D. Purba, *Pustaka Panei Bolon, Pematangsiantar, 7 Oktober 1970.*

Mansoer. 1977. *Gerilya di Asahan dan Labuhan Batu 1947-1949*, Medan: Kaproco.

Margareth S, Rita dan Ery Soedewo. 2003. "Jejak Kontak Kebudayaan Simalungun dengan Kebudayaan India", makalah Sarasehan Budaya Simalungun di USI (Pematangsiantar, 27 Pebruari 2003).

Marsden, William 1969. *History of Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University;

McKinnon, Edward E. , 1984. *Kota Cina: Its Context and Meaning in the Trade of Southeast Asia in the Twelfth to Fourteenth Centuries. (Thesis for Doctor Philosophy): Cornell University.*

Meuraxa, Dada. 1977. *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara* (Medan: Sastrawa).

Munoz, Paul Michel 2009. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI)*. Yogyakarta: Mitra Abadi.

Munthe, A. 1986. "Bonani Jubileum Haranggaol" dalam: *Jubileum 80 Tahun GKPS Haranggaol, 3 Maret 1906-1986* (Haranggaol: Panitia Jubileum).

Munthe, A. 1987. *Pandita August Theis: Missionar Voller Hoffnung* (PamatangSiantar: Kolportase GKPS).

Nasution, Abdul Haris. 1982. *Memenuhi Panggilan Tugas,:*

Kenang-Kenangan Masa Gerilya, Jilid IIA, (Jakarta: Gunung Agung).

Nommesen, I.L. 1894. The Gospel according to St. John, Translated out of the Original Greek into Batta (Toba), The Language of the Batta in The Island of Sumatra. Printed by Roelofzen & Hubner Nederland.

Noto Soetardjo, Noto. 1956. Dokumen-dokumen Konperensi Medja Boendar Sebelum, Sesudah dan pemboebarannya, (Djakarta: Endang).

Openheimer, S.. 1999. Eden in the East. Trafalagar Square Publishing.

Panitia Jubileum. 1988. Buku Panduan Jubileum 85 Tahun Injil di Simalungun (Pelpem GKPS Pematangsiantar, 4 September 1988).

Panitia. 1984. Pesta Jubileum 75 Tahun GKPS SaribuDolog (6 September 1909-6 September 1984).

Panjaitan, M. S. M. 1982. Ahu do Donganmuna: Sejarah 75 Tahun HKBP Siantar Sawah (19070-1982), (Pematang Siantar: Panitia Jubileum).

Parkin, Harry. 1978. Batak Fruit and Hindu Thought (Madras: The Christian Literature Society).

Parlindungan, M. O. 2007. Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak. Edisi cetak Ulang. Yogyakarta: LkiS.

Pedersen, Paul. B. 1982. Batak Blood and Protestant Soul, (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company).

Pedersen, V.1975. Darah Batak dan Jiwa Protestan.(terj) Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Pelzer, Karl J. 1985. Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan

- Perjuangan Agraria (Jakarta: Sinar Harapan).
- Peratoeran Oendang-Oendang Dewan Negara Soematera Timoer, No.1, 31 Desember 1947.
- Perret, Daniel Sumatera Timur Laut dalam Ruang Aceh sehingga Akhir Perang Aceh, *Jurnal Terjemahan Alam dan Tamaddun Melayu*, 2011, hlm. 82.
- Persiapan Propinsi Sumatera Utara, (Medan: Diabatan Penerangan, 1950), h1m. 23.
- Pimpinan Pusat GKPS. 1963. 60 Tahun Indjil Kristus di Simalungun (Pematangsiantar: GKPS).
- Pinto, Ferdinand dalam: *The Travels of Mendes Pinto*. 1989. Edited and translated by Rebecca D. Cats. Chichago: University of Chicago Press. Pp.20-9.
- Poerba, Radjamin. 1972. *Pembangunan dan Perobahan Struktur Desa di Kabupaten Simalungun* (Pematangsiantar: Percetakan HKBP).
- Purba Tambak, T. B. A. 1982. *Sejarah Simalungun* (Pematangsiantar: Percetakan HKBP).
- Purba Tambak, TBA. 1967. *Sejarah Keturunan Silou*, (Pematangsiantar: Percetakan HKBP)
- Purba, Benyamin (ed.), 2008. *Omnibus Omnia: Biografi Mgr Pius Datubara, OFM Cap* (Medan: Bina Media Perintis).
- Purba, D. Kenan dan J. D. Poerba. 1994. "Sejarah dan Perkembangan Marga Purba Pakpak" dalam *Buku Kenangan Rondang Bintang Purba Pakpak se-Jobotabek* (Jakarta: Panitia Marsombuh Sihol P3BP se Jabodetabek)
- Purba, D. Kenan. 1995. *Sejarah Simalungun* (Jakarta: Bina Budaya Simalungun)

- Purba, D. Kenan. 1997. Adat Istiadat Simalungun: Pelaksanaan dan Perkembangannya (Pematangsiantar: Bina Budaya Simalungun).
- Purba, M. D. 1997. Mengenal Kepribadian Asli Rakyat Simalungun (Medan: t.p.).
- Purba, M. D. 1986. Lintasan Sejarah Kebudayaan Simalungun (t.p.: Medan).
- Purba, M. D., 1985. Museum Simalungun. Pematangsiantar.
- Purba, MD. (1980). Bungai Rampai Simalungun (Medan: t.p.).
- Purba, O. H. S dan Elvis F Purba. 1998. Migran Batak Toba di luar Tapanuli Utara : Suatu Purba, Suruhen S. Andreas Lingga dan Marsiria. 1991., Buku Petunjuk (Guide Book) Museum Rumah Bolon Pematang Purba Kabupaten Simalungun (Medan: Museum Sumatera Utara).
- Purwanto, Bambang. 1996. "Migrasi dan Kesempatan Kerja: Persoalan Tenaga Kerja dalam Perkebunan Karet di Sumatera bagian Selatan pada Akhir Masa Kolonial", (Makalah pada Kongres Nasional Sejarah di Jakarta, Nopember).
- Radjab, Muhammad, 1949. Tjatanan di Sumatera . Djakarta: Balai Pustaka.
- Rapolsum J.J. van de Velde, "Politieke Problemen op Sumatra, Bijzonder Betreffende de Negara Sumatra Timur." Deskripsi (Medan: Monora).
- Reid, Anthony 1995. Witnesses to Sumatra: a Trevellers Anthology. (Singapore: Oxford University).
- Reid, Anthony. 1979. The Blood of the Peolpe, Revolution and The End of Tradistional Rule in Northern Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University).

- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Sinar Harapan)..
- Said, Mohammad. 1973. "What was the social revolution of 1946 in is East Sumatera"?, translated by Benedict Anderson and Toenggoel Siagian, dalam *Indonesia*, No. 15 (April), Cornell: Modern Indonesia Project.
- Sangti, Batara, *Sejarah Batak*, 1977. Balige: Karl Sianipar Company.
- Saragih, Bintan, R dan Darwan M. Purba. 2000. *80 Tahun Djariaman Damanik: Seorang Ningrat, Pejuang Kemerdekaan, Penegak Hukum dan Tokoh Masyarakat* (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Saragih, Ibnu Hibban, "Sejarah Singkat Berdirinya Kerajaan Padang dan Tebingtinggi dalam Juandaha Raya Purba (ed.). 2011. *Orang Simalungun Pendiri Tebingtinggi* (Tebingtinggi: DPC PMS Tebingtinggi).
- Saragih, J. E. . 1989. *Kamus Simalungun-Indonesia* (Pematangsiantar: Kolportase GKPS).
- Saragih, J. Wismar. 1931. "Baritani Tuan Rondahaim" (Pamatangraya, 1931) dalam Mansen Purba, *Kepahlawanan Tuan Rondahaim: Sebuah Kisah Menentang Penjajahan di Simalungun* (Bina Budaya Simalungun: Medan, 1993).
- Saragih, J. Wismar. 1935. *Baritani Tuan Rondahaim* (Pamatangraya, 1935) dalam Mansen Purba, *Rondahaim: Sebuah Kisah Kepahlawanan Menentang Penjajahan di Simalungun* (Medan: Bina Budaya Simalungun, 1993)
- Saragih, Jan B. *Sejarah GKPS Sondi Raya* (Sondi Raya, t.t.).
- Saragih, Simon. 2014. *Elpidus van Duijnhoven: Oppung Dolok, Rasul dari Simalungun Atas* (Medan: Bina Media Perintis).
- Saragih, Taralamsyah. 1981. *Saragih Garingging* (Medan: t.p.).

- Schadee, W. H. M. 1920. *De Uitbreiding van Ons Gezag in de Bataklanden*. Uitgaven van het Bataksch Instituut No. 19 (Leiden: S. C. van Doesburgh).
- Schreiner, Lothar. 1971. "The Church in Northern Sumatra: A Look at Its Past and Future" dalam William L Danker & Wi Jo Kang, *The Future of The Christian World Mission* (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company).
- Shadily, Hassan (pemred), 1983. *Ensiklopedia Indonesia*. Volume 4. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Siahaan, S. M. 1984. "Peranan dan Kedudukan Raja dalam Struktur Suku dan Masyarakat Batak " dalam: *Vocatio Dei*, Edisi VIII (April-Juni 1984, Pematangsiantar: STT HKBP).
- Sidjabat, W. B. 2007. *Ahu Sisingamangaraja* (Jakarta: Sinar Harapan).
- Sihombing, Justin. 1961. *Saratus Taon Huria Kristen Batak Protestant, 1861-1961* (Medan: Philemon & Liberty).
- Simanjuntak, Batara Sangti, 1977. *Sejarah Batak* (Balige: Karl Sianipar Company).
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2002. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Yogyakarta: Djendela.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius . 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* (Yogyakarta: Obor).
- Sinar, Tengku Luckman. 2008. *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur* (Medan, tp).
- Sinar, Tengku Luckman. 1989. "Revolusi Pihak Kiri 1946 di Serdang", dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

- Sinar, Tengku Lucman. 2008. Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Sumatera Timur (Medan: t. p.).
- Sinuraya, P. 1997. Diakonia GBKP: Sejarah Pelayanan Diakonia NZG di Tanah Karo, 1890-1940 (Medan: Percetakan Merga Silima).
- Sitompul, A. A. 1986. Perintis Kekristenan di Sumatera Bagian Utara (terj) Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Sitopu, Sayur Andreas Lingga. 1987. Mengenal Rumah Tradisional Simalungun (Pematangsiantar: Museum Simalungun).
- Smit, C. 1986. Dekolonisasi Indonesia Fakta dan Ulasan (Jakarta: Pustaka Azet).
- Staatsblad van Nederlandch-Indie, No. 176, 1947.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1906, No. 531.
- Suparlan, Parsudi. 2004. Hubungan Antar sukubangsa (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian).
- Suprayitno, 2001. Mencoba Lagi Menjadi Indonesia: Kasus Negara Sumatera Timur, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia).
- Surat raja Panei tahun 1904 dalam Arsip Nommensen Koleksi VEM Jerman, dilampirkan Uli Kozok, Surat Batak (Jakarta: KPG Gramedia, 2009)
- Surbakti, A. R. 1979. Perang Kemerdekaan Di Tanah Karo. Karo Jahe dan Dairi Area. (Yayasan PRO PATRIA, Medan).
- Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial (diterjemahkan Alimandan) (Jakarta: Prenada Media).
- Tambunan, E. H. 1982. Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaanannya, (Bandung: Tarsito).
- Tappenbeck, Ch. D. 1978. August Theis" dalam Jubileum 75

Tahun 2 September 1903-1978 GKPS (PematangSiantar: Kolportase GKPS).

Tichelman, Islam in Simeloengoen (Pematangsiantar, 1937)

Tideman, J. 1922. Simeloengoen: Het Land Der Timoer-Bataks In Zijn Vroegere Isolatie en Zijn Ontwikkeling Tot Een Deel van Het Culltuurgebied van De Oostkust van Sumatra (Leiden: Stoomdrukkerij Louis H. Becherer).

Tideman, J. 1936. Hindoe Invloed in Noordelijk Batakland (Amsterdam: NV Drukkerij "De Valk").

Tideman, J. 1936. Hindu Invloed in Noordelijk Batakland. Batak Instituut., No. 23. Amsterdam.

Tim Penulis Sejarah. 1994. Sumatera Utara dalam Lintasan Sejarah (Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara).

Tobing, Philip O. L. 1963. The Structure of the Toba Batak Belief in the High God (Amsterdam: Jacob van Campen, cet. ke-2).

van de Velde, J.. J. Surat-Surat Dari Sumatera (Jakarta: Pustaka Azet)

van den End, Thomas. 1989. Ragi Carita 2, Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an-sekarang (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Vergouwen, J. C. 2004. Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba (terj.) (Yogyakarta: Lkis).

Volkstelling 1930, Deel IV (Batavia: Departemen van Econmische Zaken Landrukkerij, 1935).

Westenberg, C. J. 1890. "Nota over de Onafhankelijk Bataklanden", in Overgedrukt van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkekunde, deel XXXIV (Batavia: Albrecht en Rusche).

Witteborg, F. M. 1967. Herman Vollmer, ein Missionar unter

den Simalungun-Batak (Wuppertal-Barmen: Verlag der Rheinischen Missios).

Wolters. O.W. 1970. *The Fall of Srivijaya in Malay History*.

Yamin, M. 1959. *Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Naskah Persiapan UUD 1945 I*, Jakarta.

Yuanzhi, Kong. 2007. *Muslim Tionghoa Cheng Ho. Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Obor.

Zainuddin, HM. 1961. *Tarich Atjeh dan Nusantara. Djilid-I*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.

Zamzami, Amran, 1990. *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang.

van Mook, H. J. 1949. *Indonesie Netherland en de Wereld*, Batavia: De Opbouw.

b. Skripsi, Tesis, Disertasi

Saragih, Apulman. 1977. "Gema Sinalsal: Suatu Tinjauan Historis-Theologis terhadap Majalah "Sinalsal" yang Terbit tahun 1931-1942 di Simalungun". Skripsi (Jakarta: STT Jakarta).

Saragih, Djasamen. 1979. *The Impact of Christianization in Simalungun, North Sumatra, 1903-1963*, tesis MA University of Sydney Australia.

van Langenberg, Michael. 1976. "National Revolution in North Sumatra: Sumatera Timur and Tapanuli 1942-1950", Disertasi Doktor, University of Sidney.

c. Arsip Nasional Republik Indonesia

- ANRI. Anonim, "Nota Penjelasan Tentang Daerah Siantar, Tanah Jawa dan Raya di Simalungun", TBG, (terjemahan).
- ANRI. Anonim, 1909. "Nota Penjelasan Mengenai Daerah Siantar, Pane, Tanah Jawa dan Raya di Simalungun" dalam TBG.
- ANRI. Anonim, Mededelingen Betreffende He Landschap Panei en Het Rajahgebied, 1904..
- ANRI. Anonim. 1901. "Pardalanan ni Evangelist" dalam: Immanuel No. 8/Agustus 1901/Thn. XII, hlm. 2-4.
- ANRI. Anonim. 1904. " Mededeelingen Betreffende Het Landschap Panei en Het ANRI. Rajahgebied" dalam: Bijdragen Indische, Taal-, Land en Volkekunde (s'Gravenhage: Martinus Nijhoff).
- ANRI. Anonim. 1904. "Medededelingen Betreffende het Landschap Pane en het Rajahgebied" dalam TBG (Martinus Nijhoff S'Gravenhage).
- ANRI. Anonim. 1909. "Nota van Toelicting Betreffende de Simeloengoensche: Lancschappen Si Antar, Pane, Tanah Djawa en Rajah" Tijdschrift Indlandsche Taal-, Land en Volkekunde deel LI, Batavia:Albrecht en Co, S'Hage Nijhoff.
- ANRI. Anonim. 1921. Naar Een Niew Statuut, Indonesie Gelijkwaardig Deelgenoot Binnen Hetrijk Verband.
- ANRI SoK Serie Ie No. Reel film 21.
- ANRI SoK Serie Ie No. Reel film 21.
- ANRI, MvO F. J. Neiboer.
- ANRI, SoK Besluit 15 Nopember 1912 No 4, Bijlagen 2 No. 5104/4
- ANRI, SoK Besluit No. 22, 12 Desember 1906.
- ANRI, SoK Besluit no. 34, 7 September 1904, bijlagen 10.

ANRI, SoK Bisluit No. 24, 6 Januari 1904, Bijlagen 1.

ANRI. 1936. SoK, Serie Ie, No . reel film 21 Aanvullende Memorie van Overgave van de Asistent Resident van Simeloengoen en Karolanden, Sumatra Oostkust M van Rhijn, 1936.

ANRI. 1938. SoK Serie Ie No reel film 21 Memorie van Overgave van de Aftredenden Asistent Resident van Simeloengoen en Karolanden Sumatra's Oostkust, G. W. Meindersma, 1938.

ANRI. 1938. SoK Serie IIIe No. Reel Film 2 Memorie van Overgave van de Aftredenden Resident van Simeloengoen en Karolanden, Sumatra's Oostkust C. J. Westenberg, 1908.

ANRI. MvO H. Beeuwkes, 1929.

ANRI. MvO H. E. K. Ezerman, 1926.

ANRI. Naskah Pustaka Bandar Hanopan.

ANRI. Koloniaal Verslag 1915.

ANRI. Risalah Sidang DPR RIS.

d. **Koleksi Arsip**

Anonim. 1946. "Pidato Sultan Langkat di depan para Sultan dan anggota Delegasi Republik pada tanggal 3 Februari 1946.

Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI Yogya 1949/1950, No. 102 ARNAS . "Catatan singkat Rapat Delegasi RIS dan Delegasi RI tanggal 19 Mei 1950".

Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI Yogya, No. 100 ARNAS. Lampiran Surat Ketua DPR RIS kepada P.M. RI di Yogyakarta, 19April 1950.

Recomba (J.J. van de Velde), "Rapport van den Recomba voor

Noord-Sumatra over de eerste helft van September 1947".
Koleksi A.S. No.6 ARNAS.

Anonim. 1946. "Pidato Gubernur Sumatera di Depan Para Sultan dan Raja-raja pada tanggal 3 Februari 1946".

e. **Surat Kabar, Majalah, Terbitan Berkala**

Harian Merdeka, 22 Maret 1950.

Immanuel, Agustus 2001

van Langenberg, Michael. 1982. "Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatra". Indonesia nomor 33/1982.

Warta Resmi Negara Soematera Timoer, No. 3 1948.

Waspada 2 Mei 1950

Waspada, 10 Januari 1950

Waspada, 15 Mei 1950.

Waspada, 2 Mei 1950.

Waspada, 20 Maret 1950.

Waspada. 12 dan 13 Juli 1950.

Weekly Intelligence Summary , No. 19.

f. **Keputusan, Ketetapan, Undang-Undang**

Keputusan No. 23/Pem./PDRI, tanggal 17 Mei 1949.

Ketetapan Wali Negara Soematera Timoer No. 41/1949 dalam:

Warta Resmi N.S.T.No.3 /1949.

Komandan Batalyon B, Instruksi Operasi No. 008/Kat/KG.49, tgl.
1 Djuli 1949

Kongres Rakyat se Sumatera Timur. Koleksi Arsip Kabinet P.M. RI
Yogya No. 102 ARNAS.

Lampiran Surat Ketua A.V.R.O.S. (C.C.J. Maasen) kepada Adviseur
van Kabinet H.V.K. (Jhr. Mr. Th. Baud), Medan, 12 Agustus
1949.

g. Naskah/Manuskrip

Naskah Seminar draft Sejarah Simalungun di kantor Disparsenibud
Pamatangraya, 8 Desember 2012.

Naskah Silsilah Raja-raja Siantar ditulis Tuan Syahalam Damanik,
15 Desember 1997.

Naskah Stamboom Kerajaan Tanah Jawa tanggal 4 Maret 1963

Naskah. 1937. Stamboom Keradjaan Raja diperboeat di hadapan
seripadoeka Radja Gomok Radja Negeri Raja (koleksi
pribadi). Pamatangraja, 8 Maart, 1937.

Naskah. Barita ni Pandita Samuel Panggabean (naskah
tulisan tangan, t. t.). Arsip Perpustakaan STT HKBP
Pamatangsiantar).

Naskah. Sejarah Pardongni Kuria GKPS Kinalang (naskah tulisan
tangan, t. t.), hlm. 3-4.

Naskah. Jonas Girsang. Sejarah Kongsu Laita (Manuskrip, Sondi
Raya,t. t.).

h. Internet

Niji No Saki, Menyoal Asal-usul Identias Bangsa Melayu, <http://sejarah.kompasiana.com/2011/03/02>, diakses 31/12/12;12:49.

i. Majalah Sinalsal

Anonim. 1931. "Hata Horas-horas Bani Hordja ni Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 90/September 1931/Thn. VIII.

Anonim. 1934. "Hikajat dan Oesaha dari Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen di PamatangRaja dari tahoen 1928-1934" dalam: Sinalsal No. 48/Maret 1935/Tahun V.

Anonim. 1936. Het Bestuur, "Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen" na mamorloehon hamadjoeon pakon Sahap Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 63/Juni 1936/Tahun VI.

Anonim. 1937. Sada Ngawan ni Saksi ni Kristoes, "Saksi ni Kristoes" dalam: Sinalsal No.72/Maret 1937/Thn. VII.

Anonim. 1938. "Bangsa ni Naibata do age halak Simaloengoen" Sinalsal No. 89/Augustus 1938/Tahun VIII.

Anonim. 1938. "Kongsi Laita" PamatangRaja" dalam: Sinalsal No. 89/Augustus 1938/Thn. VIII.

Anonim. 1941. "Roenggoean ni Goeroe-goeroe, "District Simaloengoen" i Sariboedolog, ari 28 ronsi 30 April 1941" dalam: Sinalsal No. 123/Juni 1941/Tahun XI.

Pan Djaporman. 1931. "Tole", dalam: Sinalsal No. 5/Agustus 1931/Thn. I.

Pan Djasmin Sipajoenghoen Nagoridolog, "District Simaloengoen"

- dalam: Sinalsal No. 118. Januari 1941/Thn. XI.
- Poerba, T. R. K. A. "Statistiek ni H. K. B. P. Simaloengoen bani oedjoeng ni tahoen 1940" dalam: Sinalsal No. 120/Maret 1941/Thn. XI, hlm. 7.
- Sada Ngawan ni Kongsii Laita. 1937. "Kongsii Laita i Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 72/Maret 1937/Thn. VII.
- Saragih, J. W. S. 1940. "Koeria ni Kristen Simaloengoen na so masoek ope hoe District Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 116/November 1940/Thn. X.
- Saragih, J. Wismar. 1932. "Statistik ni Sikolah Zending na masoek bani beheerder Toean Pandita na i Sariboe Dolog bani boelan Juli 1932" dalam: Sinalsal No. 21/December 1932/Thn. II.
- Saragih, J. Wismar. 1937. "Partoeboeh ampa Pargoeloehon ni Comite Na Ra Marpodah Simaloengoen Ibagas 10 Tahoen na Salpoe" dalam: Sinalsal No. 90/September 1937/Thn. VIII.
- Saragih, J. Wismar. 1938. "Dong do Sadiha boeei ni halak Simaloengoen?", dalam Sinalsal No. 90/September 1938/ Tahun VIII (Edisi khusus Jubileum Comite Na Ra Marpodah), hlm. 29.
- Saragih, J. Wismar. 1939. "Ambilan Na Madear Ev. Loekas, hata Simaloengoen" dalam: Sinalsal No. 96/Maret 1939/Tahun IX.
- Sinalsal No. 31/Oktober 1933/Thn. II, hlm. 9-10.
- Sinalsal No. 48/Maret 1935/Thn. V, hlm. 6-10.
- W. D. P. S., "Mamongkot Garedja Raja Oesang" dalam: Sinalsal No. 56/November 1935/Thn. V.

j. **Artikel, Makalah yang Belum Diterbitkan**

Purba, M. D. 1987. "Perspektif Sejarah Kebudayaan Simalungun", makalah disajikan pada Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun, Jumat-Sabtu, 28-29 Agustus 1987 di Pematangsiantar.

Purba, Rudolf. 1964. "Aksara dan Bahasa Simalungun" dalam Intisari Seminar Kebudayaan Simalungun se-Indonesia Pertama (Pematangsiantar: Museum Simalungu).

Saragih, Julianus dan Pan Djapoltik (Ihutan Bolon Garingging). 1981. "Buha Sahap hata ni Demban Sayur" (Medan: Naskah).

Saragih, Kansi. 2002. "Eksistensi Sumatera Timur dari Sudut Pandang Sejarah dan Budaya", makalah Simposium Pembentukan Propinsi Sumatera Timur, Pematangsiantar.

Sinaga, Gindo Hilton. 2010. "Sistem Pemerintahan Sosial dan Politik Pada Zaman Raja Marpitu di Simalungun". Makalah Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun di USI Pematangsiantar, 22 Oktober 2010.

Sinaga, J. Jahiram. 2002. "Upacara Kematian dan Ziarah— Sebuah Kajian Kasus Budaya Simalungun dalam Kehidupan Kristiani", dalam J. R. Sipayung, Perjumpaan Injil dan Budaya Simalungun (Jakarta: Panitia J-100).

Sinaga, Tuan Musa. 1967. "Asal-usul Tuan Hojong Hataran (Berkedudukan di Pamatang Djorlang Hataran)", manuskrip: Pematangsiantar.

Sinar, Tengku Luckman. 1985. "Hari-Hari Terakhir Menjelang Takluknya Hindia-Belanda di Sumatera Timur", dalam Harian Waspada, 16-Oktober 1985.

- Sinar, Tengku Luckman. 1986/1987. Konsep Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Medan: Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang, 1986/1987.
- Sinar, Tengku Luckman. 1988. "Sang Nawaluh, Raja Siantar dalam Arsip Kolonial Belanda", makalah pada Seminar Hari Jadi Kota Pematangsiantar 1 Nopember 1988.
- Sinopsis Pemakaman Kembali Tuan J. Kaduk Saragih Garingging, Pamatangraya, 1995.
- Sipayung, Josep. 1980. Pustaka Ahar Mulajadi, manuskrip tulisan tangan, Pematangsiantar.
- Sofyan Effendi, Transkrip Wawancara dengan Mr.T.M Hasan, Brastagi, 1 Agustus 1990.
- Surat Gouverneur Chief C.O. NICA Sumatera. Medan, (A.I. Spits) kepada Lt. Gouverneur General, Batavia, Politiek Verslag Sumatra Over de Maand Februari 1946.
- Surat Ibrahim Nasution kepada Presiden Republik Indonesia Serikat, No. 3/AsLab, Medan, 23 Februari 1950 (Ignatius College Jogjakarta).
- Surat Ketua A.V.R.O.S., (C.C.J., Maasen) kepada Adviseur Kabinet H.V.K. (Jhr. Mr. Th. Baud), Medan, 12 Agustus 1949.
- Surat Mr. T.M Hassan kepada PM NRI di Yogya, Arnas, No. 100;
- Tarigan, Henry Guntur. 1987. "Bahasa dan Kepribadian Simalungun" makalah disajikan pada Harungguan Bolon Partuha Maujana Simalungun, Jumat-Sabtu, 28-29 Agustus 1987. di Pematangsiantar.

k. **Wawancara**

Arifin Alamsyah Sinaga di Pematang Raya.

Atin Saragih, wawancara di Pematang Bandar, 8 Oktober 2008.

Datuk Anwaruddin, Lubuk Pakam.

Gindo Hilton Sinaga, Pematangsiantar, 20 Desember 2012.

H. Moh. Said, Perbaungan (Medan).

Harto Juwono, Agustus 2008 di Pematangsiantar.

Jamerdin Damanik (60) di Hutadolog, Desember 2012.

Janamin Girsang di Nagasaribu

Kadim Morgan Damanik di Pematangsiantar.

Kardiyem, Medan, 12-8-1997.

MberaBarus, 9 April 1994, Medan.

Mohd. Said, Perbaungan 1994.

Muhammad Syukur Purba di Pematang Bandar, 8 Oktober 2008.

Tengku Luckman Sinar, Medan, Sultan Serdang.

Tengku Nurdinsyah al-Haj Raja Padang Tebingtinggi.

Tn Ibnu Hibban Saragih Tuan Rantau Laban Tebingtinggi.

Tn Kaliasan Damanik tanggal 8 Oktober 2008 di Pematang Bandar.

Tn. Djariaman Damanik, 23 Juli 2008 di Medan.

Tn. Kamen Purba putera raja Panei di Pematangsiantar, Desember 2012.

Wahid E.R, Medan.